



RPJMD
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KOTA PALOPO

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH





WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PALOPO TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis

- Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

Dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 - 2023.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Walikota adalah Walikota Palopo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palopo Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo tahun 2012-2032.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum yang mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
22. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota terpilih hasil pemilihan Walikota tahun 2018.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Palopo, RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta memperhatikan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 3

- RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:
- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
 - b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
 - c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
 - d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD;

- e. instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (3) Tata Cara Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disebabkan terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan daerah/nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RKPD Tahun 2019 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kota Palopo Tahun 2005-2025.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

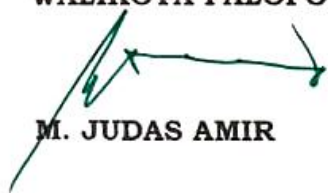
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 26 Maret 2019

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 26 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,



JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG. B.HK.HAM.01.028.19

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1. Latar Belakang.....	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-6
	1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-8
	1.5. Sistematika Dokumen RPJMD Kota Palopo	I-9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-11
	2.1. Kondisi Umum Daerah	II-11
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-11
	2.1.1.1. Aspek Geografi	II-11
	2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-11
	2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	II-12
	2.1.1.2.1. Topografi.....	II-12
	2.1.1.2.2. Geologi	II-14
	2.1.1.2.3. Hidrologi	II-16
	2.1.1.2.4. Klimatologi	II-18
	2.1.1.2.5. Penggunaan Lahan.....	II-19
	2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana.....	II-20
	2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah	II-26
	2.1.1.4.1. Rencana Struktur Ruang	II-26
	2.1.1.4.2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	II-40
	2.1.1.4.3. Kawasan Strategis Kota (KSK)	II-41
	2.1.1.4.4. Kawasan Peruntukan Perkantoran....	II-41
	2.1.1.4.5. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan	II-42
	2.1.1.4.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata.....	II-42
	2.1.1.4.7. Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).....	II-43
	2.1.1.4.8. Kawasan Peruntukan Ruang Kegiatan Sektor Informal	II-44
	2.1.1.4.9. Kawasan Peruntukan Pelayanan Pusat Kesehatan	II-44
	2.1.1.4.10. Kawasan Peruntukan Pelayanan Peribadatan.....	II-45
	2.1.1.4.11. Kawasan Peruntukan Pertemuan, Pameran dan Sosial Budaya.....	II-45
	2.1.1.4.12. Kawasan Peruntukan Olahraga	II-45
	2.1.1.4.13. Kawasan Peruntukan Transmigrasi ..	II-46

2.1.1.4.14.	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara	II-46
2.1.1.4.15.	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi.....	II-46
2.1.1.4.16.	Kawasan Peruntukan Pertanian.....	II-46
2.1.1.4.17.	Kawasan Peruntukan Peternakan.....	II-47
2.1.1.4.18.	Kawasan Peruntukan Perikanan.....	II-47
2.1.1.4.19.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	II-47
2.1.1.5.	Aspek Demografi.....	II-47
2.1.1.6.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung.....	II-53
2.1.1.6.1.	Daya Dukung Lahan	II-54
2.1.1.6.2.	Daya Dukung Permukiman.....	II-56
2.1.1.6.3.	Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Pangan	II-58
2.1.1.6.4.	Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Air Bersih	II-60
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-64
2.2.1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-64
2.2.1.1.	Pertumbuhan PDRB.....	II-64
2.2.1.2.	Laju Inflasi	II-67
2.2.1.3.	PDRB Perkapita.....	II-67
2.2.1.4.	Indeks Gini	II-68
2.2.1.5.	Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan ..	II-68
2.2.1.6.	Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per kapita Per hari	II-69
2.2.1.7.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	II-69
2.2.1.8.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	II-70
2.2.1.9.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	II-70
2.2.1.10.	Penguatan Cadangan Pangan.....	II-71
2.2.1.11.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	II-72
2.2.1.12.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	II-73
2.2.1.13.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	II-73
2.2.1.14.	Produksi Sektor Pertanian.....	II-73
2.2.1.15.	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	II-74
2.2.1.16.	Produksi Sektor Perkebunan	II-74
2.2.1.17.	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	II-75

2.2.1.18.	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB..	II-75
2.2.1.19.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	II-75
2.2.1.20.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB....	II-76
2.2.1.21.	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	II-76
2.2.1.22.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	II-77
2.2.1.23.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB.....	II-77
2.2.1.24.	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri.....	II-78
2.2.1.25.	Pertumbuhan Industri.....	II-78
2.2.1.26.	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB.....	II-78
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-79
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-79
2.2.2.2.	Angka Melek Huruf (AMH)	II-79
2.2.2.3.	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	II-80
2.2.2.4.	Angka Harapan Hidup.....	II-81
2.2.2.5.	Persentase Balita Gizi Buruk	II-81
2.2.2.6.	Prevalensi Balita Gizi Kurang.....	II-82
2.2.2.7.	Cakupan Desa Siaga Aktif.....	II-82
2.2.2.8.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	II-83
2.2.2.9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-84
2.2.2.10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-85
2.2.2.11.	Rasio Penduduk yang Bekerja	II-85
2.2.2.12.	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	II-86
2.2.2.13.	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	II-86
2.2.2.14.	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	II-87
2.2.2.15.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I .	II-89
2.2.2.16.	Indeks Kepuasan Masyarakat	II-89
2.2.3.	Fokus Seni, Budaya dan Olahraga.....	II-90
2.2.3.1.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga.....	II-90
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-91
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib	II-91
2.3.1.1.	Bidang Urusan Pendidikan.....	II-91
2.3.1.1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini.....	II-91
2.3.1.1.2.	Angka Partisipasi Kasar	II-91
2.3.1.1.3.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	II-92

2.3.1.1.4.	Angka Partisipasi Murni.....	II-93
2.3.1.1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	II-93
2.3.1.1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	II-94
2.3.1.1.4.3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ Paket C	II-94
2.3.1.1.5.	Angka Partisipasi Sekolah.....	II-94
2.3.1.1.5.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/ Paket A	II-95
2.3.1.1.5.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	II-96
2.3.1.1.5.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/ MA/Paket C	II-96
2.3.1.1.6.	Angka Putus Sekolah.....	II-97
2.3.1.1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI.....	II-97
2.3.1.1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs.....	II-98
2.3.1.1.6.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA.	II-99
2.3.1.1.7.	Angka Kelulusan	II-99
2.3.1.1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	II-99
2.3.1.1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs.....	II-100
2.3.1.1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA.....	II-100
2.3.1.1.8.	Angka Melanjutkan (AM).....	II-101
2.3.1.1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	II-101
2.3.1.1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ SMK/MA	II-101
2.3.1.1.9.	Fasilitas Pendidikan	II-102
2.3.1.1.9.1.	Sekolah Pendidikan SD/	

	MI Kondisi Bangunan	
	Baik.....	II-102
2.3.1.1.9.2.	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs dan SMA/SMK/MA	
	Kondisi Bangunan Baik	II-103
2.3.1.1.10.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar.....	II-104
2.3.1.1.11.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah.	II-105
2.3.1.1.12.	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar.....	II-106
2.3.1.1.13.	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah.....	II-107
2.3.1.1.14.	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Dasar.....	II-108
2.3.1.1.15.	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Menengah.....	II-109
2.3.1.1.16.	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar.....	II-110
2.3.1.1.17.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki – Laki	II-110
2.3.1.1.18.	Penduduk Berusia ≥ 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara).....	II-111
2.3.1.1.19.	Guru yang Memiliki Kualifikasi S1/ D-IV	II-112
2.3.1.2.	Bidang Urusan Kesehatan.....	II-112
2.3.1.2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup.....	II-112
2.3.1.2.2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB).....	II-113
2.3.1.2.3.	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup.....	II-114
2.3.1.2.4.	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup.....	II-114
2.3.1.2.5.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup.....	II-115
2.3.1.2.6.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita.....	II-115
2.3.1.2.7.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	II-116

2.3.1.2.8.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk.....	II-117
2.3.1.2.9.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk .	II-117
2.3.1.2.10.	Rasio Tenaga Media Per Satuan Penduduk.....	II-117
2.3.1.2.11.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani.....	II-118
2.3.1.2.12.	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	II-119
2.3.1.2.13.	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	II-119
2.3.1.2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	II-120
2.3.1.2.15.	Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Perkapita/Hari)	II-120
2.3.1.2.16	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak.....	II-121
2.3.1.2.17.	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	II-122
2.3.1.2.18.	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	II-123
2.3.1.2.19.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA.....	II-123
2.3.1.2.20.	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	II-124
2.3.1.2.21.	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	II-124
2.3.1.2.22.	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	II-125
2.3.1.2.23.	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	II-126
2.3.1.2.24.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	II-126
2.3.1.2.25.	Penderita Diare yang Ditangani.....	II-127
2.3.1.2.26.	Angka Kejadian Malaria.....	II-127

2.3.1.2.27.	Tingkat Kematian Akibat Malaria	II-127
2.3.1.2.28.	Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida	II-128
2.3.1.2.29.	Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang diobati Dengan Obat Malaria yang Tepat.....	II-129
2.3.1.2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi.....	II-129
2.3.1.2.31.	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir	II-130
2.3.1.2.32.	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS.....	II-130
2.3.1.2.33.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin...	II-131
2.3.1.2.34.	Cakupan Kunjungan Bayi.....	II-131
2.3.1.2.35.	Cakupan Puskesmas	II-132
2.3.1.2.36.	Cakupan Pembantu Puskesmas	II-132
2.3.1.2.37.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 .	II-133
2.3.1.2.38.	Cakupan Pelayanan Nifas	II-133
2.3.1.2.39.	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	II-134
2.3.1.2.40.	Cakupan Pelayanan Anak Balita	II-134
2.3.1.2.41.	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin.....	II-135
2.3.1.2.42.	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat.....	II-135
2.3.1.2.43.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin.....	II-136
2.3.1.2.44.	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	II-136
2.3.1.2.45.	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam.....	II-137
2.3.1.3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-137
2.3.1.3.1.	Pekerjaan Umum.....	II-137

2.3.1.3.1.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.....	II-137
2.3.1.3.1.2.	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	II-138
2.3.1.3.1.3.	Persentase Kawasan Permukiman yang Belum Dapat Dilalui Kembaraan Roda 4	II-139
2.3.1.3.1.4.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	II-140
2.3.1.3.1.5.	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	II-140
2.3.1.3.1.6.	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar.....	II-141
2.3.1.3.1.7.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	II-141
2.3.1.3.1.8.	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar.....	II-142
2.3.1.3.1.9.	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	II-142
2.3.1.3.1.10.	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun	II-142
2.3.1.3.1.11.	Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik	II-144
2.3.1.3.1.12.	Rasio Jaringan Irigasi	II-144
2.3.1.3.1.13.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	II-144
2.3.1.3.1.14.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap	

	Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan.....	II-145
2.3.1.3.1.15.	Persentase Areal Kawasan Kumuh.....	II-146
2.3.1.3.1.16.	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan.....	II-147
2.3.1.3.1.17.	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk.....	II-147
2.3.1.3.1.18.	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	II-148
2.3.1.3.2.	Penataan Ruang.....	II-149
2.3.1.3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	II-149
2.3.1.3.2.2.	Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.....	II-149
2.3.1.3.2.3.	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan.....	II- 150
2.3.1.3.2.4.	Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	II-150
2.3.1.3.2.5.	Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan.	II-151
2.3.1.4.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-151
2.3.1.4.1.	Rasio Rumah Layak Huni.....	II-151
2.3.1.4.2.	Rasio Permukiman Layak Huni.....	II-152
2.3.1.4.3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	II-152
2.3.1.4.4.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau.....	II-153
2.3.1.4.5.	Persentase Permukiman yang Tertata	II-153
2.3.1.4.6.	Persentase Lingkungan Permukiman	

	Kumuh	II-154
2.3.1.4.7.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan.....	II-154
2.3.1.4.8.	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	II-155
2.3.1.4.9.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU.	II-155
2.3.1.5.	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-156
2.3.1.5.1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	II-156
2.3.1.5.2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	II-157
2.3.1.5.3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	II-157
2.3.1.5.4.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	II-158
2.3.1.5.5.	Persentase Penegakan PERDA	II-158
2.3.1.6.	Bidang Urusan Sosial	II-158
2.3.1.6.1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	II-159
2.3.1.6.2.	Persentase PMKS yang Tertangani...	II-159
2.3.1.6.3.	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....	II-160
2.3.1.6.4.	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	II-161
2.3.1.6.5.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial.....	II-161
2.3.1.6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	II-162
2.3.1.6.7.	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa	

	Tanggap Darurat	II-163
2.3.1.6.8.	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	II-163
2.3.1.6.9.	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menenrima Jaminan Sosial.....	II-163
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-164
2.3.2.1.	Bidang Urusan Tenaga Kerja.....	II-164
2.3.2.1.1.	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun	II-164
2.3.2.1.2.	Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	II-165
2.3.2.1.3.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	II-165
2.3.2.1.4.	Keselamatan dan Perlindungan	II-166
2.3.2.1.5.	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	II-166
2.3.2.1.6.	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	II-167
2.3.2.1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	II-167
2.3.2.1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	II-168
2.3.2.1.9.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.....	II-168
2.3.2.1.10.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	II-169
2.3.2.1.11.	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan.....	II-169
2.3.2.2.	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-169
2.3.2.2.1.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	II-170
2.3.2.2.2.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR.....	II-170

2.3.2.2.3.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	II-170
2.3.2.2.4.	Rasio KDRT	II-171
2.3.2.2.5.	Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	II-171
2.3.2.2.6.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-172
2.3.2.2.7.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	II-172
2.3.2.2.8.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	II-172
2.3.2.2.9.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	II-173
2.3.2.2.10.	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus – Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	II-173
2.3.2.2.11.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.....	II-174
2.3.2.2.12.	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	II-174
2.3.2.2.13.	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	II-175
2.3.2.2.14.	Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD	II-175
2.3.2.2.15.	Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP	II-175
2.3.2.2.16.	Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA	II-176

2.3.2.2.17.	Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi.....	II-176
2.3.2.2.18.	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki – Laki Pada Kelompok Usia 15 – 24 Tahun.....	II-176
2.3.2.2.19.	Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian	II-177
2.3.2.3.	Bidang Urusan Pangan	II-177
2.3.2.3.1.	Ketersediaan Pangan Utama	II-177
2.3.2.3.2.	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	II-178
2.3.2.3.3.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	II-178
2.3.2.4.	Bidang Urusan Pertanahan.....	II-179
2.3.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat.	II-179
2.3.2.4.2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara....	II-179
2.3.2.4.3.	Penyelesaian Izin Lokasi.....	II-180
2.3.2.5.	Bidang Urusan Lingkungan Hidup.....	II-180
2.3.2.5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	II-180
2.3.2.5.2.	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/ Kota	II-180
2.3.2.5.3.	Terselenggaranya KLHS Untuk K/ R/P Tingkat Daerah Provinsi.....	II-181
2.3.2.5.4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	II-181
2.3.2.5.5.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	II-181
2.3.2.5.6.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kualitas Tutupan Lahan	II-182
2.3.2.5.7.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	II-182
2.3.2.5.8.	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas	

	Lingkungan Hidup di daerah PPLHD di Kabupaten Kota	II-183
2.3.2.5.9.	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA.....	II-183
2.3.2.5.10.	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional.	II-183
2.3.2.5.11.	Penetapan Hak MHA.....	II-183
2.3.2.5.12.	Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan.....	II-183
2.3.2.5.13.	Terfasilitasi Penyediaan Sarana/ Prasarana	II-184
2.3.2.5.14.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	II-184
2.3.2.5.15.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup.....	II-184
2.3.2.5.16.	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota Palopo	II-185
2.3.2.5.17.	Timbulan Sampah yang Ditangani....	II-185
2.3.2.5.18.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R.....	II-185
2.3.2.5.19.	Persentase Cakupan Area Pelayanan	II-186
2.3.2.5.20.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	II-186
2.3.2.5.21.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Palopo	II-187
2.3.2.5.22.	Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang Diterbitkan.....	II-187
2.3.2.5.23.	Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang – Undangan	II-187
2.3.2.6.	Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-188
2.3.2.6.1.	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	II-188
2.3.2.6.2.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran.....	II-188
2.3.2.6.3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	II-189
2.3.2.6.4.	Ketersediaan Database Kependudukan	

	Skala Provinsi.....	II-188
2.3.2.6.5.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	II-190
2.3.2.6.6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	II-190
2.3.2.6.7.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	II-190
2.3.2.7.	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	II-191
2.3.2.7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik..	II-191
2.3.2.7.2.	Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	II-191
2.3.2.7.3.	Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK.....	II-191
2.3.2.7.4.	Persentase LSM Aktif.....	II-192
2.3.2.7.5.	Persentase LPM Berprestasi.....	II-192
2.3.2.7.6.	Persentase PKK Aktif.....	II-193
2.3.2.7.7.	Persentase Posyandu Aktif.....	II-193
2.3.2.7.8.	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat.	II-193
2.3.2.7.9.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	II-193
2.3.2.8.	Bidang Urusan Penduduk dan Keluarga Berencana	II-194
2.3.2.8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	II-194
2.3.2.8.2.	Total Fertility Rate (TFR).....	II-194
2.3.2.8.3.	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek	II-194
2.3.2.8.4.	Persentase Sektor tang Tersosialisasi Konsep Pembangunan dan Alat Ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	II-195
2.3.2.8.5.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	II-195
2.3.2.8.6.	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	II-196

2.3.2.8.7.	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk.....	II-196
2.3.2.8.8.	Jumah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	II-197
2.3.2.8.9.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	II-197
2.3.2.8.10.	Rata – Rata Jumlah Anak Per Keluarga	II-198
2.3.2.8.11.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49	II-198
2.3.2.8.12.	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) Per 1.000 Perempuan Usia 15 – 19 Tahun (ASFR 15 – 19)	II-198
2.3.2.8.13.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun	II-199
2.3.2.8.14.	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need).....	II-199
2.3.2.8.15.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	II-200
2.3.2.8.16.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi.....	II-200
2.3.2.8.17.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB.....	II-201
2.3.2.8.18.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	II-201
2.3.2.8.19.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	II-202
2.3.2.8.20.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	II-202
2.3.2.8.21.	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	II-203
2.3.2.8.22.	Cakupan PKB/PLKB yang	

	Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk.....	II-203
2.3.2.8.23.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri.....	II-204
2.3.2.8.24	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/ Kelurahan	II-204
2.3.2.8.25.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Kabupaten/Kota.....	II-205
2.3.2.8.26.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	II-205
2.3.2.8.27.	Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan.....	II-206
2.3.2.8.28.	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	II-206
2.3.2.8.29.	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS).....	II-206
2.3.2.8.30.	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	II-207
2.3.2.8.31.	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	II-207
2.3.2.8.32.	Rata – Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKP)	II-208
2.3.2.8.33.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	II-208
2.3.2.9.	Bidang Urusan Perhubungan.....	II-208
2.3.2.9.1.	Arus Penumpang Angkutan Umum.	II-209
2.3.2.9.2.	Rasio Ijin Trayek	II-209

2.3.2.9.3.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum....	II-210
2.3.2.9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis.....	II-210
2.3.2.9.5.	Persentase Layanan Angkutan Darat	II-211
2.3.2.9.6.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	II-211
2.3.2.9.7.	Pemasangan Rambu – Rambu.....	II-212
2.3.2.10.	Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-212
2.3.2.10.1.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	II-212
2.3.2.10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi ...	II-213
2.3.2.10.3.	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet.....	II-213
2.3.2.10.4.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	II-214
2.3.2.11.	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-214
2.3.2.11.1.	Persentase Koperasi Aktif.....	II-214
2.3.2.11.2.	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	II-215
2.3.2.11.3.	Persentase BPR/LKM Aktif.....	II-215
2.3.2.11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil ..	II-216
2.3.2.12.	Bidang Urusan Penanaman Modal	II-216
2.3.2.12.1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA).....	II-216
2.3.2.12.2.	Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).....	II-217
2.3.2.12.3.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	II-217
2.3.2.12.4.	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	II-218
2.3.2.13.	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	II-218
2.3.2.13.1.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	II-218
2.3.2.13.2.	Persentase Wirausaha Muda.....	II-219
2.3.2.13.3.	Cakupan Pembinaan Olahraga	II-219
2.3.2.13.4.	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi..	II-219
2.3.2.13.5.	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	II-220
2.3.2.13.6.	Jumlah Atlet Berprestasi	II-220
2.3.2.13.7.	Jumlah Prestasi Olahraga.....	II-220
2.3.2.14.	Bidang Urusan Statistik	II-220

2.3.2.14.1.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	II-220
2.3.2.14.2.	Buku “Palopo Dalam Angka”	II-221
2.3.2.14.3.	Buku “PDRB”	II-221
2.3.2.15.	Bidang Urusan Persandian	II-221
2.3.2.15.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah.....	II-221
2.3.2.16.	Bidang Urusan Kebudayaan.....	II-222
2.3.2.16.1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	II-222
2.3.2.16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan.....	II-222
2.3.2.16.3.	Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	II-222
2.3.2.16.4.	Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	II-222
2.3.2.17.	Bidang Urusan Perpustakaan.....	II-223
2.3.2.17.1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	II-223
2.3.2.17.2.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah.....	II-223
2.3.2.17.3.	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	II-223
2.3.2.17.4.	Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun.....	II-224
2.3.2.17.5.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan.....	II-224
2.3.2.17.6.	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat..	II-224
2.3.2.18.	Bidang Urusan Kearsipan.....	II-224
2.3.2.18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku.....	II-224
2.3.2.18.2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	II-225
2.3.3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-225
2.3.3.1.	Bidang Urusan Pariwisata.....	II-225
2.3.3.1.1.	Kunjungan Wisata.....	II-225
2.3.3.1.2.	Lama Kunjungan Wisata.....	II-225
2.3.3.1.3.	PAD Sektor Pariwisata.....	II-226
2.3.3.2.	Bidang Urusan Pertanian.....	II-226

2.3.3.2.1.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar.....	II-226
2.3.3.2.2.	Cakupan Bina Kelompok Petani.....	II-237
2.3.3.3.	Bidang Urusan Kehutanan.....	II-227
2.3.3.3.1.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	II-227
2.3.3.3.2.	Kerusakan Kawasan Hutan.....	II-228
2.3.3.3.3.	Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan.....	II-228
2.3.3.4.	Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	II-229
2.3.3.4.1.	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	II-229
2.3.3.5.	Bidang Urusan Perdagangan.....	II-229
2.3.3.5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan.....	II-229
2.3.3.5.2.	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal.....	II-230
2.3.3.6.	Bidang Urusan Perindustrian.....	II-231
2.3.3.6.1.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin .	II-231
2.3.3.7.	Bidang Urusan Transmigrasi.....	II-231
2.3.3.7.1.	Persentase Transmigran Swakarsa....	II-231
2.3.3.8.	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	II-232
2.3.3.8.1.	Produksi Perikanan.....	II-232
2.3.3.8.2.	Konsumsi Ikan	II-233
2.3.3.8.3.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan....	II-233
2.3.3.8.4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	II-234
2.3.3.8.5.	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman	II-234
2.3.3.8.6.	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Territorial	II-235
2.3.3.8.7.	Nilai Tukar Nelayan.....	II-235
2.3.4.	Fokus Penunjang Urusan	II-236
2.3.4.1.	Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan	II-236
2.3.4.1.1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	II-236
2.3.4.1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	II-236

2.3.4.1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA.....	II-237
2.3.4.1.4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA..	II-237
2.3.4.1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD.....	II-237
2.3.4.1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	II-238
2.3.4.1.7.	Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW.....	II-238
2.3.4.2.	Bidang Urusan Keuangan.....	II-239
2.3.4.2.1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	II-239
2.3.4.2.2.	Persentase SILPA	II-239
2.3.4.2.3.	Persentase SiLPA Terhadap APBD..	II-240
2.3.4.2.4.	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	II-240
2.3.4.2.5.	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	II-241
2.3.4.2.6.	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	II-242
2.3.4.2.7.	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	II-242
2.3.4.2.8.	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	II-243
2.3.4.2.9.	Penetapan APBD.....	II-243
2.3.4.3.	Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan	II-244
2.3.4.3.1.	Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	II-244
2.3.4.3.2.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	II-244
2.3.4.3.3.	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural.	II-244
2.3.4.3.4.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	II-245
2.3.4.3.5.	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	II-245
2.3.4.3.6.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah...	II-246
2.3.4.4.	Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	II-246

2.3.4.4.1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	II-246
2.3.4.4.2.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	II-247
2.3.4.4.3.	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	II-247
2.3.4.4.4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	II-247
2.3.4.5.	Bidang Urusan Pengawasan	II-248
2.3.4.5.1.	Persentase Tindak Lanjut Temuan ...	II-248
2.3.4.5.2.	Persentase Pelanggaran Pegawai	II-248
2.3.4.5.3.	Jumlah Temuan BPK	II-249
2.3.4.6.	Bidang Urusan Sekretariat Dewan	II-249
2.3.4.6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat – Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	II-249
2.3.4.6.2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	II-250
2.3.4.6.3.	Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	II-250
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-251
2.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah	II-251
2.4.2.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-251
2.4.3.	Nilai Tukar Petani	II-252
2.4.4.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita	II-252
2.4.5.	Produktivitas Total Daerah	II-253
2.4.6.	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	II-253
2.4.7.	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum	II-254

	2.4.8.	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR	II-255
	2.4.9.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-255
	2.4.9.1.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	II-255
	2.4.9.2.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	II-255
	2.4.9.3.	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/Terminal Per Tahun.....	II-256
	2.4.9.4.	Ketaatan Terhadap RTRW.....	II-256
	2.4.9.5.	Jenis dan Jumlah Bank	II-257
	2.4.9.6.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi	II-257
	2.4.9.7.	Jenis Kelas dan Jumlah Restoran.....	II-257
	2.4.9.8.	Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel	II-258
	2.4.9.9.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih	II-258
	2.4.9.10.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik.....	II-258
	2.4.9.11.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	II-259
	2.4.9.12.	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Telepon	II-259
	2.4.10.	Fokus Iklim Berinvestasi	II-259
	2.4.10.1.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	II-259
	2.4.10.2.	Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan	II-260
	2.4.11.	Fokus Sumber Daya Manusia	II-261
	2.4.11.1.	Rasio Ketergantungan	II-261
	2.4.11.2.	Rasio Lulusan S1/S2/S3.....	II-261
	2.5.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II-262
	2.5.1.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ...	II-262
	2.5.2.	Capaian Standar Pelayanan Minimal.....	II-296
	2.5.2.1.	Bidang Urusan Pendidikan	II-296
	2.5.2.2.	Bidang Urusan Kesehatan	II-305
	2.5.2.3.	Bidang Urusan Perumahan dan Pemukiman	II-308
	2.5.3.	Capaian Kinerja SDG's/TPB	II-310
BAB III		GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-322
	3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-323
	3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-323
	3.1.2.	Neraca Daerah	III-326
	3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-330
	3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-330
	3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III-330
	3.3.	Kerangka Pendanaan	III-334
	3.3.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-334

	3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-339
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-342
	4.1. Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-342
	4.2. Permasalahan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	IV-351
	4.3. Analisa Isu Strategis	IV-361
	4.3.1. Identifikasi Isu Strategis	IV-361
	4.3.2. Pembobotan Isu Strategis	IV-363
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-367
	5.1. Visi.....	V-367
	5.2. Misi.....	V-368
	5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V-369
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-374
	6.1. Strategi Pembangunan Daerah	VI-374
	6.2. Arah Kebijakan	VI-377
	6.3. Program Pembangunan Daerah.....	VI-384
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-394
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-453
BAB IX	PENUTUP.....	IX-496
	9.1. Pedoman Transisi	IX-496
	9.2. Kaidah Pelaksanaan.....	IX-496

DAFTAR TABEL

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-11
Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan	II-11
Tabel 2.2 Luas Wilayah Berdasarkan tingkat Kemiringan Lereng	II-12
Tabel 2.3 Kondisi Topografi Kota palopo Menurut Kecamatan	II-13
Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Kota Palopo s.d Tahun 2016	II-19
Tabel 2.5 Klasifikasi Zona dan Kelas Ancaman longsor	II-20
Tabel 2.6 Kedalaman dan Kelas Ancaman Banjir	II-21
Tabel 2.7 Parameter Ancaman Kebakaran	II-22
Tabel 2.8 Parameter Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	II-23
Tabel 2.9 Parameter Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi	II-24
Tabel 2.10 Komponen Indeks Penduduk Terpapar	II-25
Tabel 2.11 Posisi Palopo sebagai Pusat Kegiatan	II-26
Tabel 2.12 Posisi Palopo dalam Sistem Jaringan	II-27
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	II-48
Tabel 2.14 Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kota Palopo Tahun 2017.....	II-50
Tabel 2.15 Komposisi Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	II-51
Tabel 2.16 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Palopo Tahun 2018-2037	II-51
Tabel 2.17 Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan saat ini dan Proyeksi untuk 5 Tahun	II-52
Tabel 2.18 Pola Tutupan Lahan Wilayah Kota Palopo Tahun 2016	II-54
Tabel 2.19 Luas Lahan Kritis Kota Palopo (Ha)	II-55
Tabel 2.20 Perkiraan Luas Kerusakan Hutan Menurut Penyebabnya Tahun 2016.....	II-56

Tabel 2.21 Angka Kekurangan Rumah (Backlog) Kota Palopo 2018.....	II-56
Tabel 2.22 Statistik Perumahan Kota Palopo	II-57
Tabel 2.23 Sebaran Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Palopo	
Tahun 2014-2015	II-58
Tabel 2.24 Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Palopo Tahun 2032.....	II-61
Tabel 2.25 Lokasi, Nama dan Kapasitas Terpasang IPAM PAM Tirta Mangkaluku	
Kota Palopo Tahun 2016.....	II-62
Tabel 2.26 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor/Lapangan Usaha	
Kota Palopo Tahun 2013-2017 (%).....	II-64
Tabel 2.27 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar	
Harga Berlaku (ADHB) Kota Palopo.....	II-65
Tabel 2.28 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar	
Harga Konstan (ADHK) Kota Palopo	II-66
Tabel 2.29 Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2013-2017 (%).....	II-67
Tabel 2.30 PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-67
Tabel 2.31 Gini Ratio Kota Palopo Tahun 2014-2017.....	II-68
Tabel 2.32 Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-69
Tabel 2.33 Persentase Pendapatan Penduduk Kurang dari USD.1,00 PPP.....	II-69
Tabel 2.34 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kota Palopo	
Tahun 2013-2017	II-70
Tabel 2.35 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun	
2013-2017	II-70
Tabel 2.36 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-71
Table 2.37 Penguatan Cadangan Pangan Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-72
Tabel 2.38 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-72

Tabel 2.39 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-73
Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-73
Tabel 2.41 Produksi Sektor Pertanian Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-73
Tabel 2.42 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-74
Tabel 2.43 Produksi Sektor Perkebunan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-74
Table 2.44 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-75
Table 2.45 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kota Palopo	
Tahun 2013-2017	II-75
Tabel 2.46 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kota Palopo.....	
Tahun 2013-2017	II-76
Tabel 2.47 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kota Palopo	
Tahun 2013-2017	II- 76
Tabel 2.48 Kontribusi Sektor Kelautan &Perikanan Terhadap PDRB	II-76
Tabel 2.49 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	II-77
Tabel 2.50 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	II-77
Tabel 2.51 Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	II-78
Tabel 2.52 Persentase Pertumbuhan Industri	II-78
Tabel 2.53 Kontribusi Sektor Transmigrasi Terhadap PDRB	II-78
Tabel 2.54 Indeks Pembangunan Manusia	II-79
Tabel 2.55 Angka Melek Huruf	II-80
Tabel 2.56 Rata-rata Lama Sekolah	II-80

Tabel 2.57 Angka Usia Harapan Hidup	II-81
Tabel 2.58 Persentase Balita Gizi Buruk	II-82
Tabel 2.59 Prevalensi Balita Gizi Kurang	II-82
Tabel 2.60 Persentase Cakupan Desa / Kelurahan Siaga Aktif	II-83
Tabel 2.61 Angka Partisipasi Angkatan Kerja	II-83
Tabel 2.62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-84
Tabel 2.63 Pengangguran Terbuka	II-85
Tabel 2.64 Rasio Penduduk yang Bekerja	II-85
Tabel 2.65 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	II-86
Tabel 2.66 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-87
Tabel 2.67 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	II-88
Tabel 2.68 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-89
Tabel 2.69 Indeks Kepuasan Masyarakat	II-90
Tabel 2.70 Perkembangan Seni, Budaya & Olahraga Kota Palopo Tahun 2013-2017..	II-90
Tabel 2.71 Perkembangan Seni, Budaya & Olahraga Kota Palopo Tahun 2013-2017 Menurut Kecamatan	II-90
Tabel 2.72 Persentase Pendidikan Anak Usia Dini Kota Palopo Tahun 2013 – 2017..	II-91
Tabel 2.73 Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-92
Tabel 2.74 Persentase Pendidikan yang ditamatkan Kota Palopo 2013-2017.....	II-93
Tabel 2.75 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-93
Tabel 2.76 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B.....	II-94
Tabel 2.77 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/SMK Paket C.....	II-94

Tabel 2.78 Angka Partisipasi Sekolah Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-95
Tabel 2.79 Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	II-95
Tabel 2.80 Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	II-96
Tabel 2.81 Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	II-96
Tabel 2.82 Angka Putus Sekolah Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-97
Tabel 2.83 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-97
Tabel 2.84 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2013 – 2017..	II-98
Tabel 2.85 Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.86 Angka Kelulusan Kota Palopo Tahun 2013-2016.....	II-99
Tabel 2.87 Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.88 Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kota Palopo Tahun 2013-2017	II- 100
Tabel 2.89 Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	II-100
Tabel 2.90 Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs.....	II-101
Tabel 2.91 Persentase Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	II-101
Tabel 2.92 Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-102
Tabel 2.93 Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-103
Tabel 2.94 Persentase Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-103
Tabel 2.95 Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat) Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-104

Tabel 2.96 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-105
Tabel 2.97 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-106
Tabel 2.98 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-107
Tabel 2.99 Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar Kota Palopo 2013-2017	II-108
Tabel 2.100 Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Menengah Kota Palopo.....	II-109
Tabel 2.101 Persentase Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kota Palopo 2013-2017	II-110
Tabel 2.102 Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-111
Table 2.103 Persentase Penduduk Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	II-111
Tabel 2.104 Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-112
Tabel 2.105 Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-113
Tabel 2.106 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-113
Tabel 2.107 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-114
Tabel 2.108 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup (AKABA) Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-115

Tabel 2.109 Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-115
Tabel 2.110 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-116
Tabel 2.111 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-116
Tabel 2.112 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-117
Tabel 2.113 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-117
Tabel 2.114 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-118
Tabel 2.115 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Palopo	
tahun 2013-2017	II-118
Tabel 2.116 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki	
Kompetensi Kebidanan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-119
Tabel 2.117 Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-120
Tabel 2.118 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Kota Palopo	
tahun 2013-2017	II-120
Tabel 2.119 Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih rendah dari	
2.100 kkal/kapita/hari.....	II-121
Tabel 2.120 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kota	
Palopo Tahun 2013-2017.....	II-121
Tabel 2.121 Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk Kota Palopo	II-122
Tabel 2.122 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-123

Tabel 2.123 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-124
Tabel 2.124 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-124
Tabel 2.125 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-125
Tabel 2.126 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam	
Program DOTS Kota Palopo	II-125
Tabel 2.127 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang di Obati dan Sembuh Dalam	
Program DOTS Kota Palopo tahun 2013-2017	II-126
Tabel 2.128 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-127
Tabel 2.129 Penderita Diare yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-127
Tabel 2.130 Angka Kejadian Malaria Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-127
Tabel 2.131 Tingkat Kematian Akibat Malaria Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-128
Tabel 2.132 Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan Kelambu Berinsektisida	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-128
Tabel 2.133 Proporsi Anak Balita dengan Demam yang diobati dengan Obat	
Anti Malaria yang Tepat Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-129
Tabel 2.134 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-129
Tabel 2.135 Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi	
Terakhir Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-130
Tabel 2.136 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki	
Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS Kota Palopo	

Tahun 2013-2017.....	II-130
Tabel 2.137 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-131
Tabel 2.138 Cakupan Kunjungan Bayi Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-132
Tabel 2.139 Cakupan Puskesmas Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-132
Tabel 2.140 Cakupan Pembantu Puskesmas Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-132
Tabel 2.141 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-133
Tabel 2.142 Cakupan Pelayanan Nifas Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-133
Tabel 2.143 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-134
Tabel 2.144 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-134
Tabel 2.145 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia	
Bulan Keluarga Miskin Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-135
Tabel 2.146 Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-136
Tabel 2.147 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-136
Tabel 2.148 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus diberikan	
Sarana Kesehatan (RS) Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-137
Tabel 2.149 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan	
Epidemiologi <24 Jam Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-137
Table 2.150 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berkondisi Baik 2013-2017.....	II-138
Table 2.151 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Palopo.....	
Tahun 2013-2017.....	II-139
Tabel 2.152 Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan	

Roda 4 Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-139
Tabel 2.153 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	
Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-140
Tabel 2.154 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase /Saluran	
Pembuangan Air (Minimal 1,5 m) Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-140
Tabel 2.155 Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau	
Bangunan Rumah Liar Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-141
Tabel 2.156 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-141
Tabel 2.157 Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-142
Tabel 2.158 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air Tidak	
Tersumbat Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-142
Tabel 2.159 Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-142
Tabel 2.160 Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran	
Sungai Rawan Longsor Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-143
Tabel 2.161 Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-144
Tabel 2.162 Persentase Rasio Jaringan Irigasi Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-144
Tabel 2.163 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-144
Table 2.164 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air	
Minum Layak di Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-146
Tabel 2.165 Persentase Areal Kawasan Kumuh Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-147
Tabel 2.166 Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kota Palopo	

Tahun 2013-2017.....	II-147
Table 2.167 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-148
Tabel 2.168 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-148
Tabel 2.169 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-149
Tabel 2.170 Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas wilayah Kota/Kawasan	
Perkotaan kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-150
Tabel 2.171 Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-150
Tabel 2.172 Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-150
Tabel 2.173 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan	
Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-151
Tabel 2.174 Rasio Rumah Layak Huni Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-151
Tabel 2.175 Rasio Permukiman Layak Huni kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-152
Tabel 2.176 Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-152
Tabel 2.177 Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-153
Tabel 2.178 Persentase Pemukiman Yang Tertata Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-153
Tabel 2.179 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-154

Tabel 2.180 Persentase Luasan Pemukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	
Kota Palopo tahun 2013-2017	II-154
Tabel 2.181 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kota Palopo	
Tahun 2013-2017	II-155
Tabel 2.182 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	
Kota Palopo tahun 2013-2017	II-155
Tabel 2.183 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Palopo	
Tahun 2013-2017	II-156
Tabel 2.184 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-157
Tabel 2.185 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota Kota Palopo	
Tahun 2013-2017	II-157
Tabel 2.186 Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-158
Tabel 2.187 Persentase Penegakkan PERDA Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-158
Tabel 2.188 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kota Palopo	
Tahun 2013-2017	II-159
Tabel 2.189 Persentase PMKS yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-160
Tabel 2.190 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-160
Tabel 2.191 Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-161
Tabel 2.192 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Palopo tahun 2013-2017	II-161

Tabel 2.193 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-162
Tabel 2.194 Persentase korban bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-162
Tabel 2.195 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap darurat Lengkap Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-163
Tabel 2.196 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kota palopo Tahun 2013-2017.....	II-163
Tabel 2.197 Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun di Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-164
Tabel 2.198 Besaran Khusus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-165
Tabel 2.199 Pencari Kerja yang Ditempatkan kota Palopo Tahun 2013-2017	II-165
Tabel 2.200 Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-166
Tabel 2.201 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-166
Tabel 2.202 Persentase Perselisihan Buruh dan Pengusaha Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-167
Tabel 2.203 Persentase Pemeriksaan perusahaan kota Palopo tahun 2013-2017	II-167
Tabel 2.204 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Kota Palopo tahun 2013-2017	II-168

Tabel 2.205 Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi kota Palopo Tahun 2013-2017	II-168
Tabel 2.206 Persentase tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-169
Tabel 2.207 Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan kota Palopo Tahun 2013-2017	II-169
Tabel 2.208 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah kota Palopo tahun 2013-2017	II-170
Tabel 2.209 Proporsi Kursi Yang diduduki perempuan di DPR kota Palopo Tahun 2013-2017	II-170
Tabel 2.210 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-170
Tabel 2.211 Rasio KDRT Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-171
Tabel 2.212 Persentase Jumlah tenaga kerja di Bawah Umur kota Palopo Tahun 2013-2017	II-171
Tabel 2.213 Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-172
Tabel 2.214 Persentase Laporan Pengaduan Ke Unit Pelayanan Terpadu Kota palopo Tahun 2013-2017	II-172
Tabel 2.215 Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-173
Tabel 2.216 Persentase Perempuan dan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Rehabilitasi Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-173
Tabel 2.217 Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-173

Tabel 2.218 Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-174
Tabel 2.219 Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-174
Tabel 2.220 Persentase Reintegrasi Sosial Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-175
Tabel 2.221 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-175
Tabel 2.222 Rasio APM Perempuan /Laki-laki di SMP Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-175
Tabel 2.223 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-176
Tabel 2.224 Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-176
Tabel 2.225 Rasio melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki (15-24 Tahun) Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-176
Tabel 2.226 Persentase Kontribusi Perempuan dalam Pekerjaan Upahan disektor Non pertanian Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-177
Tabel 2.227 Persentase Ketersediaan Pangan Utama Kota Palopo Tahun 2013 2017	II-177
Tabel 2.228 Persentase Ketersediaan energy dan Protein Per Kapita Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-178
Tabel 2.229 Peresentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-178
Tabel 2.230 Persentase Luas Lahan Bersertifikat kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-179
Tabel 2.231 Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-179

Tabel 2.232 Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-180
Tabel 2.233 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2013-2017...	II-180
Tabel 2.234 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana Pembangunan Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-180
Tabel 2.235 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah provinsi Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-181
Tabel 2.236 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-181
Tabel 2.237 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara kota palopo Tahun 2013-2017..	II-181
Tabel 2.238 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-182
Tabel 2.239 Persentase ketaatan izin Lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-182
Tabel 2.240 Jumlah PPLHD dan Sarana Prasarana PPLHD Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-183
Tabel 2.241 Jumlah MHA yang Diakui Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-183
Tabel 2.242 Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan yang diverifikasi Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-183
Tabel 2.243 Jumlah Penetapan Hak MHA Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-183
Tabel 2.244 Persentase MHA yang difasilitasi Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-183
Tabel 2.245 Persentase MHA yang diberikan Sarana/Prasarana Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-184
Tabel 2.246 Jumlah Pelatihan yang diberikan diLembaga Kemasyarakatan Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-184
Tabel 2.247 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-184

Tabel 2.248 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-185
Tabel 2.249 Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-185
Tabel 2.250 Persentase Sampah yang berkurang melalui 3R Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-185
Tabel 2.251 Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-186
Tabel 2.252 Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-186
Tabel 2.253 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-187
Tabel 2.254 Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta yang diterbitkan	
Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-187
Tabel 2.255 Persentase Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang taat Terhadap	
peraturan Perundang-undangan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-187
Tabel 2.256 Rasio Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-188
Tabel 2.257 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-188
Tabel 2.258 Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-189
Tabel 2.259 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-189
Tabel 2.260 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-190
Tabel 2.261 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Palopo	
Tahun 2013-2017.....	II-190
Tabel 2.262 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-190

Tabel 2.263 Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan kelurahan yang Baik Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-191
Tabel 2.264 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-191
Tabel 2.265 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-191
Tabel 2.266 Persentase LSM Aktif Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-192
Tabel 2.267 Persentase LPM Berprestasi Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-192
Tabel 2.268 Persentase PKK Aktif Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-193
Tabel 2.269 Persentase Posyandu Aktif Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-193
Tabel 2.270 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-193
Tabel 2.271 Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-193
Tabel 2.272 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-194
Tabel 2.273 Total Fertility Rate (TFR) Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-194
Tabel 2.274 Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-195
Tabel 2.275 IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-195
Tabel 2.276 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-195
Tabel 2.277 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	

Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-196
Tabel 2.278 Jumlah Kebijakan yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-196
Tabel 2.279 Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan Parameter dan Proyeksi penduduk untuk pencapaian dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-197
Tabel 2.280 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal, Non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-197
Tabel 2.281 Rata-rata Jumlah anak Per Keluarga Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-198
Tabel 2.282 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-198
Tabel 2.283 Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-198
Tabel 2.284 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-199
Tabel 2.285 Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-199
Tabel 2.286 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-200
Tabel 2.287 Persentase Tingkat Keberlangsungan pemakaian Kontrasepsi Kota Palopo Tahun 2013-2017.....	II-200
Tabel 2.288 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Kota Palopo Tahun 2013-2107.....	II-201
Tabel 2.289 Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kota	

Palopo Tahun 2013-2017	II-201
Tabel 2.290 Cakupan Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kota Palopo	
Tahun 2013-2017	II-202
Tabel 2.291 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	
Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-202
Tabel 2.292 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling	
Remaja/Mahasiswa Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-203
Tabel 2.293 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Kota Palopo	
Tahun 2013-2017	II-203
Tabel 2.294 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan	
keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Kota Palopo	
Tahun 2013-2017	II-204
Tabel 2.295 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	
setiap desa/kelurahan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-204
Tabel 2.296 Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang	
Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-205
Tabel 2.297 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi alat dan obat Kontrasepsi	
di Faskes Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-205
Tabel 2.298 Persentase Faskes dan Jejaringnya (diseluru tingkatan wilayah) yang	
berkerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR	
dengan standarisasi pelayanan Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-206
Tabel 2.299 Cakupan Penyediaan Informasi data Mikro Keluarga di setiap desa	
Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-206
Tabel 2.300 Persentase remaja yang terkena Infeksi menular Seksual	
Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-206

Tabel 2.301	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kota Palopo Tahun 2013-2017	II-207
Tabel 2.302	Cakupan Keluarga yang mempunyai Balita dan Anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-207
Tabel 2.303	Rata - Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-208
Tabel 2.304	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-208
Tabel 2.305	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-209
Tabel 2.306	Rasio Ijin Trayek Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-210
Tabel 2.307	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-210
Tabel 2.308	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-210
Tabel 2.309	Persentase Layanan Angkutan Darat Kota Palopo Tahun 2013 -2017....	II-211
Tabel 2.310	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-211
Tabel 2.311	Persentase Pemasangan Rambu – Rambu Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-212
Tabel 2.312	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-213
Tabel 2.313	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-213
Tabel 2.314	Proporsi Rumah dengan Akses Internet Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-214
Tabel 2.315	Proporsi Rumah tangga yang memiliki computer pribadi Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-214

Tabel 2.316	Presentase Koperasi Aktif Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-215
Tabel 2.317	Persentase UKM Non BPR /LKM Aktif Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-215
Tabel 2.318	Persentase BPR/LKM Aktif Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-216
Tabel 2.319	Presentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-216
Tabel 2.320	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-217
Tabel 2.321	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-217
Tabel 2.322	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-218
Tabel 2.323	Persentase Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-218
Tabel 2.324	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-219
Tabel 2.325	Persentase Wirausaha Muda Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-219
Tabel 2.326	Persentase Pembinaan Olahraga Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-219
Tabel 2.327	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-219
Tabel 2.328	Persentase Pembinaan Atlet Muda Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-220
Tabel 2.329	Persentase Atlet Berprestasi Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-220
Tabel 2.330	Persentase Prestasi Olahraga Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-220
Tabel 2.331	Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-220
Tabel 2.332	Ketersediaan Buku “ Palopo Dalam Angka “ Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-221
Tabel 2.333	Ketersediaan Buku “PDRB” Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-221
Tabel 2.334	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-221
Tabel 2.335	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-222

Tabel 2.336	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-222
Tabel 2.337	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara Terpadu Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-222
Tabel 2.338	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-222
Tabel 2.339	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-223
Tabel 2.340	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-223
Tabel 2.341	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-223
Tabel 2.342	Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-224
Tabel 2.343	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-224
Tabel 2.344	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang memiliki sertifikat Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-224
Tabel 2.345	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-224
Tabel 2.346	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-225
Tabel 2.347	Persentase Kunjungan Wisata Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-225
Tabel 2.348	Lama Kunjungan Wisata Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-225
Tabel 2.349	Persentase PAD Sektor Pariwisata Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-226
Tabel 2.350	Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-226
Tabel 2.351	Persentase Pembinaan Kelompok Petani	II-227
Tabel 2.352	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-228

Tabel 2.353	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-228
Tabel 2.354	Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-228
Tabel 2.355	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-229
Tabel 2.356	Nilai Ekspor Bersih Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-230
Tabel 2.357	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-230
Tabel 2.358	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-231
Tabel 2.359	Persentase Transmigran Swakarsa Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-232
Tabel 2.360	Persentase Produksi Perikanan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-232
Tabel 2.361	Persentase Konsumsi Perikanan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-233
Tabel 2.362	Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayanan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-233
Tabel 2.363	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-234
Tabel 2.364	Persentase Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang Aman Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-234
Tabel 2.365	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-235
Tabel 2.366	Nilai Tukar Nelayan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-235
Tabel 2.367	Ketersediaan Dokumen RPJPD Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-236
Tabel 2.368	Ketersediaan Dokumen RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-236
Tabel 2.369	Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2013 – 2017.....	II-237
Tabel 2.370	Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-237
Tabel 2.371	Persentase Konsisten Program RPJMD ke Dalam RKPD Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-237

Tabel 2.372	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Kota Palopo 2013 - 2017.....	II-238
Tabel 2.373	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-238
Tabel 2.374	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kota Palopo 2013 - 2017	II-239
Tabel 2.375	Persentase SILPA Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-139
Tabel 2.376	Persentase SiLP Terhadap APBD Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-240
Tabel 2.377	Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-241
Tabel 2.378	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kota Palopo 2013 - 2017	II-241
Tabel 2.379	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kota Palopo Tahun 2013 - 2017....	II-242
Tabel 2.380	Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-242
Tabel 2.381	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kota Palopo 2013 - 2017	II-243
Tabel 2.382	Ketepatan Waktu Penetapan APBD Kota Palopo 2013 - 2017	II-243
Tabel 2.383	Rata – Rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Palopo 2013 - 2017.....	II-244
Tabel 2.384	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-244
Tabel 2.385	Persentase Pejabat ASN yang Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural APBD Kota Palopo 2013 - 2017	II-244
Tabel 2.386	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintahan Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-245
Tabel 2.387	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-245
Tabel 2.388	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-246
Tabel 2.389	Persentase Implementasi Rencana Kalitbangan	II-246

Tabel 2.390	Persentase Pemanfaatan Hasil Kalitbangan	II-247
Tabel 2.391	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	II-247
Tabel 2.392	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	II-248
Tabel 2.393	Persentase Tindak Lanjut Temuan	II-248
Tabel 2.394	Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-248
Tabel 2.395	Jumlah Temuan BPK Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-249
Tabel 2.396	Tersedianya RKT pada Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-249
Tabel 2.397	Terintegrasinya Program – program kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-250
Tabel 2.398	Terintegrasinya Program – program kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.....	II-250
Tabel 2.399	Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-251
Tabel 2.400	Nilai Tukar Petani Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-252
Tabel 2.401	Persentase Pengeluaran Komsumsi RT Non Pangan per KApita ngeluaran Komsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-252
Tabel 2.402	Produktivitas Total Daerah Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-253
Tabel 2.403	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2013 – 2017	II-254
Tabel 2.404	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-254
Tabel 2.405	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-255
Tabel 2.406	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-255

Tabel 2.407	Jumlah Orang/Barang yang Tersangkut Angkutan Umum Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-256
Tabel 2.408	Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-256
Tabel 2.409	Ketaatan Terhadap RTRW Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-256
Tabel 2.410	Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo	II-257
Tabel 2.411	Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Palopo dan Kabupaten sekitar, 2016.....	II-257
Tabel 2.412	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-258
Tabel 2.413	Rasio Ketersediaan Daya Listrik Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-258
Tabel 2.414	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-259
Tabel 2.415	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-259
Tabel 2.416	Angka Kriminalitas yang Tertangani Kota Palopo Tahun 2013 - 2017...	II-260
Tabel 2.417	Persentase Desa Berstatus Terhadap Total Kelurahan Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-260
Tabel 2.418	Rasio Ketergantungan.....	II-261
Tabel 2.419	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-261
Tabel 2.420	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palopo	II-262
Tabel 2.421	Capaian SPM Pendidikan Kota Palopo Tahun 2016 - 2018	II-297
Tabel 2.422	Capaian SPM Kesehatan ngeluaran Komsumsi Rumah Tangga per Kapita Kota Palopo Tahun 2013 - 2017.....	II-305
Tabel 2.423	Capaian SPM Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	II-308
Tabel 2.424	Tabel Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo Tahun 2016 - 2017.....	II-310

BAB III	Gambaran Keuangan Daerah	III-322
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 s/dTahun 2017 Kota Palopo	III-324
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Palopo Tahun 2013 - 2017	III-327
Tabel 3.3	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo	III-329
Tabel 3.4	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palopo ..	III-330
Tabel 3.5	Defisit Riil Anggaran Kota Palopo Tahun 2015 -2017.....	III-331
Tabel 3.6	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Palopo	III-331
Tabel 3.7	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Palopo Tahun 2015 – 2017	III-333
Tabel 3.8	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 2018 – 2023	III-336
Tabel 3.9	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2019 –2023	III-340
Tabel 3.10	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Palopo Tahun 209 – 2023.....	III-341
BAB IV	Permasalahan dan Isu Starategis Daerah	IV-342
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-343
Tabel 4.2	Identifikasi Isu Strategis	IV-361
Tabel 4.3	Kriteria dan Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	IV-364
Tabel 4.4	Nilai Bobot Kriteria	IV-365
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V-367
Tabel 5.1	Penjelasan Misi dan Keterkaitan dengan Visi.....	V- 368
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Palopo Tahun 2018-2023.....	V-370

BAB VI	Strategis, Arah Kebijakan & Program Pembangunan Daerah	VI-374
Tabel 6.1	Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018-2023	VI-374
Tabel 6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Palopo 2018-2023	VI-379
Tabel 6.3	Fokus dan Rancangan Tema Pembangunan Kota Palopo 2019-2023.....	VI-384
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah Kota Palopo 2019-2023.....	VI-385
BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	VII-394
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Kota Palopo.....	VII-395
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palopo 2019-2023	VII-396
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VIII-453
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Palopo 2019-2023	VIII-454
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palopo 2019-2023.....	VIII-455
Tabel 8.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Terhadap Capaian Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minim (SPM) Kota Palopo 2019-2023	VIII-491

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Antara RPJMD Kota Palopo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-7
Gambar 2.1	Peta Administratif Kota Palopo	II-12
Gambar 2.2	Peta Topografi Kota Palopo.....	II-13
Gambar 2.3	Peta Jenis Tanah di Kota Palopo.....	II-15
Gambar 2.4	Peta Geologi Kota Palopo.....	II-16
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kota Palopo	II-17
Gambar 2.6	Peta DAS Kota Palopo.....	II-18
Gambar 2.7	Peta Rawan Banjir Kota Palopo.....	II-21
Gambar 2.8	Peta Rawan Kebakaran	II-23
Gambar 2.9	Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palopo.....	II-38
Gambar 2.10	Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palopo	II-40
Gambar 2.11	Peta Kepadatan Penduduk Kota Palopo	II-49
Gambar 2.12	Komposisi Penduduk Kota Palopo Tahun 2017.....	II-50
Gambar 2.13	Grafik Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Bahan Pangan	II-58
Gambar 2.14	Grafik Perkembangan Ketersediaan Pangan Nabati Kota Palopo (2013 – 2016)	II-59
Gambar 2.15	Grafik Perkembangan Jumlah Ternak yang Dipotong di RPH Kota Palopo (2013 – 2016).....	II-59
Gambar 2.16	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Palopo (2014).....	II-60
Gambar 2.17	Grafik Jumlah Sambungan Rumah PAM Tirta Mangkaluku Palopo	II-61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Salah satunya adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berlaku selama lima tahun.

Kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan lima tahunan ini selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RPJMD menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023.

Masalah pembangunan berkelanjutan juga menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018 – 2023. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda internasional dan Indonesia sebagai negara berkembang telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya, Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan pendekatan proses (Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas) dan pendekatan substansi (Holistik-Tematik, Integratif, Spasial). Pendekatan Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Pendekatan Politik artinya bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan, karena rakyat sebagai pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah. Olehnya itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang

ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Sementara pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. RPJMD Kota Palopo 2018-2023 merupakan tahapan atau periode ke IV (ke empat) dari pentahapan pembangunan dua puluh tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2005-2025.

Dengan dilantiknnya Walikota dan Wakil Walikota Palopo (**Drs. H. M. Judas Amir, MH dan Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si**) pada tanggal 26 September 2018, maka sesuai Pasal 41 Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan RPJMD Kota Palopo 2018–2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dimulai sejak Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah dan KLHS.

3. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi oleh BAPPEDA.

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.

5. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

6. Penetapan RPJMD

Penetapan Perda tentang RPJMD yaitu mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023. Walikota Palopo menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Palopo tahun 2018 – 2023 yang telah dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Peraturan Daerah Kota Palopo tentang RPJMD Kota Palopo tahun 2018 – 2023.

Penyusunan RPJMD juga harus memerhatikan kondisi gambaran umum Kota Palopo. Karena dari gambaran umum kondisi daerah akan diketahui permasalahan dan isu actual termasuk kekuatan, ancaman potensi dan peluang Kota Palopo. Langkah tersebut juga harus dibarengi dengan upaya mengenali berbagai potensi besar yang dimiliki Kota Palopo untuk dikembangkan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Palopo di masa yang akan datang. Selain itu penyusunan RPJMD Kota Palopo ini didasari oleh visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 8) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (TPB);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 - 25) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD;
 - 27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 28) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal);
 - 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana Kabupaten/Kota;
 - 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota;
 - 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 34) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 35) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008 -2028 ;
 - 36) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - 37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
 - 38) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 39) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012 – 2032;
 - 40) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2005 – 2025.
 - 41) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo ;
 - 42) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Palopo bukanlah suatu dokumen yang berdiri sendiri melainkan merupakan suatu rangkaian dokumen dari perencanaan lainnya baik pada level Nasional maupun Provinsi. Semua dokumen perencanaan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diwujudkan lebih lanjut dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sebagai konsekuensi negara kesatuan, perencanaan pembangunan daerah seharusnya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Bahkan sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan pilar dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu, Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tidak mengabaikan kepentingan negara.

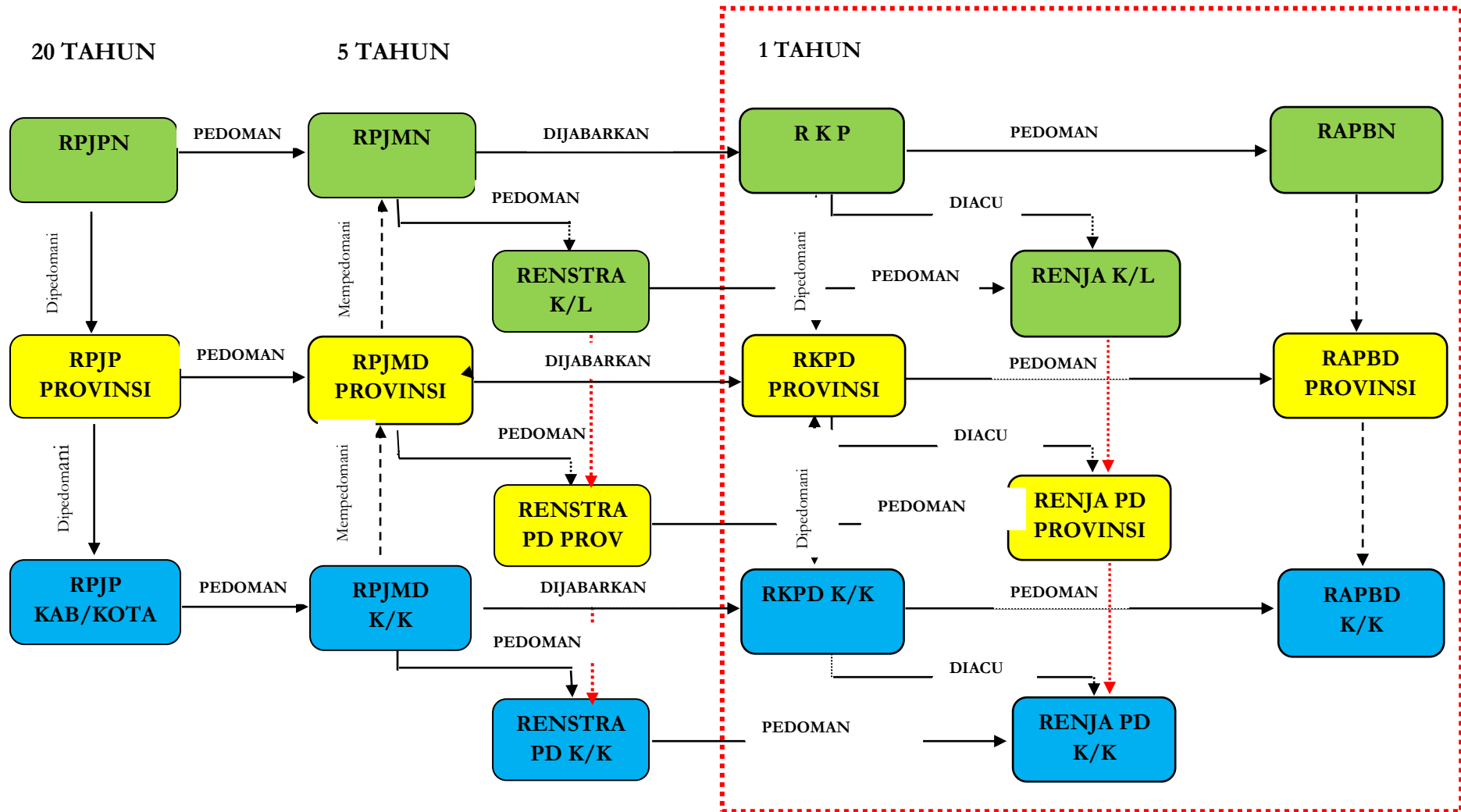
RPJMD Kota Palopo merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan dokumen tersebut mempertimbangkan aspek-aspek dokumen perencanaan lain seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RPJP Kota Palopo, RPJP Kabupaten Daerah sekitar, RTRW Nasional, RTRW Propinsi, RTRW Kota Palopo dan RTRW Kabupaten Daerah sekitar.

Secara prosedural Perubahan RPJMD telah berpedoman pada RPJP Nasional, RPJP Propinsi Sulawesi Selatan, RPJP Kota Palopo dan RPJP daerah sekitar. Disamping itu RPJMD Kota Palopo disusun dengan mengacu pada RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan, dan memperhatikan RPJMD daerah sekitar. RPJMD Kota Palopo juga berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Palopo dan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah sekitar agar terjadi keterpaduan pembangunan antar wilayah secara regional. RPJMD Kota Palopo yang telah dijadikan Peraturan Daerah, akan dijabarkan ke dalam RKPD dan menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun dan menetapkan Renstra dan Renja SKPD.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, hubungan antar dokumen RPJMD Kota Palopo dengan dokumen perencanaan lain, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan Daerah sekitarnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Hubungan antara RPJMD Kota Palopo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dokumen RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Oleh karena itu, kualitas dokumen RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Palopo periode 2018-2023, juga berpedoman pada visi dan misi Kota Palopo dalam RPJPD Tahun 2005-2025 beserta arah pembangunannya.

RPJMD dengan RTRW Kota Palopo

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai poladan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012-2032, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/ atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo.

RPJMD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah yang memuat prioritas pembangunan, program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Palopo yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Palopo adalah menjadi pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh *stakeholder* (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Palopo sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari Walikota terpilih, sehingga seluruh upaya pembangunan dilakukan dengan sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Oleh karena itu, RPJMD Kota Palopo menjadi dokumen perencanaan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun kedepan.

Pada prinsipnya tujuan penyusunan RPJMD Kota Palopo adalah untuk menciptakan Pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien, efektif, berorientasi terhadap visi dan misi, berkesinambungan, terarah dan terpadu dalam

merealisasikan setiap program kebijakan yang telah disusun. Secara khusus tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode tahun pemerintahan 2018 – 2023 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas pembangunan daerah ;
2. Menjadi pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
4. Menciptakan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Menjadi panduan/pedoman operasional visi dan misi Walikota terpilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan;
6. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang dengan tujuan perencanaan penganggaran lima tahunan dan tahunan pembangunan daerah;
7. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program pembangunan daerah;
8. Sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

1.5 Sistematika Dokumen RPJMD Kota Palopo

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo 2018-2023, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Palopo.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Palopo secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kota Palopo untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKANDAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu memberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IX : PENUTUP

Menjelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan serta ketentuan perencanaan menjelang akhir periode perencanaan, serta tata laksana RPJMD Kota Palopo 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. **Kondisi Umum Daerah**
- 2.1.1. **Aspek Geografi dan Demografi**
- 2.1.1.1. **Aspek Geografi**
- 2.1.1.1.1. **Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, Kota Palopo mempunyai luas wilayah **252,99** km², memiliki **9 Kecamatan**, dan **48 Kelurahan**. Kota Palopo berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah Utara, Teluk Bone di sebelah Timur dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah Selatan serta Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara di sebelah Barat.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan
Kota Palopo

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
1.	Wara Selatan	4	10,66	4,21
2.	Sendana	4	37,09	14,66
3.	Wara	6	11,49	4,54
4.	Wara Timur	7	12,08	4,77
5.	Mungkajang	4	53,80	21,27
6.	Wara Utara	6	10,58	4,18
7.	Bara	5	23,35	9,23
8.	Telluwanea	7	34,34	13,57
9.	Wara Barat	5	59,56	23,56
Jumlah		48	252.99	100,00

Sumber : Diolah dari beberapa sumber

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Kecamatan Wara Barat merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan yang terkecil adalah Wara Utara. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Wara Timur dan kelurahan yang paling sedikit adalah Wara Selatan, Sendana, Mungkajang.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kota Palopo



Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kota Palopo

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Palopo terletak antara **2°53'.15"** - **3°04'.08"** Lintang Selatan dan **120°03'.10"** - **120°14'.34"** Bujur Timur. Geografi wilayah mencakup pesisir di bagian Timur dan pegunungan di bagian Barat, serta dataran rendah memanjang dari utara sampai selatan, dengan 6 aliran sungai. Kemiringan lereng Kota Palopo dilihat dari titik ketinggiannya di atas permukaan air laut antara 0 – 25, 26 – 100, 101 – 500, 501 – 1000, dan 1000+ dpl dengan klimatologi Kota Palopo dipengaruhi oleh curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

2.1.1.2.1. Topografi

Kondisi topografi Kota Palopo meliputi ketinggian antara 0 – 1.500 m dari permukaan air laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng antara 0–2 %, 2–15 %, 15–40 %, dan > 40 %. Adapun tingkat kemiringan lereng Kota Palopo berdasarkan luas wilayahnya yang terluas adalah wilayah dengan tingkat kemiringan lereng 2 – 15 % dengan luas 76,677 Km² sedangkan tingkat kemiringan lereng dengan luas wilayah terkecil adalah tingkat kemiringan lereng 15 % - 40 % dengan luas wilayah 57,989 Km². Untuk lebih jelasnya, luas wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lereng Kota Palopo menurut kecamatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Berdasarkan Tingkat Kemiringan Lereng
Kota Palopo Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Kemiringan Lereng (Km ²)			
			0-2 %	2-15 %	15-40 %	> 40 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	2,132	-

2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9,272
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	34,97
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-
9.	Wara Barat	59,56	-	-	5,413	48,717
Jumlah		252.99	76,677	8,951	68,933	57,989

Sumber : Diolah dari beberapa sumber

Kondisi ketinggian, bervariasi ini menunjukkan 62,85 % dari total luas wilayah merupakan daerah ketinggian 0-500 mdl, 24,76 % terletak di ketinggian 501-1.000 mdl, dan sekitar 12,39 % terletak di atas ketinggian lebih dari 1.000 mdl. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

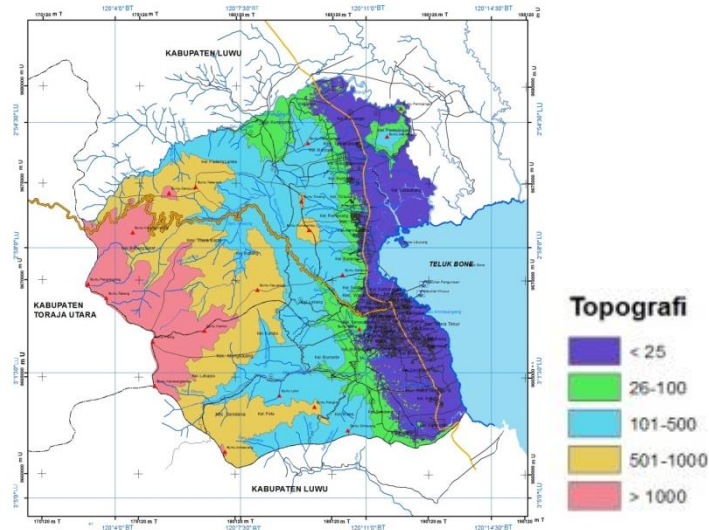
Tabel 2.3
Kondisi Topografi Kota Palopo Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Tingkat Ketinggian Daerah (Mdl)				
			0 – 25	26–100	101-500	501-1000	> 1000 %
1.	Wara Selatan	10,66	7,462	1,066	-	2.132	-
2.	Sendana	37,09	5,564	-	22,254	9.272	-
3.	Wara	11,49	11,490	-	-	-	-
4.	Wara Timur	12,08	12,080	-	-	-	-
5.	Mungkajang	53,80	2,690	-	16,140	13.450	21.520
6.	Wara Utara	10,58	6,348	2,116	2,116	-	-
7.	Bara	23,35	7,005	2,335	14,010	-	-
8.	Tellu Wanua	34,34	24,038	3,434	6,868	-	-
9.	Wara Barat	59,56	-	-	5,413	35.184	13.533
Jumlah		252.99	8,17	8,951	66,801	60.038	35.053

Sumber : Diolah dari beberapa sumber

Keadaan permukaan tanah bergunung dan berbukit terutama pada sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Toraja Utara. Daerah dengan kondisi topografi relatif rendah dan berbukit pada bagian Utara. Sedangkan bagian Timur merupakan daerah pantai yang membujur dari Utara ke Selatan dengan panjang pantainya kurang lebih 25 Km. Bagian Selatan berbukit terutama bagian Barat, sedangkan bagian lainnya merupakan dataran rendah yang datar dan bergelombang.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kota Palopo



Sumber: RTRW Kota Palopo

2.1.1.2.2. Geologi

Struktur batuan di Kota Palopo pada umumnya terdiri dari 3 jenis batuan beku. Batuan metamorf dan batuan vulkanik serta endapan alluvial yang hampir mendominasi seluruh wilayah Kota Palopo. Batuan beku yang dijumpai secara umum terdiri dari intrusi batuan beku granit dan gebro serta beberapa intrusi kecil lainnya. Kemudian dijumpai pula batuan beku yang merupakan jejak aliran larva yang telah membeku yang bersusunan balistik hingga andesitik. Batuan sedimen yang dijumpai meliputi batu gamping, batu pasir, dan konglomerat, sedangkan batuan metamorf yang dijumpai meliputi batuan meta sedimen. Batuan vulkanik yang dijumpai terdiri dari tufa dan breksi vulkanik. Sedangkan endapan-endapan alluvial terdiri dari material-material bersusunan berangkal, kerakal, kerikil, pasir hingga lempung, kondisi geologi ini akan menunjukkan potensi lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan bangunan Kota Palopo.

Diwilayah Kota Palopo mempunyai struktur batuan yang merupakan bahan galian sebagai bahan induk pembentuk tanah, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut;

- Bahan tanah liat untuk pembentuk batu bata*, banyak diupayakan oleh masyarakat di areal sawah di Kecamatan Wara, dan Wara selatan.
- Batuan endapan sungai berupa sirtu (pasir dan batu)*, banyak terdapat di sungai latuppa didominasi oleh batuan beku yang merupakan batuan sedimen beku, ukurannya bervariasi dari yang sangat besar sampai yang kecil dan merupakan pecahan batu sampai butiran.
- Bahan galian atau butiran emas*, terdapat di sungai Latuppa pada bagian hulu di atas bukit, merupakan daerah bekas penambangan emas di beberapa tempat pada zaman belanda. Dan pada saat ini masih diusahakan oleh masyarakat secara tradisional.
- Batuan sedimen*, menyebar di bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja
- Batuan terobosan*, yang menyebar di bagian utara yang merupakan daerah pegunungan.

Jenis batuan lainnya yang merupakan pelapukan bahan pembentuk tanah, yang mempunyai kandungan potensial di Kota Palopo, adalah ;

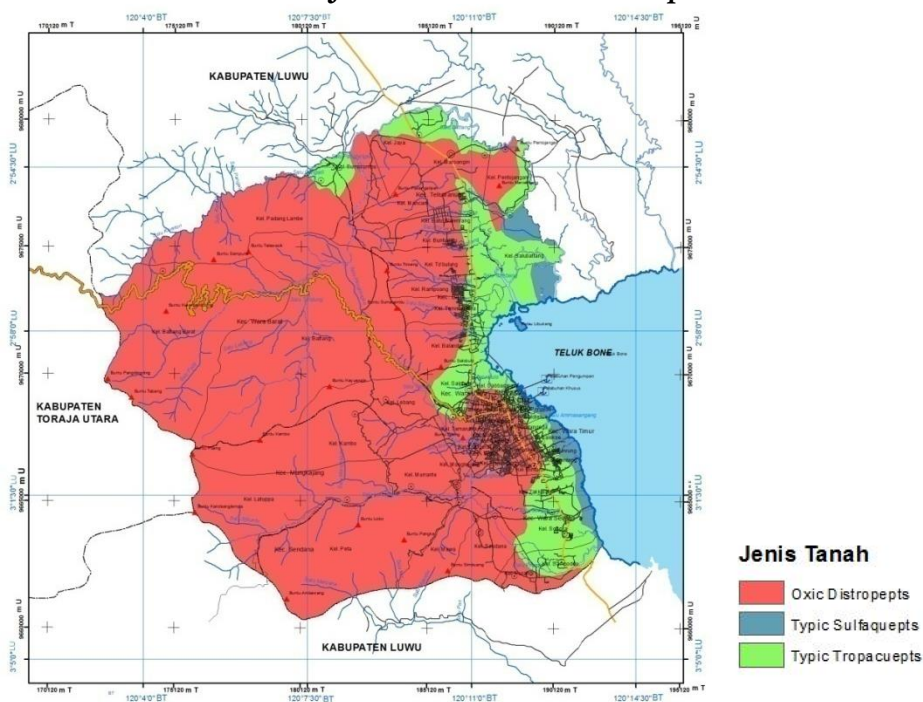
- Batuan gamping dan marmer (limestone dan marble)*, dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Telluwanua.

- b. *Batuan Granit dan Granodiorit*, untuk bahan bangunan lantai rumah, batu hias dinding dan sebagainya serta untuk pengerasan jalan (aggrogat) dimana lokasi penyebarannya di Kecamatan Wara dan Wara Selatan.
- c. *Batu sabak, filit, kuarsil, batu gamping, dan batu lamau*, terdapat di Kecamatan Wara, Wara Utara dan Bagian Barat Kota Palopo.

Jenis batuan ini dikelompokkan menurut umu pembentukannya yang diurut dari batuan yang termuda hingga yang tertua, maka batuan-batuan ini tersusun atas 5 (lima) kelompok, yaitu;

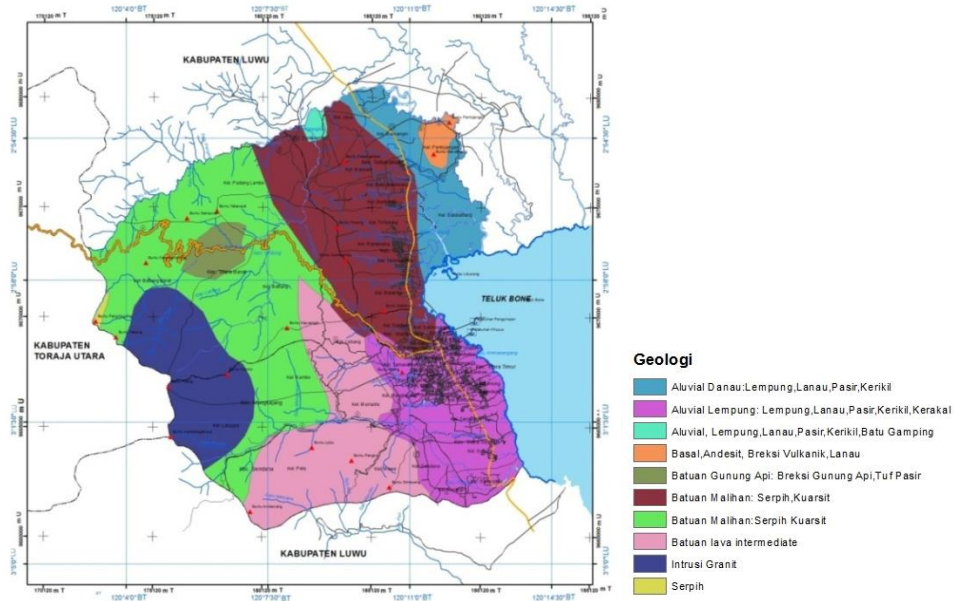
- a. *Kelompok endapan alluvial* (termasuk didalamnya endapan Qal atau terumbu lokal) yang termasuk didalamnya endapan alluvial berupa karakal, kerikil, pasir dan batu, serta terumbu koral yang tersebar disepanjang pantai dan alur aliran sungai Latuppa.
- b. *Batuan Tmb*, terdiri dari napal dan sisipan batu gamping setempat-tempat, mengandung batu pasir gamping, konglomerat dan breksi. Selain itu terdapat beberapa kelompok intrusi batuan beku yang terdiri dari batuan beku granit dan gabro. Batuan granit ini dijumpai pada Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
- c. *Batu Tol*, yaitu kelompok batuan hasil pembukuan aliran larva yang bersusun balastik hingga *andesitic*, kemudian breksi vulkanik, batu pasir dan batu lamau, serta batuan setempat-tempat mengandung fieldsphatoid. Batuan ini tersusun di Bagian Selatan Kota Palopo dan banyak tersebar di daerah Kecamatan Wara Selatan.
- d. *Batuan Tet*, yaitu terdiri dari serpih, batu gamping dan batu pasir dengan sisipan konlomerat. Kelompok batuan ini terdapat di Kecamatan Wara dan Kecamatan Telluwanua.
- e. *Batuan TKI*, yaitu terdiri dari batuan-batuan yang mengalami metamorfisme, antara lain serpihan, filit, rijang, marmer, kuarsit dan beberapa bagian di utara Kota Palopo masuk dalam wilayah Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Selatan.

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah di Kota Palopo



Sumber : RT RW Kota Palopo

Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Palopo



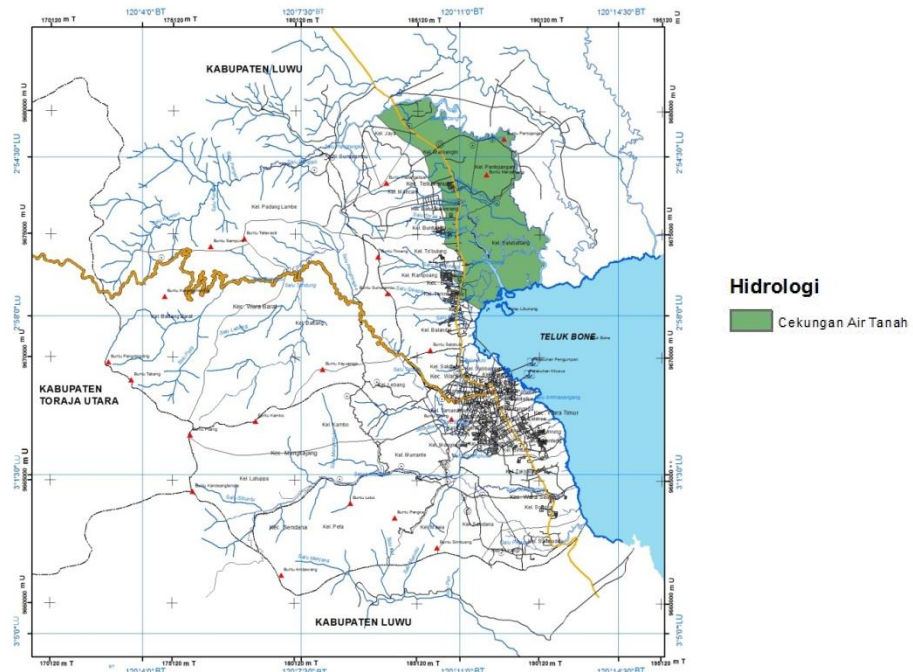
2.1.1.2.3. Hidrologi

Kedadaan Hidrologi di Kota Palopo umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Bambalu/Sungai Battang, Sungai Latuppa, Sungai Boting dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Disatu sisi keberadaan sungai-sungai tersebut sangat berpotensi dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya wisata permandian alam dan *rafting*. Kondisi hidrologi Kota Palopo secara umum adalah sebagai berikut;

1. Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter.
2. Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kota Palopo

Sumber : RTRW Kota Palopo



Dalam hal ini, hidrologi di Kota Palopo untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan kelestariannya harus tetap dijaga. Potensi sumberdaya air di Kota Palopo selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

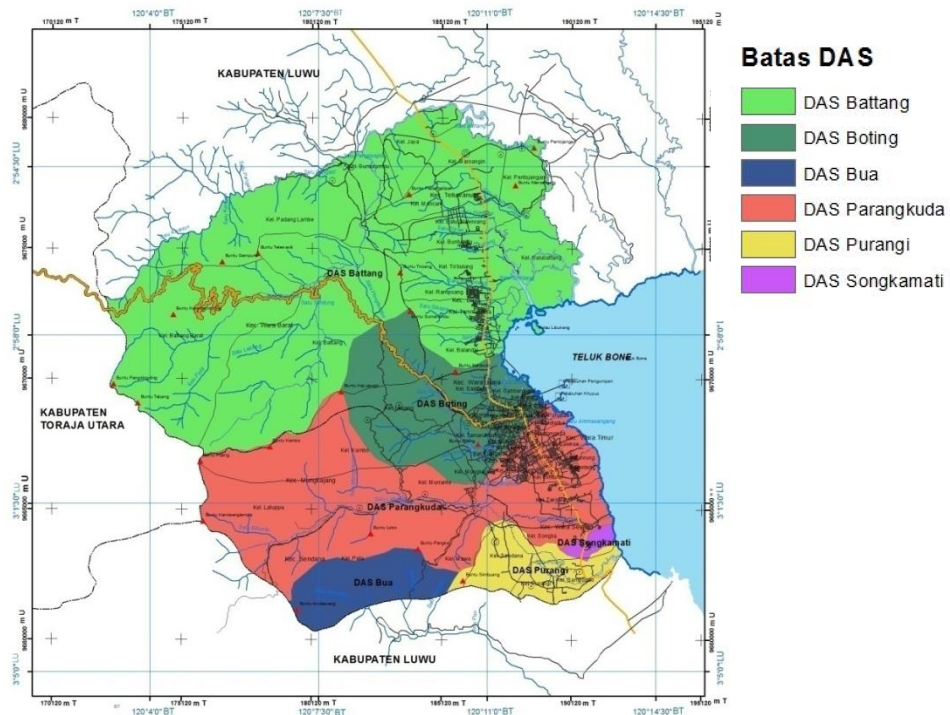
Potensi sumberdaya air di wilayah Kota Palopo yang telah dimanfaatkan oleh penduduk dalam kehidupannya untuk berbagai keperluan bersumber dari air tanah dangkal (air permukaan dan air tanah dalam air tanah dangkal/permukaan dapat berupa air sungai, sumur, rawa-rawa, bendungan, mata air dan lain sebagainya, sedangkan potensi air tanah dalam dengan pemanfaatan air melalui pengeboran.

Penyediaan air minum merupakan suatu kebutuhan pokok penduduk di suatu daerah, terutama pada daerah-daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan kualitasnya kurang memadai jika ditinjau dari aspek kesehatan. Meskipun demikian, pengadaan air minum masih terbatas dan umumnya penduduk menggunakan sumur air tanah dangkal, dalam (*artesis*), air permukaan dan mata air yang bersumber dari pegunungan.

Wilayah Kota Palopo terdiri dari beberapa Daerah Aliran Sungai baik yang melintas dalam pusat kota maupun dipinggiran Kota Palopo terdiri dari 6 daerah terdiri dari :

1. DAS Purangi dengan luas cakupan area lebih kurang 1.037 hektar.
2. DAS Bua dengan luas cakupan area lebih kurang 1.168,04 hektar.
3. DAS Songkama'ti dengan luas cakupan area lebih kurang 136,20 hektar.
4. DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area lebih kurang 6.412,80 hektar.
5. DAS Boting dengan luas cakupan area lebih kurang 3.087,25 hektar.
6. DAS Salubattang dengan luas cakupan area lebih kurang 13.760,59 hektar.

Gambar 2.6
Peta DAS Kota Palopo



Sumber: RTRW Kota Palopo

2.1.1.2.4. Klimatologi

Curah hujan yang dicatat dari data Badan Metereologi dan Geofisika di pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah mempunyai variasi antara 500-1000 mm/th, sedangkan untuk daerah hulu (pengunungan) berkisar antrara 1000-2000 mm/tahun. Curah hujan dan hari hujan ini akan menentukan pula potensi air permukaan (air sungai) maupun ketersediaan akir tanah (*ground water*) seperti dalam peta hidrogeologi Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu pada umumnya, yang dapat digunakan sebagai data potensi air tanah dalam jika diperlukan untuk fasilitas pengairan menggunakan sistem pompa air tanah dalam untuk kebutuhan pertanian maupun perkebunan/peternakan.

Kondisi hari hujan harian di Kota Palopo tidak menentu karena udara dan butir air yang diuapkan dari laut mengumpul menjadi awan dan mengenai pengunungan, akhirnya sewaktu-waktu menjadi hujan di Kota Palopo. Dalam hal ini dapat dirasakan, pada waktu musim kemarau masih dapat dirasakan hujan, sebaliknya pada musim hujan masih banyak didapatkan hari tanpa hujan, ini menjadi ciri khusus yang memungkinkan berbagai jenis tanaman buah bergantian berbuah sepanjang tahun. Demikian pula, panjang hari hujan lebih relatif lebih pendek jika dibandingkan dengan wilayah lain di Luwu Raya, sehingga lebih tepat untuk usaha pengeringan, baik untuk hasil laut maupun hasil pertanian.

Suhu udara rata-rata tahunan di dataran rendah Kota Palopo berkisar antara rata-rata 25,5⁰ C – 27,9⁰ C, angka ini berkurang 0,6⁰ C setiap kenaikan 100 Meter, sehingga makin tinggi keadaan permukaan tanah disuatu wilayah udaranya semakin

tinggi. Kelembaban udara dipengaruhi oleh keadaan ketinggian permukaan tanah, suhu udara dan kecepatan angin. Kelembaban bervariasi antara 78,8 % sampai 85 % tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang bervariasi antar 5,2 sampai 8,5 jam/hari.

Kecepatan angin berkisar antara 41,9-72 km/jam dalam keadaan normal. Angin bertiup dari laut ke daratan pada waktu pagi sampai sore hari dan pada malam hari angin darat mengarah ke laut. Cuaca Kota Palopo cepat berubah dari keadaan panas/kering menjadi mendung dan hujan, hal ini disebabkan uap air laut yang dihembuskan ke arah daratan sampai ke daerah pegunungan di wilayah bagian barat dan sebagian utara Kota Palopo, akan berkumpul menjadi butiran air hujan karena kelembaban udara di kawasan pegunungan, yang terbawa angin ke daerah dataran yang lebih rendah, sehingga terjadi curah hujan yang kebanyakan di wilayah pegunungan dan wilayah daratan sewaktu-waktu. Sehingga Kota Palopo seakan-akan tidak mengenal musim kering yang berkepanjangan karena keadaan sehari-harinya sering terjadi hujan kiriman dan mendung secara mendadak dan hilang dengan cepat pula.

2.1.1.2.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Palopo cukup bervariasi sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimukimi oleh masyarakat. Secara umum, Kota Palopo ini memiliki 3 dimensi wilayah yaitu pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah serta pesisir dan laut. Perbedaan dimensi wilayah ini mempengaruhi aktifitas masing – masing masyarakat yang bermukim ditempat tersebut. Luas dari masing – masing jenis penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Kota Palopo.d Tahun 2016

NO	PENGUNAAN LAHAN	
1.	Hutan	58,30
2.	Permukiman	4,79
3.	Sawah	10,42
4.	Tambak	4,88
5.	Padang Rumput	0,01
6.	Kebun/Tegalan	6,63
7.	Semak Belukar	14,43
8.	Sungai	0,39
9.	Rawa	0,01
10.	Tanah Kosong	0,05
JUMLAH		100%

*Sumber Data : - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Badan Informasi Geospasial 2012
- Hasil olahan GIS Data Citra Satelit Spot 6 dan Spot 7 Tahun 2017*

Berdasarkan informasi pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa 58,30% wilayah Kota Palopo masih berupa hutan dengan luas permukiman sebesar 4,79%. Sementara luas sawah sebesar 10,42% dari luas Kota Palopo.

A. Kawasan Budidaya

Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya :

- a. Perikanan budidaya tambak seluas lebih kurang 550 Ha di Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua;

- b. Budidaya air tawar seluas 355,8 Ha di Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana dan Kecamatan Telluwanua;
- c. Kawasan potensil budidaya rumput laut meliputi tambak dan pantai yang berada di Perairan Teluk Bone seluas lebih kurang 150 Ha di wilayah Kecamatan Bara, dan Kecamatan Telluwanua;
- d. Balai Benih Ikan Salopao dengan luas 1,3 Ha di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.

B. Kawasan Lindung

- Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung dengan luas $\pm$ 8.297,58 hektar terletak di Kelurahan Latuppa, dan Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat, dan Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat.

- Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan Taman Wisata Alam Nanggala III seluas 891 hektar terletak di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

- Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya $\pm$ 12 hektar merupakan kawasan resapan air di Kawasan Mangkaluku dan sekitarnya Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berikut adalah analisis kerentanan wilayah rawan bencana di Kota Palopo :

a. Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Berada di kawasan Battang Barat, dan Battang (Kecamatan Wara Barat), kawasan Latuppa, dan kawasan Kambo (Kecamatan Mungkajang), kawasan Peta (Kecamatan Sendana). Intensitas terjadinya bencana gerakan tanah dalam beberapa tahun terakhir di beberapa lokasi di wilayah Kota Palopo cenderung meningkat frekuensinya.

Bencana ini relatif sering terjadi di kawasan bagian barat Kota Palopo, khususnya di wilayah Kelurahan Battang Barat dan Kelurahan Battang. Fenomena ini disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan di daerah rentan gerakan tanah. Kondisi ini diperparah saat intensitas hujan yang tinggi terjadi dalam durasi yang panjang. Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim Revisi RTRW Kota Palopo, skor/indeks ancaman bencana tanah longsor di Kota Palopo secara umum masih pada posisi rendah.

Tabel 2.5
Klasifikasi Zona dan Kelas Ancaman Longsor

Zona Ancaman	Kelas	Nilai	Bobot (%)	Skor
Gerakan Tanah Sangat Rendah, Rendah	Rendah	1		
Gerakan Tanah Menengah	Sedang	2		
Gerakan Tanah Tinggi	Tinggi	3		

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo (2017)

Jalur evakuasi bencana tanah longsor :

- a. Ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- b. Ruas Jalan Poros Latuppa-Kantor Kecamatan Mungkajang;
- c. Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Kantor Kecamatan Wara Selatan.

b. Banjir

Kawasan rawan banjir berada di Berada di Kelurahan Salubattang, Kelurahan Jaya, Kelurahan Mancani, (Kecamatan Telluwanua), Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Pontap, Kelurahan PonjalaE, Kelurahan SalotelluE (Kecamatan Wara Timur), Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Tompotikka (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Padanglambe (Kecamatan Wara Barat)

Ancaman bencana banjir masih kerap melanda Kota Palopo. Pada tahun 2017 terjadi bencana alam banjir dengan arus deras di Kecamatan Mungkajang yang menyebabkan 1 jembatan utama rusak. Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Telluwanua yang menyebabkan beberapa rumah warga, sarana umum (masjid) dan fasilitas pemerintahan (Kantor Lurah) terendam dan menghancurkan 16 KK mengungsi.

Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya banjir di Kota Palopo adalah:

- Kondisi DAS dalam keadaan kritis yang berakibat resapan air hujan ke dalam sistim akuifer semakin berkurang dan erosi lahan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan pula sedimentasi di alur dan muara sungai yang juga tinggi.
- Kapasitas sistem pengendali banjir yang ada seperti dimensi palung sungai, tampungan air, sistem drainase dan lainnya kurang memadai.

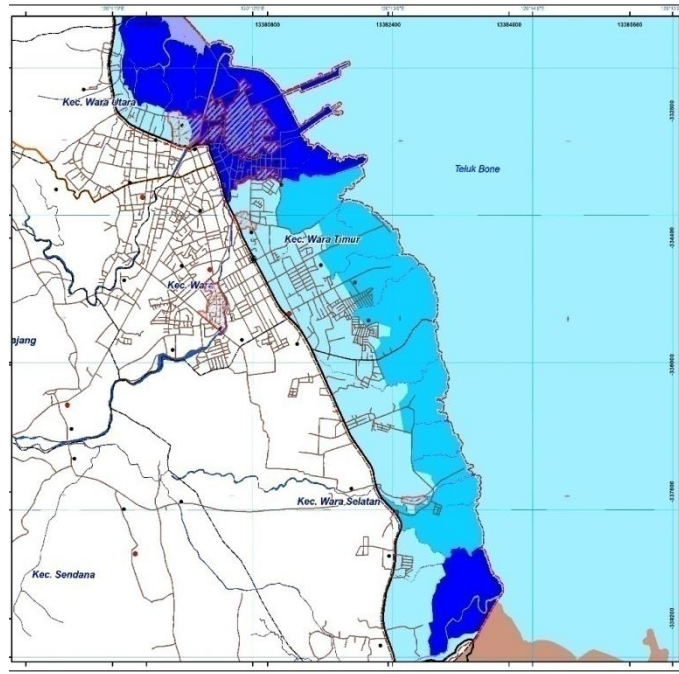
Namun demikian, berdasarkan perhitungan Tim Revisi RTRW Kota Palopo, skor/indeks ancaman bencana banjir di Kota Palopo secara umum masih pada posisi rendah.

Tabel 2.6
Kedalaman dan Kelas Ancaman Banjir

Kedalaman (m)	Kelas	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 0,76	Rendah	1		
0,76 – 1,5	Sedang	2		
>1,5	Tinggi	3		

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo (2017)

Gambar 2.7
Peta Rawan Banjir Kota Palopo



Jalur evakuasi bencana banjir :

- Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;
- Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa;
- Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo;
- Ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim;
- Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

c. Kebakaran Gedung dan Permukiman

Kawasan rawannya berada di Berada di kawasan permukiman kepadatan tinggi pada wilayah Kelurahan Penggoli, Kelurahan Batupasi, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Luminda, Kelurahan Pajalesang, Kelurahan Boting, Kelurahan Tompotikka, dan Kelurahan Dangerakko.

Ancaman kebakaran gedung dan permukiman berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65 – 1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32 – 1,66, dan 3,00 – 2,23.

Tabel 2.7
Parameter Ancaman Kebakaran

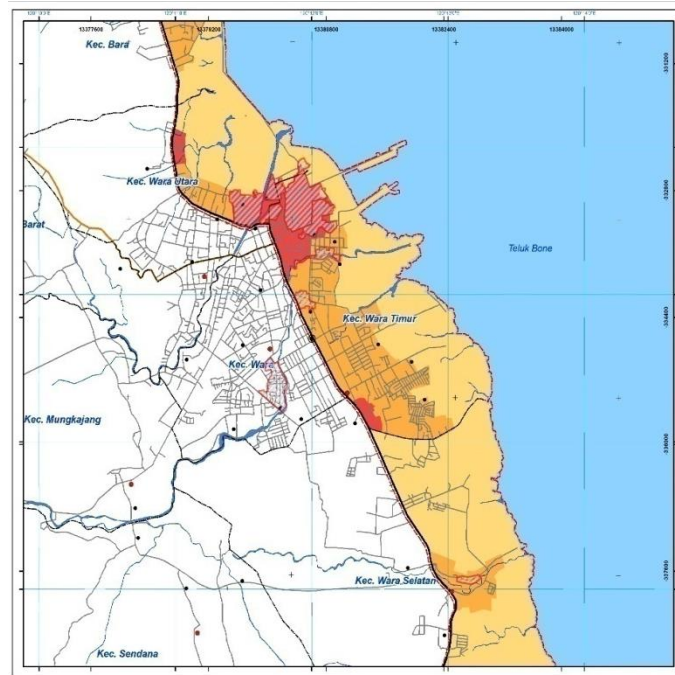
Paramater	Bobot (%)	Kelas			Skor
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Frekuensi kejadian kebakaran (%)	60	<2%	2-5%	>5%	0,60
Kerugian ekonomi (miliar rupiah)	6	<1 m	1-3 M	>3 M	0,06
Jumlah korban meninggal	28	-	1 orang	>1 orang	0,28
Jumlah korban luka berat	6	<5 orang	5-10 orang	>10 orang	0,06
Jumlah Skor					1,00

Keterangan : Hazard Kebakaran Gedung dan Permukiman = $(0,6 \times \text{skor frekuensi kejadian}) + (0,06 \times \text{skor kerugian ekonomi}) + (0,28 \times \text{skor jumlah meninggal}) + (0,06 \times \text{skor jumlah luka berat})$.

Jalur evakuasi kebakaran gedung dan permukiman :

- Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;
- Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa;
- Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo;
- Ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Gedung Saodenrae Convention Centre;
- Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre;
- Ruas Jalan Andi Tadda – Jalan Jenderal Ahmad Yani – Gedung Saodenrae Convention Centre;
- Ruas jalan Sungai Rongkong – Lapangan Kodim.

Gambar 2.8
Peta Rawan Kebakaran



d. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, dan Kecamatan Telluwanua. Ancaman kebakaran hutan dan lahan berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65–1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23.

Tabel 2.8
Parameter Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Paramater	Bobot (%)	Minimum	Maximum	Kelas			Skor
				Rendah	Sedang	Tinggi	
Jenis Hutan	40			Hutan	Lahan Perkebun	Padang rumput	0,40

Paramater	Bobot (%)	Minimum	Maximum	Kelas			Skor
				Rendah	Sedang	Tinggi	
					an	kering, semak belukar dan lahan pertanian	
Curah Hujan Tahunan	30	0 mm	5000 mm	Penghujan	Penghujan-Kemarau	Kemarau	0,30
Jenis Tanah	30	Non bog soil	Bog soil	Non organik/ Non gambut	Semi organik	Organik/gambut	0,30
Jumlah Skor							1,00

Keterangan : Hazard Kebakaran Hutan dan Lahan = $(0,4 * \text{skor jenis hutan}) + (0,3 * (\text{curah hujan tahunan} / 5000)) + (0,3 * \text{skor jenis tanah})$.

Jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan :

- Ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- Ruas Jalan Poros Latuppa-Lapangan Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang; dan
- Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Lapangan Kelurahan Purangi Kecamatan Wara Selatan.
- Ruas Jalan Poros Kambo – Lapangan Kelurahan Kambo Kecamatan Wara Barat.

e. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Kawasan rawannya berada di Berada di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara. Ancaman gelombang ekstrim dan abrasi Kota Palopo berada pada klasifikasi/kategori Rendah yakni pada skor 1,50 atau masih dalam kelas interval 1,65–1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23. Indikator yang digunakan untuk bahaya gelombang ekstrim dan abrasi adalah tinggi gelombang, arus wilayah perairan (*current*) tutupan vegetasi di wilayah pesisir, bentuk garis pantai dan tipologi pantai.

Tabel 2.9
Parameter Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Paramater	Bobot (%)	Kelas			Skor
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Tinggi gelombang	30	<1 m	1-2,5 m	>2,5 m	0,30
Arus (<i>current</i>)	30	<0,2	0,2 – 0,4	>0,4	0,30
Tutupan vegetasi	15	>80%	40 – 80%	<40%	0,45
Bentuk garis pantai	15	Berteluk	Berteluk - lurus	lurus	0,15
Tipologi pantai	10	Berbatu karang	Berbatu pas	berlumpur	0,30
Jumlah Skor					1,50

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo

Keterangan: Hazard Gelombang Ekstrim dan Abrasi =
 $(0,3 \times \text{skor tinggi gelombang}) + (0,3 \times \text{skor arus}) + (0,15 \times \text{skor tutupan vegetasi}) + (0,15 \times \text{skor bentuk garis pantai}) + (0,1 \times \text{skor tipologi pantai})$.

Jalur evakuasi gelombang ekstrim dan abrasi :

- Ruas Jalan A. Tendriajeng – Jalan Andi Tadda – Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa;
- Ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro – Lapangan Gaspa;
- Ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila;
- Ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

f. Indeks Penduduk Terpapar

Penentuan Indeks Penduduk Terpapar dihitung dari komponen sosial budaya di kawasan yang diperkirakan terlanda bencana. Komponen ini diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan indikator kelompok rentan pada suatu kawasan bila terkena bencana. Indeks ini baru bisa diperoleh setelah Peta Ancaman untuk setiap bencana selesai disusun. Data yang diperoleh untuk komponen sosial budaya kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Selain dari nilai indeks dalam bentuk kelas (rendah, sedang atau tinggi), komponen ini juga menghasilkan jumlah penduduk yang terpapar ancaman bencana pada suatu daerah. Komponen dan indikator untuk menghitung Indeks Penduduk Terpapar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Komponen Indeks Penduduk Terpapar

No	Bencana	Komponen/ Indikator	Kelas Indeks			Bonot Total	Skor	
			Rendah	Sedang	Tinggi			
		Sosial Budaya (40%)						
		1	Kepadatan Penduduk	<500 jiwa/km2	500-1000 jiwa/km2	>1000 jiwa/km2		60%
		2	Kelompok Rentan	<20%	20-40%	>40%		40%
		Sosial Budaya (40%)						
		1	Kepadatan Penduduk	<500 jiwa/km2	500-1000 jiwa/km2	>1000 jiwa/km2		60%
		2	Kelompok Rentan	<20%	20-40%	>40%		40%
		Sosial Budaya (40%)						
		1	Kepadatan Penduduk	<500 jiwa/km2	500-1000 jiwa/km2	>1000 jiwa/km2		60%
		2	Kelompok Rentan	<20%	20-40%	>40%		40%
		Sosial Budaya (40%)						
		1	Kepadatan Penduduk	<500 jiwa/km2	500-1000 jiwa/km2	>1000 jiwa/km2		60%
		2	Kelompok Rentan	<20%	20-40%	>40%		40%
		Sosial Budaya (40%)						
		1	Kepadatan Penduduk	<500 jiwa/km2	500-1000 jiwa/km2	>1000 jiwa/km2		60%
		2	Kelompok Rentan	<20%	20-40%	>40%		40%

No	Bencana	Komponen/ Indikator	Kelas Indeks			Bonot Total	Skor
			Rendah	Sedang	Tinggi		
	an	Rentan					

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo

➤ **Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana :**

1. **Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana Banjir, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Gelombang Ekstrim dan Abrasi :**

- Lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka;
- Stadion Lagaligo Kelurahan Lagaligo;
- Lapangan Gaspa Kelurahan Boting;
- Lapangan Kodim Kelurahan Salobulo;
- Lapangan Islamic Centre Kelurahan Takkalala;
- Lapangan Rampoang Kelurahan Rampoang.

2. **Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana tanah longsor serta, kebakaran hutan dan lahan :**

- Lapangan Kelurahan Battang (Kecamatan Wara Barat), Lapangan Kelurahan Peta (Kecamatan Sendana), Lapangan Kelurahan Murante (Kecamatan Mungkajang).

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kota Palopo diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan. Posisi Kota Palopo untuk mendukung pengembangan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, dan pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan.

2.1.1.4.1. Rencana Struktur Ruang

➤ **Kota Palopo Dalam RTRW Nasional**

Rencana struktur ruang Kota Palopo diarahkan sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional, dengan Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Kota Palopo.

Rencana struktur ruang wilayah di Kota Palopo meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional dan sistem jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis nasional. Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah dan Lokal dalam RPJMD Sulsel sebagai berikut :

Tabel 2.11

Posisi Palopo sebagai Pusat Kegiatan

No	Kota	Pusat Kegiatan Nasional	Pusat Kegiatan Wilayah	Pusat Kegiatan Lokal
1	Palopo	Diarahkan sebagai Kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional (OKN) yang berorientasi pada kegiatan Pelayanan sentra pengolahan hasil pertanian (sentra pangan nasional) dan perkebunan	Agroindustri, Perkebunan dan Pertanian	-

Sumber Data : Diolah dari RTRWN 2009-2029

➤ Kota Palopo Dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi sebagai "salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia dengan pengembangan industri berbasis logistik; serta lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; dan pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, dan biji besi; serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari."

Pusat kegiatan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Pare - Pare, yang berfungsi mendukung peran Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, simpul transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi.

Arahan Sistem Jaringan Struktur Ruang Wilayah Nasional di Sulawesi Selatan terkait posisi Kota Palopo sebagai berikut :

Tabel 2.12
Posisi Palopo dalam Sistem Jaringan

No	Kota	Sistem Jaringan Transportasi Nasional	Sistem Jaringan Energi Nasional	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional	Sistem Jaringan Sumber Data Air
1	Palopo	Jaringan jalan arteri dan kolektor primer Jaringan jalan bebas hambatan dantar kota Jaringan jalur KA	SUTT	Jaringan teresterial	Wilayah Sungai (WS)-Lintas Provinsi Pompengan – Larona

Sumber Data : Diolah dari RT RW Propinsi Sulsel 2009-2029

Arahan Pola Ruang Wilayah Nasional di Sulawesi Selatan Palopo masuk di Kawasan Palopo DSK (pariwisata mendukung Tana Toraja, perkebunan, pertanian, dan perikanan). Kebijakan pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan

diarahkan dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya unggulan yang memiliki nilai strategis dengan menumbuhkembangkan agropolitan yang memadukan agroindustri, agrobisnis pada kluster sentra-sentra produksi komoditas pertanian unggulan. Kawasan pertanian dan perikanan yang diarahkan sebagai kawasan pengembangan budidaya komoditas unggulan berupa kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sedangkan pengembangan kawasan aglomerasi industri skala kecil dan menengah diarahkan pada Kota Palopo.

Kebijakan pengembangan kawasan perdagangan diarahkan tumbuh berkembang terpadu dengan pengembangan kawasan industri lokal di sentra-sentra produksi di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan perdagangan skala besar diarahkan pada Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah, sedangkan kawasan perdagangan skala sedang diarahkan pengembangannya pada pusat kegiatan lokal provinsi. Pembangunan kawasan perdagangan diarahkan perencanaannya terpadu dengan fasilitas pendukungnya seperti; kawasan perkantoran, perbankan, pertokoan, hotel dan restoran, terminal bis dan kawasan pergudangan.

Kebijakan pengembangan kawasan pariwisata, diarahkan pada kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata dengan mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Pengembangan kawasan pariwisata di Sulawesi Selatan meliputi pengembangan kawasan pariwisata alam (TWA) yang mengandalkan potensi dan kekayaan alam diarahkan pada TWA yang berada di kabupaten Luwu Timur, Gowa, Bone, Soppeng, Pangkep, Kepulauan Selayar, Maros, Takalar, Jeneponto, Wajo, Enrekang, Tana Roraja, Sinjai, dan Kota Palopo serta Kota Makassar, pengembangan pariwisata budaya dan sejarah (TWP) yang mengandalkan kekayaan alam, adat, sejarah dan budaya pada kawasan permukiman dan perdesaan tradisional maupun kawasan peninggalan kerajaan, serta situs peninggalan sejarah diarahkan pada kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Sinjai, Bone, Bulukumba, Gowa, Bulukumba serta Kota Makassar dan Kota Palopo.

Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan dengan menunjuk pada peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPARNAS) yang telah menetapkan Daerah Pariwisata Nasional (DPN) Makassar-Takabonerate dan sekitarnya kemudian DPN Toraja-Lorelindu dan sekitarnya yang telah meliputi 7 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yaitu: Maros (karst), Kota Makassar, Sengkang, Sinjai, Bulukumba, Selayar, dan **Palopo** dan 2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu: Toraja dan Takabonerate.

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Palopo

Tujuan Penataan Ruang Kota Palopo

“Mewujudkan Kota Palopo sebagai kota modern pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan umum terdepan di Indonesia yang berkearifan lokal dan religi, serta nyaman dan produktif untuk semua”.

Kebijakan Penataan Ruang Kota

- a. Penyebaran pusat – pusat pelayanan skala regional dan skala kota;
- b. Pengendalian intensitas fungsi primer kota;
- c. Pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan – lahan marginal di kawasan pesisir menjadi lahan produktif perkotaan;
- d. Pengembangan jaringan lahan baru yang mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota;

- e. Peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan;
- f. Peningkatan daya saing kota melalui program – program inovasi daerah yang berkearifan lokal;
- g. Peningkatan integrasi teknologi sarana dan prasarana pelayanan kota;
- h. Pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Kota Palopo

- a. Strategi penyebaran pusat – pusat pelayanan skala regional dan skala kota, meliputi :
 - 1. Mengendalikan intensitas pemanfaatan ruang secara horizontal di kawasan pusat kota;
 - 2. Mengarahkan investasi pembangunan baru pada sub – sub wilayah di luar kawasan pusat kota;
 - 3. Mengoptimalkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada komponen – komponen kota skala regional dan skala kota yang telah tersedia di sub = sub wilayah, terutama yang ada di bagian Utara dan Selatan kota;
 - 4. Mengembangkan jaringan jalan baru guna meningkatkan aksesibilitas pergerakan antar sub – sub wilayah dengan daerah – daerah luar kota, maupun antar sub – sub wilayah dengan kawasan pusat kota.
- b. Strategi pengendalian intensitas fungsi primer pusat kota, meliputi :
 - 1. Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan – kegiatan skala regional;
 - 2. Menerapkan standar pelayanan minimum secara ketat, terutama kegiatan pada koridor jalan utama dengan memperhatikan daya tampung milik jalan untuk parkir;
 - 3. Mengoptimalkan pengembangan komponen – komponen skala regional yang telah ada saat ini dengan kelengkapan pendukung seperti area parkir, ruang terbuka hijau dan lainnya.
- c. Strategi pengoptimalan pemanfaatan dan pengembangan lahan – lahan marginal di kawasan pesisir menjadi lahan produktif perkotaan, meliputi :
 - 1. Melakukan reklamasi kawasan pesisir Kota Palopo guna memenuhi kebutuhan pengembangan fisik kota ke arah Timur, serta mencegah terjadinya degradasi kawasan pesisir;
 - 2. Melakukan penataan kawasan permukiman kumuh nelayan di sepanjang pesisir Kota Palopo;
 - 3. Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada area sempadan pantai dan sungai terutama pada area sekitar muara sungai, guna mencegah terjadinya bencana alam banjir dan abrasi;
 - 4. Mengembangkan kegiatan – kegiatan jasa dan perdagangan skala nasional, regional dan kota pada lahan – lahan hasil reklamasi di pesisir Kota Palopo.
- d. Strategi pengembangan jalan baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota, meliputi :
 - 1. Melakukan pembangunan jalan – jalan baru guna mengurangi volume kendaraan pada jalan utama kota (jalan arteri primer) saat ini sehingga aksesibilitas pergerakan tetap tinggi, baik antar kota maupun dalam kota;
 - 2. Mengintegrasikan program nasional pengembangan jalan bebas hambatan penghubung antar kota di Sulawesi;

3. Mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) terutama jalan – jalan utama kota dari kegiatan yang mengganggu kelancaran fungsi jalan.
- e. Strategi pengembangan jaringan jalan baru guna mengefisienkan mobilitas penduduk serta angkutan barang antar kota dan dalam kota, meliputi :
 1. Melakukan pembangunan jalan – jalan baru guna mengurangi volume kendaraan pada jalan utama kota (jalan arteri primer) saat ini sehingga aksesibilitas pergerakan tetap tinggi, baik antar kota maupun dalam kota;
 2. Mengintegrasikan program nasional pengembangan jalan bebas hambatan penghubung antar kota di Sulawesi;
 3. Mengendalikan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) terutama jalan – jalan utama kota dari kegiatan yang mengganggu kelancaran fungsi jalan.
- f. Strategi peningkatan kualitas kawasan lindung guna mendukung upaya pembangunan kota yang berkelanjutan, meliputi :
 1. Mengendalikan pemanfaatan kawasan lindung dari kegiatan yang akan merusak ekosistem alami kawasan;
 2. Melakukan penghijauan/penanaman vegetasi pepohonan pada area kawasan lindung yang telah krisis akibat penebangan pohon secara liar;
 3. Tidak mengarahkan pengembangan kegiatan budidaya perkotaan ke dalam kawasan lindung yang berpotensi merubah bentang alam;
 4. Mempertahankan luasan kawasan lindung yang ada dan menjadikannya sebagai paru – paru kota;
 5. Mengoptimalkan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan potensi wisata alam yang ada didalamnya.
- g. Strategi peningkatan daya saing kota melalui program – program inovasi daerah yang berkearifan lokal, meliputi :
 1. Mengembangkan kegiatan yang bersifat inovasi yang berbeda dengan daerah lain, dengan mengaplikasikan teknologi dalam sistem kegiatannya;
 2. Mengembangkan program – program inovasi dengan memanfaatkan potensi unggulan komparatif wilayah dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta dalam kerangka membangun daya saing kota;
 3. Melakukan revitalisasi kawasan bersejarah sebagai perwujudan pengembangan kota pusaka dengan memanfaatkan teknologi dan memperhatikan ruang terbuka publik.
- h. Strategi peningkatan integrasi teknologi sarana dan prasarana pelayanan kota, meliputi :
 1. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang mengadopsi konsep kota modern guna mengoptimalkan kualitas pelayanannya;
 2. Mengembangkan utilitas kota yang mengintegrasikan teknologi termutakhir dan ramah lingkungan, guna mengefektifkan dan memperluas fungsi dan cakupan pelayanan masing – masing utilitas;
 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kota sebagai upaya merespon peningkatan kebutuhan masyarakat.
- i. Strategi pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi :
 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang ada saat ini;
 2. Mengembangkan zona penyangga (barrier) pada kawasan pertahanan dan keamanan yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dengan kawasan lainnya yang tidak bersinergis dengan kawasan pertahanan dan keamanan;

3. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kota yang berfungsi memperkuat fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Penataan Pola Ruang Daerah :

1. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

▪ Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.

▪ Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

- a. SPPK I berada di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua, dengan fungsi meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, pelayanan kesehatan, perumahan kepadatan rendah dan pendidikan menengah.
- b. SPPK II berada di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, dengan fungsi meliputi pelayanan kesehatan skala regional, perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan kepadatan sedang dan pendidikan menengah.
- c. SPPK III berada di Kelurahan Songka Kecamatan Wara, dengan fungsi meliputi perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan kepadatan sedang, pendidikan tinggi, simpul transportasi regional dan pelayanan kesehatan skala lokal.
- d. SPPK IV berada di Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana, dengan fungsi meliputi perumahan kepadatan rendah, perkantoran, pelayanan kesehatan skala lokal, pusat budaya dan olahraga.
- e. SPPK V berada di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat, dengan fungsi meliputi perumahan kepadatan rendah, perkantoran dan pelayanan kesehatan skala lokal.

▪ Pusat Lingkungan

PL meliputi pelayanan perkantoran, pemerintahan, perdagangan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial budaya, serta perumahan yang tersebar di setiap kelurahan.

2. Rencana Sistem Prasarana Wilayah

Rencana Sistem Jaringan Utama

Jaringan Transportasi Darat

Rencana Sistem Jaringan Jalan

Rencana sistem jaringan jalan terdiri dari Jaringan jalan arteri primer, Jaringan jalan kolektor primer; Jaringan lokal primer yang terdiri Ruas jalan penghubung Kelurahan Sampoddo – Kelurahan Jaya melalui Kecamatan Sendana – Kecamatan Mungkajang – Kecamatan Wara Barat – Kecamatan Telluwanua (jalan lingkaran barat luar), Jaringan jalan lingkungan primer terdiri dari Pengembangan jaringan jalan lingkaran barat dalam (ruas Buntu Pareppa – Pepabri – Pamenta – Lassik) sepanjang $\pm 9,0$ km, Jaringan jalan bebas hambatan yang terdiri dari Ruas Palopo – Tindantana dan ruas Palopo – Pare-Pare.

Rencana pembangunan dan pengembangan terminal di Kota Palopo :

- a. Terminal type C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara;
- b. Pengembangan terminal type A di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan;
- c. Pengembangan terminal type C Telluwanua di Kecamatan Telluwanua.

Rencana Sistem Jaringan Jalur Kereta Api

Rencana jaringan jalur kereta api melintasi wilayah Kecamatan Telluwanua – Kecamatan Bara – Kecamatan Wara Utara – Kecamatan Wara Timur –

Kecamatan Wara Selatan. Jalur ini membangun konektivitas antara kawasan peruntukan industri Maroangin – Terminal type A Songka – Bandara Lagaligo – Pare-Pare – Makassar. (jalur kereta antar kota utama Makassar – Pare-Pare – Palopo – Palu – Manado). Kemudian menyediakan fasilitas Park and Ride yang berdekatan dengan Terminal type A Songka, sebagai tempat pergantian moda angkutan umum untuk selanjutnya menggunakan kereta api. Jalur ini sebagian berada di atas perairan laut, berhimpit dengan jalur jalan bebas hambatan.

Jaringan Transportasi Laut

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Tatanan kepelabuhanan adalah Pelabuhan Nasional Pengumpul Tanjung Ringgit terdapat di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur.

1. Alur pelayaran terdiri atas :
 - a. Alur pelayaran barang terdiri atas :
 - ❖ Palopo – Surabaya – Jakarta.
 - ❖ Palopo – Loktuan – Gresik – Tarjun – Batulicin – Bontang.
 - ❖ Palopo – Makassar – Belawan – Bitung.
 - ❖ Palopo – Saumlaki – Malinau – Tanjung Redep – Tanjung Jere.
 - ❖ Palopo – Lemito – Gorontalo.
 - ❖ Palopo – Irak – Swiss – USA.
 - b. Alur pelayaran penumpang dengan rute terdiri atas :
 - ❖ Palopo – Kolaka Utara – Kendari.
 - ❖ Palopo – Siwa – Kolaka Utara – Kendari.

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Jaringan Energi/Listrik

Rencana Sistem Jaringan Energi/Listrik

Pembangkit tenaga listrik terdiri atas :

- a. Sumber energi listrik utama yang masuk dalam sistem interkoneksi Sulawesi yang melayani wilayah Kota Palopo yang terbesar adalah berasal dari PLTA Poso (PT. Poso Energy) berkapasitas 2 x 65 MW melalui jaringan SUTET 275 KV, kemudian didistribusikan melalui Gardu Induk Latuppa masuk ke jaringan tegangan menengah yang dikelola oleh PT. PLN hingga ke konsumen.
- b. Sistem jaringan interkoneksi regional Sulawesi pada jaringan tegangan menengah 20 KV.

Jaringan Telekomunikasi

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

1. Jaringan telepon kabel kini menggunakan kabel serat optik terintegrasi 3 fungsi : Telepon, Internet dan TV.
2. Jaringan nirkabel meliputi :
 - a. Penyediaan dan pemanfaatan menara Base Transceiver Station yang digunakan secara bersama menjangkau seluruh wilayah kota;
 - b. Penyebaran jaringan internet hotspot pada pusat – pusat kegiatan dan kawasan strategis;
 - c. Pengembangan Microcell Pole di beberapa spot kawasan guna menambah kapasitas jaringan 4G LTE, dengan cakupan per Unit radius ± 2 km.

Jaringan Sumber Daya Air

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi :

- a. DAS Purangi dengan luas cakupan area 1.037 hektar;
- b. DAS Bua dengan luas cakupan area 1.168, 04 hektar;
- c. DAS Songkamati dengan luas cakupan area 136,20 hektar;
- d. DAS Pacangkuda dengan luas cakupan area 6.412,80 hektar;
- e. DAS Boting dengan luas cakupan area 3.087,25 hektar;
- f. DAS Salubattang dengan luas cakupan area 13.760,59 hektar.

Daerah Irigasi (DI) terdiri atas :

- a. Daerah Irigasi wewenang/tanggung jawab Provinsi Sulawesi Selatan, yakni :
 - DI Padang Alipan
 - b. Daerah Irigasi wewenang/tanggung jawab Kota Palopo, yakni :
 - DI Padang Lambe, DI Lappo, DI Kaluku, DI Sumarambu, DI To'Punti, DI Tomarundung 1, DI Tomarundung 2, DI Murante, DI Mawa, DI Lumandi, DI Songka, DI Purangi, DI Sendana, DI Batu Papan, DI Batu Lotong
- Cekungan air tanah terletak di Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua dengan luas area 2.634,71 hektar.

Jaringan Penyediaan Air Minum Kota

Jaringan air baku untuk air minum terdiri atas :

Sungai Latuppa di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang; Sungai Babak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang; Sungai Mangkaluku di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang; Sungai Bambalu di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat; Rencana pengembangan DAM Latuppa.

Jaringan perpipaan

- a. Unit Air Baku yang bersumber dari :
 - Sungai Mangkaluku, dengan potensi debit air baku $\pm$ 4.800 liter per detik;
 - Sungai Latuppa, dengan potensi debit air baku $\pm$ 6.600 liter per detik;
 - Sungai Mangandang, dengan potensi debit air baku $\pm$ 60 liter per detik;
 - Sungai Buludatu, dengan potensi debit air baku $\pm$ 5 liter per detik;
 - Sungai Bambalu, dengan potensi debit air baku $\pm$ 8.200 liter per detik.
 - b. Unit Produksi Air Minum terdiri atas :
 - IPAM I H. Abd Madjid di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang berkapasitas sebesar 350 liter/detik;
 - IPAM II Magandang di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara berkapasitas sebesar 20 liter/detik;
 - IPAM III Battang di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat berkapasitas 110 liter/detik;
 - IPAM IV Mungkajang di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang berkapasitas 20 liter/detik;
 - IPAM V Batupapan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Telluwanua berkapasitas 50 liter/detik.
- Rencana pengembangan :
1. Penambahan kapasitas masing – masing 50 liter/detik untuk IPAM Batupapan, IPAM Abd. Madjid dan IPAM Battang;
 2. Pengembangan pipa transmisi Batupapan sepanjang 34,3 km di Kelurahan Padang Lambe dan Kelurahan Battang;
 3. Pengembangan pipa transmisi Latuppa sepanjang 3 km di Kelurahan Murante dan Kelurahan Latuppa;

4. Pengembangan pipa distribusi sepanjang 14 km di Kelurahan Benteng, Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Padang Lambe, Kelurahan Jaya dan Kelurahan Maroangin;
5. Pengembangan pipa tersier sepanjang 17,5 km di Kelurahan Batu Walenrang, Kelurahan Mancani, Kelurahan Jaya, Kelurahan Maroangin dan Kelurahan Padang Lambe;
6. Pembangunan DAM jaringan air baku air minum Latuppa di Kelurahan Latuppa.

Jaringan bukan perpipaan

Jaringan bukan perpipaan meliputi sungai, sumur dangkal, sumur pompa tangan pada spot = spot permukiman yang berada pada Kelurahan Salubattang, Kelurahan Sumarambu, Kelurahan Peta dan Kelurahan Kambo.

Pengelolaan air limbah Kota

Sistem air limbah domestik :

- a. Sistem setempat (*on site*) : setiap bangunan gedung dilengkapi tangka septic;
- b. IPAL Komunal skala lingkungan pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan permukiman kumuh;
- c. Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua.

Sistem pengolahan air limbah industri :

Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota di Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua juga merupakan IPAL kawasan peruntukan industri (insentif infrastruktur).

Persampahan Kota

Rencana Sistem Jaringan Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) :

Dikembangkan di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua berhimpit dengan TPA dan IPLT Mancani.

Lokasi TPS :

TPS sampah organik dan TPS sampah an organik direncanakan pada unit lingkungan permukiman dan kawasan Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) dan Pusat Lingkungan (PL).

Lokasi TPST 3R :

- Eksisting 2 unit di Kelurahan Lagaligo.
- Direncanakan dikembangkan di setiap kelurahan.

Lokasi TPA :

Di Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua seluas 10 Ha dengan menggunakan metode Sanitary Landfill.

Dainase Kota

Rencana Sistem Drainase

Saluran drainase primer :

- a. Sungai Latuppa yang melintasi wilayah Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Timur;
- b. Sungai Boting yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara, dan Kecamatan Wara Utara;
- c. Sungai Takkalala yang melintasi Kecamatan Wara Selatan;

- d. Sungai Amassangan yang melintasi Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Timur;
- e. Sungai Pikun yang melintasi Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara;
- f. Sungai Salu Battang yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua;
- g. Sungai Batu yang melintasi wilayah Kecamatan Telluwanua; dan
- h. Sungai Andoli yang melintasi wilayah Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Bara.

Saluran drainase sekunder :

Melintasi wilayah Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur.

Saluran drainase tersier :

Di saluran-saluran berskala pelayanan lokal yang menyebar di seluruh wilayah kota.

Jaringan Pejalan Kaki

Rencana Sistem Jaringan Jalan Pejalan Kaki

1. Jaringan jalan pejalan kaki, termasuk Difabel :

- a) Ruas jalan arteri primer sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Djemma-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Sultan Hasanuddin-Jalan DR. Sam Ratulangi dari batas selatan kota hingga batas utara kota.
- b) Ruas jalan sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani-Jalan Andi Ahmad (eks Jalan Veteran);
- c) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Patang-Jalan Imam Bonjol-Jalan Imam Bonjol II;
- d) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan KH. Ahmad Razak –Jalan Tandipau - Jalan M. Kasim;
- e) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Opu Tosappaile-Jalan Samiun;
- f) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Andi Kambo-Jalan A. Tendriaeng;
- g) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan K.H. Ahmad Dahlan-Jalan Rambutan - Jalan Mangga - Jalan Durian;
- h) Ruas jalan lokal sepanjang Jalan Lagaligo dan Jalan Latamacelling;
- i) Ruas Jalan Pongsimpin hingga ke kawasan wisata alam Latuppa;
- j) Ruas Jalan A. Masjaya – Jalan Andi Sulthani – Jalan Ambe Nona;
- k) Ruas Jalan Sungai Rongkong;
- l) Jalur difabel diletakkan di semua jaringan pejalan kaki.
- m) Dari *park and ride* ke stasiun kereta api dan terminal tipe A Songka.

2. Penataan jalur pejalan kaki

- a. Pengembangan Zebra Cross pada pusat-pusat kegiatan di sekitar koridor jalan arteri primer.
- b. Penataan kembali jalur pejalan kaki pada kedua sisi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Andi Djemma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Balai Kota, dan Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Veteran;
- c. Pembangunan Jembatan Penyeberangan pada kawasan perkantoran, kawasan perdagangan, dan kawasan Jasa di sekitar koridor Jalan Andi Djemma dan Jalan Dr. Sam Ratulangi;
- d. Mengintegrasikan jaringan pejalan kaki di kawasan pusat kota dengan fasilitas-fasilitas pemerintahan, jasa, dan pendidikan;

- e. Mengintegrasikan semua jaringan pejalan kaki dengan pengguna difabel, berupa kelengkapan ubin sebagai pengarah dan peringatan.

Jalur dan tempat evakuasi bencana

Jalur evakuasi bencana tanah longsor :

- a. Ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- b. Ruas Jalan Poros Latuppa-Kantor Kecamatan Mungkajang;
- c. Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Kantor Kecamatan Wara Selatan.

Jalur evakuasi bencana banjir :

- a. Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;
- b. Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa;
- c. Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo;
- d. Ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim;
- e. Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

Jalur evakuasi kebakaran gedung dan permukiman :

- a. Ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;
- b. Ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa;
- c. Ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo;
- d. Ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Gedung Saodenrae Convention Centre;
- e. Ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre;
- f. Ruas Jalan Andi Tadda – Jalan Jenderal Ahmad Yani – Gedung Saodenrae Convention Centre;
- g. Ruas jalan Sungai Rongkong – Lapangan Kodim.

Jalur evakuasi kebakaran hutan dan lahan :

- a. Ruas Jalan Poros Toraja Utara-Palopo-Lapangan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- b. Ruas Jalan Poros Latuppa-Lapangan Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang; dan
- c. Ruas Jalan Poros Purangi-Jalan Jenderal Sudirman- Jalan Pantai II-Lapangan Kelurahan Purangi Kecamatan Wara Selatan.
- d. Ruas Jalan Poros Kambo – Lapangan Kelurahan Kambo Kecamatan Wara Barat.

Jalur evakuasi gelombang ekstrim dan abrasi :

- a. Ruas Jalan A. Tendriajeng – Jalan Andi Tadda – Jalan Jenderal Ahmad Yani - Lapangan Gaspa;
- b. Ruas Jalan Yos Sudarso-Jalan Landau-Jalan Sawerigading-Jalan Diponegoro – Lapangan Gaspa;
- c. Ruas Jalan Malaja Baru-Jalan Malaja-Jalan Andi Djemma-Lapangan Pancasila;
- d. Ruas Jalan Pantai I-Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana :**Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana Banjir, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Gelombang Ekstrim dan Abrasi :**

- a. Lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka;
- b. Stadion Lagaligo Kelurahan Lagaligo;
- c. Lapangan Gaspa Kelurahan Boting;
- d. Lapangan Kodim Kelurahan Salobulo;
- e. Lapangan Islamic Centre Kelurahan Takkalala;
- f. Lapangan Rampoang Kelurahan Rampoang.

Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana tanah longsor serta, kebakaran hutan dan lahan :

- a. Lapangan Kelurahan Battang (Kecamatan Wara Barat), Lapangan Kelurahan Peta (Kecamatan Sendana), Lapangan Kelurahan Murante (Kecamatan Mungkajang).

Sempadan pantai :

1. Batas sempadan pantai pada wilayah Kelurahan Sampoddo, Kelurahan Songka, Kelurahan Takkalala, Kelurahan Binturu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Salotellue, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Pontap, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Salobulo, dan Kelurahan Balandai berada pada bangunan terluar di atas lahan hasil reklamasi yang berfungsi sebagai bangunan peredam gelombang ekstrim dan abrasi.
2. Batas sempadan pantai pada wilayah Kelurahan Temmalebba berada pada bangunan terluar berupa tanggul yang berfungsi meredam gelombang ekstrim dan abrasi.
3. Batas sempadan pantai pada wilayah Kelurahan Salubattang meliputi daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Prasarana dan Sarana Perkotaan Lainnya**Jalur sepeda :**

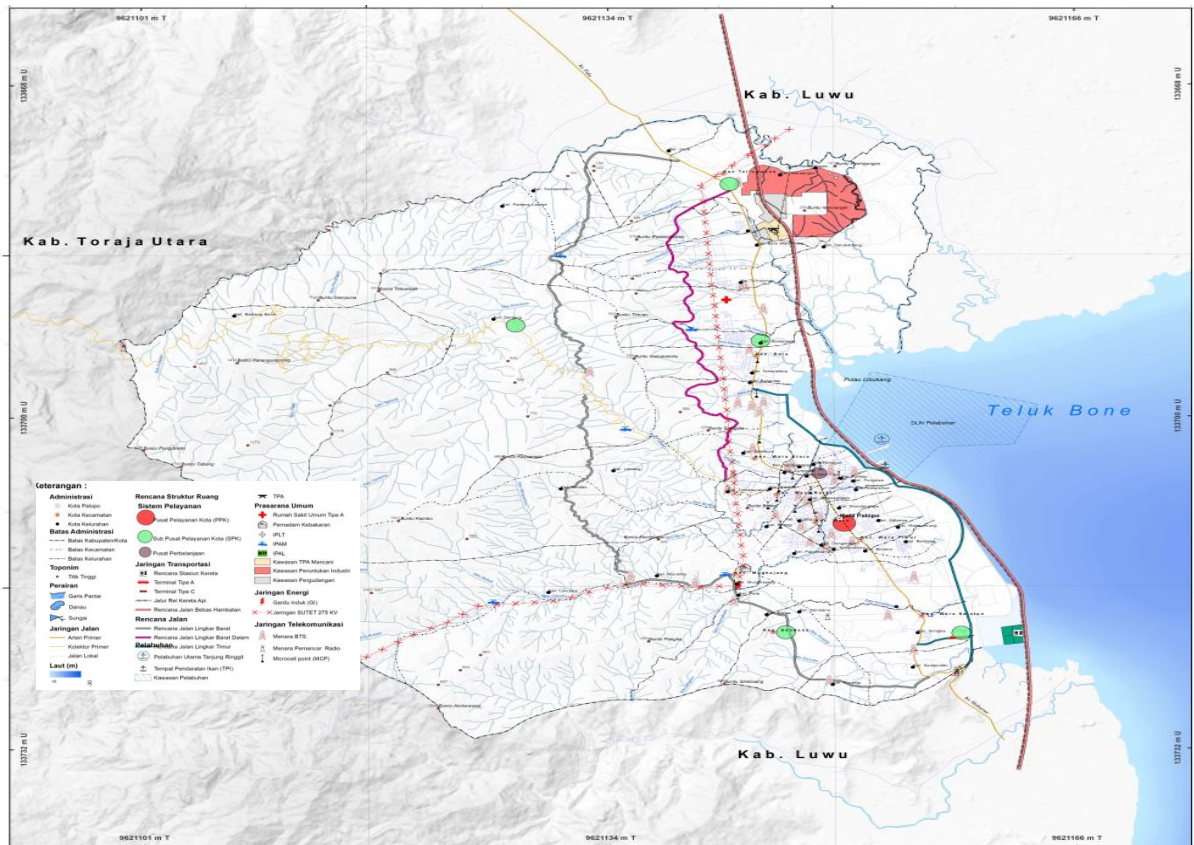
- a. Ruas Jalan Balai Kota - Jalan Opu Tosappaile -Jalan Pongsimpin - Kambo - Jalan Andi Ahmad – Lapangan Gaspa;
- b. Ruas Jalan Andi Baso Rahim - Jalan Andi Kambo - Jalan Andi Tendriajeng - Jalan Yos Sudarso - Jalan Sungai Rongkong - Jalan Imam Bonjol - Jalan Patang - Jalan Tandipau - Jalan Kelapa - Jalan Latamacceling - Lapangan Pancasila;
- c. Rencana pengembangan ruas jalan akses pelabuhan – TPI/PPI – Terminal Songka – Stasiun kereta/park and ride di Songka

Kelengkapan jalur sepeda :

- Menyediakan rambu dan marka jalan di jalur sepeda;
- Menyediakan lahan parkir khusus sepeda pada gedung perkantoran, gedung komersial, terminal, gedung perdagangan, gedung pendidikan, dan park and ride kereta.
- Melengkapi jalur sepeda dengan penerangan jalan umum untuk meningkatkan keamanan pengguna sepeda di malam hari;

- Mengintegrasikan jalur sepeda dengan moda angkutan umum dengan menyiapkan perangkat pengangkut sepeda di angkutan umum berupa rak angkut di bus.

Gambar 2.9
Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palopo



▪ Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Kawasan Perlindungan Setempat Sungai Tidak Bertanggul

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam wilayah Kota Palopo :

- a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
- c. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Sungai Bertanggul

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam wilayah Kota Palopo ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Kawasan Sempadan SUTET

Kawasan Sempadan SUTET 275 KV adalah 7,0 meter dari ayunan konduktor, yang melintasi Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Mungkajang, dan Kecamatan Sendana.

Kawasan Sempadan Rel Kereta Api

Kawasan sempadan Rel Kereta Api adalah batas ruang milik jalur kereta api yang merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling rendah 6 (enam) meter.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- RTH Publik tersebar di wilayah Kota Palopo direncanakan seluas 5.269,55 hektar atau sebesar 20,41%.
- RTH Privat seluas 2.601,7 hektar atau sebesar 10,08%.

Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya, yaitu cagar budaya provinsi berupa Masjid Djami Tua di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara.

Peninggalan Cagar Budaya berupa Bangunan Bersejarah terdiri atas:

- a. Istana Datu Luwu di Kecamatan Wara;
- b. Kantor Pos dan Giro di Kecamatan Wara Utara;
- c. Rumah Jabatan Wakil Walikota di Kecamatan Wara;
- d. Rumah Jabatan Komandan Kodim di Kecamatan Wara;
- e. Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Wara Utara;
- f. Kantor KODIM di Kecamatan Wara;
- g. Kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di Kecamatan Wara;
- h. Kantor Bea Cukai Palopo di Kecamatan Wara Timur;
- i. RSU Sawerigading Kecamatan Wara;
- j. RSU Tentara Kecamatan Wara;
- k. Makam Raja-Raja Luwu Lokkoe di Kecamatan Wara Utara;
- l. Makam Belanda di Kecamatan Wara Utara;
- m. Kantor Veteran RI di Kecamatan Wara;
- n. Makam TallettuE di Kecamatan Wara Timur;
- o. Makam JarraE di Kecamatan Wara Timur;
- p. Gereja Pniel di Kecamatan Wara;
- q. Kampus STISIPOL di Kecamatan Wara Utara;
- r. Mess Belanda di Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat;
- s. Benteng Portugis di Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur.
- t. Kawasan Lalebbata di Kecamatan Wara

Kawasan Lindung Lainnya**Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil**

- Pulau Libukang di Kecamatan Bara.

Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir

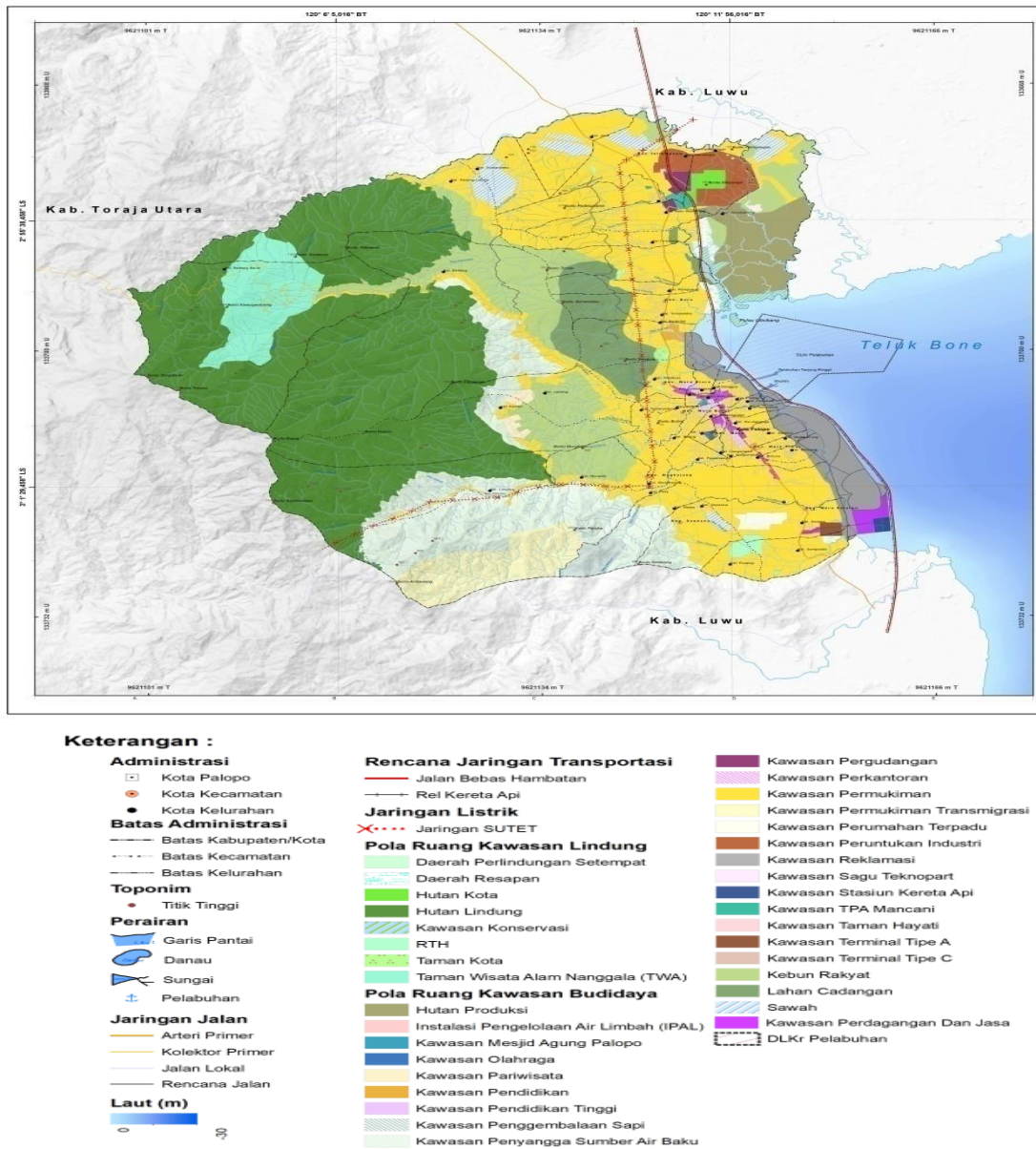
- Kawasan pantai berhutan bakau di wilayah Kecamatan Telluwanua, dan Kecamatan Bara.

Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- Di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat.

Gambar 2.10

Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palopo



- Rencana pemanfaatan untuk perumahan dan permukiman menyebar ke bagian selatan dan bagian utara, mengakomodir kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangannya.

2.1.1.4.2. KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Di Wilayah Kota Palopo

1. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, merupakan kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Bara, dan sebagian wilayah Kecamatan Telluwanua.
2. KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi merupakan kawasan penambangan minyak dan gas bumi Blok Bone Utara..
3. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mungkajang, dan sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat;
- b. Kawasan Taman Hutan Raya Nanggala ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Wara Barat.

2.1.1.4.3. KAWASAN STRATEGIS KOTA (KSK)

KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomiterdiri atas :

1. Kawasan Reklamasi Salemo seluas $\pm$ 700 Ha di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Bara;
2. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha wilayah Kelurahan Mancani;
3. Kawasan Perumahan Terpadu seluas $\pm$ 100,0 Ha di wilayah Kelurahan Purangi;
4. Kawasan Pusat Kota Palopo meliputi Kelurahan Tompotikka dan Kelurahan Salekoe;
5. Kawasan Pusat Niaga Palopo di wilayah Kelurahan Dangerakko;
6. Kawasan Pusat Perbelanjaan di wilayah Kelurahan Salobulo;
7. Kawasan Peruntukan Industri seluas $\pm$ 360 Ha di wilayah Kelurahan Maroangin;
8. Kawasan Terminal tipe A seluas $\pm$ 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Songka;
9. Kawasan Koridor Jalan Andi Djemma;
10. Kawasan Koridor Jalan Andi Kambo;
11. Kawasan Koridor Jalan DR. Sam Ratulangi;
12. Kawasan Pelabuhan Tanjung Ringgit di wilayah Kelurahan Pontap;
13. Kawasan Hiburan Labombo di wilayah Kelurahan Salekoe;
14. Kawasan Transmigrasi seluas $\pm$ 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta;
15. Kawasan Resor Kambo seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Kambo.

KSK dari sudut kepentingan Sosial Budaya terdiri atas :

1. Kawasan Bersejarah Istana Datu Luwu dan Mesjid Djami Tua seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Ammassangan;
2. Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo seluas 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Boting;
3. Kawasan Menara Payung Luwu terintegrasi dengan Pusat Kuliner Tradisional seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Batupasi;
4. Kawasan Islamic Centre Palopo seluas $\pm$ 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Takkalala;
5. Kawasan Komunitas Adat Peta, Latuppa, Mungkajang dan Battang;
6. Kawasan Desa Wisata Peta, Murante, dan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
7. Kawasan Olah Raga Terpadu (kawasan stadion olah raga Lagaligo) seluas $\pm$ 2,0 Ha di wilayah Kelurahan Lagaligo;
8. Kawasan Sirkuit Road Race seluas $\pm$ 8,0 Ha di wilayah Kelurahan Rampoang.

KSK dari sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung yang berada di wilayah Kecamatan Mungkajang, dan di wilayah Kecamatan Wara Barat dengan luas keseluruhan 8.666 Ha;
2. Kawasan DAS Pacangkuda (sumber utama air baku air minum kota) seluas $\pm$ 6.646,66 di wilayah Kelurahan Latuppa dan Kelurahan Murante;
3. Kawasan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) seluas 5,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.

KSK dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi

- Kawasan Sagu Teknopark Palopo seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Salubattang.

2.1.1.4.4. KAWASAN PERUNTUKAN PERKANTORAN

❖ Kawasan Perkantoran Pemerintah Skala Kota :

Tersebar di beberapa sub wilayah sesuai dengan kondisi eksisting, yakni : Kelurahan Tompotikka, Kelurahan Amassangan, Kelurahan Lagaligo, dan Kelurahan Boting (Kecamatan Wara), Kelurahan Salekoe, dan Kelurahan Pontap (Kecamatan Wara Timur), Kelurahan To'bulung (Kecamatan Bara), Kelurahan Tomarunding (Kecamatan Wara Barat), Kelurahan Batupasi (Kecamatan Wara Utara), dan Kelurahan Mungkajang (Kecamatan Mungkajang).

❖ **Kawasan Perkantoran Pemerintah skala kecamatan dan kelurahan (skala lokal)**

Tersebar di masing sub-sub wilayah kota di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan, yang akan lebih mengefisienkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

❖ **Kawasan peruntukan perkantoran swasta, direncanakan pada :**

- a. Kawasan pusat kota;
- b. Koridor jalan-jalan utama kota, yakni koridor jalan arteri primer, jalan kolektor primer, serta jalan lokal primer yang memiliki akses yang tinggi dengan kawasan lainnya;
- c. Kawasan reklamasi Salemo.

2.1.1.4.5. KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN

❖ **Kawasan Peruntukan Industri:**

Di wilayah Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua direncanakan seluas 360Ha.

❖ **Kawasan industri kecil dan usaha mikro**

Tidak menimbulkan limbah berbahaya, peruntukannya tersebar di sub-sub wilayah KotaPalopo.

❖ **Kawasan peruntukan pergudangan**

- a. Lokasinya berdekatan atau teraglomerasi dengan kawasan peruntukan IndustriKelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua seluas 25,0 Ha.
- b. Kawasan Pergudangan lainnya (eksisting) berada di Kelurahan Batu Walenrang yang direncanakan seluas 25, 0 Ha.

2.1.1.4.6. KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA

❖ **Kawasan pariwisata budaya meliputi:**

- a. Istana Kedatuan Luwu (Kawasan Lalebata) terletak di Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara;
- b. Rumah adat Peta dan tempat tarian adat di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
- c. Rumah adat Mungkajang dan Latuppa dan tempat tarian adat di Kecamatan Mungkajang;
- d. Maccara Tasi (Pesta Laut) di Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara;
- e. Tempat pendaratan Belanda di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
- f. Tempat pementasan kesenian di Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara.

❖ **Kawasan pariwisata alam meliputi:**

- a. Kawasan Agrowisata Latuppa di Kelurahan Latuppa, Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang dan Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.
- b. Kawasan Air Terjun Babak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
- c. Kawasan Air Terjun Siguntu di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
- d. Kawasan Air Terjun Rantenase di Kelurahan Peta Kecamatan Sendana;
- e. Kawasan Kali Jodoh di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang;
- f. Pemandangan alam Kambo di Kelurahan Kambo Kecamatan Mungkajang;

- g. Kawasan Air Terjun Mawa di Kelurahan Mawa Kecamatan Sendana;
- h. Puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo Kecamatan Wara Selatan;
- i. Kawasan wisata Pantai Labombo di Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur;
- j. Kawasan wisata Permandian alam Batupapan, Batiok dan Lumarrang (kurungan batu) di Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
- k. Gua Kalo Dewata di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- l. Kawasan wisata Pantai Songka di Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan;
- m. Kawasan wisata Permandian alam Batutongkon di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat;
- n. Kawasan tempat pelelangan ikan (TPI) di Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur;
- o. Kawasan wisata Pulau Libukang di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara;
- p. Kawasan wisata Lembah Kattun di Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat.

Rencana Pengembangan Kawasan Pariwisata Buatan:

- a. Kawasan wisata seni kreatif di pedestrian jalan Jenderal Ahmad Yani di Kelurahan Amassangan;
- b. Kawasan wisata seni kreatif di koridor lapangan Pancasila Kelurahan Tompotikka;
- c. Rencana pengembangan kawasan Resor Kambo di Kelurahan Kambo;
- d. Rencana pengembangan kawasan wisata kuliner di Kawasan Menara Payung Luwu di Kelurahan Batupasi.

2.1.1.4.7. KAWASAN PERUNTUKAN RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)

❖ **Plaza**

Pelataran tempat berkumpulnya massa (*assembly point*) dengan berbagai jenis kegiatan seperti sosialisasi, duduk-duduk, aktivitas massa, dan lain-lain.

- Rencana pengembangannya berada di kawasan Menara Payung (*Landmark* Kota Palopo), serta di kawasan reklamasi Pantai Salemo berada di Kelurahan Sabbamparu (Kecamatan Wara Utara), Kelurahan Ponjale (Kecamatan Wara Timur), dan di Kelurahan Salekoe (Kecamatan Wara), dan Kelurahan Takkalala (Kecamatan Wara Selatan).

❖ **Pelataran Parkir**

Pelataran parkir merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama meletakkan kendaraan bermotor seperti mobil atau motor; serta kendaraan lainnya seperti sepeda. Lahan parkir dikenal sebagai salah satu bentuk RTNH yang memiliki fungsi ekonomis.

- Rencana pengembangan lahan parkir umum di Kota Palopo direncanakan terintegrasi dengan Plaza, juga pada terminal tipe A Songka dan terminal C Dangerakko, fasilitas *park and ride* stasiun kereta api, serta di masing-masing kawasan pariwisata di beberapa sub wilayah.

❖ **Lapangan Olahraga**

Lapangan olah raga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya kegiatan olah raga..

- Berupa lapangan olah raga bulutangkis dan basket. Pengembangannya di beberapasub wilayah, termasuk di lahan kawasan reklamasi Salemo nantinya.

❖ **Tempat Bermain dan Rekreasi**

Tempat bermain dan rekreasi merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan berbagai kelengkapan tertentu untuk mewadahi kegiatan utama bermain atau rekreasi masyarakat.

- Direncanakan berada di kawasan reklamasi Salemo, di Kelurahan Salekoe (Kecamatan Wara), Kelurahan Songka (Kecamatan Wara Timur), dan di wilayah Kelurahan Sampoddo berupa Anjungan Cerdas.

❖ **Koridor**

Koridor merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai jalur dengan fungsi utama sebagai sarana aksesibilitas pejalan kaki yang bukan merupakan trotoar (jalur pejalan kaki yang berada di sisi jalan). Koridor sebagai ruang terbuka non hijau dibentuk diantara dua bangunan atau gedung, dimana dimanfaatkan sebagai ruang sirkulasi atau aktivitas tertentu.

- Rencana pengembangan Koridor berada pada kawasan Reklamasi Salemo.
- Diprioritaskan pada kawasan Perdagangan dan Jasa sebagai pembatas antar blok-blok bangunan sehingga pengunjung lebih leluasa, nyaman, dan aman dalam beraktivitas berkeliling.
- Sementara untuk Koridor di kawasan pariwisata digunakan sebagai lintasan *jogging*, dan kegiatan sejenis lainnya.

❖ **Ruang Terbuka Biru (RTB)**

RTB tidak hanya sebagai penyimpan air, ruang terbuka biru (seperti kanal, danau, sungai, dll) juga memiliki fungsi sebagai tempat wisata, sarana transportasi air, dan fungsi lainnya.

- Badan air : Sungai Latuppa, Sungai Boting, Sungai Takkalala, Sungai Amassangan, Sungai Pikun, Sungai Salubatang, Sungai Batu, Sungai Songka Mati, Sungai Ponjalae, dan Sungai Andoli.
- Kanal Labombo di Kelurahan Salekoe dan Kanal Takkalala di Kelurahan Takkalala dalam kawasan reklamasi Salemo.

2.1.1.4.8. KAWASAN PERUNTUKAN RUANG KEGIATAN SEKTOR INFORMAL

Rencana pengembangan peruntukan ruang kegiatan sektor informal, meliputi :

1. Kawasan pelataran Lagota Pusat Niaga Palopo di Kelurahan Lagaligo;
2. Kawasan sekitar lapangan Kodim Kelurahan Salobulo;
3. Koridor jalan akses Pelabuhan – Lemo-Lemo di Kelurahan Sabbamparu dan Kelurahan Salobulo.
4. Koridor Jalan Guttu Patalo dan Jalan Wecudai sekitar stadion Lagaligo di Kelurahan Lagaligo
5. Kawasan terminal Tipe A Songka di Kelurahan Songka;
6. Kawasan terminal Tipe C Dangerakko di Kelurahan Dangerakko;
7. Kawasan stasiun kereta api di Kelurahan Songka;
8. Kawasan park and ride kereta api di Kelurahan Songka;
9. Kawasan reklamasi Salemo;
10. Kawasan puncak Sampoddo di Kelurahan Sampoddo;
11. Kawasan pelabuhan Tanjung Ringgit di Kelurahan Pontap;
12. Koridor jalan poros Latuppa di Kelurahan Latuppa;
13. Koridor jalan poros terminal tipe A Songka di Kelurahan Songka;
14. Koridor jalan poros Battang di Kelurahan Battang dan Kelurahan Battang Barat.

2.1.1.4.9. KAWASAN PERUNTUKAN PELAYANAN PUSAT KESEHATAN

Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan:

- a. Rumah Sakit Umum Sawerigading kelas/tipe B di Kecamatan Bara;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C dr. Palammai di Kecamatan Wara

- c. Rumah Sakit Umum At Medika di Kelurahan Tompotikka;
- d. Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Madyang di Kelurahan Salekoe;
- e. Rumah Sakit Tentara di Kelurahan Amassangan;
- f. Rumah Sakit Bintang Laut di Kelurahan Pattene;
- g. Rumah Sakit Mega Buana d Kelurahan Binturu;
- h. Rumah Sakit Mujaisyah di Kelurahan Balandai;
- i. Rencana pengembangan Rumah Sakit Jiwa Kalang-Kalang di Kelurahan To'bulung;
- j. Rencana pengembangan kawasan peruntukan sarana kesehatan skala regional dan skala kota di kawasan Reklamasi Salemo;
- k. Rencana pengembangan kawasan peruntukan sarana kesehatan skala regional dan skala kota di wilayah Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, dan Kecamatan Wara Utara.
- l. Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan skala pelayanan lingkungan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar merata di setiap wilayah kecamatan, agar lebih mudah diakses oleh warga setempat.

2.1.1.4.10. KAWASAN PERUNTUKAN PELAYANAN PERIBADATAN

- a. Kawasan Mesjid Agung Luwu Palopo di Kelurahan Boting Kecamatan Wara.
- b. Kawasan Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan.
- c. Sementara untuk pengembangan kawasan peruntukan peribadatan lainnya yang berskala lingkungan akan disesuaikan dengan kebutuhan umat masing-masing.

2.1.1.4.11. KAWASAN PERUNTUKAN PERTEMUAN, PAMERAN DAN SOSIAL BUDAYA

Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, insentif, konferensi, pameran, dan sosial budaya meliputi :

- a. Kompleks Islamic Centre di Kelurahan Takkalala Kecamatan Wara Selatan;
- b. SaodenraE Convention Centre di Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara;
- c. Rencana peruntukan perhotelan kelas berbintang di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Mungkajang;
- d. Pengembangan perhotelan kelas berbintang di kawasan reklamasi Salemo;
- e. Pengembangan Plasa Menara Payung (landmark Kota Palopo) di Kelurahan Batupasi;
- f. Gedung Kesenian di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- g. Gedung Pemuda di Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan;
- h. Gedung Merdeka Convention Hall di Kelurahan SalekoE Kecamatan Wara Timur; dan
- i. Gedung Rasdiana Convention Hall di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- j. Kawasan Perkemahan di Kelurahan Padang Lambe.

2.1.1.4.12. KAWASAN PERUNTUKAN OLAHRAGA

Kawasan Peruntukan Olah Raga :

- a. Kawasan olahraga terpadu Lagaligo di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara;
- b. Kawasan Lapangan Gaspa di Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- c. Rencana pengembangan lapangan sepakbola di setiap wilayah kecamatan;
- d. Rencana pengembangan lapangan bulutangkis dan sepak takraw di setiap wilayah kelurahan;
- e. Rencana pengembangan kawasan sirkuit Road Race seluas 8,0 Ha di Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara;
- f. Rencana pengembangan kawasan lapangan Golf seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana.

2.1.1.4.13. KAWASAN PERUNTUKAN TRANSMIGRASI

Rencana pengembangan kawasan peruntukan Transmigrasi di wilayah Kota Palopo seluas 976,73 Ha di wilayah Kelurahan Peta Kecamatan Sendana.

2.1.1.4.14. KAWASAN PERUNTUKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi :

- a. Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara;
- b. Rumah jabatan Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading berada di Jalan Wolter Monggidi Kecamatan Wara;
- c. Kantor Polisi Militer (PM) di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Wara Utara;
- d. Kawasan Lapangan Tembak di Kelurahan Balandai Kecamatan Wara;
- e. Lapangan Kodim di Jalan Dr. Samratulangi Kecamatan Wara Utara;
- f. Lapangan Asrama TNI AD 721 Makassar di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- g. Kantor Polisi Resort Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- h. Zibang Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- i. Tepbek Palopo di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara;
- j. Koramil di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Wara dan Polsektersebar di masing-masing wilayah kecamatan.

2.1.1.4.15. KAWASAN HUTAN PRODUKSI

Kawasan Hutan Produksi terletak di Kelurahan alubattang Kecamatan Telluwanua dengan luas 608 hektar (*Sumber : BPKH Wilayah VII Makassar*)

2.1.1.4.16. KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN

➤ Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang direncanakan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di wilayah Kota Palopo seluas 1.100 Ha, yang tersebar di beberapa sub wilayah, meliputi :

1. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan:
 - a. Wilayah Kecamatan Telluwanua :
 - 1) Di wilayah Kelurahan Jaya seluas 400 Ha;
 - 2) Di wilayah Kelurahan Salubattang seluas 180 Ha;
 - 3) Di wilayah Kelurahan Pentojangan seluas 150 Ha;
 - 4) Di wilayah Kelurahan Sumarambu seluas 130 Ha;
 - 5) Di wilayah Kelurahan Maroangin seluas 80 Ha.
 - b. Wilayah Kecamatan Sendana :
 - Di wilayah Kelurahan Sendana seluas 80 Ha.
 - c. Wilayah Kecamatan Wara Barat
 - Di wilayah Kelurahan Padang Lambe seluas 80 Ha.
2. Kawasan Sentra Pengolahan Hasil Pertanian masing-masing seluas 1,0 Ha di Kelurahan Songka dan Kelurahan Battang Barat.

➤ Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan berupa kawasan perkebunan rakyat seluas 2.724 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat, dan Kecamatan Telluwanua.

➤ Kawasan peruntukan pertanian Holtikultura

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura seluas 2.083 Ha tersebar di wilayah Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Wara Barat dan Kecamatan Telluwanua.

2.1.1.4.17. KAWASAN PERUNTUKAN PETERNAKAN

Kawasan peruntukan Peternakan di wilayah Kota Palopo meliputi :

- a. Kawasan Satelit Pembibitan Ayam seluas 1,9 Ha di Kelurahan Mancani, dan seluas 1,0 Ha di Kelurahan Maroangin;
- b. Kawasan Rumah Tahanan Hewan seluas 2,0 Ha di Kelurahan Padang Lambe;
- c. Kawasan lahan Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan ladang pembesaran kandang seluas 10,0 Ha di wilayah Kelurahan Padang Lambe.
- d. Kawasan pakan ternak seluas 1,0 Ha termasuk didalamnya gudang dan tempat mesin pakan di wilayah Kelurahan Padang Lambe;
- e. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) seluas 1,5 hektar yang berlokasi di Kelurahan Purangi Kecamatan Sendana;
- f. Ternak unggas di dikembangkan di daerah pinggiran kota di wilayah Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Bara, dan Kecamatan Sendana;
- g. Kawasan penggembalaan ternak sapi seluas 100 Ha di wilayah Kelurahan Peta;
- h. Kawasan Pusat Kesehatan Hewan seluas 1,0 Ha di wilayah Kelurahan Mancani.

2.1.1.4.18. KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN

Kawasan Peruntukan Perikanan tangkap, meliputi :

Perikanan tangkap berada di Perairan Teluk Bone dan didukung oleh ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) PonjalaE/ Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

2.1.1.4.19. KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

1. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas terletak di Blok Bone Utara.
2. Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral terdiri atas :
 - a. Penambangan emas terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang;
 - b. Penambangan galena terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat;
 - c. Penambangan marmer terletak di Kelurahan Battang, Kelurahan Padanglambe Kecamatan Wara Barat;
 - d. Penambangan granit terletak di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Battang Barat Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua.

Potensi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan rakyat berupa pertambangan **Golongan Batu** yang terdapat di wilayah :

- a. Kecamatan Mungkajang;
- b. Kecamatan Wara Selatan;
- c. Kecamatan Wara Barat;
- d. Kecamatan Sendana;
- e. Kecamatan Telluwanua;
- f. Kecamatan Bara;
- g. Kecamatan Wara Utara;
- h. Kecamatan Wara.

Golongan Batuan ada 47 jenis, salah satunya adalah kerikil berpasir alami (Sirtu)

2.1.1.5. Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta

penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu.

Tiga kecamatan dengan populasi terbesar pada tahun 2017 masing masing adalah Kecamatan Wara, disusul Wara Timur dan Bara. Jumlah Penduduk Kota Palopo 2013-2017 selengkapnya dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kota Palopo Tahun 2013-2017

Kecamatan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Wara	34.401	41.237	41.610	37.421	38.917
- Laki - Laki	16.518	20.597	20.833	17.919	19.469
- Perempuan	17.883	20.640	20.777	19.502	19.448
Wara Utara	24.542	25.827	26.242	22.905	24.093
- Laki - Laki	12.016	12.646	12.841	11.268	11.875
- Perempuan	12.526	13.181	13.401	11.637	12.218
Wara Selatan	14.157	15.282	15.960	15.168	16.677
- Laki - Laki	7.035	7.639	7.957	7.575	8.291
- Perempuan	7.122	7.643	8.003	7.593	8.386
Telluwana	15.980	16.988	17.520	16.712	17.477
- Laki - Laki	8.146	8.646	8.935	8.527	8.911
- Perempuan	7.834	8.342	8.585	8.185	8.566
Wara Timur	40.433	43.320	44.259	40.587	43.058
- Laki - Laki	20.134	21.566	22.071	20.221	21.455
- Perempuan	20.299	21.754	22.188	20.366	21.613
Wara Barat	12.994	13.669	13.880	12.988	13.316
- Laki - Laki	6.632	6.987	7.089	6.623	6.808
- Perempuan	6.362	6.682	6.791	6.365	6.508
Sendana	7.458	7.779	8.036	7.627	7.964
- Laki - Laki	3.841	4.000	4.125	3.876	4.041
- Perempuan	3.617	3.779	3.911	3.751	3.923
Mungkajang	9.394	9.867	10.103	9.714	10.235
- Laki - Laki	4.783	5.042	5.172	4.966	5.222
- Perempuan	4.611	4.825	4.931	4.748	5.013
Bara	29.516	31.662	32.552	31.834	33.341
- Laki - Laki	14.737	15.826	16.264	15.940	16.669
- Perempuan	14.779	15.836	16.288	15.894	16.672
Kota Palopo	193.282	205.631	210.162	195.473	205.078

Sumber Data : Dinas Catatan Sipil Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 hanya bertambah sebanyak 11.796 jiwa dengan Wara Timur sebagai

Jika dalam skala rumah tangga, pada tahun 2013, jumlah rumah tangga di Kota Palopo sebanyak 35.025, tahun 2014 sebanyak 35.914, tahun 2015 sebanyak 36.871, tahun 2016 sebanyak 37.749 dan tahun 2017 sebanyak 38.641 rumah tangga.

Berdasarkan kelompok status pendidikan, sepanjang tahun 2013-2017, persentase penduduk Kota Palopo yang mengakses lembaga perguruan tinggi baik diploma maupun tingkat strata juga terus meningkat. Jika pada tahun 2013 hanya

14.02% yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi, pada tahun 2017 jumlah menjadi 15.67% (Badan Pusat Statistik Kota Palopo tahun 2013-2018).

Secara lengkap kondisi jumlah, distribusi dan kepadatan penduduk Kota Palopo tahun 2017 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14
Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2017

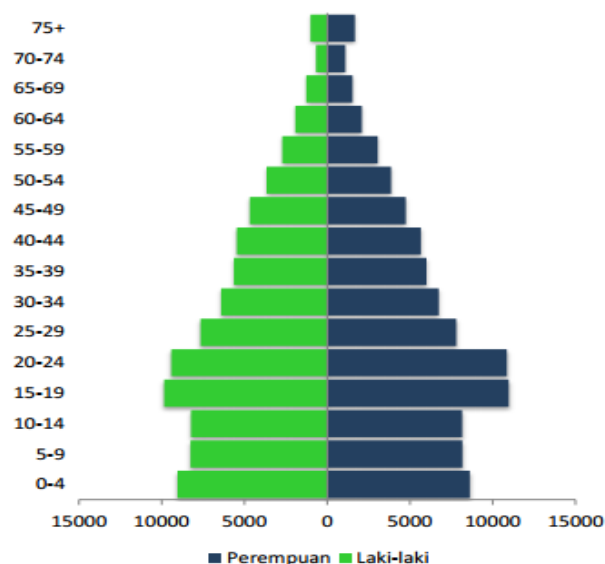
No	Kecamatan	Luas Area (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Wara Selatan	10.66	16677	8.13	1,564
2	Sendana	37.09	7964	3.88	215
3	Wara	11.49	38917	18.98	3,387
4	Wara Timur	12.08	43058	21.00	3,564
5	Mungkajang	53.8	10235	4.99	190
6	Wara Utara	10.58	24093	11.75	2,277
7	Bara	23.35	33341	16.26	1,428
8	Telluwanea	34.34	17477	8.52	509
9	Wara Barat	59.6	13316	6.49	223
	Kota Palopo	252.99	205078	11.11	811

Sumber : Diolah dari beberapa sumber

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Palopo menetap di wilayah Kecamatan Wara (21.64%), disusul Kecamatan Wara Timur (21.5%), dan Kecamatan Bara (15.59%).

Kondisi penduduk Kota Palopo tahun 2017 berdasarkan umur diuraikan tabel sebagai berikut :

Gambar 2.12
Komposisi Penduduk Kota Palopo Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur



Gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, penduduk Kota Palopo yang berusia 15-19 tahun menempati struktur penduduk dengan jumlah terbanyak, disusul penduduk berumur 20-24 tahun. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan yang berumur 15-19 tahun dan 20-24 tahun lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki pada umur yang sama. Sex ratio atau rasio perempuan dan laki-laki di Kota Palopo pada tahun 2017 berada pada angka 94.53 artinya dari 100 orang penduduk rata-rata terdapat 94-95 orang penduduk perempuan.

Berikut adalah data penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kota Palopo sampai dengan tahun 2017 :

Tabel 2.15
Komposisi Penduduk Kota Palopo Tahun 2017
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

GOLONGAN UMUR <i>Age Group</i>	LAKI-LAKI <i>Male</i>	PEREMPUAN <i>Female</i>	JUMLAH <i>Total</i>	SEKS RASIO <i>Gender Ratio</i>	PERSEN TASE <i>Persen tage</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 – 4	9 046	8 620	17 666	104,94	9,99
5 – 9	8 262	8 166	16 428	101,18	9,29
10 – 14	8 227	8 156	16 383	100,87	9,26
15 – 19	9 851	10 956	20 807	89,91	11,76
20 – 24	9 422	10 844	20 266	86,89	11,46
25 – 29	7 662	7 790	15 452	98,36	8,73
30 – 34	6 410	6 727	13 137	95,29	7,43
35 – 39	5 641	5 991	11 632	94,16	6,58
40 – 44	5 474	5 656	11 130	96,78	6,29
45 – 49	4 684	4 739	9 423	98,84	5,33
50 – 54	3 664	3 853	7 517	95,09	4,25
55 – 59	2 725	3 055	5 780	89,20	3,27
60 – 64	1 929	2 089	4 018	92,34	2,27
65 +	2 970	4 298	7 268	69,10	4,11
JUMLAH/ Total	85 967	90 940	176 907	94,53	100,00

Sumber : Palopo Dalam Angka Kota Palopo 2018

Daya Tampung Penduduk

Diproyeksikan bahwa pada tahun 2032 nanti jumlah penduduk Kota Palopo akan berjumlah sebanyak 313.766 jiwa, sedangkan pada tahun 2037 nanti diperkirakan akan berjumlah sebanyak 358.985 jiwa. Selengkapnya mengenai proyeksi jumlah penduduk Kota Palopo periode tahun 2018 – 2037 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Palopo
Tahun 2018–2037

No.	TAHUN	JUMLAH (Jiwa)
1.	2018	183.097
2.	2022	203.920
3.	2027	274.240
4.	2032	313.766
5.	2037	358.985

Sumber: Revisi RTRW Kota Palopo, 2017

Tabel 2.17
Tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan saat ini dan
proyeksinya untuk 5 tahun

Kecamatan	Tingkat Pertumbuhan (%)					Kepadatan Penduduk (orang/Ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Wara	1.91	1.90	1.91	1.91	1.90	5.58	5.69	5.80	5.91	6.02
Wara Utara	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	17.04	17.47	17.91	18.36	18.82
Wara Selatan	3.20	3.21	3.20	3.20	3.20	10.11	10.43	10.77	11.11	11.47
Wara Timur	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	33.17	34.23	35.33	36.46	37.63
Mungkajang	3.20	3.20	3.21	3.20	3.20	6.92	7.14	7.37	7.60	7.85
Bara	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	24.05	24.82	25.61	26.43	27.28
Sendana	3.21	3.20	3.20	3.20	3.20	5.71	5.89	6.08	6.27	6.47
Telluwanea	3.21	3.20	3.20	3.20	3.20	11.62	12.00	12.38	12.78	13.19
Wara Barat	4.53	4.54	4.53	4.54	4.53	9.56	9.86	10.18	10.50	10.84
Jumlah	2.92	2.93	2.93	2.93	2.94	11.48	11.82	12.16	12.52	12.89

Sumber: Analisa Pokja Sanitasi Kota Palopo Tahun 2017

Persebaran penduduk Kota Palopo tergambarkan dari jumlah penduduk per satuan wilayah kecamatan, dimana wilayah Kota Palopo terdapat 9(sembilan) wilayah administrasi kecamatan dan 48 (empat puluh delapan) kelurahan. Wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Wara yakni sebanyak 37.421 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 3.181 jiwa/km². Sementara wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Sendana yakni hanya sebanyak 6.249 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 168 jiwa/km².

Dari jumlah sebaran dan kepadatan penduduk, Kecamatan Wara adalah merupakan wilayah kecamatan yang tertinggi. Kondisi ini dikarenakan Kecamatan Wara secara fungsional merupakan pusat pelayanan Kota Palopo, dan secara faktual Kecamatan Wara lebih memiliki berbagai sarana dan prasarana wilayah yang mendukung aktifitas permukiman/perumahan, dan ketersediaan fasilitas pelayanan umum yang memudahkan penduduk dalam melakukan aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya sehingga begitu menarik untuk dijadikan sebagai kawasan hunian/permukiman/ perumahan. Juga bahwa wilayah Kecamatan Wara merupakan dahulu merupakan pusat kerajaan Luwu, ditandai dengan keberadaan Istana Datu Luwu dan Mesjid Jami'. Faktor-faktor tersebut menjadi pendorong percepatan pertumbuhan wilayah ini, sehingga terlihat saat ini sudah tidak ada lagi lahan kosong untuk pengembangan bangunan perumahan dan bangunan-bangunan lainnya, kecuali dengan membangun secara vertikal.

Sementara Kecamatan Sendana yang berpenduduk paling sedikit hanya sebanyak 6.399 jiwa, dikarenakan wilayah ini lebih dominan dengan topografi perbukitan/pegunungan, dengan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya penduduk relatif masih sangat minim, sehingga tidak kuat menarik penduduk untuk bermukim. Faktor lainnya adalah lahan datar yang ada sebagian besar untuk kegiatan pertanian sawah yang memang masih menjadi tumpuan ekonomi penduduk setempat, sehingga sulit untuk dialihfungsikan menjadi lahan peruntukan permukiman ataupun bangunan lainnya.

Pola persebaran penduduk tersebut sebagaimana kondisinya saat ini, dimasa yang akan datang cenderung berubah dengan pola yang lebih merata terutama, pada wilayah Kecamatan Wara Selatan di bagian selatan, dan Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua di bagian utara Kota Palopo. Indikasinya terlihat saat ini, bahwa di masing-masing wilayah tersebut intensitas pengembangan perumahan dan permukiman meningkat, baik perumahan yang dikembangkan oleh pihak swasta, maupun oleh masyarakat secara swadaya. Dimana pada akhirnya nanti akan diikuti dengan pengembangan sarana dan prasarana permukiman yang akan mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya penduduk setempat.

Dimasa yang akan datang, diperkirakan kecenderungan perkembangan penduduk akan mengalami peningkatan yang signifikan pada beberapa wilayah kecamatan, terutama pada Kecamatan Wara Selatan dan Wara Utara yang menjadi alternatif pembangunan fisik Kota Palopo saat ini.

Kecenderungan akan dampak dari pesatnya pembangunan fisik di Kota Palopo nantinya, tentunya akan berimbas pada pertumbuhan wilayah hinterlandnya (kabupaten-kabupaten) yang berbatasan langsung dengan Kota Palopo secara fisik seperti Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Bua yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Luwu. Wilayah-wilayah hinterland dari Kota Palopo ini nantinya dapat tumbuh bersinergi dengan pusat wilayah (Kota Palopo), dimana fungsi-fungsi pelayanan berupa pusat distribusi alat-alat dan mesin pertanian berskala regional terpusat di Kota Palopo, sementara sentra produksi pertanian berada di daerah-daerah hinterlandnya.

2.1.1.6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dalam konteks ini kondisi eksisting suatu wilayah akan ditunjukkan dengan status kondisi lingkungan baik secara fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan telah terjadi kerusakan atau tidak. Oleh karena itu dibutuhkan baku kerusakan lingkungan hidup untuk menilai status kondisi lingkungan tersebut.

Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam konteks ini daya tampung lingkungan dihubungkan dengan pencemaran lingkungan akibat dari suatu kegiatan, oleh karena itu dibutuhkan baku mutu lingkungan hidup untuk menilai status pencemaran lingkungan tersebut.

Secara umum konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat digambarkan melalui framework sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Sisi permintaan lebih didasarkan pada kebutuhan dan pola konsumsi akan sumber daya alam dan jasa lingkungan seperti lahan, air, dan sumber daya alam lainnya. Kebutuhan ini akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan penduduk baik di suatu wilayah administrasi maupun wilayah ekoregion. Interaksi kebutuhan akan sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan jumlah yang diekstraksi akan meninggalkan jejak ekologis (*ecological foot print*) yang menunjukkan jejak ekosisitim per satuan penggunaan sumber daya.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah karena dengan diketahuinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maka diketahui cadangan sumber daya wilayah serta kemampuan fisik wilayah dalam

mendukung kebijakan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan di dalamnya. Ketika daya dukung dan daya tampung wilayah sudah terlampaui, maka:

- Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- Segala usaha dan/atau kegiatan yang melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

2.1.1.6.1. Daya Dukung Lahan

Meskipun Kota Palopo dari aspek kegiatan merupakan kawasan perkotaan, namun pola penggunaan lahan saat ini (existing condition, 2017) masih didominasi oleh kegiatan non budidaya perkotaan. Data yang ada hasil overlay antara peta Rupa Bumi Indonesia tahun 2012 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial dengan peta hasil survey lapangan tahun 2017 oleh Tim Revisi RTRW Kota Palopo, menunjukkan bahwa jenis tutupan lahan yang dominan adalah hutan yakni seluas 15.075,63 Ha atau sebesar 58,39%, disusul masing-masing semak belukar seluas 4.660,21 Ha atau sebesar 18,05%, tegalan/ladang seluas 1.674,58 Ha atau sebesar 6,49%, sawah seluas 1.753,66 Ha atau sebesar 6,79%, tambak seluas 1.258,68 Ha atau sebesar 4,87%. Selengkapnya mengenai kondisi tutupan lahan wilayah Kota Palopo tahun 2016 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Pola Tutupan Lahan Wilayah Kota Palopo Tahun 2016

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan	15.075,63	58,39
2	Permukiman	1.238,85	4,79
3	Sawah	2.689,00	10,42
4	Tambak	1.258,68	4,88
5	Padang Rumput	2,78	0,01
6	Kebun/Tegalan	1.711,77	6,63
7	Semak Belukar	3.724,87	14,43
8	Sungai	102,88	0,39
9	Rawa	1,22	0,01
10	Tanah Kosong	12,32	0,05
Jumlah		25.817,00	100

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kota Palopo (2017)

Salah satu maksud dari analisis aspek tata guna lahan/tanah adalah untuk melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi pemanfaatan atau penggunaan/ tanah, distribusi penggunaan lahan serta kecenderungan swasta dan masyarakat dalam penguasaan/penggunaan lahan, baik karena pengaruh aspek fisik/lokasi, ekonomi, harga tanah, aksesibilitas, keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif dan aspek lainnya. Berdasarkan data komposisi dan distribusi penggunaan lahan di Kota Palopo dimana luas kawasan hutan masih yang mendominasi wilayah Kota Palopo yaitu seluas 15.075,63Ha atau sebesar 58,39% yang terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 8.666Ha (33,57%), kawasan konservasi seluas 891 Ha (3,45%),

kawasan hutan produksi terbatas seluas 608 Ha (2,35%), serta areal penggunaan lainnya seluas 4.910,63 Ha atau sebesar 19,02%.

Untuk penggunaan untuk permukiman luasannya relatif masih kecil yakni baru seluas 1.238,85 Ha atau sebesar 4,79%, untuk kegiatan pertanian berupa sawah seluas 1.753,66 Ha (6,80%), dan yang cukup luas jenis tutupan lahannya adalah semak belukar seluas 4.660,21 Ha atau sebesar 18,05%.

Dari komposisi tutupan lahan saat ini (existing condition, 2017) pada wilayah Kota Palopo, terlihat bahwa potensi ketersediaan lahan untuk memwadah permukiman penduduk, maupun sarana dan prasarana kota masih sangat memadai. Potensi ketersediaan lahan yang cukup luas yang saat ini cenderung menjadi kawasan alternatif pengembangan fisik Kota Palopo mencakup wilayah Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Telluwanua. Sementara untuk lahan-lahan pada wilayah Kecamatan Wara saat ini harganya relatif tinggi di banding dengan di wilayah lainnya, sehingga lebih sesuai jika diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang produktif, seperti untuk bangunan fasilitas jasa komersial, perdagangan, dan perkantoran swasta. Sedangkan lahan-lahan di wilayah pesisir Teluk Bone yang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Wara Timur, Wara Utara, dan Wara Selatan memerlukan teknologi atau perlakuan khusus seperti penimbunan untuk mematangkan lahan-lahan tersebut, sehingga akhirnya menjadi relatif mahal.

Secara umum, potensi sumber daya lahan wilayah Kota Palopo masih sangat besar untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan. Lahan-lahan yang dapat dialihfungsikan menjadi peruntukan untuk budidaya perkotaan terdiri dari: padang rumput, kebun/tegalan, semak belukar, rawa, sawah tadah hujan, dan tambak kurang produktif. **Dengan demikian, masih ada seluas 8.512,88 Ha atau sebesar 32,97% potensial sebagai alternatif pengembangan fisik Kota Palopo.**

Sementara itu, data BPDAS Jeneberang-Saddang pada tahun 2017 menunjukkan bahwa luas lahan di Kota Palopo yang dalam kondisi agak kritis seluas 15.901,28 Ha, areal khusus seluas 44,50 Ha, lahan kritis seluas 2.748,02 Ha, yang berpotensi menjadi lahan kritis seluas 3.161,78 Ha, lahan yang sangat kritis seluas 706,75 Ha, serta lahan yang tidak kritis seluas 2.851,32 Ha. Lahan kritis adalah lahan yang sangat tandus dan gundul dengan tingkat kesuburan yang sangat rendah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Lahan ini masih dapat dikelola walaupun produktivitasnya rendah.

Tabel 2.19
Luas Lahan Kritis Kota Palopo 2017 (Ha)

No	Agak Kritis	Areal Khusus	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	Total
1	15.901,28	44,5	2.748,02	3161,78	706,75	2.851,32	25.413,65

Sumber: BPDAS Jeneberang-Saddang (2017)

Terkait dengan lahan hutan, luas hutan di Kota Palopo pada tahun 2016 adalah 9.931,91 Ha. Keadaan seperti itu menurut jenisnya adalah 8.309,28 Ha sebagai hutan lindung, 970,44 Ha sebagai hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, Hutan Produksi Terbatas seluas 634,19 Ha dan hutan Kota seluas 18 Ha. Produksi kayu hutan pada tahun 2015 berdasarkan jenis produksi di Kota Palopo sebanyak 376,74 m³ yang terdiri dari kayu bulat sebanyak 109 m³ dan kayu gergajian sebanyak 267,74 m³. Produksi kayu hutan pada tahun 2014 berdasarkan jenis produksi sebanyak 315,22 m³ yang terdiri dari kayu bulat sebanyak 157,60 m³ dan kayu gergajian sebanyak 157,62

m3. Produksi kayu hutan pada tahun 2013 berdasarkan jenis produksi sebanyak 755,03 m3 kayu bulat.

Beberapa penyebab kerusakan hutan diakibatkan oleh kebakaran hutan, perambahan hutan, ladang berpindah dan penebangan liar. Kerusakan hutan di Kota Palopo akibat perambahan hutan. Tabel di bawah menunjukkan bahwa penyebab kerusakan hutan yang terjadi di Kota Palopo disebabkan oleh perambahan hutan. Diperkirakan luas kerusakan hutan akibat perambahan sebesar 1.130 Ha.

Tabel 2.20
Perkiraan Luas Kerusakan Hutan Menurut Penyebabnya, 2016

No	Penyebab Kerusakan	Luas (Ha)
1	Kebakaran hutan	-
2	Ladang berpindah	-
3	Penebangan liar	-
4	Perambahan hutan	1.130
5	Lainnya	-
Total		1.130

Sumber: Dinas Kebutuhan & Perkebunan Kota Palopo, 2016

2.1.1.6.2. Daya Dukung Permukiman

Semakin berkembangnya Kota Palopo menjadi wilayah perkotaan yang memiliki sarana dan fasilitas yang cukup lengkap di bidang pendidikan, kesehatan, dan pasar tenaga kerja menjadikan Kota ini sebagai tujuan daerah sekitarnya untuk bekerja maupun menuntut ilmu. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya permintaan bangunan tempat tinggal.

Kondisi permukiman di Kota Palopo digolongkan menjadi 3 golongan yaitu :

- Permukiman Kepadatan Tinggi seluas lebih kurang 1.024 hektar berada pada Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur
- Permukiman Kepadatan Sedang seluas lebih kurang 680 hektar berada pada Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Bara
- Permukiman Kepadatan Rendah seluas lebih kurang 1.794 hektar berada pada Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Telluwanua.

Tabel 2.21
Angka Kekurangan Rumah (Backlog) Kota Palopo 2018

Nomor	Kecamatan	Kekurangan Rumah (backlog)
1	Wara Selatan	205
2	Sendana	537
3	Wara	1.012
4	Wara Timur	889
5	Mungkajang	167

6	Wara Utara	554
7	Bara	961
8	Telluwanea	1.103
9	Wara Barat	205
Total		5.633

Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat kekurangan rumah sebanyak 5.633 unit di Kota Palopo. Kecamatan dengan kebutuhan rumah terbanyak terdapat di Kecamatan Telluwanea (1.103 unit) dan Kecamatan Wara (1.012 unit). Sedangkan kecamatan dengan kebutuhan rumah terendah ada di Wara Barat dan Wara Selatan masing-masing 205 unit. Dilihat dari status kepemilikan bangunan tempat tinggal, yang berstatus milik sendiri persentasenya sebesar 74,02 persen, sedangkan yang berstatus kontrak/sewa dan lainnya sebesar 25,98 persen.

Kualitas perumahan dapat diukur dengan melihat kondisi lantai, atap, dinding dan luas lantai perkapita. Secara umum kualitas perumahan di Kota Palopo cenderung baik. Kondisi rumah tangga di Kota Palopo 99,13 persen memiliki lantai bukan tanah, 93,25 persen memiliki atap layak dan 59,39 persen memiliki dinding permanen (tembok).

Tabel 2.22
Statistik Perumahan Kota Palopo

Uraian	2014	2015	2016
Milik sendiri	72,45	72,06	74,02
Kontrak/sewa & lainnya	27,55	27,95	25,98
Lantai bukan tanah	97,96	97,6	99,13
Atap layak	82,18	88,51	93,25
Tembok	52,26	56,71	59,39

Sumber: Statistik Daerah Kota Palopo (BPS, 2017)

Kondisi perumahan di daerah perkotaan menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Namun sebaliknya, persentase rumahtangga yang sewa/kontrak & lainnya di perkotaan relatif lebih tinggi dibanding perdesaan mengingat daerah perkotaan merupakan kawasan yang menjadi pusat kegiatan yang cukup padat sebagai pusat niaga, pemerintahan maupun pusat pendidikan.

Kota Palopo, sebagai kota yang perkembangannya cukup pesat dalam berbagai faktor bila dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena ini menjadi beban tersendiri bagi pemerintah Kota Palopo terutama dalam menyediakan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang umumnya datang dari daerah pedesaan di sekitar Kota Palopo untuk mencoba kehidupan dan penghidupan yang baru. Selain itu, wilayah pesisir Kota

Palopo yang telah lama dihuni oleh warga lokal yang sebagian besar merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan orientasi ekonominya pada laut, seperti nelayan tangkap, nelayan budi daya rumputlaut dan sebagainya. Sebagian besar dari daerah tersebut merupakan kawasan permukiman kumuh yang masih perlu dilakukan penataan agar menjadi permukiman yang layak huni.

Selanjutnya terkait dengan permukiman kumuh di Kota Palopo, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 290/VII/2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Palopo, menyebutkan bahwa di wilayah Kota Palopo masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh seluas 89,33 Ha yang tersebar di 10 wilayah kelurahan. Selengkapnya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.23

Sebaran Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palopo Tahun 2014-2015

Kecamatan	Kelurahan	RT/RW	Luas (Ha)
Wara	Dangerakko	01, 02 & 04	14,21
	Ponjalae	01, 02 & 05	11,90
	Pontap I	RW 01/RT 05	19,72
	Pontap II	RW 03/RT 06	7,73
	Surutanga	03, 04 & 05	4,14
	Salotellue	01, 02 & 03	4,51
Wara Selatan	Takkalala	01 & 02	2,66
	Penggoli	01, 03 & 06	5,43
	Sabbamparu	01, 02, 03 & 04	15,20
	Batupasi	02, 03 & 04	3,80
Total			89,30

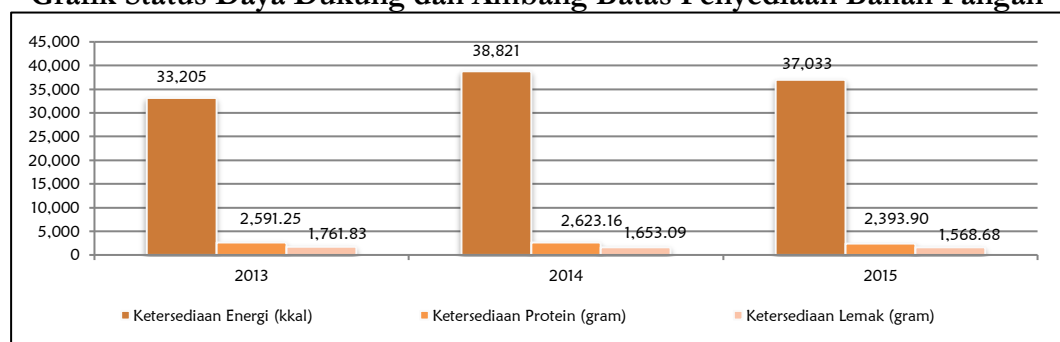
Sumber: Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 290/VII/2014

2.1.1.6.3. Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Bahan Pangan

Indikator umum yang digunakan dalam melihat kondisi pangan dalam suatu wilayah biasanya merujuk pada ketentuan FAO yang mensyaratkan ketersediaan energi minimal 2200 kkal/kapita/hari dan protein 54 gram/kapita/hari. Jika merujuk pada standar ini, maka Palopo masih berada di bawah ketentuan FAO dalam hal ketersediaan energi, yakni masih berada pada angka 2.130,1 kkal/kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan proteinnya, Palopo sudah melampaui karena sudah berada pada posisi 68,9 gram/kapita/hari (2016).

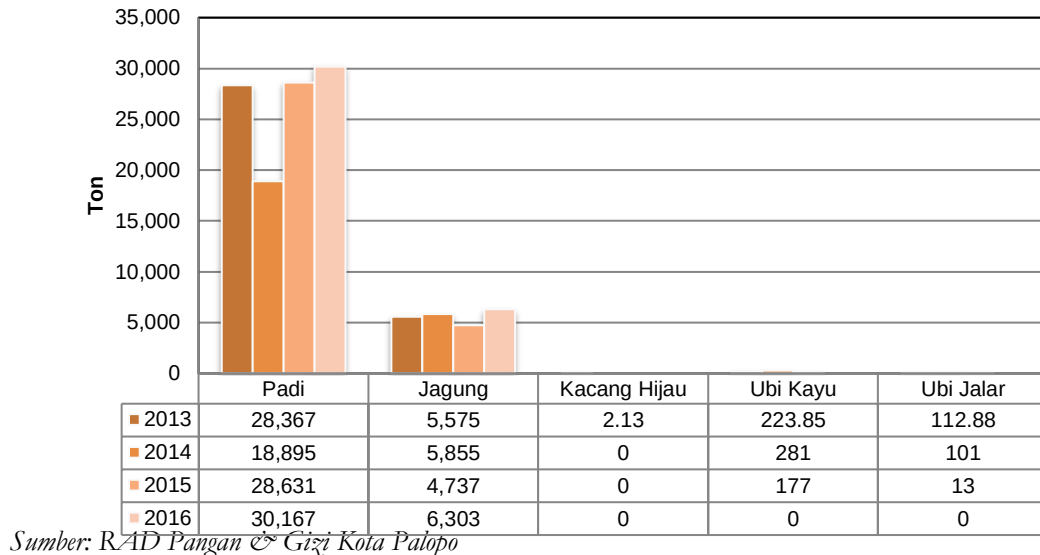
Gambar 2.13

Grafik Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Bahan Pangan



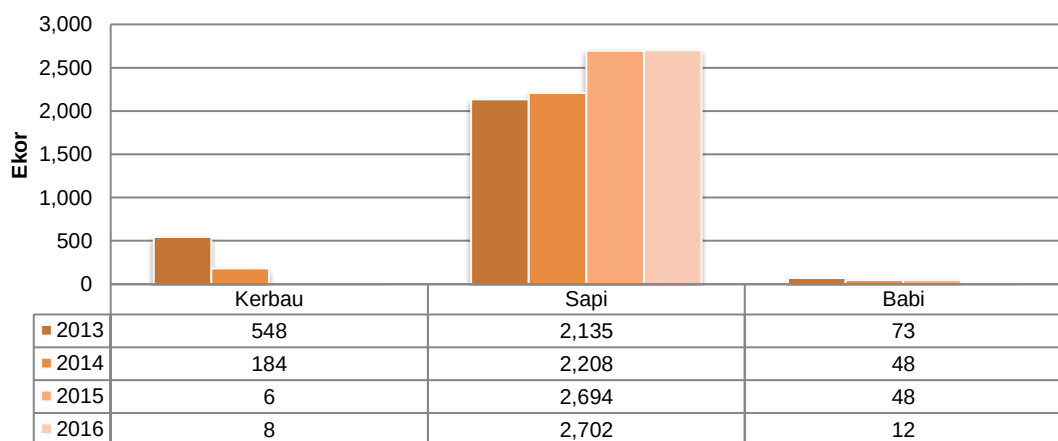
Perkembangan produksi pangan nabati dan pangan hewani di Kota Palopo menunjukkan tren yang positif dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Produksi padi meningkat dari 18.895 ton pada tahun 2014 menjadi 28.631 ton pada tahun 2015 dan 30.167 ton pada tahun 2016. Demikian pula pada komoditas jagung yang juga relatif meningkat. Pada tahun 2013 produksi jagung 5.575 ton, meningkat 5.855 ton (2014), menurun menjadi 4.737 ton (2015) dan kembali meningkat menjadi 6.303 ton pada 2016.

Gambar 2.14
Grafik Perkembangan Ketersediaan Pangan Nabati Kota Palopo (2013-2016)



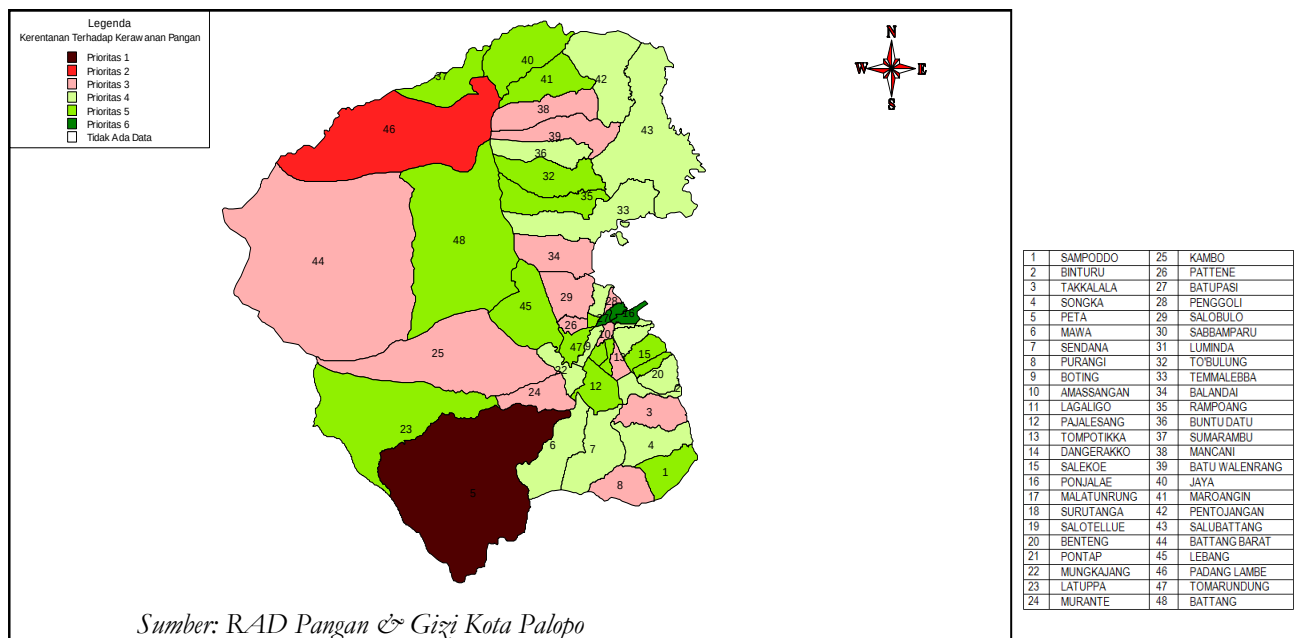
Sementara itu, perkembangan produksi pangan hewani juga menunjukkan tren yang positif khususnya pada komoditas sapi. Jumlah ternak sapi yang dipotong di RPH setiap tahun meningkat, yakni pada tahun 2013 sebanyak 2.135 ekor meningkat menjadi 2.702 ekor di tahun 2016.

Gambar 2.15
Grafik Perkembangan Jumlah Ternak yang Dipotong di RPH Kota Palopo (2013-2016)



Berdasarkan indeks pangan komposit, posisi ketahanan dan kerentanan pangan Kota Palopo berada pada angka 0,32–0,48 yakni berada pada keadaan agak tahan. Melalui Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Kota Palopo 2014, nampak bahwa terdapat beberapa kelurahan yang rentan terhadap kerawanan pangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini. Sementara itu, tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perkembangan kualitas konsumsi pangan di Kota Palopo menunjukkan adanya peningkatan dengan skor PPH 82,4 gram/kapita/hari pada tahun 2014 menjadi 88,7 gram/kapita/hari pada tahun 2015.

Gambar 2.16
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Palopo (2014)



2.1.1.6.4. Status Daya Dukung dan Ambang Batas Penyediaan Air Bersih

Kondisi penyediaan air minum di Kota Palopo hampir seluruh wilayah yang meliputi 48 (empat puluh delapan) kelurahan telah terlayani oleh jaringan air minum dari PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo. Tercatat sampai tahun 2016 jumlah pelanggan air minum telah mencapai 30.929 pelanggan. Dimana kapasitas produksi air minum dari 5 (lima) IPAM yang ada mampu memproduksi air minum sebesar 550 liter/detik.

Jika diasumsikan bahwa pelanggan tersebut adalah rumah tangga yang didalamnya masing-masing berpenghuni 5 orang (1 KK = 5 orang), maka secara keseluruhan cakupan pelayanan jaringan air minum PAM Tirta Mangkaluku telah mengakses sebesar 89,43% atau sebanyak 154.645 jiwa penduduk Kota Palopo.

Diprediksi hingga tahun 2032, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk beserta aktifitasnya ($\pm$ 313.766 jiwa), maka akan membutuhkan air minum minimum sebanyak 28.238 m³/hari atau dengan kapasitas produksi sebesar 327 lt/dtk untuk kebutuhan domestik (rumah tangga). Asumsi yang digunakan mengacu pada kriteria perencanaan Dirjen Cipta Karya, Dep. PU, dimana disebutkan bahwa untuk kota dengan kategori Sedang yang berpenduduk 100.000 jiwa s/d 500.000 jiwa konsumsi unit sambungan rumah (SR) adalah sebesar 90–120 liter/org/hari.

Asumsi-asumsi lainnya terkait dengan konsumsi air minum di kota/perkotaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perdagangan dan jasa komersial, perkiraan konsumsi sebagai berikut :
 - Pasar = 12.000 liter/hektar/hari
 - Hotel = 150 liter/bed/hari
 - Rumah makan = 100 liter/tempat duduk/hari
- 2) Kesehatan, pendekatan perkiraan kebutuhan kegiatan ini dilandaskan pada kebutuhan untuk tiap tempat tidur. Kebutuhan untuk tiap tempat tidur menurut standar 400 liter/bed/hari;
- 3) Peribadatan; kebutuhan konsumsi air dikhususkan untuk kegiatan umat Islam, dengan perkiraan 2% dari kebutuhan domestik;
- 4) Perkantoran, Pendidikan; 10% dari kebutuhan domestik;
- 5) Kepentingan umum 10% dari kebutuhan domestik.

Tabel 2.24
Perkiraan Kebutuhan Air Minum di Kota Palopo Tahun 2032

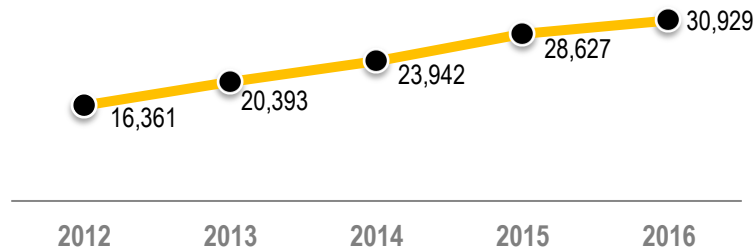
No	Jenis Penggunaan	Jumlah Kebutuhan	
		M ³ /Hari	Lt/Dt
1	Rumah Tangga	28.238	326,83
2	Perdagangan dan Jasa	304	3,52
3	Pendidikan	2.824	32,68
4	Kesehatan	288	3,33
5	Peribadatan	565	6,54
6	Perkantoran	2.824	32,68
7	Kepentingan Umum	2.824	32,68
Jumlah		37.867	438,26

Sumber: Revisi RTRW Palopo, 2017

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka diperkirakan kebutuhan air minum di Kota Palopo hingga tahun 2032 terlihat pada tabel di bawah. Dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2032 nanti kebutuhan akan air minum di Kota Palopo sudah mampu dipenuhi. Karena kapasitas produksi air minum dari 5 (lima) IPAM yang ada milik PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo telah mampu memproduksi air minum sebesar 550 liter/detik.

Layanan air minum melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum (PAM) Tirta Mangkaluku Kota Palopo relatif semakin baik. PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo (dahulu bernama PDAM Kota Palopo). Kondisi eksisting hingga 2017, jumlah Sambungan Rumah (SR) di Kota Palopo sudah ada sebanyak 30.929 SR.

Gambar 2.17
Grafik Jumlah Sambungan Rumah PAM Tirta Mangkaluku Palopo



Kapasitas terpasang keseluruhan saat ini adalah sebesar 550 liter/detik dari 5 unit IPAM, yakni masing-masing sebagai berikut :

- ❖ IPAM I H. Abd. Madjid yang berlokasi di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang dengan kapasitas terpasang sebesar 350 liter/detik.
- ❖ IPAM II Magandang di Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara dengan kapasitas terpasang sebesar 20 liter/detik.
- ❖ IPAM III Battang di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat dengan kapasitas terpasang sebesar 110 liter/detik.
- ❖ IPAM IV Mungkajang di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang dengan kapasitas terpasang sebesar 20 liter/detik.
- ❖ IPAM V Batupapan di Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Telluwanua dengan kapasitas terpasang sebesar 50 liter/detik.

Selengkapnya mengenai perkembangan dan kapasitas masing-masing IPAM tersebut seperti terlihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Lokasi, Nama, dan Kapasitas Terpasang IPAM
PAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo Tahun 2016

No	Nama IPAM	Kapasitas Terpasang
1	IPAM I H. Abd. Madjid di Kelurahan Murante Kec. Mungkajang	
	WTP 1	40 Liter/Detik
	WTP 2	100 Liter/Detik
	WTP 3	70 Liter/Detik
	WTP 4	50 Liter/Detik
	WTP 5	50 Liter/Detik
	WTP 6	20 Liter/Detik
	WTP 7	20 Liter/Detik
	Jumlah	350 Liter/Detik
2	IPAM II Magandang di Kelurahan To'Bulung Kec. Bara	
	WTP 1	20 Liter/Detik
	Jumlah	20 Liter/Detik
3	IPAM III Battang di Kelurahan Battang Kec. Wara Barat	
	WTP 1	50 Liter/Detik
	WTP 2	20 Liter/Detik
	WTP 3	20 Liter/Detik
	WTP 4	20 Liter/Detik
	Jumlah	110 Liter/Detik
4	IPAM IV Mungkajang di Kelurahan Latuppa Kec. Mungkajang	
	WTP 1	20 Liter/Detik
	Jumlah	20 Liter/Detik

5	IPAM V Batupapan Kelurahan Padang Lambe Kec. Telluwanua WTP 1	50 Liter/Detik
	Jumlah	50 Liter/Detik
	Total Kapasitas Terpasang (KT)	550 Liter/Detik

Sumber : Revisi RTRW Kota Palopo 2017

Walaupun dari segi daya dukung masih relatif aman, namun harus dipastikan bahwa kapasitas pasokan air baku tetap terjaga pada asumsi angka yang digunakan di atas. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang serius untuk menjaga sumber air baku PAM Tirta Mangkaluku agar produksinya tetap konsisten.

Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang terbaharui dan secara alamiah berada di dalam wilayah hidrografis yang disebut daerah aliran sungai yang mengikuti siklus hidrologis. Ketersediaan sumber daya air dalam setiap daerah aliran sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan hidrogeologi setempat sehingga mengakibatkan adanya daerah aliran sungai dengan ketersediaan air yang melimpah dan daerah aliran sungai yang sangat kekurangan air.

Prasarana sumber daya air yang terdapat di wilayah Kota Palopo terdiri dari:

▪ **Daerah Aliran Sungai (DAS)**

1. DAS Battang, sepanjang 221.130,490 meter dengan luas area cakupan 13.966,720 Ha, terdiri dari beberapa sungai (salu), yakni :
 - ❖ Salu Battang sepanjang 47.088,75 meter.
 - ❖ Salu Pangngala sepanjang 34.102,66 meter.
 - ❖ Salu Paredean sepanjang 36.911,88 meter.
 - ❖ Salu Patangke sepanjang 28.749,36 meter.
 - ❖ Salu Tandung sepanjang 39.874,48 meter.
 - ❖ Salu Tombang sepanjang 13.071,77 meter.
 - ❖ Salu Palangiran sepanjang 1.774,21 meter.
2. DAS Pacangkuda sepanjang 45.593,69 meter dengan luas area cakupan 6.646,66 Ha, terdiri dari beberapa sungai (salu), yakni :
 - ❖ Salu Binturu sepanjang 3.597,76 meter.
 - ❖ Salu Songka sepanjang 1.382,78 meter.
 - ❖ Salu Tellue sepanjang 3.003,62 meter.
 - ❖ Salu Amassangang sepanjang 14.072,90 meter.
 - ❖ Salu Latuppa sepanjang 20.891,38 meter.
 - ❖ Salu Tabaro sepanjang 2.003,67 meter.
3. DAS Songka Mati sepanjang 5.603,69 meter dengan luas area cakupan 155,09 Ha. yang terbentuk dari Salu Songka Mati.
4. DAS Purangi sepanjang 1.759,20 meter dengan luas area cakupan 1.111,76 Ha. yang terbentuk dari Salu Pinang.
5. DAS Boting sepanjang 41.712,37 meter dengan luas area cakupan 3.002,34 Ha, terdiri dari beberapa sungai (salu), yakni :
 - ❖ Salu Boting sepanjang 22.963,86 meter.
 - ❖ Salu Bulu sepanjang 5.544,88 meter.
6. DAS Bua dengan luas area cakupan 1.168 Ha.

▪ **Daerah Irigasi (DI)**

Data tahun 2017 tercatat Daerah irigasi yang terdapat di wilayah Kota Palopo terdiri dari :

1. DI Padang Lambe sepanjang 1.079 meter.
2. DI Lappo sepanjang 114 meter.

3. DI Kaluku sepanjang 97 meter.
4. DI Sumarambu sepanjang 1.079 meter.
5. DI To'Punti sepanjang 208 meter.
6. DI Tomarunding 1 sepanjang 1.017 meter.
7. DI Tomarunding 2 sepanjang 739 meter.
8. DI Murante sepanjang 1.545 meter.
9. DI Mawa sepanjang 9.155 meter.
10. DI Lumandi sepanjang 555 meter.
11. DI Songka sepanjang 691 meter.
12. DI Purangi sepanjang 382 meter.
13. DI Sendana sepanjang 667 meter.
14. DI Batu Papan sepanjang 411 meter.
15. DI Batu Lotong sepanjang 212 meter.

▪ **Cekungan Air Tanah**

Cekungan air tanah merupakan suatu area dengan air yang berasal dari aliran permukaan. Cekungan air tanah merupakan salah satu contoh dari sistem geomorfologi. Sistem aliran air tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara alamiah cekungan air tanah dibatasi oleh batas hidrogeologi yang dikontrol oleh kondisi geologi dan atau hidrolika air tanah. Terkait dengan itu, di wilayah Kota Palopo terdapat Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua seluas 2.634,71 Ha.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Indikator ini menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan, menjadi dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan sektoral dan regional. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dibentuk melalui 17 lapangan usaha yang ada.

Tabel 2.26
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor/ Lapangan Usaha
Kota Palopo Tahun 2013-2017 (%)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
PRIMER					
Pertanian, Kehutanan & Perkebunan	5,85	8,26	0,34	0,20	5,78
Pertambangan & Penggalian	-1,84	-1,12	4,66	5,54	4,76
SEKUNDER					
Industri Pengolahan	3,90	5,73	5,22	5,10	3,57
Listrik & Gas	12,69	25,80	-4,87	9,10	7,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah dan Daur	4,56	4,45	0,38	3,75	6,66
TERSIER					

Bangunan/Konstruksi	5.96	4,12	4,97	7,21	6,32
Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor)	15.28	13,26	12,21	11,21	10,36
Transportasi & Pergudangan	7.04	9,00	7,28	8,26	7,39
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	5.33	4,91	7,15	8,45	7,17
Informasi & Komunikasi	9.29	2,83	7,82	10,25	11,56
Jasa Keuangan & Asuransi	9.08	4,41	7,40	14,92	0,30
Real Estate	5.30	6,53	5,79	6,78	7,48
Jasa Perusahaan	6.15	5,60	4,10	4,74	7,88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	2.69	2,47	6,42	(0,69)	5,36
Jasa Pendidikan	7.25	1,78	6,05	5,14	8,23
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	11.03	7,81	10,39	9,59	9,94
Jasa Lainnya	2.75	2,47	3,35	5,88	9,69
PDRB KOTA PALOPO	8.02	7,05	6,45	6,98	7,19

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

Struktur perekonomian di Kota Palopo relatif stabil, tidak terlalu banyak mengalami perubahan yang berarti sampai dengan tahun 2017, dimana sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih menjadi sektor unggulan (Lead sektor) yang mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Palopo.

Pertumbuhan PDRB Kota Palopo tahun 2013-2017 diuraikan sebagai berikut :

1. Ekonomi Kota Palopo dalam 5 tahun terakhir mengalami perlambatan. Pada tahun 2013 berada pada angka 8,02 %, 2014 pada angka 7,05%, tahun 2015 pada angka 6,47% dan tahun 2016 kembali meningkat pada angka 6,95% dan tahun 2017 tetap naik menjadi 7,19%.Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun ke tahun di Kota Palopo, padahal selama ini, sektor tersebut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap struktur perekonomian Kota Palopo.
2. Tabel pertumbuhan ekonomi Kota Palopo menurut sektor/lapangan usaha 2013-2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Untuk nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.27
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Palopo

Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
PRIMER										
Pertanian, Kehutanan & Perkebunan	780.692,6	18,67	934.573,1	19,68	1.014.563	18,96	1.048.007,7	17,73	1,152,632.10	17.60%
Pertambangan & Penggalian	7.378,7	0,18	8.526,9	0,18	10.052,9	0,19	10.940,5	0,19	11,556.80	0.18%
SEKUNDER										
Industri Pengolahan	127.503,5	3,05	143.409,4	3,02	158,172,2	2,96	171.807,5	2,91	184,744.00	2.82%
Listrik & Gas	3.597,7	0,09	4.548,6	0,10	4.024,9	0,08	4.499,8	0,08	5,345.20	0.08%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah dan Daur	12.001,9	0,29	9.549,3	0,20	9.669,5	0,18	10.215,7	0,17	11,248.80	0.17%
TERSIER										

Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
Bangunan/Konstruksi	668.025,6	15,98	757.099,8	15,94	826.601,6	15,45	931.352	15,76	1,046,984.50	15.98%
Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor)	877.733,1	20,99	1.004.980,6	21,16	1.172.712,5	21,92	1.352.719,6	22,89	1,547,183.10	23.62%
Transportasi & Pergudangan	212.126,9	5,07	248.058,8	5,22	334.012,5	6,24	368.067,6	6,29	389,039.10	5.94%
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	49.288,2	1,18	56.336,5	1,19	63.278,4	1,25	71.797,1	1,31	78,670.20	1.20%
Informasi & Komunikasi	188.458,8	4,51	194.555,1	4,10	198.868,5	4,11	227.531,6	4,18	261,928.20	4.00%
Jasa Keuangan & Asuransi	349.243,6	8,35	387.521,9	8,16	434.658,8	8,22	511.67	8,66	535,106.90	8.17%
Real Estate	217.040,2	5,19	248.653,3	5,24	273.084,7	5,28	301.395,1	5,33	335,531.10	5.12%
Jasa Perusahaan	3.953,9	0,09	4.410,1	0,09	4.938	0,14	5.342	0,18	5,917.20	0.09%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan	329.368,6	7,88	368.547,3	7,76	430.642,3	8,05	443.013,6	8,06	479,886.00	7.33%
Jasa Pendidikan	207.936,8	4,97	213.459,6	4,50	230.536,4	4,54	245.502,1	4,57	270,343.20	4.13%
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	91.838,0	2,20	105.254,3	2,22	119.642,5	2,24	135.142,8	2,29	153,715.00	2.35%
Jasa Lainnya	55.037,6	1,32	59.101,7	1,24	65.625,3	1,29	71.783,0	1,34	80,857.50	1.23%
PDRB KOTA PALOPO	3.690.917,3	100	4.181.225,7	100	4.748.586,5	100	5.91.787,9	100	6,550,688.70	100

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.28
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2013-2017
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Palopo

Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
PRIMER										
Pertanian, Kehutanan & Perkebunan	695.638,1	19,15	753.097,3	19,36	755.647,6	18,25	757.127,6	19,37	800,892.10	16.87%
Pertambangan & Penggalian	5.742,2	0,16	5.677,9	0,15	5.942,3	0,14	6.271,5	0,19	6,538.50	0.14%
SEKUNDER										
Industri Pengolahan	103.615,3	2,85	109.553,8	2,82	115.276,0	2,78	121.153,5	2,86	125,475.70	2.64%
Listrik & Gas	3.828,9	0,11	4.816,6	0,12	4.582,0	0,11	4.998,8	0,15	5,373.50	0.11%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah dan Daur	11.767,5	0,32	12.291,0	0,32	12.337,1	0,30	12.799,5	0,34	13,652.50	0.29%
TERSIER										
Bangunan/Konstruksi	557.357,5	15,34	580.302,7	14,92	609.159,1	14,71	653.084,9	15,77	694,364.00	14.63%
Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil & Sepeda Motor)	762.344,1	20,98	863.455,0	22,20	968.889,4	23,40	1.007.473,2	24,33	1,189,106.30	25.05%
Transportasi & Pergudangan	192.569,6	5,30	209.897,8	5,40	225.169,9	5,44	243.778,8	5,50	259,988.20	5.48%
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	42.593,0	1,17	44.682,9	1,15	47.878,4	1,16	51.926,4	1,25	55,651.50	1.17%
Informasi & Komunikasi	196.188,2	5,40	201.742,8	5,19	217.520,0	5,25	239.823,7	5,79	267,536.20	5.64%
Jasa Keuangan & Asuransi	291.467,6	8,02	304.332,7	7,82	326.862,0	7,89	375.630,7	8,48	376,911.30	7.94%
Real Estate	172.090,8	4,74	183.319,8	4,71	193.926,6	4,68	207.072,5	4,77	222,553.30	4.69%
Jasa Perusahaan	3.396,3	0,09	3.586,4	0,09	3.733,3	0,09	3.910,2	0,13	4,218.20	0.09%
Administrasi Pemerintahan,	275.756,4	7,59	282.566,9	7,27	300.717,1	7,26	298.654,3	7,29	315,270.60	6.64%

Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
Pertahanan & Jaminan										
Jasa Pendidikan	182.515,9	5,02	185.768,7	4,78	197.007,7	4,76	207.138,8	4,84	224.196,00	4.72%
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	87.151,7	2,40	93.954,1	2,42	103.715,5	2,51	113.661,0	2,57	124,964.30	2.63%
Jasa Lainnya	48.982,2	1,35	50.192,8	1,29	51.872,6	1,25	54.920,9	1,34	60,243.50	1.27%
PDRB KOTA PALOPO	3.633.005,30	100,00	3.889.239,20	100,00	4.140.236,60	100,00	4.428497.0	100	4,746,935.70	100.00%

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

2.2.1.2. Laju Inflasi

Merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikena dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.

Tabel 2.29
Laju Inflasi Kota Palopo Tahun 2013 - 2017 (%)

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi (%)	5,25	8,95	3,38	2,47	3,94

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

Dalam tiga tahun terakhir, dalam aspek ini Pemerintah Kota Palopo ternyata cukup mampu menekan serta mengendalikan laju inflasi. Jika pada tahun 2014 tingkat inflasi Kota Palopo sebesar 8,95 persen, tahun 2016 mampu ditempatkan pada angka 2,47 persen dan tahun 2017 naik sebesar 3,94. Laju inflasi Kota Palopo tahun 2014 sampai tahun 2017, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Capaian tingkat inflasi Kota Palopo tahun 2017 ini telah berada di bawah target capaian inflasi nasional yang menargetkan pada angka 3,5 persen. Tingkat inflasi di Kota Palopo pada tahun 2017 juga lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi di Provinsi Sulsel Tahun 2017 yang berada pada angka 4,44%. Tingkat inflasi Sulsel pada tahun 2013 berada angka 6,24, 2014 pada angka 8,61, 2015 pada 4,48, 2016 pada angka 2,94.

2.2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum. Semakin besar angka PDRB per kapita, semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.

Dengan mengequivalenkan PDRB per kapita dengan ukuran pendapatan di suatu wilayah, dan upaya pemerintah menjadikan masyarakat sebagai pelaku ekonomi riil yang menjadi pembentuk nilai PDRB, maka diharapkan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di Kota Palopo merupakan salah satu dampak dari hasil dan keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tertentu.

Tabel 2.30
PDRB Per Kapita Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	4,181,225.67	4,748,586.46	5,351,284.09	5,906,480.40	6,550,688.70
Jumlah Penduduk (Jiwa)	160,819	164,903	168,894	172,916	176,907
PDRB Perkapita (Juta)	26.00	28,79	31,68	34,18	37,0

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa rentang waktu 2013 – 2017 pendapatan per kapita masyarakat per tahun Kota Palopo meningkat. Jika pada tahun 2013 hanya pada angka 2,4 juta per bulan/kapita, pada tahun 2017 berada pada angka 3,08 juta per bulan/kapitanya. Pendapatan Per kapita Masyarakat Kota Palopo pada tahun 2017 ini masih berada dibawah rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Sulsel Tahun 2017 yang berada pada angka 48,21 Juta/Tahun atau setara 4,01 juta per bulan, namun lebih tinggi dari pendapatan nasional per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2017 yang berada pada angka 13,59 Juta/Tahun atau 1,13 juta/bulan/kapita.

2.2.1.4. Indeks Gini

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Tabel 2.31
Gini Ratio Kota Palopo Tahun 2014 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Gini Ratio	-	-	0,43	0,37	0,34

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

Jika dibandingkan dengan nasional dan sulsel, gini rasio Kota Palopo tahun 2015 masih berada di atas gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0,4 dan nasional 0,41. Tahun 2016, gini rasio Palopo berada dibawah gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0,4 dan nasional pada angka 0,4. Kemudian pada tahun 2017, juga berada dibawah gini rasio Sulsel yang berada pada angka 0,42 dan nasional pada angka 0,39.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Palopo terus mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, yang artinya terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kota Palopo.

2.2.1.5. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sementara garis kemiskinan sendiri merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berikut adalah data kondisi kemiskinan Kota Palopo 2013-2017:

Tabel 2.32
Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo
Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	15.500	14.590	14.510	15.020	15.440
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,57	8,80	8,58	8,74	8,78
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	228.881	246.727	261.056	274.319	228.881
Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan (%)	90.43	91.2	91.42	91.26	91.22

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2017, jumlah penduduk miskin Kota Palopo meningkat dibanding tahun – tahun sebelumnya. Salah satu penyebab meningkatnya penduduk miskin adalah tingginya tingkat pengangguran dan urbanisasi penduduk dimana Kota Palopo yang menjadi destinasi para pencari kerja di wilayah Luwu Raya.

Persentase penduduk miskin Kota Palopo pada tahun 2017 ini masih berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan yang tahun 2017 yang berada pada angka 9,38% dan dibawah persentase penduduk miskin nasional yang berada pada angka 10,12%

2.2.1.6. Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari

Indikator ini mengindikasikan bahwa persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah \$1 (PPP) per hari termasuk kategori miskin. Indikator ini disepakati menunjukkan status seseorang miskin dan bermanfaat untuk memonitor kemajuan upaya pengetasan kemiskinan setiap negara termasuk Indonesia.

Tabel 2.33
Persentase Pendapatan Penduduk Kurang dari USD.1,00 PPP

URAIAN	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin dengan pendapatan di bawah \$ 1 PPP	15.500	14.590	14.510	15.020	15.440
Jumlah Penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari	9,64%	8,85%	8,59%	8,69%	8,72%

Sumber Data : BPS Kota Palopo Tahun 2018

2.2.1.7. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah data perkembangan PAD Kota Palopo 2013-2017 :

Tingkat 2.34

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	51.663.729.162,20	81.646.676.135,53	92.277.783.805,00	134.110.076.220,35	167.307.131.609,15
b	Total Pendapatan Daerah	Rupiah	604.409.930.598,56	704.255.513.596,57	854.330.445.704,26	1.004.346.574.517,06	934.121.533.937,22
c	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	8,55	11,59	10,80	13,35	17,91

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo (Perda APBD TA 2018)

Data di atas menunjukkan bahwa dalam 4 tahun, besaran peningkatan PAD Kota Palopo hanya sekitar 10% meningkat dari 8,55% menjadi 17,91%, atau rata-rata 2% selama lima tahun terakhir. Ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan Kota Palopo ditunjang atau lebih banyak berasal dari dana dana pemerintah pusat seperti bagi hasil atau DAU. Sehingga kemandiri fiskal sebagai sebuah daerah otonom masih sangat rendah sebab masih sangat tergantung pada keuangan dari pemerintah pusat.

Angka pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa dari 100 Milyar Pendapatan Daerah Kota Palopo pada tahun 2013, hanya 8,55 Milyar yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Kondisinya kemudian meningkat pada tahun 2017, dimana dari 100 Milyar Pendapatan Daerah, sebanyak 17,91 Milyar diantaranya berasal dari PAD Kota Palopo.

2.2.1.8. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pemerintah Kota Palopo selama 3 tahun berturut-turut sejak Tahun 2015 hingga 2017 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Tingkat 2.35

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Predikat Laporan Keuangan	Predikat	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo (Perda APBD TA 2018)

2.2.1.9. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah indikator kualitas konsumsi pangan oleh masyarakat. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah.

Dengan mengetahui skor PPH, pemerintah bisa menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan kemudian

merencanakan strategi apa yang bisa dilaksanakan untuk memperbaiki konsumsi dan ketersediaan pangan. Semakin tinggi persentase indikator ini, semakin baik kualitas konsumsi pangan oleh masyarakat.

Tabel 2.36
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Standar	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Kecukupan Gizi /AKG(%)						
	Padi		19.23	20.63	22.18	22.50	22.90
	Umbi		1.69	0.91	1.06	1.17	1.28
	Pangan Hewani		4.54	19.80	19.69	21.60	21.98
	Minyak dan Lemak		0.77	4.13	4.17	4.05	4.31
	Buah/Biji Berminyak		0.23	0.74	0.44	0.27	0.73
	Kacangan		7.69	2.48	3.28	3.69	4.12
	Gula		1.92	1.82	2.04	0.72	0.73
	Sayur Buah		23.07	17.57	25.81	27.00	27.48
	Lain		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bobot masing-masing kelompok pangan						
	Padi	25	25	25	25	25	25
	Umbi	2.5	2.2	1.1	1.2	1.3	1.4
	Pangan Hewani	24	5.9	24	22.2	24	24
	Minyak dan Lemak	5	1	5	4.7	4.5	4.7
	Buah/Biji Berminyak	1	0.3	0.9	0.5	0.3	0.8
	Kacangan	10	10	3	3.7	4.1	4.5
	Gula	2.5	2.5	2.2	2.3	0.8	0.8
	Sayur Buah	30	30	21.3	29.1	30	30
	Lain		0	0	0	0	0
3	Skor Pola Pangan Harapan	100	76.90%	82.50%	88.70%	90%	91.60%

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan adanya perbaikan kualitas konsumsi pangan oleh masyarakat Kota Palopo sejak 2013-2017. Jika pada tahun 2013 hanya pada angka 76,86 tahun 2017 mencapai angka 91,60. Ini menggambarkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kota Palopo semakin memperhatikan aspek keberimbangan gizi, keamanan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam.

2.2.1.10. Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam. Berikut adalah kondisi cadangan Pangan Kota Palopo 2013-2017 :

Tabel 2.37
Penguatan Cadangan Pangan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Cadangan pangan Kota Palopo (Ton)	513	533.8	612	663	720
2	Koefisien 100 Ton (Ton)	100	100	100	100	100
3	Persentase Penguatan cadangan pangan Kota Palopo (%)	51,3	53,38	61,2	66,3	72

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa cadangan pangan utama Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 terus menguat. Jika pada tahun 2013 hanya berada pada angka 51.3% pada tahun 2017 menjadi 72%.

2.2.1.11. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk.

Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll).

Kerawanan Pangan Kronis adalah suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, aset produksi dan kekurangan pendapatan.

Tabel 2.38
Penanganan Daerah Rawan Pangan
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penanganan daerah rawan pangan (Skor atau Nilai)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	0.32 - 0.48	Data Tidak Tersedia
Predikat	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Agak Tahan	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2018

Sesuai data Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo, tidak ada satupun kelurahan atau spot wilayah yang berstatus daerah rawan pangan.

2.2.1.12. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi sebuah daerah dipengaruhi oleh sektor atau lapangan usaha

pertanian/perkebunan. Untuk menghitungnya dibutuhkan angka jumlah kontribusi sektor terhadap jumlah PDRB daerah tahun berkenaan.

Tabel 2.39
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	Juta	780.692,60	934.573,1	1.014.556,61	1.048.007,67	1.152.632,07
2.	Jumlah PDRB	Juta	4.181.225,67	4.748.586,46	5.351.284,90	5.906.480,42	6.550.688,67
3	Persentase (1/2 x 100%)	%	18,67	19,68	18,96	17,73	17,60

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo 2017,

2.2.1.13. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Tanaman palawija adalah jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Indikator ini untuk melihat sejauh mana kontribusi tanaman palawija terhadap PDRB Kota Palopo.

Tabel 2.40
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija)	Juta					
2.	Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta	780.692,60	934.573,1	1.014.556,61	1.048.007,67	1.152.632,07
3	Persentase (1/2 x 100%)	%	-	-	-	-	-

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo 2017

2.2.1.14. Produksi Sektor Pertanian

Produksi sektor pertanian merupakan capaian kinerja atas produksi komoditas bahan pangan utama di Kota Palopo yang terdiri dari padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar serta sagu.

Tabel 2.41
Produksi Sektor Pertanian
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah produksi komoditas pertanian/peternakan (ton/tahun)					
Padi	28367	18895	28630	30167	32444
Jagung	5575	5857	4737	6303	5086
Ubi Kayu	224	281	177	70.4	70
Ubi jalar	112,88	101	13	18.94	4.55
Sagu	85.2	70.61	51.33	33.04	15.59
Daging Ruminansia	237.62	278.45	306.06	232.94	247.48

Daging Sapi	172.58	189.53	284.00	232.24	247.16
Daging Kerbau	65.04	88.92	22.06	0.70	0.32
Daging Kambing	-	-	-	-	-
Daging Unggas	1242.92	1409.8	2185.4	3085.93	3028.82
Daging Ayam Kampung	127.87	129.51	133.81	143.72	145.012
Daging Ayam Ras Pedaging	1107.89	1,271.71	2,043.39	2,934.04	2875.36
Daging Itik/Bebek	7.16	8.58	8.20	8.17	8.45
Telur	350,13	626,9	666,85	2063,9	1778,18
Ayam Buras	293.37	541.13	563.08	1999.48	1590.19
Ayam Ras	4.62	9.69	14.54	-	45.00
Itik/Angsa/Entog	52.14	76.08	89.23	64.42	142.99
Nilai (Juta)	13.281,87	12.378,45	12.040,57	27.454,47	78.511,00

Sumber Data : Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa produksi komoditas pertanian seperti padi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Berbeda halnya dengan jagung yang produksinya fluktuatif. Produksi komoditas peternakan seperti daging dan telur juga terus mengalami peningkatan produksi secara signifikan.

2.2.1.15. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Tanaman keras adalah istilah pertanian yang merujuk pada kelompok tanaman perkebunan yang sifatnya tahunan atau prenil. Misalnya kopi dan cengkeh dan kakao.

Tabel 2.42

Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kontribusi perkebunan (tanaman keras)	Juta					
2.	Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan	Juta	780.692,60	934.573,1	1.014.556,61	1.048.007,67	1.152.632,07
	Persentase (1/2 x 100%)	%	-	-	-	-	-

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Kota Palopo Tahun 2018

2.2.1.16. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi sektor perkebunan merupakan capaian kinerja atas produksi komoditas perkebunan yang diusahakan di Kota Palopo.

Tabel 2.43

Produksi Sektor Perkebunan Kota Palopo Tahun 2013 -2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah produksi komoditas perkebunan / ton					
Kelapa Dalam	62.75	67.18	55.82	49.67	31,92
Kopi Robusta	73.61	69.13	66.85	66.07	66,26
Kopi Arabika	1.69	0.4	0.61	0.05	0,01
Cengkeh	139.26	69.6	81.77	110.36	127.99
Kakao	2801.73	1763.18	1546.48	1240.17	1411.83
Nilai (Juta)	4.957,91	6.285,88	1.851,24	1.350.52	-

Sumber Data : Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa produksi komoditas perkebunan seperti cengkeh dan kakao di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 sangat fluktuatif. Produksi tertinggi komoditas ini terjadi pada tahun 2013. Namun setelah tahun berikutnya cenderung terus menurun. Olehnya fokus penanganan program dan kegiatan bidang perkebunan harus mampu menyikapi kondisi fluktuatifnya produksi perkebunan ini.

2.2.1.17. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Adalah persentase antara Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani dibagi jumlah produksi padi/bahan pangan utama.

Tabel 2.44
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama local hasil kelompok petani (ton) tahun n	Ton	34364	25205	33608	36592	37620
2.	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) tahun n						
	Padi	Ton	28367	18895	28630	30167	32444
	Jagung	Ton	5575	5857	4737	6303	5086
	Ubi Kayu	Ton	224	281	177	70.4	70
	Ubi Jalar	Ton	112,88	101	13	18.94	4.55
	Sagu	Ton	85.2	70.61	51.33	33.04	15.59
3	Persentase (1/2 x 100%)	%					
	Padi	%	82.55%	74.97%	85.19%	82.44%	86.25%
	Jagung	%	16.22%	23.24%	14.09%	17.22%	13.52%
	Ubi Kayu	%	0.65%	1.11%	0.53%	0.19%	0.19%
	Ubi Jalar	%	0.33%	0.40%	0.04%	0.05%	0.01%
	Sagu	%	0.25%	0.28%	0.15%	0.09%	0.04%

Sumber Data : Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan Kota Palopo Tahun 2018

2.2.1.18. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Data Kontribusi sektor kehutanan hanya disajikan sampai dengan tahun 2016, sebab tahun 2017 kewenangannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.45
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan	Milyar	266,60	222,60	214,20	199,20	Pindah kewenangan
B	Jumlah PDRB	Juta	4.181.225,67	4.748.586,46	5.351.284,90	5.908.480,42	Pindah kewenangan
c	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,01	0,01	0,01	0,05	Pindah kewenangan

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo Tahun 2016

2.2.1.19. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Palopo tidak mengalami perubahan setiap tahunnya, yakni dari 2,7 persen tahun 2013 tetap menjadi 2,7 persen tahun 2016. Walaupun sektor pertambangan bukan

menjadi sektor unggulan namun kontribusinya terhadap PDRB diharapkan bisa lebih ditingkatkan.

Data Kontribusi sektor kehutanan hanya disajikan sampai dengan tahun 2016, sebab tahun 2017 kewenangannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.46
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
A	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertambangan	Juta	7.378,71	8.526,91	10.052,93	10.940,53	11.556,77
B	Jumlah PDRB	Juta	4.181.225,67	4.748.586,46	5.351.284,90	5.906.480,42	6.550.688,67
C	Persentase	%	0,18	0,18	0,19	0,19	0,18

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

2.2.1.20. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang kepariwisataan daerah mampu mengakselerasi pariwisata di Kota Palopo. Beberapa komponen yang biasanya digunakan dalam perhitungan ini adalah investasi di bidang hotel, jumlah wisatawan asing dan lama mereka tinggal.

Tabel 2.47
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Juta	49.228,2	56.336,5	63.278,4	71.797,1	
b	Jumlah PDRB	Juta	4.181.225,67	4.748.586,46	5.351.284,90	5.906.480,42	6.550.688,67
c	Persentase	%	1,18	1,19	1,18	1,21	

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2018

2.2.1.21. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang perikanan daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

Tabel 2.48
Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun

			2013	2014	2015	2016	2017
A	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kelautan dan Perikanan	Juta					
B	Jumlah PDRB	Juta	4.181.225,67	4.748.586,46	5.351.284,90	5.906.480,42	6.550.688,67
C	Persentase	%					

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018

2.2.1.22. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang perdagangan daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

Tabel 2.49
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Juta	877.733,07	1.004.980,56	1.172.712,51	1.352.719,62	1.547.183,14
b	Jumlah PDRB	Juta	4.181.225,67	4.748.586,46	5.351.284,90	5.906.480,42	6.550.688,67
c	Persentase	%	20,99	21,16	21,91	22,90	23,62

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo 2017

2.2.1.23. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang perindustrian daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo.

Tabel 2.50
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Juta	127.503,52	143.409,43	158.172,18	171.807,48	184.743,96
b	Jumlah PDRB	Juta	4.181.225,67	4.748.586,46	5.351.284,90	5.906.480,42	6.550.688,67
c	Persentase	%	3,05	3,02	2,96	2,91	2,82

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palopo dari tahun ke tahun justru menurun. Ini menjadi persoalan mendasar mengingat Palopo sejatinya adalah sebuah Kota yang dipersiapkan menjadi Kota jasa dan perdagangan termasuk peningkatan kontribusi sektor industri yang berbasis rumah tangga.

Pada tahun 2013, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Palopo pada angka 3,05%, namun 2017 justru menurun menjadi 2,82%. Meski menurun, secara persentase nilai kontribusi sektor indsutri terhadap PDRB Kota Palopo tetap meningkat. Jika 2013 pada angka 127, 50 Milyar/Tahun, tahun 2017 menjadi 184,74 Milyar.

2.2.1.24. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi konsumsi rumah tangga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo

Tabel 2.51

Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri Rumah Tangga	Juta					
b	Jumlah PDRB	Juta	4.181.225,67	4.748.586,46	5.351.284,90	5.906.480,42	6.550.688,67
c	Persentase	%					

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun 2018

2.2.1.25. Pertumbuhan Industri

Tabel 2.52

Persentase Pertumbuhan Industri Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah industri tahun n – Jumlah industri tahun (n-1)**)	Buah	-	45	183	11	135
b.	Jumlah industri sampai tahun n	Buah	371	416	599	610	745
Persentase			-	12,13	43,99	1,84	22,13

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah industri di Kota Palopo sepanjang 2013-2017 meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2015, dimana terbentuk sebanyak 183 industri baru (43,99%), sementara di tahun 2014 hanya ada 416 industri dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 599 industri.

2.2.1.26. Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pembangunan di bidang transmigrasi daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo

Tabel 2.53

Kontribusi Sektor Transmigrasi Terhadap PDRB Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Transmigrasi	Juta	0	0	0	0	0
b	Jumlah PDRB	Juta	4.181.225,67	4.748.586,46	5.351.284,90	5.906.480,42	6.550.688,67

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
c	Persentase	%	□	□	□	□	□

Sumber Data : Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun 2018

Kontribusi transmigrasi terhadap kondisi perekonomian Kota Palopo sampai tahun 2017 belum dapat diukur. Sebab sampai dengan tahun pertengahan tahun 2018, untuk pembangunan daerah transmigrasi di Kecamatan Sendana, Kelurahan Peta, Kota Palopo masih pada tahap penyusunan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Adalah Indeks yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. IPM Merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). - IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. - Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dikelompokkan dalam empat kelompok, yaitu: 1. Kelompok "Sangat Tinggi": $IPM \geq 80$ 2. Kelompok "Tinggi": $70 \leq IPM \leq 80$ 3. Kelompok "Sedang": $60 \leq IPM \leq 70$ 4. Kelompok "Rendah": $IPM < 60$ Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Tabel 2.54
Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo
Tahun 2013–2017

No	Tahun	IPM
1	2013	75.02
2	2014	75.65
3	2015	76.27
4	2016	76.45
5	2017	76.71

Sumber Data : Palopo Dalam Angka Tahun 2018

Pada tabel menunjukkan bahwa selama periode 2013- 2017 angka IPM Kota Palopo mengalami peningkatan sebesar 0,63 point, dari 75,02 tahun 2013 menjadi 75,65 tahun 2014. Tahun 2015 IPM Kota Palopo mengalami peningkatan kembali sebesar 0,55 point dari tahun 2014 sebesar 76,27, dan Tahun 2016 kembali naik sebesar 76,69 serta Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 76,71.

Nilai IPM Kota Palopo pada tahun 2017 ini berhasil menggeser Kota Pare-Pare sebagai daerah ber IPM tertinggi kedua di Sulawesi Selatan dan menempatkan palopo sebagai kota dengan IPM tertinggi setelah Kota Makassar. Pada tahun sebelumnya Palopo selalu berada dibawah nilai capaian IPM Kota Pare-Pare.

2.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)

Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan adalah angka melek huruf. Indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya

manusia. Indikator melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat sekolah dasar, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Tabel 2.55
Angka Melek Huruf
Kota Palopo Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Melek Huruf Kota Palopo	97.14	99.2	98.22	96,07	98.02
2	Angka Melek Huruf Sul-Sel	-	93.61	92.93	93.01	94.06

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2018

Data diatas menunjukkan, pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Palopo yang buta huruf masih tersisa sebanyak 2.86%, sebab ada sebanyak 97.14% penduduk yang melek huruf. Pada tahun 2017, besaran penduduk yang melek huruf mencapai 98.02% yang artinya besaran penduduk yang buta huruf hanya tersisa 1.98%.

2.2.2.3. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Perkembangan Rata-rata Lama sekolah Kota Palopo 2013-2017 diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.56
Rata-rata Lama sekolah
Kota Palopo Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata Lama Sekolah Palopo	9,95	9,96	10,25	10,26	10,33
2	Rata-rata Lama Sekolah Sulsel		7,49	7,64	8,28	7,95

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Palopo & RKPD Sulsel 2019

Lama sekolah masyarakat Kota Palopo tahun 2017 masih lebih tinggi dibandingkan angka lama sekolah rata-rata Sulsel tahun 2017 yang berada pada angka 7,95 Tahun. Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017, lama bersekolah penduduk Kota Palopo selama 10,33 tahun, lebih lama dibandingkan tahun 2013 dimana lama bersekolah rata-rata penduduk Kota Palopo hanya 9,95 tahun.

2.2.2.4. Angka Harapan Hidup

Adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Kegunaan AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka usia harapan hidup masyarakat.

Perkembangan angka usia harapan hidup masyarakat Kota Palopo 2014-2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.57
Angka Usia Harapan Hidup
Kota Palopo Tahun 2013– 2017

Angka Usia Harapan Hidup				
2013	2014	2015	2016	2017
70,1	70,12	70,2	70,25	70,3

SumberData : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Usia harapan hidup masyarakat Kota Palopo tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup rata-rata Sulsel tahun 2017 yang berada pada angka 69,82 tahun, namun di bawah Nasional yang berada pada angka 71,06 tahun. Pada tahun 2017 rata-rata lama hidup penduduk Kota Palopo selama 70,3 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang berada pada angka 70,10 tahun.

2.2.2.5. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Dalam istilah medis Gizi Buruk disebut sebagai Malnutrisi Energi Protein (MEP) Berat, MEP itu sendiri ada dua macam yaitu MEP ringan dan berat. Pada MEP ringan disebut juga sebagai gizi kurang, belum menunjukkan gejala klinis yang khas, anak yang mengalami gizi kurang hanya terlihat kurus dan gangguan pertumbuhan. Sedangkan MEP berat atau gizi buruk, anak sudah memiliki gejala-gejala klinis yang khas beserta gangguan biokimiawi dalam tubuh.

Tabel 2.58
Persentase Balita Gizi Buruk
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jml Balita Gizi Buruk	Jiwa	5	7	11	3	4

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
b.	Jumlah Balita	Jiwa	13.851	15.774	15.275	16.177	16.963
c	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,04%	0,04%	0,07%	0,02%	0,02%
d	Balita Gizi Buruk per 10.000 balita	Rasio	4	4	7	2	2

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase balita gizi buruk di Kota Palopo 2013-2017 sangat rendah. Setiap tahun jumlah balita gizi buruk menurun. Dari 10.000 jumlah balita yang lahir pada tahun 2013 terdapat 4 kasus, dan tahun 2017 menurun menjadi 2 kasus per 10.000 balita.

2.2.2.6. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Dari tabel di bawah ini dapat dilihat terjadi penurunan persentase Balita gizi kurang dari tahun 2013. Faktor yang menyebabkan terjadinya Balita gizi kurang yakni masih kurangnya pengetahuan orangtua tentang pentingnya memenuhi kebutuhan dan kecukupan gizi anak.

Tabel 2.59
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Palopo
Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Banyaknya Balita Gizi Kurang	Jiwa	648	322	221	346	402
b.	Jumlah Balita	Jiwa	13.851	15.774	15.275	16.177	16.963
c	Persentase Balita Gizi Kurang	%	4,68%	2,04%	1,45%	2,14%	2,37%
d	Balita Gizi Kurang per 10.000	Rasio	468	204	145	214	237

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10.000 jumlah balita yang lahir pada tahun 2013 terdapat 468 gizi buruk, dan tahun 2017 menurun menjadi 237 kasus. Dari aspek persentase, jumlahnya menurun setiap tahun. Jika pada tahun 2013 sebanyak 4,68% pada tahun 2017 hanya tersisa 2,37%.

2.2.2.7. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Desa yang dimaksud dapat berarti kelurahan atau istilah-istilah lain bagi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah.

Tabel 2.60
Persentase Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kelurahan siaga aktif	48	48	48	48	48

b.	Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk	48	48	48	48	48
	Persentase Kelurahan Siaga Aktif	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

2.2.2.8. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.61

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Jumlah Angkatan kerja 15 tahun ke atas	Orang	65.906	67.996	65.346	67.504	75.563
	<i>Laki – Laki</i>	<i>Orang</i>	<i>41.253</i>	<i>42.122</i>	<i>40.014</i>	<i>40.975</i>	<i>47.057</i>
	<i>Perempuan</i>	<i>Orang</i>	<i>24.653</i>	<i>25.874</i>	<i>25.332</i>	<i>26.529</i>	<i>28.506</i>
	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	108.804	115.579	127.082	123.168	134.147
	<i>Laki – Laki</i>	<i>Orang</i>	<i>52.020</i>	<i>55.814</i>	<i>60.361</i>	<i>58.952</i>	<i>63.600</i>
	<i>Perempuan</i>	<i>Orang</i>	<i>56.784</i>	<i>59.765</i>	<i>66.721</i>	<i>64.216</i>	<i>70.547</i>
c	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,57	58,83	51,42	54,81	56,33
	<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	<i>%</i>	<i>79,30</i>	<i>75,47</i>	<i>66,29</i>	<i>69,51</i>	<i>73,99</i>
	<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	<i>%</i>	<i>43,42</i>	<i>43,29</i>	<i>37,97</i>	<i>41,31</i>	<i>40,41</i>

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo, Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2018, Olahan

Data di atas menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 menurun. Pada tahun 2013, dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, mampu menyediakan 60-61 orang angkatan kerja berusia 15 tahun keatas yang aktif secara ekonomi bekerja namun pada tahun 2017 angkanya menurun menjadi 56 orang per 100 penduduk. Ke depan, angka yang menjadi target persentase indikator ini diharapkan bisa terus meningkat.

Dari aspek gender, tabel di atas juga menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2013-2017 di Kota Palopo masih terus berada dibawah angka partisipasi angkatan kerja laki. Pada tahun 2017, selisih angkanya bahkan terpaut 33,58%. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota

Palopo perlu agar ke depan angka partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat.

2.2.2.9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah.

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Contoh: Jika TPAK 66% artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi pada periode tertentu.

Tabel 2.62
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Palopo Tahun 2013-2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	65.906	67.996	65.346	67.504	75.563
	- Laki – Laki	Orang	41.253	42.122	40.014	40.975	47.057
	- Perempuan	Orang	24.653	25.874	25.332	26.529	28.506
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Orang	102.220	110.171	120.400	116.200	126.879
	- Laki – Laki	Orang	49.313	53.208	57.633	56.109	60.630
	- Perempuan	Orang	52.907	56.963	62.767	60.091	66.249
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,47	61,72	54,27	58,09	59,56
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	%	83,66	79,16	69,43	73,03	77,61
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	%	46,60	45,42	40,36	44,15	43,03

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo 2018

Angka pada tabel diatas menunjukkan adanya penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo sepanjang 2013-2017. Jika pada tahun 2013, dari 100 orang penduduk usia 15 -64 tahun, ada 64 orang (pembulatan 64,47) yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa di Kota Palopo, pada tahun 2017 hanya tersedia 60 (pembulatan 59,56) orang yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa.

Artinya sepanjang 2013-2017, jumlah tenaga kerja di Kota Palopo yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, menurun. Ke depan diharapkan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palopo cenderung meningkat. Olehnya Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan ketenagakerjaan.

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2013-2017 di Kota Palopo masih jauh tertinggal dibawah TPAK laki. Pada tahun 2017, selisih angkanya bahkan terpaut 34,58%. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo perlu agar ke depan TPAK perempuan terus meningkat.

2.2.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran. Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tabel 2.63
Pengangguran Terbuka
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	Orang	5.962	5.540	7.890	9.739	8.282
b	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	65.906	67.996	65.346	67.504	75.563
c.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,03	8,15	12,07	14,43	10,96

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo & BPS Kota Palopo Tahun 2018

Tingginya arus urbanisasi menjadi salah satu meningkatnya tingkat pengangguran di Kota Palopo. Kota Palopo menjadi salah satu kota tujuan pendidikan di wilayah utara Sulawesi Selatan dan mereka yang telah lulus dari perguruan tinggi masih tetap tinggal di Kota Palopo untuk mencari pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kota Palopo mencapai 10,96% di tahun 2017 dan belum mampu diturunkan sesuai target daerah sebesar 5,72%.

Meski demikian, dari aspek gender, sesuai data BPS Kota Palopo 2018, tingkat pengangguran perempuan pada tahun 2017 hanya pada angka 8,00%, berselisih empat point dengan tingkat pengangguran laki-laki yang masih berada pada angka 12,76%. Kondisi pada tahun 2017 ini jauh lebih baik, dimana pada tahun 2015, sesuai data BPS, tingkat pengangguran perempuan pada saat itu masih berada pada angka 10,29%. Ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan perempuan cukup berhasil ditekan.

2.2.2.11. Rasio Penduduk yang Bekerja

Adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak penduduk usia kerja yang bekerja.

Tabel 2.64
Rasio Penduduk yang Bekerja
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Penduduk yang bekerja	Jiwa	59.944	62.456	57.456	57.765	67.281
b.	Angkatan kerja	Jiwa	65.906	67.996	65.346	67.504	75.563
c.	Persentase penduduk yang	%	90,95	91,85	87,93	85,57	89,04

bekerja

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018

Angka pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 persentase penduduk yang bekerja di Kota Palopo 89,04%, artinya dari 100 orang angkatan kerja hanya 89 orang yang bekerja. Kondisi ini jauh lebih buruk dibandingkan tahun 2013 dimana dari 100 orang angkatan kerja, sebanyak 91 orang telah bekerja. Angka ini menggambarkan bahwa semakin banyak angkatan kerja di Kota Palopo yang tidak bekerja sehingga akan berdampak pada jumlah dan persentase pengangguran. Olehnya ke depan angka yang menjadi target persentase indikator ini harus ditingkatkan.

2.2.2.12. Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.

Tabel 2.65

**Persentase Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Produk Domestik Regional Bruto (x 000) Harga Konstan	Juta	3.633.005,18	3.889.239,03	4.140.871,84	4.428.497,04	4.746.935,70
b.	Jumlah Tenaga Kerja (Yang Bekerja)	Orang	59.944	62.456	57.456	57.765	67.281
c.	Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja	Juta/O rang	62,17	62,27	72,07	76,66	70,56

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo 2017, diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa produktifitas tenaga kerja di Kota Palopo 2013-2017 meningkat. Jika pada tahun 2013 seorang tenaga kerja yang bekerja menghasilkan nilai tambah sebesar 62,17 Juta/Orang/Tahun, tahun 2017 meningkat menjadi 70,56 Juta/Orang/Tahun atau hanya meningkat sebesar 8,39 Juta dalam lima tahun terakhir.

2.2.2.13. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Kesempatan Kerja yang biasanya dinyatakan dalam bahasa tingkatan adalah persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja..

Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi. Misal: TKK 94%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), sebanyak 94 orang merupakan penduduk bekerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih, dan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Tabel 2.66
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Kesempatan kerja (= Jumlah Penduduk yang Telah Bekerja)	Orang	59.944	62.456	57.456	57.765	67.281
b.	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas						
	- Laki – Laki	Orang	52.020	55.814	60.361	58.952	63.600
	- Perempuan	Orang	56.784	59.765	66.721	64.216	70.547
	Jumlah	Orang	108.804	115.579	127.082	123.168	134.147
c.	Rasio Kesempatan Kerja	%	55,09	54,04	45,21	46,9	50,15

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018, Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2018

Data diatas menunjukkan bahwa, dari 100 orang penduduk usia 15 ke atas di Kota Palopo tahun 2017, hanya 50 orang yang memiliki kesempatan kerja atau merupakan penduduk yang bekerja. 50 orang lainnya tidak bekerja atau menganggur. Angka ini jauh menurun dibandingkan kondisi tahun 2013 dimana dari 100 orang penduduk usia 15 tahun keatas, hanya terdapat 45 orang yang tidak bekerja atau pengangguran.

Kemudian jika dilihat dari angka kinerja yang ada, capaian inipun masih sangat rendah. Pemerintah Kota palopo harus berupaya membuka akses yang lebih luas bagi penyediaan lapangan kerja baru melalui berbagai strategi dan program ketengakerjaan atau meningkatkan jiwa wirausaha bagi para penduduk usia kerja.

2.2.2.14. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Molai tahun 2001 status pekerjaan dibedakan menjadi 8 kategori. Yakni berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, Majikan, Pekerja bebas di nonpertanian, Pekerja keluarga/tak dibayar.

Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa

perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Indikator ini menunjukkan kemandirian tenaga kerja dalam membuka lapangan kerja sendiri. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin besar peluang tenaga kerja untuk membuka lapangan usaha sendiri.

Tabel 2.67
Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

No	Status Pekerjaan Utama	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Tenaga Kerja yang Berusaha sendiri						17.166
	- Laki – Laki	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	12.145
	- Perempuan	Orang	-	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	5.021
	Pekerja Bebas Keluarga						
	- Laki – Laki	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2.336
	- Perempuan	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	-
b	Total Kesempatan kerja (= Jumlah Penduduk yang Telah Bekerja)	Orang	59.944	62.456	57.456	57.765	67.281
c	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja						
		%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	25,51
	- Laki – Laki	Persen	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	18,05%
	- Perempuan	Persen	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	7,46%

Sumber Data : BPS, Palopo Dalam Angka Tahun 2017

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hanya ada 25,51% tenaga kerja di Kota Palopo yang berusaha sendiri. Artinya dari 100 tenaga kerja, hanya ada 26 (pembulatan 25,51) tenaga kerja yang bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Dari aspek gender, besaran tenaga kerja perempuan yang berusaha sendiri masih berselisih 10,59% berada dibawah besaran tenaga kerja laki laki yang berusaha sendiri yang berada pada angka 18,05%, sementara perempuan hanya pada angka 7,46%. Pada tahun 2017, dari 100 pekerja, ada 18 orang pekerja laki-laki yang berusaha sendiri, sementara dari 100 pekerja perempuan pada tahun tersebut hanya ada 7 orang pekerja perempuan yang berusaha sendiri. Artinya kemandirian pekerja laki-laki masih lebih baik dibandingkan kemandirian pekerja perempuan.

2.2.2.15. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah.

Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan psikologisnya (*psychological needs*) seperti kebutuhan ibadah, makan protein

hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca dan tulis latin.

Berikut adalah data kondisi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di Kota Palopo 2013-2017 :

Tabel 2.68
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Keluarga Pra Sejahtera	KK	5.583	5.583	5.583	3.500	3.134
b.	Keluarga Sejahtera I	KK	6.847	6.847	6.847	7.304	10.804
	Jumlah		12.430	12.430	12.430	10.804	13.938
c.	Jumlah Keluarga	KK	30.860	30.860	30.860	35.606	34.786
	Persentase		40,28	40,28	40,28	30,34	40,07

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB & BPS Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, di Kota Palopo terdapat 40,28% kategori keluarga sejahtera I dan keluarga prasejahtera. Namun 2017, jumlah kemudian menurun menjadi 40,07%. Ini menunjukkan adanya pengurangan dari aspek persentase jumlah keluarga untuk kedua kategori ini.

Kondisi juga mengartikan bahwa s.d 2017, dari 100 keluarga yang ada, masih ada 40 keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Ke depan, angka target persentase untuk indikator ini harus lebih ditekankan.

2.2.2.16. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Tabel 2.69
Indeks Kepuasan Masyarakat
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-

Sumber Data :

2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga
2.2.3.1. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga

Tabel 2.70
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Capaian Pembangunan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	-	0.00007	0.00012	0.00014	0.00016
b.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	-	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001
c.	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0008
d.	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0.00006	0.00005	0.00005	0.00006	0.00005

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018
Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel 2.71
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2013 – 2017
Menurut Kecamatan
Kota Palopo

No	Kecamatan	Jumlah Grup Kesenian Per 10.000 Penduduk	Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 Penduduk	Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk
1.	Wara	0.0004	0.00003	0.0016	0.00008
2.	Wara Timur	0.0002	Data Tidak Tersedia	0.0006	0.00009
3.	Wara Selatan	0.0004	Data Tidak Tersedia	0.0004	0.0006
4.	Wara Barat	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	0.0002	0.00022
5.	Wara Utara	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	0.0005	0
6.	Mungkajang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	0.0010	0
7.	Sendana	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	0.0006	0
8.	Bara	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	0.0003	0
9.	Telluwanea	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	0.0011	0

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018
Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib dasar diarahkan pada pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

2.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Merupakan jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak dibagi jumlah seluruh anak yang berusia 4-6 tahun yang dinyatakan dalam persentase.

Tabel 2.72
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Orang	4438	4484	4681	4338	4110
2	Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun	Orang	7446	7262	7411	6875	6511
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	59,60	61,75	63,16	63,10	63,12

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa, meski pun meningkat, tingkat partisipasi anak berusia 4-6 tahun mengakses pendidikan anak usia dini relatif masih rendah dan belum mencapai angka 75%. Ini menunjukkan bahwa perlunya ada akselerasi program dan kegiatan sehingga lebih banyak anak usia 4-6 tahun yang mengakses lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Palopo.

Sampai dengan tahun 2017, jumlah lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Palopo, totalnya sebanyak 129 lembaga, termasuk yang berada dibawah Kementerian Agama. Jumlah ini terdiri dari Raudatul Afhal (RA) sebanyak 5, TPA sebanyak 3, Satuan Paud Sejenis (SPS) sebanyak 2, Kelompok Bermain (KB) sebanyak 30, TK sebanyak 89.

Beberapa aspek yang mesti menjadi perhatian dalam meningkatkan angka partisipasi ini adalah memastikan edukasi dan sosialisasi urgensi pendidikan anak usia dini terhadap orang tua dan memastikan bahwa biaya pendidikan pada level ini bisa dijangkau oleh semua kalangan.

2.3.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi Kasar adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angkanya menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau **lebih dari 100** persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2.73
Angka Partisipasi Kasar Kota Palopo
Tahun 2013 -2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017

1	APK SD/MI/Paket A	106,32	109,55	101,81	111,66	106,00
2	APK SMP/MTs/Paket B	86,88	84,86	88,23	86,17	84,91
3	APK SMA/MA/SMK/Paket C	75,52	79,32	91,56	95,35	85,39

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka

Tabel diatas menunjukkan bahwa partisipasi kasar tingkat SD sederajat di Kota Palopo tahun 2013-2017 selalu melebihi 100%. Sementara APK tingkat SMP/sederajat dan SMA/sederajat selalu dibawah 100%.

Kondisi ini menggambarkan setiap tahunnya selalu ada penduduk yang sudah bersekolah di tingkat SD, meski umurnya belum mencukupi 7 tahun, atau melebihi umur yang seharusnya. Namun kondisi ini juga mencerminkan bahwa di Kota Palopo, untuk tingkat sekolah dasarnya, tetap mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya yakni penduduk berumur 7-12 tahun.

Pada tingkat pendidikan SMP/sederajat, partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan ini menurun. Jika pada tahun 2013 dari 100 orang penduduk berumur 13-15 tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 86-87 orang, pada tahun 2017 menurun menjadi 84-85 orang, per 100 penduduk umur 13-15 tahun.

Sementara pada jenjang SMA/sederajat partisipasi kasar pada jenjang pendidikan ini justru meningkat. Jika pada tahun 2013 dari 100 orang penduduk berumur 16-18, tahun yang bersekolah rata-rata sebanyak 75-76 orang, pada tahun 2017 meningkat menjadi 85 orang, per 100 penduduk umur 16-18 tahun.

Beberapa aspek yang sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan partisipasi kasar adalah aspek ketersediaan sekolah, guru dan keterjangkauan biaya pendidikan. Olehnya ke depan melalui pelaksanaan pendidikan paripurna, Kota Palopo berharap mampu meningkatkan angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP sederajat. Untuk menyikapi hal ini Pemerintah Kota Palopo melaksanakan program pendidikan gratis. Sehingga diharapkan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan partisipasi pada anak usia sekolah.

2.3.1.1.3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini menunjukkan besaran atau persentase komposisi penduduk usia menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki masing-masing tingkat pendidikan. Mulai dari SD, SMP dan SMA/sederajat. Ini untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya atau sebagai bahan analisis pasar kerja.

Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut. Berikut adalah data penduduk usia 10 tahun keatas di Kota Palopo 2013-2017, sesuai tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan :

Tabel 2.74
Persentase Pendidikan yang Ditamatkan
Kota Palopo 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Tamat SD/sederajat	%	21.63	21.36	19.23	30.47	14.18
2	Tamat SMP/sederajat	%	18.23	16.29	18.02	11.82	23.63
3	Tamat SMA	%	30.66	25.42	26.12	31.75	36.68
4	Tamat SMK	%	4.89	5.13	3.89	4.06	2.81
5	Tamat Perguruan Tinggi	%	14.02	12.75	15.72	14.08	15.67

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Diploma I/II	%	0.37	0.38	0.33	0.29	0.37
	Diploma III	%	2.76	1.61	2.61	1.82	1.39
	Diploma IV/S1-S3	%	10.89	10.76	12.78	11.97	13.91
6	Tidak/Belum Bersekolah	%	10.57	19.06	17.03	7.85	7.02

Sumber : BPS, Palopo Dalam Angka, Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Palopo

Data diatas menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia 10 tahun keatas untuk kategori penduduk yang tamat perguruan tinggi di Kota Palopo sepanjang 2013-2017 meningkat. Jika pada tahun 2013, besaran penduduk yang tamat perguruan tinggi sebesar 14.02%, pada tahun 2016 meningkat menjadi 15.67%. Pada tingkat SMA, meningkat dari 30.66% pada tahun 2013 menjadi 36.68% pada tahun 2017 dan SMK dari 4.89% menurun menjadi 2.81%.

2.3.1.1.4. Angka Partisipasi Murni

Adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu

2.3.1.1.4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Tabel 2.75
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Kota Palopo
Tahun 2013 –2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A	21.159	18.162	17.491	20.936	22.327
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun	21.917	18.622	18.586	21.952	22.500
3	APM SD/MI (%)	96,54	97,53	94,11	95,37	99,32

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Kota Palopo

Tabel di atas menunjukkan, pada tahun 2013, terdapat 96,54% anak usia 7-12 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SD/MI sederajat. Dan pada tahun 2017 menjadi 99,23%. Namun pada tahun-tahun berikutnya, jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, yang menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini cukup baik, misalnya dengan jumlah ketersediaan sekolah yang tersedia.

2.3.1.1.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Tabel 2.76
Angka Partisipasi Murni Kota Palopo
Tahun 2013 -2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang	8.018	8.257	7.974	8.600	8.933

SMP/MTs/Paket B						
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun	10.899	10.566	10.572	11.226	11.469
3	APM SMP/MTS (%)	73,57	78,15	75,43	76,61	77,89

Sumber Data :Badan Pusat Statistik Kota Palopo

Tabel diatas menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2013, hanya 73,57 % anak usia 13-15 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMP/MTs sederajat, pada tahun 2017 sudah mencapai angka 77,89%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik. Meski pun angkanya jika dibandingkan dengan APM tingkat SD sederajat, APM pada tingkat SMP/ sederajat masih berada di bawah.

2.3.1.1.4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C

Tabel 2.77
Angka Partisipasi Murni Kota Palopo
Tahun 2013 –2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah siswa usia 16-18 Tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C	4.823	7.341	8.475	7.204	7.610
2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun	9.792	12.136	12.411	10.962	11.457
3	APM SMA/SMK/MA/Paket C sederajat	49,25	60,49	68,29	65,72	66,42

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

Tabel diatas menunjukkan, APM pada tingkat pendidikan ini terus membaik setiap tahunnya. Jika tahun 2013, hanya 49,25 % anak usia 16-18 tahun yang tepat waktu bersekolah di tingkat SMA/SMK sederajat, pada tahun 2017 sudah mencapai angka 66,42,89%. Jumlah anak yang masuk tepat waktu sekolah semakin tinggi, menunjukkan daya serap sekolah pada tingkat pendidikan ini semakin membaik.

2.3.1.1.5. Angka Partisipasi Sekolah

Adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 2.78
Angka Partisipasi Sekolah
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun yang masih bersekolah	21,917	18,622	18,396	21,952	22,347

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21,917	18,622	18,586	21,952	22,500
1.3	APS SD/MI (per 1.000)	1000	1000	989.8	1000	993.2
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun yang masih bersekolah	10,288	10,050	10,416	10,841	11,255
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10,899	10,566	10,572	11,226	11,469
2.3	APS SMP/MTs (per 1.000)	943.9	951.2	985.2	965.7	981.3
3	Jumlah murid usia 16-18 tahun yang masih bersekolah	6,855	10,046	10,163	9,692	10,121
3.1	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9,792	12,136	12,411	10,962	11,457
3.2	APS SMA/SMK/ sederajat (per 1.000)	700,01	827,8	818,9	884,1	883,4

Sumber Data : - BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2014-2018, diolah

Sesuai data BPS diatas, memperlihatkan bahwa angka partisipasi sekolah penduduk yang berada pada umur 7-12 tahun menurun. Namun kondisi ini berbeda dengan penduduk umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun, yang angka partisipasi sekolahnya cenderung membaik sepanjang tahun 2013-2017.

2.3.1.1.5.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Tabel 2.79
Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun yang masih bersekolah	21,917	18,622	18,396	21,952	22,347
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21,917	18,622	18,586	21,952	22,500
1.3	APS SD/MI (per 1.000)	1000	1000	989.8	1000	993.2

Sumber : BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka Diolah

Data diatas menunjukkan bahwa angka APS umur 7-12 tahun pada tahun 2017 sebesar 992.3 yang artinya rata-rata ada 992 orang penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah dari 1000 penduduk berusia 7-12 tahun. Data BPS juga menunjukkan bahwa pada tahun 2017, rata-rata masih ada 68 orang penduduk berumur 7-12 tahun yang tidak atau belum pernah bersekolah per 1000 penduduk usia 7-12 tahun. Kondisi tahun 2017 ini kurang baik dibandingkan tahu 2013, dimana pada tahun tersebut, rata-rata penduduk usia 7-12 tahun, semuanya bersekolah.

2.3.1.1.5.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Tabel 2.80
Persentase Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun yang masih bersekolah	10,288	10,050	10,416	10,841	11,255
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10,899	10,566	10,572	11,226	11,469
2.3	APS SMP/MTs (per 1.000)	943.9	951.2	985.2	965.7	981.3

Sumber Data : BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka Diolah

Pada tingkat usia 13-15 tahun, tahun 2017 APS nya sebesar 981.3 yang artinya rata-rata ada sebanyak 981 orang penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah dari 1000 penduduk berusia 13-15 tahun pada tahun tersebut. Terdapat 18-19 orang penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah per 1000 penduduk usia 13-15 tahun.

2.3.1.1.5.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C

Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga terjadi peningkatan pada kelompok umur 16-18 tahun (SMA/MA/SMK). Pada kelompok umur 16-18 tahun, APS meningkat dari 70,01 persen tahun 2013 menjadi 88,34 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.81

Persentase Partisipasi Sekolah Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Jumlah murid usia 16-18 tahun yang masih bersekolah	6,855	10,046	10,163	9,692	10,121
3.1	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9,792	12,136	12,411	10,962	11,457
3.2	APS SMA/SMK/ sederajat (per 1.000)	700,01	827,8	818,9	884,1	883,4

Sumber Data : BPS Kota Palopo, Palopo Dalam Angka Diolah

Pada tingkat usia 16-18 tahun, pada tahun 2017, dari 1000 penduduk usia ini, terdapat 883 orang penduduk yang masih bersekolah, 13-14 orang tidak atau belum bersekolah dan 102.8 orang tidak lagi bersekolah. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013, dimana hanya terdapat 700 penduduk usia 16-18 tahun yang masih bersekolah, 5-6 orang tidak atau belum pernah sekolah dan 294 orang tidak lagi bersekolah.

2.3.1.1.6. Angka Putus Sekolah

Adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun).

Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil

maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Contoh APTS7-12 = 10,11% berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 10 sampai 11 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 10 anak yang putus sekolah.

Tabel 2.82
Angka Putus Sekolah
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0	0	0.40	0	0.68
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	5.14	4.13	1.45	3.43	1.87
3.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (%)	29.43	16.74	15.87	9,10	10.28

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2013-2018

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kota Palopo untuk tingkat SD/ sederajat cenderung meningkat. Jika pada tahun 2013 pada posisi 0%, tahun 2015 menjadi 0.40% dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 0.68%. Kondisi ini berbeda dengan angka putus sekolah pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yang justru menurun atau menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Pada tingkat SMP/ sederajat angka putus sekolah menurun dari 5.14% pada tahun 2013 menjadi 1.87% pada tahun 2017 dan SMA/ sederajat menurun dari 29.43% pada tahun 2013 menjadi 10.28% pada tahun 2017.

2.3.1.1.6.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Tabel 2.83
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SD/MI Kota Palopo	Orang	0	0	74	0	153
2.	Jumlah Seluruh APS SD/MI Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang pernah/ sedang bersekolah)	Orang	21,917	18,622	18,470	21,952	22,500
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	0.40	0	0.68

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2018

Data diatas menunjukkan bahwa angka putus sekolah Kota Palopo 2013-2017 pada tingkat SD cenderung meningkat. Angka putus sekolah Jika pada tahun 2013 sebesar 0% pada tahun 2017 sebesar 0,68%. Artinya pada tahun 2017, dari 100 siswa sekolah SD ada 1 orang siswa yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak

menamatkan pendidikannya pada jenjang SD/ sederajat. Ini mesti disikapi oleh Pemerintah sehingga angkanya tidak semakin meningkat.

2.3.1.1.6.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Tabel 2.84
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMP/MTs Kota Palopo	Orang	556	432	153	385	214
2.	Jumlah Seluruh Angka Partisipasi Sekolah (APS)SMP/MTs Kota Palopo (Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	10,817	10,465	10,567	11,213	11,465
3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	5.14	4.13	1.45	3.43	1.87

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2018

Data di atas menunjukkan bahwa angka putus sekolah Kota Palopo 2013-2017 pada tingkat SMP justru menurun. Dari 556 kasus pada tahun 2013 menurun menjadi 214 kasus pada tahun 2017.

Pada tahun 2013, dari 100 siswa ada 5 (pembulatan 5.14%) yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikannya pada jenjang SMP/ sederajat namun pada tahun 2017 dari 100 siswa hanya ada 1-2 (1,87%) orang saja yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan pendidikannya pada jenjang SMP/ sederajat.

2.3.1.1.6.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Tabel 2.85
Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Capaian Kinerja APTS SMA/SMK/ sederajat se Kota	Orang	2,611	1,963	1,869	962	1,147
2	Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/ sederajat se- Kota (Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun yang pernah/sedang bersekolah)	Orang	8,873	11,728	11,776	10,573	11,162
3.	Angka Putus Sekolah	%	29.43	16.74	15.87	9,10	10.28

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	(APS) SMA/SMK/MA						

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2018

Data diatas menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada tingkat ini cukup tinggi di Kota Palopo pada tahun 2013. Meskipun trendnya semakin tahun terus menurun. Jika pada tahun 2013 terdapat 29 orang siswa putus sekolah per 100 siswa (29,43%), pada tahun 2017 hanya terdapat 10 orang (10,28%) siswa yang putus sekolah per 100 orang siswa.

2.3.1.1.7. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan besar jumlah siswa yang tidak tinggal kelas atau berhasil menamatkan pendidikannya pada level yang sedang ia tempuh. Indikator ini menunjukkan keberhasilan para siswa dalam mengikuti ujian sekolahnya.

Tabel 2.86
Angka Kelulusan
Kota Palopo Tahun 2013 –2016

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Kelulusan SD	95,72	96,63	97,48	98,87	100
2.	Angka Kelulusan SMP	97,34	98,74	99,05	99,62	99,30
3.	Angka Kelulusan SMA/SMK	102,60	102,32	102,82	102,44	99,75

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2017

2.3.1.1.7.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Tabel 2.87
Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2936	2830	3038
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	3012	2862	3038
3.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	95,72	96,63	97,48	98,87	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun pada tingkat SD terus membaik. Jika pada tahun 2013 persentase angka kelulusan mencapai 95.72%, pada tahun 2017, semua siswa pada jenjang pendidikan SD/ sederajat lulus atau mencapai 100%.

2.3.1.1.7.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Tabel 2.88
Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2759	2822	2865
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2785	2833	2885
3.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,34	98,74	99,05	99,62	99,30

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

Demikian halnya dengan kelulusan tingkat SMP sederajat. Data di atas menunjukkan bahwa angka kelulusan dari tahun ke tahun pada tingkat ini terus membaik. Jika pada tahun 2013 persentase angka kelulusan masih pada posisi 97.34%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 99.30%.

2.3.1.1.7.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Tabel 2.89

Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
2.	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	102,60	102,32	102,82	102,44	99,75

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa angka kelulusan SMA sederajat pada empat tahun awal 2013-2016 angkanya melebihi 100%. Ini disebabkan karena mereka yang sebelumnya tinggal kelas atau tidak lulus, baru berhasil menamatkan pendidikannya pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Kemudian pada tahun 2017 masih terdapat 0,25% siswa yang tidak berhasil menamatkan pendidikan SMA sederajatnya tepat waktu karena tidak berhasil lulus.

2.3.1.1.8. Angka Melanjutkan (AM)

Indikator ini menggambarkan persentase pelajar yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Angka ini diperoleh dengan membagi Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs terhadap jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya.

2.3.1.1.8.1. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Tabel 2.90

Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	Siswa					
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya	Siswa			2936	2830	3038
3.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%					

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

2.3.1.1.8.2. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Tabel 2.91

Persentase Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	Siswa	4233	4534	4420	4531	-
2.	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya	Siswa	3225	3210	3213	3228	3361
3.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	131.25	141.24	137.56	140.36	-

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah lulusan SMP/Sederajat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/Sederajat meningkat setiap tahunnya. Jika pada tahun 2013 hanya pada angka 131.25%, pada tahun 2017 menjadi 140.36%. Angka melanjutkan yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa semua lulusan SMP/MTS yang ada di Kota Palopo, melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA/SMK/ sederajat.

Angka melanjutkan melebihi 100% ini, menurut data Dinas Pendidikan Kota Palopo, karena cukup banyak lulusan SMP/ sederajat yang berada di luar wilayah Kota Palopo, memilih untuk bersekolah di SMA/ sederajat yang berada di wilayah Kota Palopo. Terutama lulusan SMP/ sederajat yang menetap di perbatasan Kabupaten Luwu.

Beberapa alasannya adalah, sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah sekolah di Kota Palopo lebih kompetitif dibandingkan dengan sekolah SMA/ Sederajat yang berada di wilayah mereka tinggal. Faktor lainnya adalah karena orang tua mereka bekerja di wilayah Kota Palopo.

Kondisi ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap sistem zonasi pendidikan belum berjalan cukup baik. Sebab masih banyak lulusan sekolah yang memilih bersekolah diluar dari zona wilayahnya. Namun ini juga menunjukkan adanya ketimpangan kualitas sekolah maupun pendidikan sehingga para lulusan memilih bersekolah di wilayah Kota Palopo dengan alasan sarana dan prasarana sekolah serta

kualitas pembelajaran yang lebih kompetitif. Meski demikian kondisi ini juga menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017, daya serap pendidikan menengah baik SMA, SMK atau MA di Kota Palopo cukup baik, sehingga mampu menampung lulusan yang berasal dari luar Kota Palopo.

2.3.1.1.9. Fasilitas Pendidikan

2.3.1.1.9.1. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Indikator ini menggambarkan kondisi umum bangunan sekolah SD atau yang setingkat yang layak dipakai proses belajar mengajar. Semakin tinggi nilai persentasenya, menunjukkan bahwa tersedia ruang kelas yang cukup untuk menunjang proses belajar mengajar.

Tabel 2.92
Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Sekolah SD/MI berkondisi Baik	77	81	77	77	77
a	Jumlah SD Negeri Berkondisi Baik	61	61	62	62	63
b	Jumlah SD Swasta Berkondisi Baik	12	10	11	11	11
c	Jumlah MI Negeri Berkondisi Baik	0	5	4	4	4
d	Jumlah MI Swasta Berkondisi Baik	4	5	-	-	-
2	Jumlah seluruh SD/MI di Kota Palopo (Negeri & Swasta)	79	83	79	79	80
e	Jumlah SD Negeri	63	63	64	64	65
f	Jumlah SD Swasta	12	10	11	11	11
g	Jumlah MI Negeri	0	5	4	4	4
h	Jumlah MI Swasta	4	5	-	-	-
3	Persentase Sekolah SD/MI Kondisi baik(%)	97.47	97.59	97.47	97.47	96.25

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Palopo Dalam Angka, Dinas Pendidikan Tahun 2018

Data menunjukkan bahwa masih ada dua sekolah dasar (SD) di Kota Palopo yang kondisinya belum baik dalam menunjang proses belajar mengajar. Yakni Sekolah Dasar yang terletak di Tandung dan di Pamenta. Keduanya merupakan daerah Kota Palopo yang aksesnya relatif jauh dan berada pada daerah terluar dari wilayah Kota Palopo.

2.3.1.1.9.2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik

Tabel 2.93
Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jml SMP/MTs Kondisi Baik	27	34	28	29	30
a.	Jumlah SMP Negeri Berkondisi Baik	13	14	13	13	14
b	Jumlah SMP Swasta Berkondisi	7	13	8	8	8

	Baik					
c	Jumlah MTs Negeri Berkondisi Baik	1	1	7	8	8
d	Jumlah MTs Swasta Berkondisi Baik	6	6	-	-	-
2.	Jml Seluruh SMP/MTs	27	34	28	29	30
e	Jumlah SMP Negeri	13	14	13	13	14
f	Jumlah SMP Swasta	7	13	8	8	8
g	Jumlah MTs Negeri	1	1	7	8	8
h	Jumlah MTs Swasta	6	6	-	-	-
3.	Persentase Sekolah SMP/MTs Kondisi baik (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Tahun 2018

Tabel 2.94

**Persentase Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
Kota Palopo Tahun 2013 -2017**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jml SMA/SMK/MA Kondisi Baik	33	34	34	31	31
a.	Jumlah SMA Negeri Berkondisi Baik	6	7	6	6	6
b	Jumlah SMA Swasta Berkondisi Baik	7	7	6	6	6
c	Jumlah SMK Negeri Berkondisi Baik	4	4	7	7	7
d	Jumlah SMK Swasta Berkondisi Baik	15	15	14	11	11
e	Jumlah MA Berkondisi Baik	1	1	1	1	1
2	Jml Seluruh SMA/SMK/MA	33	34	34	31	31
e	Jumlah SMA Negeri	6	7	6	6	6
f	Jumlah SMA Swasta	7	7	6	6	6
g	Jumlah SMK Negeri	4	4	7	7	7
h	Jumlah SMK Swasta	15	15	14	11	11
i	Jumlah MA Negeri	1	1	1	1	1
j	Jumlah MA Swasta	0	0	0	0	0
3	Persentase Sekolah SMA/SMK/MA Kondisi baik (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS dan Dinas Pendidikan Tahun 2018

2.3.1.1.10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Adalah gambaran ketersediaan atau daya tampung sekolah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Pendidikan dasar adalah tingkat SD/Mi dan SMP/MTs. Sehingga jumlah sekolah yang berada dalam tabel di bawah ini adalah jumlah SD dan Jumlah Sekolah madrasah Ibtidaiyah (MI) yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama dan Pihak Swasta lainnya, namun berlokasi di Kota Palopo.

Tabel 2.95

**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar (SD/SMP yang sederajat) Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun

		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah	79	83	79	79	80
	<i>SD Negeri</i>	63	63	64	64	65
	<i>SD Swasta</i>	12	10	11	11	11
	<i>MI Negeri</i>	0	5	4	4	4
	<i>MI Swasta</i>	4	5	-	-	-
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	21,917	18,622	18,586	21,952	22,500
1.3.	Rasio SD/MI (per 10.000)	36	45	43	36	36
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	27	34	28	29	30
	<i>SMP Negeri</i>	13	14	13	13	14
	<i>SMP Swasta</i>	7	13	8	8	8
	<i>MTs Negeri</i>	1	1	7	8	8
	<i>MTs Swasta</i>	6	6	0	0	0
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10,899	10,566	10,572	11,226	11,469
2.3.	Rasio SMP/MTs (per 10.000)	25	32	26	26	26
3	Pendidikan Dasar (SD dan SMP)					
3.1	Total Jumlah gedung sekolah (SD + SMP sederajat)	106	117	107	108	110
3.2	Total jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun + jumlah penduduk usia 13-15 tahun	32,816	29,188	29,158	33,178	33,969
3.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Per 10.001	32	40	37	33	32

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2013-2017

Tabel diatas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar yakni SD dan SMP atau yang sederajat di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 cenderung stagnan. Jika pada tahun 2013 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) tersedia sekolah sebanyak 32 unit, tahun 2017 juga tersedia sebanyak 32 unit.

Untuk umur 7-12 tahun atau tingkat SD/sederajat, pada tahun 2013 tersedia 36 sekolah untuk 10.000 penduduk usia 7 – 12 tahun, sementara pada tahun 2017 juga masih tersedia 36 sekolah untuk 10.000 penduduk usia SD/MI.

Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ketersediaan bangunan sekolah untuk umur 13-15 tahun, dimana pada tahun 2013 sampai dengan 2017, hanya tersedia masing-masing hanya 25 dan 26 sekolah untuk menampung 10.000 penduduk usia 13 – 15 tahun.

2.3.1.1.11. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK.

Tabel 2.96

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	SMA/MA/SMK					
1	Jumlah Sekolah	33	34	34	31	31
	<i>SMA Negeri</i>	6	7	6	6	6
	<i>SMA Swasta</i>	7	7	6	6	6
	<i>SMK Negeri</i>	4	4	7	7	7
	<i>SMK Swasta</i>	15	15	14	11	11
	<i>Madrasah Aliyah</i>	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk Usia 16-18 th	9792	12136	12411	10962	11457
3	Rasio Ketersediaan Sekolah (per 10.000 penduduk)	34	28	27	28	27

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo Dalam Angka 2013-2017

Tabel diatas menggambarkan bahwa rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan menengah di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 menurun. Jika pada tahun 2013 untuk 10.000 penduduk usia pendidikan 16-18 tahun tersedia sekolah sebanyak 34 unit, tahun 2017 hanya tersedia sebanyak 27 unit.

2.3.1.1.12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru sekolah yang bersangkutan. Indikator ini untuk menggambarkan ketersediaan guru pada level pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada level pendidikan tersebut.

Indikator ini akan menunjukkan perkembangan beban kerja guru. Semakin rendah nilai rasio ini berarti semakin tinggi beban kerja guru yang bersangkutan, yang berdampak pada berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa untuk pendidikan dasar, rasio guru dan murid sepanjang tahun 2013-2017, untuk tingkat pendidikan dasar menurun. Artinya beban kerja yang dirasakan oleh guru pendidikan dasar pada tingkat SD dan SMP semakin tinggi, meskipun jika dilihat dari angka rasio masih dalam kondisi normal.

Jika pada tahun 2013, untuk 10.000 siswa pendidikan dasar (SD dan SMP) dilayani 709 orang guru, pada tahun 2017 hanya dilayani oleh 635 orang guru. Artinya pada tahun 2013 rasio guru dan murid pada angka 1: 14, sementara pada tahun 2017 berada pada angka 1 : 15 atau 16.

Pada jenjang SD/Mi/ sederajat, data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2017, pada tingkat SD/MI, rasio guru dan murid stagnan berada pada angka 1 : 15, artinya satu orang guru harus mengajar sebanyak 15 orang.

Jenjang SMP/MTs/ Sederajat, pada tahun 2013, rasio guru murid berada pada angka 1 : 13, sementara pada tahun 2017 berada pada posisi 1 : 15. Rasio ini masih dalam batas normal dimana beban mengajar guru masih dalam tahap normal, sehingga

menjamin kualitas belajar mengajar. Sehingga persoalan yang kemudian harus ditangani adalah soal distribusi atau penyebaran guru sekolah.

Tabel 2.97
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	1174	1292	1833	1208	1136
	<i>SD Negeri</i>	980	980	1613	986	933
	<i>SD Swasta</i>	144	194	158	160	142
	<i>MI Negeri</i>	0	59	62	62	61
	<i>MI Swasta</i>	50	59	0	0	0
1.2.	Jumlah Murid	17468	21169	19565	19091	18719
	<i>SD Negeri</i>	15104	16657	16471	15867	15393
	<i>SD Swasta</i>	2242	2974	2384	2514	2659
	<i>MI Negeri</i>	0	769	710	710	667
	<i>MI Swasta</i>	122	769	0	0	0
	Rasio Guru/Murid SD/MI (per 10.000)	672	610	937	633	607
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	770	905	827	764	697
	<i>SMP Negeri</i>	474	538	514	497	478
	<i>SMP Swasta</i>	151	232	153	101	86
	<i>MTs Negeri</i>	64	42	160	166	133
	<i>MTs Swasta</i>	81	93	0	0	0
2.2.	Jumlah Murid	9958	10355	10338	10167	10137
	<i>SMP Negeri</i>	7324	7408	7823	7615	7562
	<i>SMP Swasta</i>	1195	1475	1105	1135	1289
	<i>MTs Negeri</i>	1159	1127	1410	1417	1286
	<i>MTs Swasta</i>	280	345	0	0	0
	Rasio Guru/Murid SMP/MTs (per 10.000)	773	874	800	751	688
3	Pendidikan Dasar (SD + SMP, Sederajat)					
3.1.	Jumlah Guru (SD dan SMP)	1944	2197	2660	1972	1833
3.2.	Jumlah Murid (SD dan SMP)	27426	31524	29903	29258	28856
3.3	Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar (per 10.000)	709	697	890	674	635

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

2.3.1.1.13. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Tabel 2.98
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	SMA/MA/SMK					
1	Jumlah Guru	1225	1263	2771	990	980
	SMA Negeri	319	361	1820	331	331
	SMA Swasta	153	153	114	87	87
	SMK Negeri	313	313	481	361	351
	SMK Swasta	398	398	301	169	169
	MA	42	38	55	42	42
2	Jumlah Murid	9457	11463	12017	11121	11131
	SMA Negeri	4169	4567	5059	5005	5005
	SMA Swasta	1030	1030	832	892	902
	SMK Negeri	3609	3619	4455	3496	3496
	SMK Swasta	649	2247	1671	1728	1728
3	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah per 1000	130	110	231	89	88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2013-2017.

Tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2013, untuk mendidik 1000 siswa SMA/SMK/MA sederajat di Kota Palopo tersedia guru sebanyak 131 orang. Artinya rasio guru murid berada pada angka 1 guru : 8 murid. Sementara pada tahun tahun 2017, hanya tersedia 83 orang guru untuk melayani 1000 orang siswa. Artinya rasio guru murid pada tahun 2017 adalah 1 guru : 11 murid.

2.3.1.1.14. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Dasar

Adalah rata-rata **jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas** dibagi jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru per kelas diperoleh dengan membagi jumlah ruang kelas tersedia dengan jumlah guru yang tersedia.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan **ketersediaan tenaga pengajar per kelas**. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.99
Persentase Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar
Kota Palopo 2013 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs, Swasta dan Negeri)					
1	Jumlah Guru Pendidikan Dasar (Orang)	1,944	2,138	2,660	1,972	1,833

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Jumlah Kelas Pendidikan Dasar (Buah)	1,035	1,205	1,095	1,145	1,120
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (Guru/ Kelas)	1.88	1.77	2.43	1.72	1.64
4	Jumlah Murid Pendidikan Dasar (Orang)	27,426	30,755	29,903	29,258	28,856
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Dasar (Siswa/ Kelas)	25.50	25.52	27.31	25.55	25.76
6	Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar per 10.000 (Guru/Siswa/Kelas)	0.69	0.58	0.81	0.59	0.57

Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2013-2017 dan Buku Potensi Wilayah Kota Palopo

Data diatas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) di tahun 2013, tersedia 1-2 orang (pembulatan 1.88) guru untuk setiap kelas pendidikan dasar, di tahun 2017, kondisinya tidak jauh berbeda yakni terdapat 1-2 orang guru (pembulatan 1.64) untuk setiap ruang kelas pendidikan dasar.

Data diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah rata-rata murid untuk setiap kelasnya pada pendidikan dasar sebanyak 25-26 orang per kelas (pembulatan 25.50), di tahun 2017 kondisinya juga tidak jauh berbeda yakni 25-26 orang siswa per kelasnya (pembulatan 25.76).

Sehingga pada tahun 2013, kondisi pendidikan dasar di Kota Palopo digambarkan sebagai berikut : untuk satu ruang kelas pendidikan dasar rata-rata diisi oleh sebanyak 25-26 orang siswa dan tersedia 1-2 orang guru untuk mendampingi proses belajar mengajar di setiap kelasnya. Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi di tahun 2017 dimana untuk setiap ruang kelas pendidikan dasar diisi oleh sebanyak 25-26 orang siswa per kelas dan tersedia 1-2 orang guru untuk mendampingi proses belajar mengajar di setiap kelasnya.

Sementara untuk rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Dasar yang dihitung per 10.000 jumlah siswa pendidikan dasar, diperoleh dengan membagi nilai rasio jumlah Guru Per Kelas Pendidikan Dasar (rasionya) dengan jumlah siswa pendidikan dasar yang ada.

Rasio ideal untuk indikator ini adalah 1, yang menunjukkan bahwa untuk satu kelas tersedia guru sebanyak 1 orang, untuk satu kelas belajar. Namun data di atas menunjukkan bahwa nilai rasionya cenderung menurun, sebab di tahun 2013 berada pada angka 0.69 tetapi pada tahun 2017 berada pada angka 0.57.

2.3.1.1.15. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata – Rata Pendidikan Menengah

Tabel 2.100

Persentase Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata Pendidikan Menengah

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) Swasta & Negeri					
1	Jumlah Guru Pendidikan Menengah (Orang)	1225	1263	2771	990	980
2	Jumlah Kelas Pendidikan Menengah (Buah)	445	446	466	477	462

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Rasio Guru Per Kelas Pendidikan Menengah (Orang/ Kelas)	2.75	2.83	5.95	2.08	2.12
4	Jumlah Murid Pendidikan Menengah (Orang)	10,095	11,861	12,472	11,732	11,785
5	Rasio Siswa Per Kelas Pendidikan Menengah (Siswa/ Kelas)	22.7	26.6	26.8	24.6	25.5
6	Rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Menengah per 10000 (Orang/Kelas)	2.73	2.39	4.77	1.77	1.80

Sumber : Diolah dari Data Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Palopo dalam Angka 2013-2017 dan Buku Potensi Wilayah Kota Palopo

Data diatas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK/Setara) di tahun 2013, tersedia 2-3 orang (pembulatan 2.75) guru untuk setiap kelas pendidikan dasar, di tahun 2017, tersedia 2 orang guru (pembulatan 2.12) untuk setiap ruang kelas pendidikan menengah.

Data diatas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah rata-rata murid untuk setiap kelasnya pada pendidikan menengah sebanyak 22-23 orang per kelas (pembulatan 22.7), di tahun 2017 kondisinya menjadi 25-26 orang siswa per kelasnya (pembulatan 25.5).

Sehingga pada tahun 2013, kondisi pendidikan menengah di Kota Palopo digambarkan sebagai berikut : untuk satu ruang kelas pendidikan menengah rata-rata diisi oleh sebanyak 22-23 orang siswa dan tersedia 2-3 orang guru untuk mendampingi proses belajar mengajar di setiap kelasnya. Namun di tahun 2017 untuk setiap ruang kelas pendidikan menengah diisi oleh sebanyak 25-26 orang siswa per kelas dan tersedia 2 orang guru untuk mendampingi proses belajar mengajar di setiap kelasnya.

Sementara untuk rasio Guru Murid per Kelas Rata-Rata Pendidikan Menengah yang dihitung per 10.000 jumlah siswa pendidikan menengah, diperoleh dengan membagi nilai rasio jumlah Guru Per Kelas Pendidikan Menengah (rasionya) dengan jumlah siswa pendidikan menengah yang ada.

Rasio ideal untuk indikator ini adalah 1, yang menunjukkan bahwa untuk satu kelas tersedia guru sebanyak 1 orang, untuk satu kelas belajar. Data diatas telah menunjukkan bahwa nilai rasionya cenderung menurun, sebab di tahun 2013 berada pada angka 2.73 tetapi pada tahun 2017 berada pada angka 1.80.

2.3.1.1.16. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan berapa besar penduduk usia 12 tahun pada tahun tertentu, yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasarnya yang dinyatakan dalam persentase. Ini menunjukkan berapa banyak penduduk Kota Palopo yang berhasil menamatkan pendidikan dasar tingkat SD/MI nya.

Tabel 2.101

Persentase Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Kota Palopo 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Banyaknya/jumlah lulusan SD	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2936	2830	3038
b	Banyaknya penduduk usia	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

	12 tahun						
c	Persentase Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

2.3.1.1.17. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki – Laki

Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun sampai 24 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100.

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Contoh: AMH Kota Palopo Tahun 2013 sebesar 92,93 persen, artinya sekitar 93 persen penduduk di Kota Palopo yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Tabel 2.102
Persentase Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun, Perempuan dan Laki – Laki
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang belum melek huruf	Orang	21	27	18	11	2
	<i>Laki</i>	<i>Orang</i>	<i>9</i>	<i>13</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>
	<i>Perempuan</i>	<i>Orang</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>2</i>
b	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn	Orang	31960	29506	39414	40,279	41,073
	<i>Laki</i>	Orang	<i>13960</i>	<i>17996</i>	<i>18,457</i>	<i>18,896</i>	<i>19,273</i>
	<i>Perempuan</i>	Orang	<i>18000</i>	<i>11510</i>	<i>20,957</i>	<i>21,383</i>	<i>21,800</i>
c	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki	%	99.934	99.908	99.954	99.973	99.995
	<i>Laki</i>	<i>%</i>	<i>99.94</i>	<i>99.93</i>	<i>99.96</i>	<i>99.97</i>	<i>100.00</i>
	<i>Perempuan</i>	<i>%</i>	<i>99.93</i>	<i>99.88</i>	<i>99.95</i>	<i>99.97</i>	<i>99.99</i>

*Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018, *Potensi Wilayah Palopo, Statistik Daerah Kota Palopo, Palopo Dalam Angka*

Data diatas menunjukkan bahwa AMH penduduk usia 15-24 tahun Kota Palopo pada tahun 2013 sebesar 99.934%, artinya 99.93% penduduk usia tersebut di Kota Palopo sudah mampu membaca dan menulis.

Kondisi ini lebih membaik di tahun 2017 dimana AMH penduduk usia 15-24 tahun telah mencapai 99.99% yang menunjukkan bahwa 99 orang dari 100 penduduk Kota Palopo yang berumur 15-24 tahun pada tahun 2017 sudah mampu membaca dan menulis.

2.3.1.1.18. Penduduk Berusia ≥ 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100.

Tabel 2.103
Persentase Penduduk Berusia ≥ 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se Kota Palopo	Orang	105,692	115,646	117,728	118,993	123,206
b	Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun	Orang	108,804	116,579	119,862	123,168	126,430
c	Penduduk Berusia ≥ 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	97.14	99.20	98.22	96,61	97.45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo, Statistik Daerah Kota Palopo, Buku Potensi Wilayah Kota Palopo

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 masih terdapat 2,86% penduduk Kota Palopo yang berusia diatas 15 yang masih buta aksara. artinya Namun pada tahun 2017, angka ini menurun dimana hanya terdapat 2.55% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf di Kota Palopo.

2.3.1.1.19. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Adalah indikator yang menggambarkan kualitas dari tenaga guru yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kualitas tenaga guru yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2.104
Persentase Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jml guru bejazah S1-D4	2921	3179	3343	3657	3861

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Jml guru SD/Sederajat+SMP Sederajat +SMA Sederajat	3,169	3,401	5,431	2,962	2,813
3	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi s1/d4	92.17	93.47	61.55	123.46	137.26

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2018

Data diatas menunjukkan persentase guru yang berijazah S1-D4 di Kota Palopo meningkat tajam. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 92.17%, tahun 2017 berada pada angka 137.26%. Ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2017 semua guru yang berstatus ASN di Kota Palopo telah menyandang strata satu atau sarjana/diploma 4.

Kondisi pada tahun 2016 dan 2017 melebihi angka 100% sebab, terdapat guru yang menempuh strata satu kembali untuk menyesuaikan gelar pendidikan kesarjanaanya sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan para tenaga guru di Kota Palopo sudah sangat kompetitif.

2.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

2.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2.105
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun pada 1 tahun tertentu)	16	4	1	6	6
2	Jumlah kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959
3	Rasio Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	6	2	0	2	2

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 1000 kelahiran hidup, ada 6 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun, kemudian 2014 turun menjadi 2 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun, 2015 turun menjadi 0 kematian dalam 1000 kelahiran hidup, 2016 naik menjadi 2 kasus kematian bayi sebelum usia tepat 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Capaian yang sama juga terjadi pada tahun 2017.

2.3.1.2.2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = $(100 - \text{angka kematian bayi})$. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 2.106
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Per 1000 kelahiran	100	100	100	100	100
2.	AKB per 1000	6	2	0	2	2
3	AKHB	94	98	100	100	98

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 kelahiran hidup, ada 94 bayi yang tetap hidup sampai tepat usia 1 tahun, kemudian 2014 naik menjadi 98 bayi sebelum usia tepat 1 tahun, 2015 semua bayi hidup per 100 kelahiran hidup, 2016 pun demikian, dan di 2017 hanya ada 98 bayi hidup per 100 kelahiran.

2.3.1.2.3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaannya.

Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Misalkan perhitungan dari data Susenas 2004 mendapatkan perkiraan Angka Kematian Balita sebesar 74 per 1000 balita, dengan referensi waktu Mei 2002. Artinya, pada tahun 2002 setiap 1000 balita (umur 0 sampai 4 tahun 11 bulan 29 hari) pada tahun 2002, 74 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

Tabel 2.107
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	3	8	4	12	6
2.	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	1	3	1	4	2

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan, pada tahun 2013, dari 1000 balita yang lahir, ada 1 balita yang meninggal dan tidak mencapai umur tepat lima tahun. Dan tahun 2017

terdapat 2 kematian balita per 1000 kelahiran. Sesuai data dalam tabel di atas, perlunya meningkatkan program kesehatan terutama ibu, bayi dan balita mengingat adanya trend kenaikan jumlah balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup.

2.3.1.2.4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribukelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh factor factor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Tabel 2.108

Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup(AKABA) Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	16	18	17	21	16
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada Satu Tahun Tententu	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	6	7	6	8	5

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan, pada tahun 2013 dari 1000 kelahiran hidup, terdapat 6 kasus kematian neonatal pada bayi, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 5 kasus kematian neonatal pada bayi per 1000 kelahiran bayi hidup.

2.3.1.2.5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Atau Maternal Mortality Ratio (MMR) **adalah** Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Tabel 2.109

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	2	3	4	4	2

No	Uraian	Tahun			2016	2017
		2013	2014	2015		
2.	Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	73	115	146	145	68

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan, dari 100.000 ibu melahirkan, terdapat 73 kasus kematian ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di Kota Palopo. Dan pada tahun 2017, terjadi 68 kasus kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan. Angka ini menunjukkan bahwa kasus kematian ibu karena melahirkan adalah ancaman yang harus disikapi oleh pemerintah Kota Palopo melalui berbagai program dan kegiatan untuk mengatasi persoalan ini.

2.3.1.2.6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Dari rasio ini dapat diketahui banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yang diinginkan. Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standar ditentukan oleh masing-masing daerah.

Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancangan pemerataan sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.110
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Posyandu	147	147	147	147	149
2.	Jumlah Balita	13.851	15.774	15.275	16.178	16.963
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (1.000)	11	9	10	9	9

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani 1000 balita, tersedia sebanyak 11 posyandu. Namun pada tahun 2017, hanya tersedia 9 posyandu untuk melayani 1000 orang balita. Ini menggambarkan adanya peningkatan beban kerja posyandu di Kota Palopo.

2.3.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu dan poliklinik yang bisa disediakan pemerintah dalam melayani masyarakat. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin banyak faskes yang disiapkan pemerintah untuk melayani masyarakatnya.

Tabel 2.111
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jml	33	33	34	48	48
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
c	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (10.000)	Rasio	2	2	2	3	3

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani 10.000 orang penduduk tersedia sebanyak 2 faskes (puskesmas, poliklinik dan pustu). Namun pada tahun 2017, sudah tersedia 3 fasilitas kesehatan. Ini menggambarkan adanya pengurangan beban kerja faskes di Kota Palopo.

2.3.1.2.8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Indikator ini memberikan gambaran perkembangan beban kerja dan daya tampung rumah sakit yang ada di Kota Palopo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.112
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Rumah Sakit	5	5	5	6	7
2.	Jumlah Penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
3	Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk (100.000)	3	3	3	4	4

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani penduduk sebanyak 100.000 orang hanya tersedia sebanyak 3 rumah sakit. Namun pada tahun 2017 menjadi 4 rumah sakit. Ini menggambarkan adanya pengurangan beban kerja yang ada di rumah sakit Kota Palopo.

2.3.1.2.9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menyusun rencana dalam penyediaan jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan, hingga pendidikan, latihan dan penyebaran tenaga kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari rasio ini dapat diketahui jumlah penduduk yang harus dilayani oleh seorang tenaga kesehatan tertentu, karena itu rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan tenaga kesehatan untuk suatu jenis pelayanan kesehatan.

Tabel 2.113
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah dokter	Org	71	75	81	82	89
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
c	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	Per 10.000	4	5	5	5	5

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 4 orang dokter atau 1 dokter harus melayani sebanyak 2500 penduduk. Namun pada tahun 2017, meningkat menjadi tersedia 5 orang dokter untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo atau 1 dokter harus melayani 2000 penduduk. Ini memberikan informasi bahwa beban kerja tenaga dokter di Kota Palopo sejak 2017 jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Ini menunjukkan adanya potensi peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan di Kota Palopo.

2.3.1.2.10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga medis yang siap melayani per 1000 penduduk di Kota Palopo. Ini menggambarkan kondisi beban kerja yang dialami tenaga medis. Semakin tinggi nilai rasio indikator ini maka semakin ringan beban kerja para tenaga medis tersebut.

Tabel 2.114
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah Tenaga Medis	Org	71	75	81	82	89
	Dokter Umum	Org	38	38	39	40	41
	Dokter Gigi	Org	16	16	18	17	23
	Dokter Ahli (RS)	Org	17	21	24	25	25
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
c	Rasio tenaga Medis Persatuan Penduduk (10.000)	Rasio	4	5	5	5	5

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani 10.000 jiwa penduduk, Pemerintah Kota Palopo bisa menyiapkan 4 orang tenaga medis. Namun pada tahun 2017, sudah tersedia 5 orang tenaga medis untuk melayani 10.000 jiwa penduduk Kota Palopo. Ini memberikan informasi bahwa beban kerja tenaga medis di Kota Palopo sejak 2017 menurun dibandingkan tahun 2013. Ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Palopo, termasuk meningkatkan kualitas layanan di RS Rujukan Sawerigading Kota Palopo.

2.3.1.2.11. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/ atau bayi, Komplikasi

dalam kehamilan, dsb. Semakin tinggi angka indikator ini, menggambarkan tingkat penanganan kesehatan ibu hamil dan bayi yang semakin baik.

Tabel 2.115
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				2017
			2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jml	419	366	446	472	457
2.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Jml	615	601	601	617	647
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	68,13	60,89	74,20	76,49	70,63

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa tingkat penanganan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Palopo dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013, dari 100 kasus komplikasi kebidanan sebanyak 68 kasus berhasil diatangani. Dan pada tahun 2017 sebanyak 71 kasus berhasil ditangani per 100 kasus komplikasi kebidanan. Ini mengindikasikan membaiknya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil terutama cakupan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

2.3.1.2.12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Adalah Perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator yang digunakan adalah proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih.. Semakin banyak persalinan yang ditolong dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu melahirkan.

Tabel 2.116
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				2017
			2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.755	2.674	2.764	2.767	2.956

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
2.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Jml	2.755	2.871	2.870	2.944	3.086
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	93,14	96,31	93,99	95,79

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Palopo yaitu 100 persen pada tahun 2013 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 2.775 ibu bersalin (jiwa). Sedangkan pada tahun 2017, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 95,79 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 3.086 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kota Palopo sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

2.3.1.2.13. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT. Semakin tinggi persentase indikator ini semakin baik kinerja UCI.

Tabel 2.117
Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kelurahan UCI	Jml	46	47	46	47	46
2.	Jumlah seluruh kelurahan	Jml	48	48	48	48	48
3	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	95,83	97,92	95,83	97,92	95,83

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2017, 95,83 persen kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memenuhi UCI dimana sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bayi, ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah pada tingkat dasar.

2.3.1.2.14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk di Kota Palopo yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2013 hingga tahun 2015. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan.

Tabel 2.118
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	5	7	11	3	4
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	5	7	11	3	4
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.2.15. Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/Perkapita/Hari)

Indikator ini memberikan gambaran proporsi dan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara cukup dan bergizi. Umumnya masyarakat miskin belum mampu memenuhi konsumsi pangan minimum baik dari aspek kuantitas maupun kualitas gizi. Indikator ini erat kaitannya dengan aspek kemiskinan. Semakin tinggi angka indikator ini, artinya semakin banyak penduduk yang kekurangan pangan karena kesulitan mengakses kebutuhan dasar akibat aspek ekonomi.

Tabel 2.119

Penduduk yang Tingkat Konsumsinya Lebih Rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 kkal/kapita/hari (Jumlah Penduduk Miskin)						
		Orang	15,500	14,590	14,510	15,020	15,440
2	Jumlah Balita (Jumlah Penduduk Berumur di Bawah Lima Tahun) (*)						
		Orang	13,851	15,774	15,275	16,178	16,963
3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)						
		%	111.9	92.5	95.0	92.8	91.0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 balita per 100 penduduk miskin, semuanya memiliki asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum. Artinya tidak ada satupun balita/penduduk miskin yang asupan kalorinya berada di atas tingkat minimum. Namun sejak tahun 2014 sampai tahun 2017, kondisi ini mulai berubah.

Pada tahun 2014, sudah ada sebanyak 7-8 per 100 penduduk miskin yang asupan kalorinya berada di atas tingkat konsumsi minimum. Hanya terdapat 92-93 balita per 100 penduduk miskin yang asupan kalorinya berada dibawah tingkat minimum. Tahun 2017 kondisi ini lebih membaik dimana terdapat 9 balita yang asupan kalorinya berada di atas tingkat konsumsi minimum. Hanya tersisa 91 balita/100 penduduk miskin yang asupan kalorinya berada dibawah tingkat minimum.

Ini menunjukkan bahwa kondisi tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun 2014, sebab sepanjang tahun 2013-2017, jumlah balita per 100 penduduk miskin yang asupan kalorinya sudah berada di atas tingkat konsumsi minimum, berhasil dinaikkan, sementara dan jumlah balita per 100 penduduk miskin, yang asupan kalorinya berada di bawah tingkat minimum berhasil diturunkan.

2.3.1.2.16. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Tabel 2.120

Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah anak yang usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	2.843	2.936	3.020	3.081	3.166
2.	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	Orang	2.724	2.614	2.747	2.755	3.700
3	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	104,37	112,32	109,94	111,83	85,57

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan terjadinya penurunan persentase bayi berumur dibawah satu tahun yang memperoleh imunisasi campak di Kota Palopo sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 dari 100 balita rata-rata hanya 85-86 orang yang mendapatkan imuniasi campak. Ini menunjukkan bahwa kinerja imunsasi perlu ditingkatkan. Misalnya melalui media sosialisasi yang menegaskan keamanan, kehalalan dan arti pentingnya imuniasi bagi para balita.

2.3.1.2.17. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

AFP (Acute Flaccid bahwa kasus AFP bukanlah kasus polio, melainkan Paralysis) merupakan gejala kelumpuhan pada anak yang berumur < 15 tahun yang bersifat layuh/flaccid dan terjadi secara mendadak (akut) bukan karena rudapaksa/trauma/kecelakaan. Untuk membuktikan bahwa virus polio liar sudah tidak ada lagi di Kota Palopo, maka harus ditemukan gejala gejala yang menyerupai penyakit polio.

Dalampenilaian kinerja surveilans AFP, terdapat indikator NonPolio AFP rate > 2 per 100.000 anak usia kurang dari 15tahun per tahun dan spesimen adekuat > 80 %. Non PolioAFP rate merupakan target penemuan kasus per tahun. Jadi apabila suatu wilayahmemiliki jumlahpenduduk <15 tahun sebanyak 500.000, maka wilayahtersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFPdalam satu tahun. Jika target penemuan belum dapatdipenuhi, dapat dikatakan bahwa kinerja surveilans AFPbelum baik, karena masih dimungkinkan adanya kasusyang belum terjaring.

Tabel 2.121

Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				2017
			2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan	Kasus	1	0	1	1	0
2.	Jumlah penduduk < 15 tahun	Orang	52.015	49.032	49.748	48.835	48.835
3	Non polio AFP rate per 100.000 penduduk	Rasio	2	0	2	2	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100.000 penduduk Kota Palopo survey AFP hanya menemukan 2 kasus non polio AFP Rate, bahkan 2017 sama sekali tak ada. Ini menunjukkan kinerja surveillance Non Polio AFP Rate di Kota Palopo cukup baik.

Ini jika merujuk pada indikator keberhasilan surveillance AFP yang menyebutkan bahwa daerah dengan jumlah penduduk <15 tahun sebanyak 500.000 orang, maka wilayah tersebut harus dapat menemukan minimal 10 kasus AFP dalam satu tahun. Dengan kondisi Kota Palopo yang hanya memiliki jumlah penduduk dibawah 15 tahun berkisar 48 ribu orang pada tahun 2017, target penemuan AFP sebanyak 0 kasus dan itu tercapai. Kondisi ini juga memberikan gambaran, bahwa kemungkinan penyebaran polio atau gejala lainnya yang mirip polio di Kota Palopo sangat kecil.

2.3.1.2.18. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru, sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru meradang dan membengkak. Kondisi kesehatan ini sering kali disebut dengan paru-paru basah, sebab paru bisa saja dipenuhi dengan air atau cairan lendir. Kondisi paru-paru basah ini dapat dialami oleh siapa pun. Namun pneumonia pada anak bisa sangat berbahaya dan menyebabkan kematian. Bahkan, badan kesehatan dunia (WHO) menyebutkan jika penyakit pneumonia adalah penyebab 16% kematian balita di dunia pada tahun 2015. Sementara, di Indonesia sendiri, dilansir dari CNN, penyakit pneumonia pada anak menyebabkan 2-3 balita yang meninggal setiap jamnya.

Tabel 2.122
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				2017
			2013	2014	2015	2016	
1.	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun	Orang	24	101	132	51	105
2.	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	1.385	1.577	1.528	1.618	1.697
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	1,73	6,40	8,64	3,15	6,19

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Meskipun persentasenya meningkat dari tahun ke tahun, tabel di atas menunjukkan cakupan penanganan balita yang diperkirakan menderita penyakit berbahaya seperti pneumonia di Kota Palopo masih sangat rendah. Pada tahun 2013,

kinerjanya hanya berada pada angka 1,73% meskipun meningkat pada tahun 2017 yang mencapai 6,19%. Artinya pada tahun 2017, dari 100 kasus pnemunia, rata-rata hanya ditangani hanya 6 kasus. Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas terkait bersama stake holder terkait perlu meningkatkan kinerja untuk menangani kasus pneumonia ini.

2.3.1.2.19. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang sangat mudah sekali dalam penularannya. Seperti halnya penyakit flu biasa, dalam penyebarannya TBC juga melalui udara. Penyakit tuberkolosis sangat mematikan apabila tidak segera dilakukan penanganan. Di Indonesia, penanganan sejak dini sudah dilakukan dengan memberikan paket imunisasi BCG pada balita. Namun demikian, belum sepenuhnya Indonesia 100% terbebas dari penyakit ini.

Tabel 2.123
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 bulan	Orang	130	206	202	241	243
2.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Orang	139	202	242	222	176
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	93,53	101,98	83,47	108,56	138,07

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa meskipun jumlah penderita TBC BTA naik hampir setiap tahunnya, cakupan pelayanan dan pengobatan terhadap para penderita juga terus meningkat. Ini menunjukkan kinerja pelayanan untuk menangani kasus atau penderita TBC BTA sudah cukup baik. Angkanya melebihi 100% sebab juga terdapat pengidap TBC BTA dari luar Kota Palopo namun mendapat penanganan medis di Kota Palopo, sebagai salah satu daerah yang memiliki pusat layanan rujukan.

2.3.1.2.20. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang menggambarkan tingkat penyebaran penyakit atau pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Indikator ini untuk mengetahui perkembangan jumlah pengidap penyakit TBC di Kota Palopo.

Tabel 2.124
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	Orang	348	299	374	354	433
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu	Orang	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	waktu yang sama						
3	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Orang	216	181	221	205	245

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100.000 penduduk Kota Palopo, terdapat 216 orang yang terjangkit atau menjadi pengidap penyakit TBC, jumlah ini meningkat pada tahun 2017 menjadi 240 orang per 100.000 penduduk. Olehnya program program baik yang sifatnya pencegahan maupun pengobatan, mestinya menjadi fokus penanganan pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Terkait pada tahun tahun mendatang.

2.3.1.2.21. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Adalah indikator yang menggambarkan kasus kematian pengidap TBC paru per 100.000 penduduk Kota Palopo. Semakin tinggi angka kasus ini semakin tinggi tingkat kematian karena penyakit TBC.

Tabel 2.125
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pasien TB yang meninggal	Orang	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
3	Presentase tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Meski secara jumlah, pengidap TBC di Kota Palopo meningkat setiap tahunnya, namun kematian yang disebabkan oleh karena penyakit ini sepanjang 2013-2017 sama sekali tidak ada. Ini menunjukkan bahwa tindakan pengobatan yang dilaksanakan cukup efektif dalam mengobati para pasien. Kondisi ini juga menunjukkan pengobatan bagi para pasiennya dilakukan dengan standar operasional yang baik, sehingga kematian yang disebabkan oleh penyakit ini di Kota Palopo nihil.

2.3.1.2.22. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberkulosis di Rumah Sakit melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOT's adalah tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan Tuberkulosis merupakan program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh Unit Pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Sakit. Khusus bagi pelayanan pasien tuberkulosis di Rumah Sakit dilakukan dengan strategi DOTS.

Hal ini memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik, karena dibutuhkan kedisiplinan dalam penerapan semua standar prosedur operasional yang ditetapkan,

disamping itu perlu adanya koordinasi antar unit pelayanan dalam bentuk jejaring serta penerapan standar diagnosa dan terapi yang benar, dan dukungan yang kuat dari jajaran direksi rumah sakit berupa komitmen dalam pengelolaan penanggulangan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2.126

Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	130	94	91	354	430
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diperkirakan ada dalam wilayah tertentu	Orang	139	202	242	338	538
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	93,53	46,53	37,60	104,73	79,93

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa kinerja penanganan pasien TB dalam program DOTs sejak 2013 sampai dengan 2017 terus menurun. Tahun 2013, 93,53 % pasien TB BTA dalam program DOTS mendapatkan pengobatan dan berhasil sembuh. Tetapi di 2017 hanya 79,93% pasien TB BTA yang memperoleh pengobatan dan sembuh melalui program DOTS. Ini menandakan bahwa kinerja program dan kegiatan pelaksanaan DOTS di sejumlah Rumah Sakit Pemerintah Kota Palopo harus diperbaiki dan ditingkatkan.

2.3.1.2.23. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TB tipe menular. Strategi ini akan memutuskan penularan TB dan dengan demikian menurunkan insiden TB di masyarakat. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB. Semakin tinggi nilai indikatornya, menunjukkan bahwa kinerja program DOTS semakin baik.

Tabel 2.127

Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun	Orang	110	96	121	159	154
2.	Jumlah pasien baru TB BTA paru yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	Orang	130	206	202	241	243
3	Proporsi kasus tuberkulosis	%	84,62	46,60	59,90	65,98	63,37

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	yang diobati dan sembuh dalam program DOTS						

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa kinerja program DOTS di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 terus menurun. Besaran persentase pasien TB yang sembuh pun menurun. Kondisi ini mengindikasikan cukup banyaknya pasien TB yang tidak menjalankan prosedur pengobatan TB dalam program DOTS secara baik. Ini bisa dipengaruhi banyak faktor, terutama faktor internal pasien atau pengidap TB. Olehnya diperlukan advokasi dan sosialisasi serta edukasi yang lebih intensi dalam meningkatkan motivasi untuk sembuh serta mengikuti program pengobatan secara teratur bagi pasien atau pengidap TB.

2.3.1.2.24. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2013 yaitu 233 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 233 kasus. Pada tahun 2015, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP sebanyak 159 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mencapai 100 persen.

Tabel 2.128

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	Orang	233	159	280	366	74
2.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Orang	233	159	280	366	74
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.2.25. Penderita Diare yang Ditangani

Tabel 2.129

Penderita Diare Yang Ditangani Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun *						
		Orang	5750	5764	4069	3684	3287
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) (**)						
		Orang	92,470,925	95,050,089	68,722,969	63,702,254	58,149,331
3	Jumlah Penduduk (***)						

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
		Jiwa	160,819	164,903	168,894	172,916	176,907
4	Penderita diare yang ditangani						
		%	0.0062%	0.0061%	0.0059%	0.0058%	0.0057%
		Per 100.000	6	6	6	6	6

Sumber Data : (*)Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018, (**) Rumus Permendagri 86 Tahun 2017, (***) BPS Kota Palopo

Tabel diatas menggambarkan tingkat penanganan diare di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 cenderung stagnan. Jika pada tahun 2013, dari 100.000 penduduk Kota Palopo ditangani sebanyak 6 kasus diare, pada 2017, diare yang tertangani rata-rata 5-6 kasus diare. Ke depan angka yang menjadi target persentase indicator ini harus ditekan.

2.3.1.2.26. Angka Kejadian Malaria

Tabel 2.130
Angka Kejadian Malaria
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				2017
			2013	2014	2015	2016	
1.	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	Orang	167	163	191	287	34
2.	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
3	Penderita malaria yang ditangani per 100.000	%	104	99	113	166	19

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2013, dari 100.000 penduduk Kota Palopo terdapat sebanyak 104 kejadian malaria, jumlah terus menurun sampai di tahun 2016 jumlahnya meningkat cukup besar menjadi 166 kasus per 100.000 penduduk. Namun ditahun 2017 jumlahnya hanya menjadi 19 kasus per 100.000 penduduk. Ini menunjukkan kinerja penanggulangan angka malaria di Kota Palopo mulai menunjukkan kondisi yang lebih baik.

2.3.1.2.27. Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tabel 2.131
Tingkat Kematian Akibat Malaria
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kematian tersangka malaria	Orang	0	0	0	0	0
2.	Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun	Orang	167	163	191	287	34
3	Tingkat kematian akibat malaria (1.000)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel menunjukkan bahwa angka kematian akibat kasus malaria di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 per 1000 penduduk nihil. Ini menggambarkan bahwa penanganan pasien kasus malaria di Kota Palopo berhasil.

2.3.1.2.28. Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida

Tabel 2.132

**Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida
Kota Palopo Tahun 2013 –2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida	Orang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Jumlah balita	Orang	13.851	15.774	15.275	16.178	16.963
3	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.2.29. Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat

Tabel 2.133

**Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat
Kota Palopo Tahun 2013 –2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun	Orang	167	14	5	24	19
2.	Jumlah penderita positif dalam 1 tahun	Orang	167	14	5	24	19
3	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.2.30. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

Prevalensi adalah seberapa sering suatu penyakit atau kondisi terjadi pada sekelompok orang, dalam hal ini adalah HIV AIDS. Atau dengan kata lain merupakan gambaran tentang frekwensi penderita lama dan baru yang ditemukan selama jangka waktu tertentu terhadap sekelompok populasi dalam waktu tertentu.

Tabel 2.134

**Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi
Kota Palopo Tahun 2013 –2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun

			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	14	16	19	53	72
2.	Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%
4	Rasio per 100.000	per 100.000	9	10	12	32	42

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa periode 2013-2017 jumlah pengidap HIV/AIDS di Kota Palopo meningkat. Jika 2013 hanya sebanyak 14 orang tahun 2017 jumlahnya mencapai 72 orang. Dalam rasio per 100.000 penduduk, pada tahun 2013 terdapat rata-rata 9 kasus HIV/AIDS, dan meningkat menjadi rata-rata 42 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2017. Kondisi ini memerlukan perhatian serius pemerintah sehingga jumlahnya setiap tahun seharusnya bisa ditekan.

2.3.1.2.31. Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir

Tabel 2.135
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Banyaknya penduduk usia 15 – 24 tahun yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
2.	Banyaknya penduduk usia 15 – 24 tahun yang berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
3	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.2.32. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Indikator ini menggambarkan cakupan edukasi, sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS di kalangan 15-24 tahun.

Tabel 2.136
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15 – 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan
Komprehensif Tentang HIV/AIDS
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	548	Data Tidak Tersedia
2.	Jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama (*)	Orang	31.960	38.433	39.414	40.279	41.073
3	Proporsi jumlah penduduk usia 15 – 24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018, () Badan Pusat Statistik*

Ini juga menunjukkan pelaksanaan program kegiatan yang sifanya sosialisasi dan edukasi publik terutama bagi usia 15-24 tahun oleh Pemerintah Kota Palopo belum secara konsisten dan berkelanjutan. Kegiatan ini kadang dilaksanakan dan kadang pula tidak dilaksanakan. Pada tahun 2016, dari 10.000 penduduk usia 15-24 tahun hanya 136 orang yang mendapatkan sosialisasi HIV AIDS. Sementara disisi lain jumlah usia 15-24 tahun yang menjadi fokus sasaran edukasi, jumlahnya terus meningkat. Ini menjadi potensi meningkatnya ancaman bagi prevalensi HIV AIDS di Kota Palopo.

2.3.1.2.33. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palopo, menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dari 100 persen pada tahun 2013 tetap menjadi 100 persen di tahun 2015. Hal ini diakibatkan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata I meningkat dari 59.910 pada tahun 2013 menjadi 205.631 pada tahun 2015.

Tabel 2.137
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata I	Kali	51.080	159.223	205.631	156.926	130.531
2.	Jumlah seluruh pasien miskin di Kota	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Palopo						
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Informasi dari Dinas Kesehatan Kota Palopo menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, tidak ada pasien miskin yang ditolak oleh fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palopo. Pasien miskin yang berobat di fasilitas kesehatan di Kota Palopo sejak tahun 2016 telah ditanggung oleh Pemerintah Kota Palopo. Sebab sejak tahun tersebut Pemerintah Kota Palopo membayar premi asuransi kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin Kota Palopo.

2.3.1.2.34. Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada terutama bagi bayi yang baru lahir. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan bayi yang ada.

Tabel 2.138
Cakupan Kunjungan Bayi
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jumlah kunjungan	2.594	2.533	2.596	2.638	2.982
2.	Seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959
3	Cakupan kunjungan bayi	%	95,23	96,90	94,50	95,75	100,78

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan rentang waktu 2013-2017, tingkat kunjungan bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan standar kesehatan, semakin membaik. Ini terkait erat dengan kesadaran masyarakat untuk memantau perkembangan kesehatan bayinya di sejumlah pusat kesehatan yang ada. Jumlah kunjungan bayi setiap tahunnya terus meningkat jika 2013 hanya sebanyak 2594 tahun 2017 mencapai 2982 kunjungan atau 100,78% dari jumlah bayi yang lahir.

2.3.1.2.35. Cakupan Puskesmas

Tabel 2.139
Cakupan Puskesmas
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah puskesmas	11	11	12	12	12
2.	Jumlah seluruh kecamatan	9	9	9	9	9
3	Cakupan puskesmas (%)	122,22	122,22	133,33	133,33	133,33

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kota Palopo memiliki minimal satu pusat kesehatan masyarakat. Bahkan sejak 2013-2017 ada kecamatan yang memiliki lebih dari satu puskesmas. Kondisi ini tentu diharapkan bisa meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Palopo.

2.3.1.2.36. Cakupan Pembantu Puskesmas

Tabel 2.140
Cakupan Pembantu Puskesmas
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pembantu puskesmas	22	22	22	36	36
2.	Jumlah seluruh kelurahan	48	48	48	48	48
3	Cakupan pembantu puskesmas (%)	46	46	46	75	75

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2013 hanya 46 kelurahan di Kota Palopo yang memiliki puskesmas pembantu.kondisi ini berlangsung sampai pada tahun 2015. Namun pada tahun 2016-2017, 75% kelurahan yang ada di Kota Palopo telah memiliki puskesmas pembantu. Ini menunjukkan semakin banyaknya jumlah puskesmas pembantu yang diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap sarana kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

2.3.1.2.37. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Semakin tinggi nilai indikator ini menunjukkan semakin baiknya kesadaran ibu hamil untuk memeriksa kesehatan dirinya dan calon bayinya pada sarana kesehatan yang ada.

Tabel 2.141
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan ante-natal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.852	2.804	2.774	2.796	3.001
2.	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	3.076	3.006	3.007	3.083	3.234
3	Cakupan kunjungan ibunhamil K4	%	92,72	93,28	92,25	90,69	92,80

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan kesadaran ibu hamil untuk memeriksa dirinya dan kesehatan bayuinya semakin baik dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2013 sebesar 92,72% pada tahun 2017 meningkat menjadi 92,80%. Meski demikian dari data tersebut juga mengungkapkan bahwa masih ada sebagian ibu hamil yang belum memanfaatkan layanan kesehatan yang bisa diaksesnya. Ini tentu membutuhkan edukasi dan sosialisasi yang intensi agar seluruh ibu hamil rutin memeriksa kesehatan dirinya dan bayinya di pusat kesehatan yang ada.

2.3.1.2.38. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan ibu nifas merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Masa nifas merupakan masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 – 8 minggu atau dalam agama islam disebut 40 hari. Tujuan dari masa nifas yaitu untuk mengetahui kesejahteraan ibu dan bayi, baik dari kesehatan, kebersihan, nutrisi, pemberian ASI, tanda bahaya masa nifas, perdarahan, cara mencegah hipotermi pada bayi. Semakin tinggi nilai indikatornya semakin baik kesadaran ibu yang sudah melahirkan terhadap status kesehatan dirinya dan bayinya usai melahirkan.

Tabel 2.142
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	2.607	2.596	2.635	2.743	2.816
2.	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	2.607	2.871	2.870	2.944	3.087
3	Cakupan pelayanan nifas	%	100	90,42	91,81	93,17	91,22

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan tingkat kesadaran ibu usai melahirkan sepanjang 2013-2017 sudah cukup baik. Meski demikian data ini juga mengungkap masih adanya ibu yang usai melahirkan namun tidak lagi memanfaatkan pelayanan kesehatan nifas. Olehnya masih dibutuhkan sosialisasi dan edukasi sehingga kesadaran ibu yang telah melahirkan untuk memantau perkembangan kesehatannya semakin baik di tahun mendatang

2.3.1.2.39. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Menurut World health Organization (WHO) Neonatus adalah bayi baru lahir hingga berumur 28 hari. Sementara menurut kemenkes 2015, adalah bayi yang baru lahir berusia 0-28 hari sejak dilahirkan. Umur ini sangat rentan terhadap berbagai macam gangguan kesehatan. Olehnya penanganan untuk mengatasi atau mencegah munculnya berbagai macam ancaman gangguan kesehatan sangat penting dilaksanakan.

Tabel 2.143
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Tahun

		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	222	142	319	310	303
2.	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	409	410	412	413	444
3	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	54,28	34,63	77,43	75,06	67,79

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa 2013-2017 jumlah bayi yang lahir di Kota Palopo dengan kondisi neonatus beragam semakin meningkat setiap tahunnya. Tahun 2013 hanya 409, tahun 2017 sebanyak 444. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan yang serius terutama pada aspek pencegahan, dimana mengedukasi ibu hamil menjadi point penting dalam upaya tersebut. Melihat persentase penanganan, kinerja indikator ini cukup baik ditandai dengan meningkatnya angka kinerja penanganan bayi dengan komplikasi neonatus.

2.3.1.2.40. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2.144
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu	Orang	6.756	6.516	5.390	7.248	8.431
2.	Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Orang	13.851	15.774	12.543	12.861	13.487
3	Cakupan pelayanan anak balita	%	48,78	41,31	42,97	56,36	62,51

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018,

Data di atas menunjukkan bahwa 2013-2017 cakupan pelayanan anak balita 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Per tahun terjadi peningkatan pelayanan terhadap anak balita. Ini menggambarkan semakin baiknya kesadaran para orang tua dalam memeriksakan kesehatan anak balitanya.

2.3.1.2.41. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan Keluarga Miskin

Indikator ini hanya mengukur pada rumah tangga miskin. Kemiskinan umumnya menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab anak usia 6-12 tahun di keluarga miskin tidak pernah mendapatkan makanan pendamping ASI, sehingga terjadi kerawanan gizi. Olehnya pemerintah melaksanakan program pemberian makanan pendamping ASI bagi rumah tangga miskin.

Tabel 2.145
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 12 Bulan
Keluarga Miskin
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP ASI	Orang	930	86	72	533	249
2.	Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	Orang	930	86	72	533	249
3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa 2013-2017, semua anak berumur 6-12 tahun yang lahir dari keluarga miskin di Kota Palopo menerima makanan pendamping ASI. Ini membuktikan bahwa komitmen Pemkot Palopo untuk memperhatikan gizi bagi masyarakat miskin cukup baik.

2.3.1.2.42. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Indikator ini menunjukkan langkah dan cakupan kemampuan pemerintah daerah dalam memeriksa status kesehatan seluruh siswa sekolah dasar pada tahun tertentu. Semakin tinggi angka indikator ini semakin baik cakupan pemeriksaan siswa sekolah yang ada setingkat sekolah dasar.

Tabel 2.146
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.646	3.646	3.188	2.660	2.790
2.	Jumlah murid SD kelas 1 dan setingkat di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	3.691	3.691	3.368	2.692	2.861
3	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	98,78	98,78	94,66	98,81	97,52

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa 2013-2017, sebagian besar siswa sekolah dasar di Kota Palopo setiap tahunnya diperiksa status kesehatannya. Cakupan pemeriksaan mencakup 94-9% siswa sekolah dasar yang ada. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Palopo menciptakan generasi yang sehat sejak pendidikan dasar.

2.3.1.2.43. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Tabel 2.147
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 (kali)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
2.	Jumlah seluruh masyarakat miskin (*)	15.500	14.590	14.510	15.020	15.440
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : () BPS Kota Palopo, Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018*

Tabel diatas menunjukkan bahwa pelayanan bagi masyarakat miskin di Kota palopo 2013-2017 telah mencakup semua pasien dari golongan tidak mampu. Besarnya persentase yang melebihi angka 100% disebabkan sangat banyaknya pasien masyarakat miskin dari kabupaten di sekitar Kota Palopo yang memanfaatkan sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang ada di Kota Palopo yakni RSUD Sawerigading Rampoang.

Jumlah masyarakat miskin ini merupakan 40% masyarakat miskin yang berada pada desil paling bawah. Sejak BPJS berlaku, Dinas kesehatan tak bisa memisahkan data pasien miskin yang mengakses sarkes strata 1

2.3.1.2.44. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Tabel 2.148
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana
Kesehatan (RS)
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pelayanan gawat darurat level 1	5	5	6	6	7
2.	Jumlah RS	5	5	6	6	7
3	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.2.45. Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Indikator ini menggambarkan kecepatan pemerintah kota palopo merespon terjadinya sebuah Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Kota Palopo. Kecepatan merespon sebuah KLB adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatasi KLB di sebuah daerah.

Kejadian Luar Biasa atau KLB merupakan suatu status yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelompokkan suatu peristiwa atau penyakit tertentu. Biasa nya penyakit tersebut lebih berpengaruh pada penyakit yang biasanya terjadi. Sehingga KLB dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan kasus yang berhubungan dengan penyakit, yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi.

Tabel 2.149

**Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan
Epidemiologi < 24 Jam
Kota Palopo Tahun 2013 –2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah KLB di kelurahan ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	Kasus	1	2	2	4	0
2.	Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Kasus	1	2	3	4	0
3	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	0

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palopo memberikan respon yang sangat baik terhadap adanya KLB di wilayah administrasi Kota Palopo. Namun yang mesti diwaspadai adalah terjadinya KLB hampir setiap tahun di Kota Palopo. Hanya pada tahun 2017, tidak terjadi KLB.

2.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1. Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indicator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada

Kondisi jaringan jalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan. Salah satunya adalah Jalan Kondisi Baik (B) yang didefinisikan sebagai semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 %), sehingga arus lalu -lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.

Tabel 2.150
Proporsi Panjang Jaringan Jalan
Berkondisi Baik 2013 –2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik (Km)	262.4	250.1	279.1	279.1	296.68
b.	Panjang Jalan Keseluruhan (Km)	359.32	395.860	502	502	503.16
c	<i>Panjang Jalan Negara (km)</i>	30.9	54.0	58.61	58.61	59.77
d	<i>Panjang Jalan Kewenangan Provinsi (km)</i>	23	-	-	-	-
e	<i>Panjang Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (km)(*)</i>	305.42	341.86	443.39	443.39	443.39
f	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	73.02	63.18	55.6	55.6	58.96

Sumber data : Palopo Dalam Angka, BPS Kota Palopo, () Dinas PU dan Pekerjaan Umum Kota Palopo 2018*

Angka dalam tabel di atas adalah data jalan yang berada di wilayah Kota Palopo baik yang merupakan jalan negara, jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017, sebagaimana yang tercantum dalam Palopo dalam Angka 2014-2018. (BPS Kota Palopo). Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo tahun 2013 sepanjang 305.42 Km, 2014 sepanjang 341.86 Km, tahun 2015 sampai dengan 2017 sepanjang 443.39 Km.

Angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa persentase jalan yang berkondisi baik di Kota Palopo sepanjang 2013-2017, **tanpa melihat kewenangan pengelolaan**, justru menurun. Jika tahun 2013 terdapat 73,02% jalan berkondisi baik, tahun 2017 hanya 58,96 % yang kondisinya baik.

2.3.1.3.1.2. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Jumlah panjang jalan yang dimaksud dalam indicator ini, adalah total keseluruhan panjang jalan yang berada di wilayah Kota Palopo termasuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara yang ada.

Jaringan yang baik sangat mempengaruhi mobilitas dan aksesibilitas pergerakan di dalam jaringan tersebut. Pendekatan yang biasanya digunakan untuk perencanaan jaringan adalah pendekatan ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan nasional dan tidak boleh melupakan hambatan fisik yang mungkin ditemui.

Di dalam sektor transportasi aksesibilitas adalah ukuran kemudahan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dikatakan kalau aksesibilitas tinggi adalah bila alternatif rute menuju suatu tempat banyak sehingga dapat dicapai dengan gampang dari beberapa tujuan.

Tabel 2.151
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah panjang jalan (Jalan Negara + Jalan Provinsi + Jalan Kewenangan Pemkot)	359.32	395.860	502	502	503.16
b.	Jumlah penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
c.	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk (per 10.000)	22	24	30	29	28

Sumber Data : BPS dan Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa untuk 10.000 penduduk Kota Palopo pada tahun 2013, hanya tersedia jalan sepanjang 22 Km, jumlah ini terus meningkat dimana tahun 2017 tersedia jalan sepanjang 28 Km untuk 10.000 penduduk. Peningkatan rasio panjang jalan per penduduk ini, menggambarkan dari tahun ke tahun, masyarakat akan semakin mudah dalam mengakses wilayah Kota palopo, sebab semakin banyak jalan yang tersedia per 10.000 penduduk.

2.3.1.3.1.3. Persentase Kawasan Pemukiman yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sementara pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan (UU No 1 Tahun 2011).

Indikator ini menggambarkan kondisi jalan untuk mengakses pemukiman masyarakat yang memperlihatkan konektifitas dan aksesibilitas sebuah kawasan pemukiman penduduk. Semakin besar nilai indikator ini semakin sulit pula aksesibilitas wilayah maupun transportasi penduduk yang bermukim di daerah tersebut.

Tabel 2.152
Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b.	Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
c	Persentase	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palopo

2.3.1.3.1.4. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Data panjang jalan dalam indikator ini dibatasi pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo, tidak termasuk jalan kewenangan Propinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Negara. Jalan berkondisi baik dikategorikan jika mampu dilewati kendaraan roda empat dengan kecepatan di atas 40 Km/Jam. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.153
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Panjang Jalan Berkondisi Baik yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	197.77	224	211.72	220.49	264.14
b.	Panjang Jalan Kewenangan Pemerintah Kota Palopo (Km)	305.42	341.86	443.39	443.39	443.39
c	Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan Pemerintah Kota Palopo yang dalam kondisi baik (%)	64.75	65.52	47.75	49.73	59.57

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018, Potensi Wilayah Kota Palopo 2018

Data di atas menunjukkan panjang jalan Kota Palopo berkondisi baik sepanjang tahun 2013-2017 meningkat sebanyak 66,37 Km. Jika tahun 2013 hanya sepanjang

197,77 Km atau 64,75%, pada tahun 2017, panjang jalan berkondisi baik di Kota Palopo menjadi 264.14 Km. Namun jika dilihat dari sisi persentase dari total panjang jalan, persentase kondisi jalan dalam kondisi baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palopo, justru menurun. Sebab tahun 2013 berada pada angka 64,75% jalan Kota Palopo berkondisi baik. Namun 2017 hanya berada pada angka 59,57%.

2.3.1.3.1.5. Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Tabel 2.154

Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	0	0	0	0,875	5,663
b.	Panjang seluruh jalan kabupaten (Km)	305,42	341,86	443,39	443,39	443,39
c	Persentase	0	0	0	0,20%	1,28%

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

Data yang ditampilkan pada tabel diatas hanya data panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang lebarnya lebih dari 1,5 meter, sesuai indikator yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sebab masih terdapat ruas jalan lain di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase namun ukurannya lebih kecil daripada 1,5 meter.

Data pada tabel menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2017, hanya 1,28% jalan di Kota Palopo yang memiliki trotoar dan drainase selebar minimal 1,5 meter. Kondisi ini masih lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 yang berada pada angka 0,20%. Ini juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil ruas jalan di Kota Palopo yang memiliki saluran pembuangan air/drainase yang memadai yang memiliki lebar minimal 1,5 meter.

2.3.1.3.1.6. Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Tabel 2.155

Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b.	Panjang seluruh sempadan jalan kabupaten (km)	610.84	683.72	835.18	886.78	886.78
c	Persentase	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.3.1.7. Persentase Rumah Tinggal Bersantitasi

Rumah Tinggal Bersanitasi adalah hunian yang memiliki fasilitas Tempat Buang Air Besar/Tinja). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Sementara menurut UU No 1 Tahun 2011, rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya

Tabel 2.156
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tinggal berakses sanitasi	21.987	23.840	26.651	37,457	39.183
2	Jumlah Rumah Tinggal	37.956	39.851	40.716	42.262	43.167
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	57,9	59,96	65,46	88.63	90.77

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2018.

Data diatas menunjukkan terdapat sebanyak 90.77% rumah tinggal di Kota Palopo telah bersanitasi pada tahun 2017. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013 yang berada pada angka 57,9%. Ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hunian masyarakat Kota Palopo sejak 2013-2017.

2.3.1.3.1.8. Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Tabel 2.157
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	7.200,23	7.389,71	7.673,93	8.090,78	8.735,01
b.	Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97	18.947,97
c	Persentase (%)	38,00	39,00	40,50	42,70	46,10

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa sempadan sungai di Kota Palopo dari tahun ke tahun semakin banyak yang diakses oleh bangunan liar/tak berijin. Jika tahun 2013 hanya 38% sempadan sungai yang diakses bangunan liar atau sepanjang 7.200 Km, tahun 2017 jumlahnya meningkat menjadi 46,10% atau 8.735 Km. Kondisi ini menunjukkan perlunya meningkatkan kinerja penataan ruang agar sempadan sungai yang dipakai oleh bangunan liar semakin menurun.

2.3.1.3.1.9. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Tabel 2.158

**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (km)	96,6	84,65	73,39	64,23	55,47
b.	Panjang seluruh drainase di Kota Palopo (km)	475,47	487,7	498,73	507,90	516,65
	Persentase	20,32	17,36	14,71	12,64	10,73

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan kualitas dan fungsi drainase di Kota Palopo semakin menurun. Jika pada tahun 2013 terdapat 20,32% drainase Kota Palopo yang kondisinya baik dalam artian tidak tersumbat, pada tahun 2017 hanya ada 10,73% drainase Kota Palopo yang kondisinya baik atau tidak tersumbat. Ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya Pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan atau mengakselerasi program dan kegiatan penanganan drainase pada tahun mendatang.

2.3.1.3.1.10. Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Tabel 2.159

**Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luasan daerah yang tergenang (Ha)	0,892	0,624	0,437	0,306	0,214
b.	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (Ha)	6,180	4,326	3,028	2,120	1,484
c	Persentase (a/b x 100%)	14,43	14,42	14,43	14,43	14,42

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan luas daerah yang tidak terjadi genangan di Kota Palopo stagnan atau berjalan di tempat. Sampai tahun 2017, hanya 14,42% daerah di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali dalam setahun. Ini menunjukkan hanya sebagian kecil daerah rawan genangan di Kota Palopo yang tidak terjadi genangan 2 kali dalam setahun.

Kemudian luas daerah yang tergenang lebih dari dua kali dalam setahun di Kota Palopo jauh berkurang pada tahun 2017 yang berada pada angka 0,214 Ha. Meski pada tahun 2013, luas daerah yang tergenang mencapai 0,892 Ha. Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota Palopo juga berkurang dari 6,18 Ha pada tahun 2013 menurun menjadi 1,484 Ha pada tahun 2017. Pemerintah Kota Palopo menginginkan tidak ada lagi daerah yang tergenang di Kota Palopo pada tahun-tahun mendatang.

Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor.

Tabel 2.160
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran
Sungai Rawan Longsor
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (Km)	629,25	833,66	927,47	1.071,94	1.074,93
b.	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor (Km)	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94	31.579,94
	Persentase (a/b x 100%)	1,99	2,64	2,94	3,39	3,40

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan pada tahun 2013 Pemerintah Kota Palopo baru mampu menangani 1,99% wilayah aliran sungai rawan longsor/jalan penghubung rawan longsor, dengan membangun turap. Namun pada tahun 2017, persentase luas wilayah yang mampu ditangani meningkat menjadi 3,40%, namun masih menyisakan 96,6% wilayah rawan longsor baik aliran sungai maupun jalan penghubung yang belum tertangani atau memiliki turap.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terjadinya musibah longsor pada daerah rawan termasuk pada lokasi jalan penghubung dan daerah aliran sungai di Kota Palopo potensinya masih sangat besar.

2.3.1.3.1.11. Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik

Tabel 2.161
Persentase Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	351,82	356,71	383,09	522,39	678,05
b.	Luas irigasi kabupaten (Ha)	800	800	800	800	950,45
	Persentase (a/b x 100%)	43,98	44,59	47,89	65,30	71,34

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa luas irigasi di Kota Palopo yang berkondisi baik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika pada tahun 2013 pada angka 43,89% pada tahun 2017 pada angka 71,34. Meski demikian data ini juga menunjukkan bahwa masih ada irigasi Kota Palopo yang kondisinya tidak baik dimana pada tahun 2017, luasnya masih mencapai 272,4 Ha. Angka inilah yang mestinya menjadi target kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang ke depannya dalam melaksanakan program dan kegiatan keririgasian.

2.3.1.3.1.12. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Tabel 2.162
Persentase Rasio Jaringan Irigasi
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Panjang Saluran Irigasi (Km)	25,191	25,820	27,473	41,760	50,627
b.	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Sawah) (Ha)	2678	2678	2687	2689	2685
c	Rasio Jaringan Irigasi (Per 1000 Ha)	9,41	9,64	10,22	15,53	18,86

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2018, Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan Kota Palopo 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, panjang irigasi untuk mengairi sawah seluas 1000 Ha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2013 untuk 1000 Ha sawah hanya dilayani irigasi sepanjang 9,41 Km, pada tahun 2017 untuk luasan yang sama telah mampu dilayani jaringan irigasi sepanjang 18,86 Km. Meningkatnya cakupan irigasi terhadap lahan persawahan ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas lahan pertanian dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor penghambat alih fungsi lahan pertanian terutama persawahan di Kota Palopo.

2.3.1.3.1.13. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Tabel 2.163
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Di Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah Penduduk Berakses Air Minum (jiwa)	134,911	138,700	144,100	148,725	165,284
b.	Jumlah Penduduk (jiwa)	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
	Persentase (a/b x 100%)	83.89	84.11	85.32	86.01	93%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017, besaran penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap air minum sebanyak 93%. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2013 yang hanya berada pada angka 83.89%. Meski demikian ini menunjukkan bahwa masih ada kurang lebih 7% penduduk Kota Palopo yang belum memiliki akses air minum.

2.3.1.3.1.14. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. **Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air yang tidak terlindung.**

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah penduduk Kota Palopo yang memiliki Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak sebanyak 134.911 jiwa atau sebesar 83.89% dari jumlah penduduk atau dalam satuan rumah tangga sebanyak 19.141 Rumah Tangga atau 54,65% dari total jumlah rumah tangga yang ada.

Kondisi ini kemudian jauh lebih membaik pada tahun 2017, dimana jumlah penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak 165.284 jiwa atau 93,93% dari jumlah penduduk yang ada atau dalam satuan rumah tangga sebanyak 34.428 Rumah Tangga atau 88.63% dari total jumlah rumah tangga yang ada.

Tabel 2.164

**Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan
Terhadap Air Minum Layak
Di Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Sumber Air Bersih	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
A	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
1	Leding (Perpipaan)	RT	14,958	17,958	21,958	30,929	32680
2	Keran Umum	RT	0	0	0	0	-
3	Hydrant Umum	RT	0	0	0	0	-
4	Terminal Air	RT	0	0	0	0	-
5	Air Hujan	RT	0	0	0	0	-
6	Mata air terlindungi	RT	3,327	3,377	3,427	1,080	1,158
7	Sumur Terlindungi	RT	856	906	956	455	410
8	Sumur (Bor/Pompa)	RT	0	0	0	0	-

No	Sumber Air Bersih	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
9	Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		RT	19,141	22,241	26,341	32,464	34,248
10	Jumlah Rumah Tangga						
		RT	35,025	35,914	36,871	37,749	38,641
11	Persentase Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		RT	54.65%	61.93%	71.44%	86.00%	88.63%
12	Jumlah Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		Jiwa	134,911	138,700	144,100	148,725	165,284
13	Jumlah Penduduk Kota Palopo						
		Jiwa	160,819	164,903	168,894	172,916	176,907
14	Persentase Penduduk Kota Palopo yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan						
		Persen	83.89	84.11	85.32	86.01	93%

Sumber Data : Olahan dari Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo, BPS 2018

2.3.1.3.1.15. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Menurut UU No 1 Tahun 2011 Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Tabel 2.165
Persentase Areal Kawasan Kumuh
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a	Luas kawasan Kumuh (Ha)	0	89.33	85.23	42.58	32.08
b	Luas wilayah Kota Palopo (Ha)	2529.9	2529.9	2529.9	2529.9	2529.9
c	Persentase luas areal kawasan kumuh	0	3.5	3.3	1.6	1.2

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palopo 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, total luas kawasan kumuh yang telah ditangani sebanyak 57.25 Ha. Dari luas awal kawasan kumuh sebanyak 89.33 Ha pada tahun 2013, menjadi 32,08 Ha pada tahun 2017. Sehingga sampai pada tahun 2017 persentase luas areal kawasan kumuh Kota Palopo terhadap luas wilayah Kota Palopo, hanya tersisa 1.2%.

2.3.1.3.1.16. Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Tabel 2.166
Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA (ton)	524	610	981	1189	1334
b	Total volume sampah (Ton)	22.291	23.962	26.928	26.381	29.405
c	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	2,3	2,5	3,64	4,50	4,53

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2018

Data diatas menunjukkan pada tahun 2013, volume sampah yang berhasil dikurangi sebelum sampai ke tempat Pembuangan Akhir Sampah hanya sebanyak 564 ton atau sekitar 2,3% dari produksi sampah yang ada. Tahun 2017, volume sampah yang berhasil dikurangi meningkat menjadi 1334 Ton atau sebanyak 4,53%.

Ini menunjukkan adanya progress pengurangan sampah di Kota Palopo yang semakin tahun semakin membaik. Artinya proses reduce, recycle dan reuse sampah di Kota Palopo berjalan sesuai yang diharapkan. Dampaknya sampah yang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah bisa dikurangi sehingga masa pakai/operasinya juga diharapkan semakin bertambah.

2.3.1.3.1.17. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung tempat pemakaman umum yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat. pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.

Tabel 2.167
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Total Luas Tempat Pemakaman Umum (ha)	27	27	30	28	28
b.	Jumlah Penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
c	Rasio per 10.000 penduduk	1.68	1.64	1.78	1.62	1.58

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palopo 2018

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 untuk 10.000 penduduk Kota Palopo rata-rata hanya tersedia 1.58 Ha lahan pemakaman. Rasio ini menurun jika dibandingkan tahun 2013 dimana untuk 10.000 penduduk terdapat 1.68 Ha lahan pemakaman.

Pada tahun 2013 dan 2014, terdapat 14 titik lokasi pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palopo. Tahun 2015 terdapat 17 makam, namun tahun 2016, dua lokasi pemakaman ditutup karena dinyatakan sudah penuh. Sehingga sejak tahun 2016-2017 hanya terdapat 15 lokasi pemakaman umum di Kota Palopo yang bisa diakses masyarakat umum. Kapasitas makan per Ha, diperkirakan mampu menyediakan sebanyak 4000-5000 kuburan.

2.3.1.3.1.18. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator ini untuk mengetahui kapasitas tampung rumah ibadah yang bisa diakses masyarakat Kota Palopo.

Tabel 2.168
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah Tempat Ibadah	286	295	312	312	316
	Mesjid	172	174	187	187	191
	Mushola	38	45	47	47	47
	Gereja Protestan	68	68	70	70	70
	Gereja Katolik	5	5	5	5	5
	Vihara	2	2	2	2	2
	Kuil	1	1	1	1	1
b.	Jumlah Penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
c	Rasio per 1000 penduduk	1,77	1,78	1,84	1,80	1,78

Sumber Data : SIPD Kota Palopo 2013-2017

Sesuai angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk 1000 penduduk Kota Palopo tersedia sebanyak 2 (pembulatan 1,77) tempat ibadah di Kota Palopo. Kondisi yang serupa juga terjadi pada tahun 2017, dimana hanya terdapat 2 tempat ibadah per 1000 penduduk Kota Palopo.

2.3.1.3.2. Penataan Ruang

2.3.1.3.2.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Hak Guna Bangunan atau **HGB** adalah hak untuk mengusahakan (mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah) tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu tertentu. Sementara **Hak Pengelolaan** atau **HPL** menurut Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya, antara lain berupa perencanaan dan peruntukan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Indikator ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam memanfaatkan tanah yang berada dalam penguasaannya menjadi ruang terbuka hijau. Nilai rasio yang semakin tinggi menunjukkan bahwa intensitas pemanfaatan tanah oleh pemerintah daerah untuk ruang terbuka hijau semakin baik.

Tabel 2.169

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas ruang terbuka hijau (Ha)	1165.29	1167.36	1168.21	1169.23	1170.72
b.	Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha)					
c	Rasio Ruang Terbuka Hijau					

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa luas ruang terbuka hijau di Kota Palopo meningkat sejak tahun 2013. Jika pada tahun 2013 tersedian ruang terbuka hijau sebanyak 1165 Ha, pada tahun 2017 menjadi 1170 Ha, atau bertambah sebanyak 5 Ha dalam lima tahun terakhir.

2.3.1.3.2.2. Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan terdiri dari : Taman kota, Taman wisata alam, Taman rekreasi, Taman lingkungan perumahan dan permukiman, Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, Taman hutan raya, Hutan kota, dan hutan lindung.

Sesuai Revisi Rencana Tata Ruang Kota Palopo, Ruang Terbuka Hijau Kota Palopo akan dilaksanakan sebagai berikut :

- RTH Publik tersebar di wilayah Kota Palopo direncanakan seluas 1525.89 hektar atau sebesar 20,41%.
- RTH Private seluas 2.601,7 hektar atau sebesar 10,08%.

Tabel 2.170
Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luasan RTH publik yang tersedia (ha)	1165.29	1167.36	1168.21	1169.23	1170.72
b.	Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan (Ha)	1525.89	1525.89	1525.89	1525.89	1525.89
c	Persentase Luasan RTH dari Luas Wilayah Kota (%)	76.37	76.50	76.56	76.63	76.72

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018, Dok Rencana Tata Ruang Kota Palopo

Angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa 76,72 % target luasan RTH di Kota Palopo telah dicapai sampai dengan tahun 2017. Sisanya sebanyak 23,27% belum tercapai. Artinya pemerintah Kota Palopo masih harus membangun 355,17 Ha ruang terbuka hijau bagi publik untuk memenuhi target luasan RTH yang ada di dalam dokumen RT RW Kota Palopo.

2.3.1.3.2.3. Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan

Tabel 2.171
Rasio Bangunan Ber – IMB Per satuan Bangunan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah bangunan ber IMB (Buah)		621			
b.	Jumlah bangunan (Buah)		1.805			
c	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan		0,34			
d	Per 100 (%)		34,40			

Sumber Data : SIPD Kota Palopo, Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.3.2.4. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya

Tabel 2.172
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)					
b.	Jumlah ruang publik yang tersedia (Ha)	2.759	2.759	2.759	2.761	3.978
c	Persentase					

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.3.2.5. Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Tabel 2.173

Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara					
b.	Luas daratan					
	Rasio					

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu : jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Jadi Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.174

Rasio Rumah Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah rumah layak huni	18.178	19.314	25.277	28.258	29.777
b	Jumlah penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
c	Rasio Rumah Layak Huni	0,113	0,117	0,149	0,163	0,168
d	<i>Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Sulsel (*)</i>	-	0,20	0,21	0,22	0,19

Sumber Data : Dinas Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2017, (*) RKPD Sulsel 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 meningkat. Jika pada tahun 2013 hanya terdapat sebanyak 18.178 unit rumah layak huni, pada tahun 2017 jumlah rumah layak huni meningkat menjadi 29.777 unit.

Rasio rumah layak huni pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, per 1000 penduduk Kota Palopo hanya terdapat 113 unit rumah layak huni, kondisi ini

terus membaik dimana pada tahun 2017 terdapat 168 unit rumah layak huni per 1000 penduduk Kota Palopo.

Jika satu rumah layak huni diasumsikan dihuni oleh lima orang penduduk, artinya pada tahun 2013 dari 1000 penduduk, hanya terdapat 565 orang penduduk yang tinggal di rumah layak huni, sisanya sebanyak 435 orang tinggal di rumah belum layak huni. Sementara di tahun 2017, untuk rasio 1000 penduduk, sebanyak 840 penduduk sudah tinggal di rumah layak huni, sisanya sebanyak 160 orang masih tinggal di rumah belum layak huni.

Meski demikian capaian rasio rumah layak huni ini masih berada dibawah angka rasio rumah layak huni Provinsi Sulawesi Selatan. Rasio rumah layak huni Sulsel yang pada tahun 2017 berada pada angka 0,19, tahun 2016 pada angka 0,22, tahun 2015 pada angka 0,21 dan 2014 sebesar 0,20. (*Dok. RKPD Sulsel 2019*). Salah satu upaya pemerintah Kota Palopo dalam meningkatkan indikator kinerja ini adalah melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2.3.1.4.2. Rasio Pemukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas permukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik.

Tabel 2.175
Rasio Permukiman Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a	Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	3.807	3.966	4.219	4.356	4.414
b	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	4.407	4.452	4.590	4.622	4.682
c	Rasio Permukiman Layak Huni (%)	86,38	89,08	91,93	94,24	94,28
d	<i>Rasio Pemukiman Layak Huni Sulsel (%)</i>	86	87	89	89	97

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Kota Palopo Tahun 2017 dan Dok. RKPD Sulsel 2019

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2017 sebesar 94,28 % hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas area permukiman dibarengi juga dengan peningkatan kualitas rumah layak huni.

Angka pada tabel di atas juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 Ha areal permukiman, terdapat 86,38 Ha areal permukiman layak huni. Jumlah ini meningkat menjadi 94,28 Ha per 100 Ha areal permukiman pada tahun 2017. Beberapa program yang dilaksanakan untuk meningkatkan angka indikator ini di Kota Palopo adalah program NUSP, dan Kotaku. Angka rasio permukiman layak huni Kota Palopo pada tahun 2017 ini berada dibawah rasio permukiman layak huni Sulsel.

2.3.1.4.3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Tabel 2.176
Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	18.718	19.314	25.277	28.258	29.777
b.	Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	33.801	35.914	36.548	36.978	37.504
	Persentase	%	55,38	53,78	69,16	76,42	79,39

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 rumah yang ada, sebanyak 55 rumah merupakan rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2017 angkanya menjadi 79 rumah layak huni per 100 rumah. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2013-2017.

Keberadaan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan perumahan bagi MBR dan pemendagri 55 Tahun 2017 tentang kemudahan memperoleh perizinan bagi pembangunan perumahan MBR juga berkontribusi terhadap pencapaian ini.

2.3.1.4.4. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Tabel 2.177

Persentase Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	Unit	2.756	2.957	3.131	3.412	3.928
b.	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	Unit	3.400	3.600	3.693	4.012	4.265
	Persentase	%	81,06	82,14	84,78	85,04	92,10

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 rumah tangga MBR yang ada, sebanyak 81 rumah tangga MBR telah menempati rumah layak huni. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2017 angkanya menjadi 92 rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni per 100 rumah tangga MBR. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni di Kota Palopo sepanjang 2013-2017. Artinya semakin banyak rumah tangga MBR yang mampu mengakses rumah layak huni.

2.3.1.4.5. Persentase Pemukiman yang Tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.178

Persentase Pemukiman Yang Tertata Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas area permukiman tertata	Ha	4.313	4.361	4.501	4.535	4.647
b.	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	4.407	4.452	4.590	4.622	4682
	Persentase	%	97,87	97,96	98,06	98,12	99,25

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, persentase luas pemukiman yang tertata di Kota Palopo meningkat dari 97,87% menjadi 99,25% pada tahun 2017. Selain persentase, luas area pemukiman yang tertata pun meningkat dari 4.313 Ha pada tahun 2013 menjadi 4.647 Ha pada tahun 2017.

Angka dalam tabel juga menunjukkan dari 100 Ha area pemukiman yang ada, pada tahun 2013 terdapat 98 Ha (pembulatan 97,87) sudah tertata. Kondisi ini terus membaik dimana pada tahun 2017 angkanya menjadi 99 Ha area pemukiman yang tertata dari 100 Ha area pemukiman yang ada. Ini menunjukkan luas area pemukiman yang tertata semakin meningkat, di Kota Palopo sepanjang 2013-2017. .

2.3.1.4.6. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan pemukiman kumuh adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman yang mengalami kekumuhan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan atau lingkungan pemukiman yang tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat : Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada.

Tabel 2.179
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	0	0	85.23	42.58	32.08
b.	Luas wilayah Kota Palopo	Ha	2529.9	2529.9	2529.9	2529.9	2529.9
	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	0	0	3.36	1.68	1.26

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2018, Keterangan : 1 Km² = 100 Ha

Data di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017 persentase luas lingkungan pemukiman kumuh terhadap total luas wilayah Kota Palopo sebanyak 1.26%, menurun dibandingkan kondisi tahun 2013 yang berada pada angka 3.36%.

2.3.1.4.7. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Tabel 2.180

**Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	0	0	4.10	46.75	57.25
b.	Luas pemukiman kumuh	Ha	0	89.33	85.23	42.58	32.08
c	Persentase luasan pemukiman kumuh	%	0	0	95.46	45.15	35.91

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2018

Pada tahun 2014 luas pemukiman kumuh Kota Palopo adalah 89.33 Ha sesuai Surat Keputusan Walikota Palopo. Pada tahun 2015 sebanyak 4.10 Ha ditangani, sehingga Desember 2015 hanya tersisa 85.23 Ha pemukiman kumuh di Kota Palopo.

Pada tahun 2016, akumulasi pemukiman kumuh yang tertangani 46.75, sehingga luas pemukiman kumuh pada tahun 2016 berkurang menjadi 42.58 Ha. Di tahun 2017 kembali ditangani sebanyak 57.25 Ha, sehingga sampai Desember 2017, luas pemukiman kumuh di Kota Palopo hanya tersisa 32,08 Ha.

Angka dalam tabel diatas juga menunjukkan total luas pemukiman kumuh yang sudah ditangani Pemerintah Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 sebanyak 64.09 Ha dari kondisi awal 89.33 Ha dan tersisa 35.91 Ha pada tahun 2017.

2.3.1.4.8. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Tabel 2.181

**Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	KK	3.473	3.275	3.084	2.931	2.864
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	KK	35.026	35.914	36.871	37.749	38.641
	Persentase	%	9,92	9,12	8,36	7,76	7,41

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 rumah tangga di Kota Palopo, terdapat sebanyak 10 (pembulatan 9,92) rumah tangga kumuh perkotaan, kondisi ini semakin membaik di tahun 2017, dimana hanya terdapat 7 rumah tangga kumuh dari 100 rumah yang ada.

2.3.1.4.9. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Indikator ini menggambarkan keberadaan sarana dan prasarana utilitas umum (PSU) berupa kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin baik kualitas pemukiman masyarakat

Tabel 2.182

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	Kawasan	18	21	24	27	30
b.	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	Kawasan	48	120	129	135	143
	Persentase	%	37,50	17,50	18,60	20,00	20,98

Sumber Data : Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa kawasan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Utilitas Umum (PSU) di Kota Palopo semakin berkurang. Jika pada tahun 2013 terdapat 37,50% lingkungan yang didukung PSU, pada tahun 2017 jumlah menurun menjadi 20,98%, yang artinya bahwa dari 100 lingkungan perumahan yang ada pada tahun 2017, hanya 21 (pembulatan 20,98) lingkungan perumahan yang memiliki PSU.

2.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat: untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat adalah rasio polisi pamong praja terhadap setiap 10.000 penduduk, jumlah Linmas setiap 10.000 penduduk serta tersedianya pos siskamling per desa/kelurahan atau sebutan lain.

2.3.1.5.1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel 2.183

**Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	100 orang Petugas Linmas di kabupaten/kota daerah pemekaran baru	Orang	96	330	96	96	96
b.	1 wilayah kerja kabupaten/kota	Kelurahan	48	48	48	48	48
	Persentase	%	200%	688%	200%	200%	200%

Sumber Data : Badan Kesbang Pol Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah petugas Linmas sebanyak 2 orang dalam 1 kelurahan. Kecuali pada tahun 2014 sebanyak 6 – 7 orang per kelurahan, hal ini terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif periode 2014 – 2019. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio anggota linmas per satuan

penduduk di Kota Palopo Tahun 2013 berada pada posisi 1 anggota linmas berbanding 1.675 jiwa penduduk, dan pada tahun 2017 menjadi 1 linmas : 1.837 penduduk.

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja indikator ini sesuai data Kesbang Pol Kota Palopo Tahun 2018, adalah anggota Linmas yang tidak terdaftar, dimana personilnya selalu berganti atau tidak permanen, belum adanya insentif bulanan bagi linmas dan kurangnya event pembinaan bagi mereka. Beberapa hal yang menjadi solusi atas kondisi ini adalah memperbaiki tata kelola Linmas dengan menerbitkan surat keputusan kepala daerah tentang anggota Linmas sehingga lebih mengikat dan permanen, kemudian memberikan mereka insentif yang telah memiliki SK dan memberikan pelatihan dalam pelaksanaan tugas di masyarakat.

2.3.1.5.2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tabel 2.184

**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	322	312	225	215	186
b.	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	329	316	232	233	208
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	97.9	98.8	96.6	92.2	89.4

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013 2017, sebagian besar laporan pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo diselesaikan.

2.3.1.5.3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Tabel 2.185

**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Km ²	7,5	7,5	15	22,5	22,5
b.	Luas wilayah kabupaten/kota	Km ²	252.99	252.99	252.99	252.99	252.99
	Persentase	%	3,03	3,03	6,06	9,09	9,09

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2018

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2013, hanya 3,03%, tahun 2017 menjadi 9,09%. Artinya sampai dengan tahun 2017, dari Km² luas Kota Palopo, yang masuk jangkauan manajemen kebakaran hanya 9 Km². Meski meningkat, kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo ini ke depan harus lebih

ditingkatkan mengingat cukup banyak daerah rawan kebakaran terutama di daerah padat penduduk dan perumahan.

2.3.1.5.4. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator tingkat waktu tanggap atau *response time rate* adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesiapan petugas pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran yang terjadi. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.

Tabel 2.186
Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kasus	40	59	67	40	37
b.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	42	59	76	60	39
	Persentase	%	95,24	100	88,16	67,67	94,87

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus kebakaran yang ditangani kurang atau dalam waktu maksimal 15 menit, menurun. Pada tahun 2013, dari 42 kasus kebakaran, hanya 40 kasus yang ditangani kurang dalam waktu 15 menit, sementara di 2017, dari 39 kasus kebakaran, yang ditangani kurang atau maksimal 15 menit sebanyak 37 kasus. Ke depan angka yang menjadi target indikator ini harus lebih ditingkat.

2.3.1.5.5. Persentase Penegakan PERDA

Tabel 2.187
Persentase Penegakan PERDA
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	322	312	225	215	186
b.	Jumlah pelanggaran PERDA	330	323	230	220	190
	Persentase penegakan PERDA (%)	97,6	96,6	97,8	97,7	97,9

Sumber Data : Dinas SATPOL PP Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat penegakan perda di Kota Palopo semakin membaik. Jika tahun 2013 hanya pada angka 97,6%, tahun 2017 meningkat menjadi 97,9%. Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja penyelesaian dan penegakan perda di Kota Palopo.

2.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial.

2.3.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Adalah indikator yang menggambarkan kemampuan Pemerintah dalam menangani Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Palopo dengan memberikan bantuan sosial. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin baiknya penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2.188
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Jiwa	6786	6848	6813	6857	8777
b	Jumlah PMKS yang menerima seharusnya menerima bantuan	Jiwa	18,586	18586	18573	18556	18388
c	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	36.51	36.84	36.68	36.95	47.73

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2018

Pada tahun 2013 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 36.51 persen dari jumlah PMKS yang ada, dan pada tahun 2014 jumlah tersebut hanya meningkat menjadi 36,84 persen, tahun 2017 persentase pada angka 47.73%. Ini menunjukkan semakin tahun cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palopo semakin meningkat. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

2.3.1.6.2. Persentase PMKS yang Tertangani

Adalah indikator yang menggambarkan cakupan atau besaran penanganan PMKS yang ada di Kota Palopo. Penanganan PMKS bisa dalam bentuk kegiatan seperti langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik penanganan PMKS di Kota Palopo.

Tabel 2.189
Persentase PMKS yang Tertangani
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	6784	6858	6822	6875	8799
b	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	18,608	18608	18597	18588	18462
c	Persentase PMKS yang Tertangani	%	36.45	36.85	36.68	36.98	47.66

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan besaran PMKS yang tertangani di Kota Palopo sejak 2013-2017 meningkat. Jika 2013 sebanyak 36.45% artinya dari 100 orang PMKS, yang berhasil ditangani sebanyak 36 orang, namun 2017 berhasil ditangani 47-48 orang dari 100 orang PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

2.3.1.6.3. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Adalah indikator yang menggambarkan besaran PMKS yang diberikan bantuan sandang pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Semakin tinggi indikator ini, semakin banyak PMKS yang terancam kehidupannya akibat persoalan pemenuhan kebutuhan yang sangat mendasar.

Tabel 2.190
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Jiwa	16537	6877	6827	7011	8748
b	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Jiwa	25541	15881	15831	16015	15184
c	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	64.74	43.30	43.12	43.77	57.61

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan besaran PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun di Kota Palopo sejak 2013-2017 meningkat. Jika 2013 sebanyak 64.74% artinya dari 100 orang PMKS, sebanyak 64-65 orang telah diberikan bantuan sosial, tahun 2017 sebanyak 57-58 orang bisa diberikan bantuan sosial, dari 100 orang

PMKS yang ada. Meski demikian dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, capaian kinerja ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

2.3.1.6.4. Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Tabel 2.191

Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis						
		Orang	0	0	0	0	0
b	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis						
		Orang	0	0	0	0	0
c	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya						
		%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2018

Jumlah panti sosial di Kota Palopo sampai dengan tahun 2017 sebanyak sebanyak 8 panti. Setiap tahunnya, oleh Pemerintah Kota Palopo, panti tersebut diberikan bantuan social berupa beras.

Sementara kelompok social penerima KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kota Palopo sejak 2013-2016 jumlahnya sebanyak 80 kelompok. Tahun 2013, 10 kelompok diantaranya telah menerima KUBE, tahun 2014 sebanyak 50 kelompok, tahun 2015 sebanyak 7 kelompok. Jadi total jumlah kelompok penerima KUBE di Kota Palopo sampai dengan tahun 2015 sebanyak 67 kelompok.

Target indikator ini sesuai SPM adalah 80%. Namun faktanya sesuai data yang tercantum di atas, pada tahun 2017 sama sekali tidak ada panti sosial yang menerima program KUBE atau program usaha sejenis di Kota Palopo. Ini menunjukkan kinerja pelayanan untuk mencapai target indikator ini masih sangat jauh dari yang diharapkan.

2.3.1.6.5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Tabel 2.192

Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos						
		Unit	8	8	8	8	8

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
b	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos						
		Unit	8	8	8	8	8
c	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial						
		Unit	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2018

Target SPM untuk indikator ini sebesar 80%. Sejak tahun 2013-2017, target indikator ini telah dicapai. Ini menunjukkan bahwa semua panti sosial yang ada di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial bagi para penghuninya.

2.3.1.6.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tabel 2.193

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos						
		Unit	48	48	48	48	48
b	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala						
		Unit	48	48	48	48	48
c	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial						
		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa semua WKSBM di Kota Palopo telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kota Palopo sejak tahun 2013-2017, setiap tahunnya memberikan bantuan kepada kelompok WKSBM. Setiap tahunnya sebanyak 4 kelompok..

2.3.1.6.7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tabel 2.194

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017

a	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun						
		Jiwa	9749	89	39	223	139
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun						
		Jiwa	9749	89	39	223	139
c	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat						
		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2018

Target SPM untuk indikator ini adalah 80% artinya dari 100 orang korban bencana 80 orang harus mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Di Kota Palopo capaian indikator kinerja ini telah terpenuhi.

2.3.1.6.8. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tabel 2.195

**Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun						
		Jiwa	9596	20	0	42	0
b	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala						
		Jiwa	9596	20	0	42	0
c	Presentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap						
		%	100	100	0	100	0

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2018

2.3.1.6.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Tabel 2.196

**Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun						
		Orang	0	0	0	0	125
b	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun						
		Orang	953	962	964	971	1141

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
c	Presentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial						
		%	0	0	0	0	10.95

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan pada tahu 2017, dari 100 penyandang cacat di Kota Palopo hanya 1-2 orang penyandang yang menerima jaminan sosial. Capaian indikator ini di Kota palopo sepanjang 2013-2017 masih sangat perlu diakselerasi.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.3.2.1.1. Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja per Tahun

Adalah indikator yang menunjukkan jumlah kasus sengketa pengusaha dan pekerja di sebuah daerah per 1000 orang tenaga kerja. Angka ini mengindikasikan hubungan antara pengusaha sebagai pemilik modal dan pekerja sebagai penyedia jasa tenaga. Semakin tinggi sengketa antara pengusaha dengan pekerja menunjukkan adanya ketidakharmonisan yang berakibat pada penurunan investasi.

Semakin tinggi angka indikator ini, semakin banyak kasus perselisihan/sengketa antara pengusaha dan tenaga kerja yang terjadi dan akan berpengaruh terhadap iklim usaha dan ketenagakerjaan di sebuah daerah.

Tabel 2.197

Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun Di Kota Palopo 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja	4	4	8	10	14
2	Jumlah Perusahaan	1407	1438	1459	1678	1685
3	Jumlah Perusahaan ber TDP(*)	1048	770	961	829	774
3	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun (x 1000)	2,8	2,8	5,5	6,0	8,3
5	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja di Perusahaan ber TDP Per Tahun (x 100)	0.38	0.52	0.83	1.21	1.81

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018, () Palopo Dalam Angka*

Data di atas menunjukkan sepanjang 2013-2017, kasus sengketa pekerja dan pengusaha di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2013, dari 1000 perusahaan yang ada, rata-rata jumlah kasus sengketa ketenagakerjaan antara pekerja dan perusahaan sebanyak 2-3 kasus, tahun 2015 menjadi 5-6 kasus, dan 2016 menjadi 6 kasus dan 2017 menjadi 8 kasus. Ini menunjukkan dinamisnya ketenagakerjaan di Kota Palopo.

Namun jika dibandingkan terhadap jumlah perusahaan dengan tanda daftar, angka sengketa pengusaha-pekerja ini jauh lebih rendah. Sebab pada tahun 2017 jumlah perusahaan ber TDP di Kota Palopo hanya 774 buah (*sumber : Palopo Dalam Angka*) , sehingga angka sengketa pengusaha pekerja hanya pada kisaran 1,81%. Artinya dari 100 perusahaan hanya terdapat 1-2 kasus sengketa pengusaha dan pekerja.

Tahun 2016, jumlah perusahaan ber TDP hanya 829 buah, sehingga angka sengketa pengusaha pekerja hanya pada kisaran 1,21%. Artinya dari 100 perusahaan hanya terdapat 1 kasus sengketa pengusaha dan pekerja. Kemudian tahun 2015 jumlah perusahaan ber TDP sebanyak 961 perusahaan, sehingga angka sengketa pengusaha

pekerja hanya pada kisaran 0,83%. Artinya dari 100 perusahaan hanya terdapat 0-1 kasus sengketa pengusaha dan pekerja.

Tahun 2014 jumlah perusahaan ber TDP sebanyak 770, sehingga angka sengketa pengusaha pekerja hanya pada kisaran 0,52%. Artinya dari 100 perusahaan hanya terdapat 0- 1 kasus sengketa pengusaha dan pekerja dan tahun 2013 dimana jumlah perusahaan ber TDP sebanyak 1048 sehingga angka sengketa pengusaha pekerja hanya pada kisaran 0,38%. Artinya dari 100 perusahaan rata-rata tidak ada kasus sengketa pengusaha dan pekerja.

2.3.2.1.2. Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Indikator ini menggambarkan besaran sengketa antara pengusaha dan pekerja yang berhasil diselesaikan dengan perjanjian bersama. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak sengketa/perselisihan antara buruh/pekerja dan pengusaha yang diselesaikan melalui kesempatan dan musyawarah.

Tabel 2.198

Besaran Kasus yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	3	4	7	8	10
2	Kasus yang Dicatat/Dilaporkan	4	4	8	10	14
3	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	75	100	88	80	71

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013 s.d 2017 semua kasus perselisihan ketenagakerjaan di Kota palopo diselesaikan dengan perjanjian bersama tanpa perlu dilanjutkan pada pengadilan hubungan industrial. Tahun 2013, 75 kasus sengketa diselesaikan dengan perjanjian bersama, 2014 jumlah menjadi 100%, 2015 menjadi 88%% dan 2016 menjadi 80%. Di tahun 2017 jumlah kembali menurun menjadi 71%. Ini menunjukkan dinamika ketegakerjaan di Kota palopo masih tetap mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan kasus sengketa atau perselisihan tenaga kerja - pengusaha.

2.3.2.1.3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Tabel 2.199

Pencari Kerja yang Ditempatkan Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Org	274	266	66	78	121
b.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Org	5.895	5.601	4.179	2.491	2.664
	Pencari Kerja yang ditempatkan (a/b)	%	4,65	4,75	1,58	3,13	4,54

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa, dari 100 orang pencari kerja yang mendaftar, pada tahun 2013 hanya 4-5 orang tenaga kerja yang ditempatkan. Kondisi tak jauh

berbeda juga terjadi pada tahun 2017. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan cenderung stangnan, sementara angka pertumbuhan pencari kerja di Kota Palopo setiap tahunnya selalu meningkat secara signifikan yang kemudian memicu laju angka pengangguran di Kota Palopo.

2.3.2.1.4. Keselamatan dan Perlindungan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang memperhatikan dan menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi pekerjanya. Semakin tinggi angka indikator ini semakin banyak cakupan tenaga kerja yang dilindungi keselamatan dan keamanan kerjanya.

Tabel 2.200
Persentase Keselamatan dan Perlindungan
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3	Buah	345	364	375	406	420
2	Jumlah Perusahaan	Buah	1.407	1.438	1.459	1.678	1.689
3	Persentase Keselamatan & Perlindungan (x 100)	%	25	25	26	24	25

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan pada tahun 2013, dari 100 perusahaan yang ada, hanya 25% perusahaan yang menerapkan prinsip keselamatan dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Kondisi ini berlangsung cukup stagnan sampai tahun 2017. Dimana rata-rata kinerja indikator ini hanya 24-26%. Jika dilihat dari jumlah, angka cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Jika dibandingkan dengan perusahaan ber TDP, persentase perusahaan yang menerapkan K3 di Kota Palopo meningkat. Jika pada tahun 2013 hanya sebanyak 32,92%, tahun 2017 sebanyak 54,26% perusahaan telah menerapkan prinsip K3. Jumlah perusahaan ber TDP di Kota Palopo pada tahun 2017 sebanyak 774, 2016 sebanyak 829, 2015 sebanyak 961, 2014 sebanyak 770, dan 2013 sebanyak 1048 perusahaan.

2.3.2.1.5. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Indikator ini menggambarkan cakupan pekerja yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak jumlah pekerja/buruh yang dijamin jaminan sosial bidang ketenagakerjaannya.

Tabel 2.201
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	Orang	5.592	5.678	7.853	10.383	10.478
2	Jumlah Buruh/Pekerja	Orang	19.560	20.490	21.735	28.337	28.377
3	Besaran Pekerja/Buruh Peserta	Persen	29	28	36	37	37

Jamsostek

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan persentase buruh pekerja untuk menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Palopo dalam lima tahun terakhir terus meningkat. Ini menggambarkan adanya kesadaran pekerja untuk menjadi bagian dalam program jaminan kesejahteraan sosial ketenagakerjaan ini. Meski demikian jika dilihat dari persentase, sampai dengan 2017, masih ada kurang lebih 63% buruh pekerja di Kota Palopo yang belum mengikuti program, ini. Angka ini masih cukup besar. Olehnya ke depan diperlukan upaya akselerasi agar lebih banyak buruh pekerja menjadi peserta dalam Jamsostek tersebut.

2.3.2.1.6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Indikator ini menggambarkan pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap angka perselisihan buruh dan pengusaha. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin dinamisnya kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Tabel 2.202
Persentase Perselisihan Buruh dan Pengusaha
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah daerah pada tahun n	Kasus	0	0	0	0	0
b.	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah daerah	Kasus	0	0	0	0	0
	Persentase	%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.1.7. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Indikator yang menunjukkan cakupan perusahaan yang diperiksa dalam menerapkan prinsip prinsip sesuai UU ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen pemerintah dan perusahaan memenuhi hak dan kewajibannya bagi para pekerja dan buruh.

Tabel 2.203
Persentase Pemeriksaan Perusahaan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	Buah	18	8	8	6	0
2	Jumlah perusahaan terdaftar (ber TDP) (*)	Buah	1048	770	961	829	774
3	Persentase Pemeriksaan Perusahaan	%	1,67	1,01	0,87	0,67	-

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2018, BPS Kota Palopo (Palopo dalam Angka) yang menggunakan sumber Data dari DPMPTSP Kota Palopo

Data diatas menunjukkan bahwa besaran pemeriksaan perusahaan di Kota Palopo sepanjang 2013-2017 masih sangat rendah. Tahun 2013, rasio menunjukkan dari 100 perusahaan hanya 1-2 perusahaan yang diperiksa, sementara tahun 2016, hanya 1 perusahaan yang diperiksa. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan pada sejumlah perusahaan di Kota Palopo. Sehingga kinerja dan cakupan program pada dinas tenaga kerja harus diakselerasi.

2.3.2.1.8. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Indikator ini menggambarkan besaran perusahaan yang menggunakan peralatan di perusahaannya namun tetap memperhatikan prinsip prinsip keamanan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerjanya. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik bagi keamanan kerja bagi para karyawannya.

Tabel 2.204
Besaran Pengujian Perlatan di Perusahaan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah peralatan yang telah diuji	Buah	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b.	Jumlah peralatan yang terdaftar	Buah	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	Persentase	%	0,48	0,48	0,53	0,48	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 dari 100 perusahaan yang ada hanya 4-5 perusahaan terdaftar yang peralatannya diuji sementara pada tahun 2016 hanya 4-5 perusahaan saja. Ini menunjukkan masih lemahnya aspek pengawasan pada sejumlah perusahaan dan peralatan produksi yang mereka gunakan di Kota Palopo.

2.3.2.1.9. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator ini memberikan gambaran proporsi tenaga kerja di Kota Palopo yang memiliki keterampilan kompetensi kerja setelah mendapatkan pelatihan. Umumnya hambatan utama untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja (seperti memiliki lebih banyak tenaga kerja terampil) adalah rendahnya akses ke pendidikan menengah berbasis vokasi, apalagi dengan kondisi Kota Palopo dimana sebagian besar angkatan kerja merupakan lulusan SMA/SMK sederajat. Indikator ini akan berdampak pada tingkat produktifitas tenaga kerja yang ada dalam menghasilkan nilai tambah produk barang atau jasa.

Tabel 2.205
Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	16	16	16	88
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis	Orang	198	163	210	280	305

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	kompetensi						
c	Persentase	%	8.08	9.82	7.62	5.71	28.85

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan besaran tenaga kerja yang dilatih dengan berbasis kompetensi meningkat sepanjang tahun 2013. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 8.08% pada tahun 2017 sudah mencapai angka 28.85%.

2.3.2.1.10. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam skala komunitas dalam pelatihan ketenagakerjaan. Semakin nilai indikator ini, semakin banyak komunitas komunitas tenaga kerja yang siap kerja di sebuah daerah.

Tabel 2.206

Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	0	16	16	32
b.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	Orang	175	288	288	270	286
	Persentase	%	9.14	0	5.56	5.92	11.2

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2018

2.4.1.2.11. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Tabel 2.207

Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	32	90	16	64	20
b.	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	Orang	140	160	40	175	343
	Persentase	%	22.8	60	40	36.6	5.83

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan semakin menurun. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 22.8%, pada tahun 2017 menjadi 5.83%.

2.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menunjukkan komitmen pemerintah akan pentingnya akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari

partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2.3.2.2.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tabel 2.208
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	3.058	3.036	3.293	2.933	2.902
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	20.100	21.825	22.726	25.711	26.563
c	Persentase	%	15,21	13,91	14,49	11,40	10,92

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sejak tahun 2013-2017 menurun. Pada tahun 2013 pada angka 15,21% sementara di 2017 hanya pada angka 10,92%. Pekerja perempuan, pada tahun 2017 lebih banyak mengakses lapangan kerja non pemerintahan seperti lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan.

2.3.2.2.2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR

Tabel 2.209
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kursi DPR yang diduduki perempuan	Orang	5	5	5	5	5
b.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	25	25	25	25	25
c	Persentase	%	20	20	20	20	20

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang bekerja di lembaga legislatif Kota Palopo sejak periode 2009-2013 dan periode 2014-2019. Dalam 2 periode pemilihan legislatif, jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD Kota Palopo hanya 5 orang dengan presentase 20% dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Palopo.

Kondisi ini masih berada di atas capaian nasional dimana hanya 17,32% perempuan yang duduk di lembaga legislatif, termasuk provinsi yang hanya pada angka 17,6%. Jika dibandingkan dengan target pencapaian SDGs yang pada tahun 2030 menargetkan 30% perempuan duduk menjadi anggota lembaga legislatif, Kota Palopo ke depan, paling tidak harus memiliki 8 orang anggota legislatif dari kalangan perempuan.

2.3.2.2.3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel 2.210
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	609	671	752	801	840
b.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	20.100	21.825	22.726	25.711	26.563
c	Persentase	%	3.03%	3.07%	3.31%	3.12%	3.16%

Sumber Data : BPS Kota Palopo

Data di atas menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga swasta sejak tahun 2013-2017 meningkat. Pada tahun 2013 pada angka 3,03% sementara di 2017 pada angka 3,16%. Kondisi ini selaras dengan data partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, yang sejak tahun 2013-2017 menurun.

Artinya pekerja perempuan lebih banyak mengakses lapangan kerja di sektor swasta daripada lembaga pemerintahan di Kota Palopo. Beberapa lapangan usaha swasta yang banyak diakses oleh pekerja perempuan adalah lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi serta lapangan usaha jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

2.3.2.2.4. Rasio KDRT

Tabel 2.211
Rasio KDRT
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah KDRT	Kasus	21	15	20	22	10
b.	Jumlah rumah tangga	KK	35.025	35.914	36.871	37.749	38.641
c	Rasio KDRT	Per 10.000	6	4	5	6	3

Sumber Data : BPS Kota Palopo dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Palopo menurun. Jika pada tahun 2013, dari 10.000 rumah tangga terdapat sebanyak 6 kasus KDRT, sementara di 2017 jumlahnya menurun menjadi 3 kasus.

2.3.2.2.5. Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Persentase tenaga kerja di bawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Semakin tinggi nilai indikator ini mengindikasikan masih lemahnya perlindungan anak. Anak dianggap masih memiliki nilai ekonomi dan seringkali anak dieksploitasi.

Tabel 2.212
Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Pekerja anak usia 5 – 14 tahun	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b.	Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

	Persentase	%					

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.2.6. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel 2.213
Persentase Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	24.653	25.874	25.332	26.529	28.506
b	Jumlah penduduk perempuan usia kerja	Orang	52.907	56.963	62.767	60.091	66.249
c	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	46.60	45.42	40.36	44.15	43.03
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	%	83,66	79,16	69,43	73,03	77,61

Sumber Data : Data Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Dari aspek gender, tabel diatas juga menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sepanjang 2013-2017 di Kota Palopo masih jauh tertinggal dibawah TPAK laki. Pada tahun 2017, selisih angkanya bahkan terpaut 34,58%. Olehnya pengarusutamaan gender dalam aspek ketenagakerjaan di Kota Palopo perlu agar ke depan TPAK perempuan terus meningkat.

2.3.2.2.7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.214
Persentase Laporan Pengaduan ke Unit Pelayanan Terpadu
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Laporan	12	0	56	18	32
b.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Laporan	12	0	56	254	145
	Persentase	%	100	100	100	7.09	22.07

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat penanganan pengaduan atau laporan kasus perempuan atau anak korban kekerasan di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2013, seluruh laporan ditindaklanjuti, tahun 2017 hanya 18,18% yang direspon. Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini jauh menurun.

2.3.2.2.8. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Terlatih di

Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Tabel 2.215
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah korban Ktp/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana Ktp/A atau PPT/PKT di Rumah Sakit	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b.	Jumlah seluruh korban Ktp/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana Ktp/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	Persentase	%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.2.9. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.216
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Rehabsos
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b.	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	Persentase	%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.2.10. Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus – Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 2.217
Persentase Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah perkara diputuskan pengadilan dengan dasar perundang – undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perkara	78	68	48	74	87
b.	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Perkara	78	68	48	74	87
	Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.2.11. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Tabel 2.218
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Bantuan Hukum
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	Korban					
b.	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan bantuan hukum	Korban					
	Persentase	%					

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.2.12. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tabel 2.219
Persentase Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Orang	7	7	-	49	31
b.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Orang	2	2	-	254	145
	Persentase	%	350	350	-	19.29	21.38

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.2.13. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tabel 2.220
Persentase Reintegrasi Sosial
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	Orang	9	7	2	49	31
b.	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	Persentase	%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.2.14. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD

Tabel 2.221
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SD
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	APM – SD Perempuan	%			90,04	90,52	99,12
b.	APM – SD Laki - Laki	%			97,48	100	99,33

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2017, lebih banyak siswa laki-laki yang bersekolah tepat waktu dibandingkan siswa perempuan. Tahun 2015 misalnya, dari 100 siswa laki-laki, ada 97 orang yang tepat waktu masuk sekolah, jumlah ini meningkat menjadi 99 orang siswa pada tahun 2017. Sementara siswa perempuan di tahun 2013, hanya ada 90 orang siswa perempuan yang bersekolah tepat waktu.

2.3.2.2.15. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP

Tabel 2.222
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMP
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	APM – SMP Perempuan	Orang			81,02	75,52	80,28
b.	APM – SMP Laki - Laki	Orang			68,49	77,50	75,35

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2017, lebih banyak siswa perempuan yang bersekolah tepat waktu dibandingkan siswa laki-laki. Tahun 2015 misalnya, dari 100 siswa perempuan, ada 81 orang yang tepat waktu masuk sekolah, sementara di tahun yang sama, hanya ada 68 siswa laki-laki yang bersekolah tepat waktu. Di tahun 2017, jumlah siswa perempuan tingkat SMP/ sederajat yang bersekolah tepat waktu juga lebih banyak dari pada laki-laki. Siswa SMP perempuan

yang bersekolah tepat waktu pada tahun 2017 sebanyak 80 orang dari 100 siswa SMP perempuan, sedangkan laki-laki hanya 75 orang.

2.3.2.2.16. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA

Tabel 2.223
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di SMA
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	APM siswa SLTA / sederajat Perempuan	Persen			66,63	64,73	63,24
b.	APMS siswa SLTA/ sederajat laki-laki	Persen			70,11	66,80	69,65

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2017 untuk tingkat SLTA/ sederajat, lebih banyak siswa laki-laki yang bersekolah tepat waktu dibandingkan siswa perempuan. Tahun 2015 misalnya, dari 100 siswa laki-laki, ada 70 orang yang tepat waktu masuk sekolah, sementara di tahun yang sama, hanya ada 67 siswa perempuan yang bersekolah tepat waktu.

Di tahun 2017, jumlah siswa laki-laki yang bersekolah tepat waktu juga lebih banyak dari pada siswa perempuan. Siswa SLTA laki-laki yang bersekolah tepat waktu pada tahun 2017 sebanyak 70 orang dari 100 siswa SLTA laki-laki, sedangkan perempuan hanya 63 orang yang tepat waktu masuk sekolah.

2.3.2.2.17. Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi

Tabel 2.224
Rasio APM Perempuan/Laki – Laki di Perguruan Tinggi
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	APM perempuan yang masuk perguruan tinggi	Persen					
b.	APM laki-laki yang masuk Perguruan Tinggi	Persen					

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

2.3.2.2.18. Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki – Laki Pada Kelompok Usia 15 – 24 Tahun

Tabel 2.225
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki – Laki (15 – 24 Tahun)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	AMH 15 – 24 perempuan	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b.	AMH 15 – 24 laki - laki	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.2.19. Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian

Tabel 2.226
Persentase Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b.	Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian	Orang	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
	Rasio		Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

2.3.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Parameter ketahanan pangan rumah tangga yang didasarkan pada definisi ketahanan pangan dari UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, mempunyai empat komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu

1. Kecukupan ketersediaan pangan
2. Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga Diukur berdasarkan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari yaitu makan 3 (tiga) kali sehari, frekuensi makan dapat menggambarkan keberlanjutan ketersediaan pangan dalam rumah tangga.
3. Aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan Dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan (misalkan sawah atau ladang) serta cara rumah tangga memperoleh pangan
4. Kualitas atau keamanan pangan

Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor.

World Health Organization mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi.

Tabel 2.227
Persentase Ketersediaan Pangan Utama Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Rata – rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun						
		Kg	14,510.55	15,760.64	16,783.60	17,774.44	19,466.00
b.	Jumlah penduduk						
		Orang	160,819	164,903	168,894	172,916	176,907
c	Jumlah Konsumsi Rill						

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
		Kg	15,653.24	16,677.93	17,356.36	17,130.12	16,721.00
d	Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Penduduk						
		%	9.02%	9.56%	9.94%	10.28%	11.00%
e	<i>Persentase Ketersediaan Pangan Utama Per Jumlah Konsumsi Rill</i>						
		%	92.70%	94.50%	96.70%	103.76%	116.42%

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa angka ketersediaan bahan pangan utama di Kota Palopo meningkat sepanjang tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, untuk 100 jiwa penduduk Kota Palopo, rata-rata tersedia 9,02 Kg pangan utama, sementara di 2017 tersedia sebanyak 11,00 Kg bahan pangan utama per 100 jiwa penduduk Kota Palopo. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi ril, angka ketersediaan pangan utama juga meningkat. Jika pada tahun 2013 pada angka 92,70%, pada tahun 2017 berada pada angka 116,42%.

2.3.2.3.2. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Tabel 2.228

Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Kalori x BDD	Kkal/kapita/hari	29,700	20,497	22,034	21,301	20,128
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100
1	Ketersediaan energi	Kkal/kapita/hari	2970.0	2049.7	2203.4	2,130.10	2012.8
a	Ketersediaan pangan/kapita/hari x Kandungan Protein x BDD	Kkal/kapita/hari	573	816	692	689	691
b	Koefisien	Angka	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan Protein	gram/kapita/hari	57.32	81.60	69.23	68.9	69.1
3	Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	(kkal/kapita/hari)	3,027	2,131	2,273	2,199	2,082

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2018, RAD Pangan dan Gizi Kota Palopo 2016-2020

Food and Agriculture Organization atau FAO mensyaratkan untuk ketersediaan energi minimal adalah sebesar 2200 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 54 gram/kapita/hari. Sementara standar Indonesia 2000-2100 kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan energi dan protein Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 sudah berada diatas standar minimal FAO.

2.3.2.3.3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2.229

Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu						
		Sampel	-	-	-	9	9
b.	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu						
		Sampel	-	-	-	12	11
	Persentase		-	-	-	75	82

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.4. Bidang Urusan Pertanian

Berikut adalah beberapa indikator penyelenggaraan otonomi daerah pada urusan pertanian. Indikator pertanian untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah.

2.3.2.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanian untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan tanah.

Tabel 2.230
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah luas lahan bersertifikat	Km2	1,86	2,29	3,98	3,23	3,77
b.	Jumlah luas wilayah	Km2	252.99	252.99	252.99	252.99	252.99
	Persentase	%	0,75	0,92	1,61	1,31	1,52

Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan sebagian besar lahan di wilayah Kota Palopo belum bersertifikat. Sampai tahun 2017 hanya 1,52% wilayah Kota Palopo yang memiliki bukti kepemilikan. Meskipun jika dibandingkan tahun 2013, luas wilayah yang bersertifikat pada tahun 2017 luasnya meningkat.

Data dalam tabel juga menunjukkan bahwa dari 100 Km2 wilayah Kota Palopo, hanya 15,2 Km2 yang bersertifikat sampai pada tahun 2017. Penambahan luas lahan bersertifikat selama lima tahun sebesar 1,91 Km2. Olehnya Pemerintah Kota Palopo harus lebih memberikan akses dan melaksanakan advokasi masyarakat tentang pentingnya bukti legalisasi kepemilikan tanah.

2.3.2.4.2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel 2.231
Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kasus yang	Kasus	0	0	0	0	0

	diselesaikan						
b.	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	4	4	4	4	4
	Persentase	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus sengketa tanah negara di Kota Palopo sebanyak empat kasus. Yakni kasus tanah negara dengan tipologi konflik satu konflik tanah ex HGU dan tiga kasus tentang ijin pemanfaatan tanah dan sampai tahun 2017, masih dalam tahap penyelesaian konflik.

Kasus konflik tanah ex HGU sampai tahun 2017 masih dalam tahap penyelesaian, sementara untuk tiga kasus ijin pemanfaatan tanah, satu kasus dalam proses pengadilan, satu kasus belum dilakukan pelaksanaan ganti rugi dan kasus lainnya dalam proses perampungan perda RT RW. Kasus terakhir ini terkait dengan pemanfaatan tanah HPL lokasi Jalan Lingkar di Kota Palopo.

2.3.2.4.3. Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel 2.232
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah ijin lokasi	Buah	1	0	1	1	0
b.	Permohonan ijin lokasi	Buah	2	0	1	1	1
c	Persentase	%	50	0	100	100	0

Sumber Data : Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian izin lokasi di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 masih fluktuatif. Pada tahun 2013 penyelesaian izin lokasi 50%, tahun 2015 menjadi 100% dan tahun 2017 0% atau belum ada satupun permohonan izin lokasi yang diterbitkan izin lokasinya.

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Tabel 2.233
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersusunnya RPPLH kabupaten/Kota	Belum Tersedi a	Belum Tersedi a	Belum Tersedi a	Belum Tersedi a	Belum Tersedi a

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5.2. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

Tabel 2.234
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Terintegrasinya RPPLH dalam	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
rencana pembangunan kabupaten/Kota	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5.3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Tabel 2.235
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada (KLHS RTRW)	Ada (KLHS Kawasan Pesisir)	-	-	Ada (KLHS Revisi RTRW)

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan untuk menjamin Kebijakan rencana Program (K/R/P) mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan. Tabel di atas menunjukkan sepanjang 2013-2017, Pemerintah Kota Palopo hanya 3 kali menyelenggarakan KLHS yang menghasilkan 3 dokumen yakni KLHS RTRW, KLHS Kawasan Pesisir dan KLHS revisi RT RW Kota Palopo 2012-2032.

2.3.2.5.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Tabel 2.236
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Hasil pengukuran indeks kualitas air	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Kondisi di atas menunjukkan bahwa kualitas air secara umum di wilayah Kota Palopo masih dalam batas kewajaran. Sepanjang 2013-2017, hasil pengukuran indeks kualitas air di Kota Palopo berada dalam kategori cemar ringan. Data ini diperoleh dengan mengambil sampel air di beberapa sungai dan saluran air/drainase.

2.3.2.5.5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Tabel 2.237
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Unggul

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Palopo pada tahun 2017, kondisinya lebih baik dibandingkan tahun 2013-2016. Sesuai hasil uji di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, kualitas udara pada tahun 2013-2016 berkategori sangat baik. Namun tahun 2017 berada pada kategori unggul. Beberapa aspek yang mempengaruhi kondisi ini adalah penataan sejumlah RTH di Kota Palopo yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara pada tahun 2017.

2.3.2.5.6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 2.238
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5.7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.239
Persentase Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo yang ditangani	Izin	680	736	885	1109	1161
b.	Total penanggung jawab usaha dana atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo	Pihak	216	288	288	432	432
	Persentase	%	31,76	39,13	32,54	38,95	37,20

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan sepanjang tahun 2013-2017, masih lebih banyak pelaku usaha di Kota Palopo yang belum taat terhadap kepemilikan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Sampai tahun 2017, masih terdapat 62,80% yang belum taat atas izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Data ini juga menunjukkan jumlah pelaku usaha yang taat, masih berfluktuatif, meski cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

2.3.2.5.8. Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota

Tabel 2.240
Jumlah PPLHD dan Sarana Prasarana PPLHD
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	Orang	0	0	0	0	0
b.	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	Orang	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013-2017 Pemerintah Kota Palopo belum memiliki pejabat pengawas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena belum adanya ASN yang memiliki sertifikasi maupun mengikuti diklat fungsional PPLHD.

2.3.2.5.9. Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA

Tabel 2.241
Jumlah MHA Yang Diakui
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah MHA yang diakui	Komunitas	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5.10. Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional

Tabel 2.242
Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Yang Diverifikasi
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	Komunitas	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5.11. Penetapan Hak MHA

Tabel 2.243
Jumlah Penetapan Hak MHA
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah penetapan hak MHA	Komunitas	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5.12. Terfasilitasi Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Tabel 2.244

**Persentase MHA Yang Difasilitasi
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah MHA yang difasilitasi	Komunitas	0	0	0	0	0
b.	Jumlah total MHA	Komunitas	0	0	0	0	0
	Persentase	%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5.13. Terfasilitasi Penyediaan Sarana/Prasarana

Tabel 2.245

**Persentase MHA Yang Diberikan Sarana/Prasarana
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana	Komunitas	0	0	0	0	0
b.	Jumlah total MHA	Komunitas	0	0	0	0	0
	Persentase	%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5.14. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat

Tabel 2.246

**Jumlah Pelatihan Yang Diberikan di Lembaga Kemasyarakatan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Kegiatan	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5.15. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel 2.247

**Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Pemerintah Kota Palopo sampai tahun 2017 belum pernah memberikan apresiasi apapun kepada lembaga atau pihak manapun, terkait pengelolaan lingkungan hidup.

2.3.2.5.16. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota Palopo

Tabel 2.248
Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Pengaduan masyarakat yang ditangani	Buah	9	10	15	7	11
b.	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	Buah	9	10	15	7	11
	Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017, sangat baik. Semua pengaduan yang disampaikan atau dilaporkan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Palopo. Ini mengindikasikan Pemerintah Kota Palopo sangat merespon isu-isu di masyarakat yang terkait dengan persoalan lingkungan.

2.3.2.5.17. Timbulan Sampah yang Ditangani

Tabel 2.249
Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Volume timbulan sampah yang ditangani	(Ton)	27.738	31.180	33.033	31.047	33.040
b.	Jumlah total timbulan sampah	(Ton)	35.274	37.528	38.355	35.674	37.427
	Persentase	%	78,64	83,08	86,12	87,02	88,28

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Dari data di atas, menunjukkan bahwa persentase volume timbulan sampah yang ditangani dari tahun 2013-2017 semakin meningkat. Ini menunjukkan kinerja penanganan sampah di Kota Palopo, membaik. Jika pada tahun 2013 hanya mampu menangani 78,64% timbulan sampah. Tahun 2017, berada pada angka 88,28%. Data ini juga menampilkan bahwa total timbulan sampah juga semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

2.3.2.5.18. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Tabel 2.250
Persentase Sampah yang Terkurangi Melalui 3R
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017

a	Jumlah Timbunan Sampah yang ditangani (Ton)	Ton	27.738	31.180	33.033	31.047	33.040
b	Jumlah yang tertangani di TPS 3R setara	Ton	388.33	498.88	858.86	984.19	1156.40
c	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (b/a)	%	1,4	1,6	2,6	3,17	3,5

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Jumlah sampah yang tertangani di TPS 3 R adalah sampah yang berkurang melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sampah seperti ini meningkat sejak 2013 ke 2017. Ini menunjukkan bahwa peran TPS 3 R di Kota Palopo berjalan cukup baik. Jika pada tahun 2013 TPS 3 R hanya mampu menangani sebanyak 388.33 Ton pada tahun 2013, tahun 2017 mampu menangani 1.156.40 Ton sampah. Ini menunjukkan bahwa beberapa strategi 3R dalam pengurangan sampah yang masuk TPA, seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, cukup baik.

Dampaknya jumlah sampah yang terangkut ke TPA dari tahun ke tahun di Kota Palopo semakin berkurang, sehingga masa pakai TPA bisa lebih panjang/lama. Sebab akan semakin menurunkan beban tamping yang akan diterima oleh TPAS Kota Palopo yang ada di Kelurahan Mancani.

Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Palopo berhasil mengurangi sampah yang masuk ke TPA sebesar 1,4% dari produksi sampah yang ada. Dan jumlah ini meningkat menjadi 3,5% pada tahun 2017.

2.3.2.5.19. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Tabel 2.251
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah	km ² /ha	127,74	137,76	147,88	151,72	159,01
b.	Luas area Kota Palopo	km ² /ha	247,52	247,52	247,52	247,52	247,52
	Persentase	%	51	55	59	61	64

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa luas area pelayanan sampah dari tahun ke tahun meningkat. Jika tahun 2013 hanya 51% wilayah Kota Palopo yang terlayani, tahun 2017 64% wilayah Kota Palopo sudah dijangkau pelayanan sampah.

2.3.2.5.20. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Tabel 2.252
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah sampah yang tertangani	Meter Kubik	22.291	23.962	26.928	26.381	29.405

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
		(ton)					
b.	Total jumlah timbunan sampah di Kota Palopo	Meter Kubik (ton)	35.274	37.528	38.355	35.674	37.427
	Persentase	%	63,19	63,85	70,20	73,95	78,56

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Dari data di atas, menunjukkan bahwa persentase volume timbunan sampah yang ditangani dari tahun 2013-2017 semakin meningkat. Ini menunjukkan kinerja penanganan sampah di Kota Palopo, membaik. Jika pada tahun 2013 hanya mampu menangani 63.19% timbunan sampah. Tahun 2017, berada pada angka 78,56%. Data ini juga menampilkan bahwa total timbunan sampah juga semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk.

2.3.2.5.21. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Palopo

Tabel 2.253
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Nilai TPA (Program Adipura) $\geq$ 71	69,57	68,86	72,41	75,65	77,81

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa nilai predikat Tempat Pembuangan Sampah Kota Palopo semakin menunjukkan peningkatan ke arah lebih baik. Jika pada tahun 2013 hanya pada angka 69,57, pada tahun 2017 menjadi 77,81.

2.3.2.5.22. Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan

Tabel 2.254
Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit	Buah	0	0	0	0	0
b.	Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun	Buah	0	0	0	0	0
	Persentase	%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.5.23. Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang - Undangan

Tabel 2.255
Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang - Undangan Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta yang taat pada	Buah	0	0	0	0	0

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	peraturan						
b.	Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta	Buah	0	0	0	0	0
	Persentase	%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.6.1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Semakin tinggi nilai indikator ini, artinya semakin baik tingkat kepemilikan dokumen kependudukan berupa KTP di masyarakat.

Tabel 2.256
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP	Orang	87.012	87.542	96.727	108.634	114.080
b.	Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah	Orang	134.525	144.477	148.783	138.174	145.476
c	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	Orang	0,65	0,61	0,65	0,79	0,78
d	Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk per 100	Orang	65	61	65	79	78

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 dari 100 penduduk Kota Palopo, sebanyak 65 orang telah penduduk wajib KTP. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya dimana tahun 2017, dari 100 penduduk wajib KTP, 78 orang diantaranya telah ber KTP.

2.3.2.6.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Semakin tinggi nilai indikator ini, artinya semakin banyak bayi yang memiliki akte lahir.

Tabel 2.257
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Bayi Berakte Kelahiran	Orang	2.815	2.778	2.750	2.609	1.397
b.	Jumlah bayi	Orang	3.367	3.223	3.199	2.977	2310
c	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Rasio	0.84	0.86	0.86	0.88	0.605

d	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per 100	Per 100	83.61	86.19	85.96	87.64	60.48

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2013 dari 100 balita yang lahir, sebanyak 84 bayi telah memiliki akte kelahiran. Namun sampai dengan tahun 2017, kondisi pelayanan akte kelahiran menurun. Pada tahun 2017 dari 100 bayi lahir, hanya 60 yang memiliki akte kelahiran. Menurunnya indikator rasio bayi berakte kelahiran di Kota Palopo sejak 2013-2017 akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran.

2.3.2.6.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Adalah perbandingan jumlah pasangan nikah dalam 1 tahun yang berakte terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah pada tahun yang sama. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak pasangan suami istri yang memiliki akte nikah.

Tabel 2.258

Rasio Pasangan Berakte Nikah Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasang	14.262	15.885	15.967	14.867	16.116
b.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasang	35.860	40.337	42.281	40.003	42.856
c.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Rasio	0,40	0,39	0,38	0,37	0,38
d	Rasio Pasangan Berakte Nikah per 100	Per 100	40	39	38	37	38

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2013 dari 100 penduduk yang menikah, hanya 40 pasangan yang memiliki akte nikah. Kondisi ini jauh lebih baik dari tahun 2017 dimana dari 100 pasangan nikah hanya 38 pasangan yang resmi memiliki akte nikah.

2.3.2.6.4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Tabel 2.259

Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Ada	Ada	Aada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.6.5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2.260
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.6.6. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Tabel 2.261
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	Lembar	87.023	88.684	98.514	109.003	114.080
b.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	134.525	114.477	148.783	138.174	138.174
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	64,69	77,47	66,21	78,89	82,56

Sumber Data : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan tahun 2017 sebanyak 82,56% penduduk Kota palopo yang wajib memiliki KTP sudah ber KTP, sehingga masih tersisa 17,44% penduduk wajib ber KTP namun belum memiliki KTP. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2013 dimana hanya 64,69 % penduduk wajib KTP yang memiliki KTP.

2.3.2.6.7. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tabel 2.262
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan (#)	Orang	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959
b.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan (@)	Orang	2.724	2.614	2.747	2.755	2.959
Persentase		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Kesehatan 2018 (@) dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Palopo Tahun 2018 (#)

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Palopo sudah mencapai 100% ini menunjukkan bahwa semua bayi yang lahir pada tahun tersebut, pada tahun itu juga langsung memiliki akte kelahiran.

2.3.2.7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

2.3.2.7.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Tabel 2.263

Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kantor pemerintahan kelurahan yang baik	Kantor	47	47	47	47	47
b.	Jumlah seluruh pemerintahan Kelurahan	Kelurahan	48	48	48	48	48
Persentase		Persen	97,92	97,92	97,92	97,92	97,92

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sampai pada tahun 2017 masih ada satu kantor kelurahan di wilayah Kota Palopo yang kondisinya kurang baik.

2.3.2.7.2. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 (satu) tahun dibagi dengan jumlah LPM. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik kinerja pembinaan organisasi oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.264

Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kelompok binaan LPM	Kelompok	48	48	48	48	48
b.	Jumlah LPM	Kelompok	48	48	48	48	48
Rata-rata		Kelompok	1	1	1	1	1

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tiap kelurahan di Kota Palopo rata-rata memiliki 1 lembaga pemberdayaan masyarakat. Jumlah LPM ini tidak mengalami penambahan selama 5 tahun.

2.3.2.7.3. Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tabel 2.265

Rata – Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	-	-	-	-	145
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58
Rata - rata							2,5

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, 1 PKK di Kota Palopo membina sebanyak 2-3 kelompok binaan. Kelompok binaan PKK ini antara lain adalah Dasawisma dan BKMT di tingkat kelurahan.

2.3.2.7.4. Persentase LSM Aktif

Adalah jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dihitung berdasarkan jumlah LSM aktif. Semakin tinggi nilai indikator ini, artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah semakin baik.

Tabel 2.266
Persentase LSM Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah LSM aktif	Buah	-	2	4	2	-
b.	Jumlah LSM	Buah	37	37	37	37	37
Persentase		%	0	5,40	10,81	5,40	-

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda dan Badan kesbang Linmas Kota Palopo Tahun 2018, Potensi Wilayah Kota Palopo 2018

Sesuai data dari Bagian Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo, sebagian besar LSM di Kota Palopo sampai dengan tahun 2017, tidak aktif. Jumlah LSM yang aktif tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Badan Kesbang Linmas Kota Palopo.

2.3.2.7.5. Persentase LPM Berprestasi

Tabel 2.267
Persentase LPM Berprestasi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah LPM berprestasi	Buah	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	2
b.	Jumlah LPM	Buah	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	48
Persentase		%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	4,17

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2018

Sesuai data dari Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo, pada tahun 2017 hanya 4,17% atau 2 LPM di Kota Palopo yang berprestasi. Jumlah relatif masih sedikit dibanding jumlah seluruh LPM yang ada di Kota Palopo.

2.3.2.7.6. Persentase PKK Aktif

Tabel 2.268
Persentase PKK Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah PKK aktif	Unit	58	58	58	58	58
b.	Jumlah PKK	Unit	58	58	58	58	58
Persentase		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2018

Sesuai data Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palopo, dari 58 PKK yang ada di Kota Palopo terdiri dari 9 PKK Kecamatan dan 48 PKK Kelurahan

2.3.2.7.7. Persentase Posyandu Aktif

Tabel 2.269
Persentase Posyandu Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah posyandu aktif	Buah	147	147	147	147	149
b.	Total posyandu	Buah	147	147	147	147	149
Persentase		%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda dan Dinas Kesehatan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, Posyandu di Kota Palopo 100% berfungsi aktif melakukan pembinaan kesehatan masyarakat. Selain itu, data di atas juga menunjukkan bahwa terjadi penambahan 2 unit Posyandu dari 147 unit di tahun 2016 menjadi 149 di tahun 2017.

2.3.2.7.8. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.270
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Buah	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b.	Total program pemberdayaan masyarakat	Buah	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
Persentase		%	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.7.9. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.271
Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	Buah	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
b.	Total pasca program pemberdayaan masyarakat	Buah	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
Persentase		%					

Sumber Data : Bag. Pemberdayaan Masyarakat & Kelurahan Setda Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.8.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu, angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Tabel 2.272
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,69	2,54	2,42	2,38	2,31

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

2.3.2.8.2. Total Fertility Rate (TFR)

Adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Atau secara singkat diuraikan sebagai rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 Tahun).

Dengan mengetahui TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Nilai TFR sebesar 2,35 menunjukkan bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya. Angka TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi)

Tabel 2.273
Total Fertility Rate (TFR)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Total Fertility Rate (TFR)					

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.3. Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek

Adalah indikator yang menunjukkan adanya dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada pemerintah daerah. Indikator ini menunjukkan adanya garnd desain pada level pemerintah daerah dalam mengendalikan laju peetumbuhan penduduk dan scenario penanganannya.

Tabel 2.274
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.4. Persentase Sektor yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)

Sesuai permendagri 86 tahun 2017, indikator ini adalah persentase Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang terpapar terhadap Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ada

Tabel 2.275
IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang terpapar	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
Jumlah organisasi perangkat daerah yang ada	41	41	40	40	49
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.5. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Sesuai permendagri 86 tahun 2017, indikator ini adalah persentase Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang aktif di kampung KB terhadap Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ada.

Tabel 2.276
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam
Pembangunan Daerah melalui Kampung KB
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	No Data	No Data	No Data	16	16

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah semua perangkat daerah	41	41	40	40	49
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	No Data	No Data	No Data	40,00%	32,65%

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Program Kampung KB baru terbentuk pada tahun 2016. Jumlah kampung KB yang berada di Kota Palopo pada tahun 2016 sebanyak 1 kampung KB, pada tahun 2017 sebanyak 10 kampung KB.

Perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB Kota Palopo sejak tahun 2016 dan 2017 adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perikanan, 9 Kantor Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

2.3.2.8.6. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Sesuai permendagri 86 tahun 2017, indikator ini adalah persentase Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk terhadap jumlah perangkat daerah yang ada.

Tabel 2.277

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	0	0	0	0	0
Jumlah semua perangkat daerah	41	41	40	40	49
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Sesuai data Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo, Pemerintah Kota Palopo belum memiliki Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk.

2.3.2.8.7. Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Sesuai permendagri 86 tahun 2017, jumlah kebijakan yang dimaksud dalam indikator ini adalah Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk.

Tabel 2.278

Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, belum ada satupun kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

2.3.2.8.8. Jumlah Sektor yang Menyepakati Dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan Dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Sesuai permendagri 86 tahun 2017, indikator ini adalah jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 2.279

Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan Parameter dan Proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan Parameter dan Proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Sesuai data Dinas Pengendalian Penduduk & KB, Kota Palopo belum memiliki data jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan Parameter dan Proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sebab belum memiliki Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

2.3.2.8.9. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Indikator ini untuk melihat tingkat partisipasi dan keterlibatan filantropi dan stakeholder lain di luar pemerintah yang terlibat dalam pendidikan kependudukan.

Tabel 2.280

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

informal yang melakukan pendidikan kependudukan					

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.10. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Indikator ini untuk melihat rata-rata jumlah anak per keluarga yang ada di Kota Palopo yang mengindikasikan berhasil tidaknya program pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Tabel 2.281

**Rata-rata jumlah anak per keluarga
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah anak (Orang)	65.302	64.722	65.233	66.155	62.376
Jumlah keluarga	34.500	34.680	34.734	34.660	34.786
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa program Keluarga Berencana di Kota Palopo berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk. Data menunjukkan sepanjang tahun 2013-2017, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palopo hanya 2 orang. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pengendalian penduduk terutama dalam ber KB berhasil.

2.3.2.8.11. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49

Tabel 2.282

**Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah peserta KB aktif	13.918	15.022	15.255	16.873	17.774
Jumlah pasangan usia subur	21.540	21.754	21.980	23.181	23.802
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	64,61	69,05	69,40	72,79	74,67

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan angka pemakaian alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memakai alat kontrasepsi. Pada tahun 2017, dari 100 PUS sekitar 75 PUS telah menggunakan alat kontrasepsi. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kondisi pada tahun – tahun sebelumnya.

2.3.2.8.12. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15 – 19 Tahun (ASFR 15 – 19)

Tabel 2.283

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)

Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018, BPS Kota Palopo

2.3.2.8.13. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Tabel 2.284
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	320	309	471	222	239
Jumlah pasangan usia subur	21.540	21.754	21.980	23.181	23.802
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	1.49	1.42	2.14	0.96	1.00
Per 1000 PUS	15	14	21	10	10

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2013 dari 1.000 Pasangan Usia Subur, terdapat 15 Pasangan Usia Subur yang memiliki istri berumur di bawah 20 tahun. Namun pada tahun 2017, hanya terdapat 10 pasangan PUS yang memiliki istri berumur dibawah 20 tahun. Ini menunjukkan semakin berkurangnya pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun sekaligus memberikan gambaran semakin membaiknya kesadaran masyarakat Kota Palopo untuk tidak menikah dalam usia dini.

2.3.2.8.14. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Tabel 2.285
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	6.702	6.680	6.654	5.468	5.350
Jumlah pasangan usia subur	21.540	21.754	21.980	23.181	23.802

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	31.11	30.71	30.27	23.59	22.48

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Dari tabel di atas bahwa pelayanan ber KB bagi PUS di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 semakin membaik. Tahun 2013 masih terdapat 31,11 % Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber KB, tapi tidak terpenuhi, artinya pada tahun ini hanya ada 68,89% PUS yang ingin ber KB dan sudah terpenuhi.

Sementara di tahun 2017, persentase PUS yang ingin berKB dan sudah terpenuhi telah berada pada angka 77,52%, karena hanya ada 22,48% PUS yang ingin ber KB dan belum terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin banyak PUS yang ingin ber KB dan telah mendapatkan pelayanan KB setiap tahunnya. Olehnya angka target indikator ini ke depannya harus lebih ditekan dari tahun 2017.

2.3.2.8.15. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Tabel 2.286
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	2.965	2.945	3.190	3.635	3.877
Jumlah akseptor KB	13.918	15.022	15.255	16.873	17.774
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21,30	19,60	20,91	21,54	21,81

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018,

Data diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kota Palopo semakin meningkat. Baik dalam skala jumlah, maupun dalam skala persentase. Jika pada tahun 2013 terdapat 2.965 akseptor KB menggunakan MKJP (21,30%), tahun 2017 akseptor KB menggunakan MKJP meningkat menjadi 3.877 atau 21,81%.

Data di atas juga memberikan informasi, bahwa dari 100 akseptor KB, pada tahun 2013, sebanyak 20 akseptor menggunakan MKJP, 80 akseptor lainnya menggunakan alat kontrasepsi lainnya. Dan pada tahun 2017, jumlahnya menjadi 22 akseptor pengguna MKJP. Olehnya angka target indikator ini ke depannya harus lebih tinggi dari tahun 2017.

2.3.2.8.16. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Penggunaan kontrasepsi yang paling lama adalah 72 bulan (6 tahun).

Tabel 2.287
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017

Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi	9.302	9.213	9.196	8.071	8.023
Jumlah akseptor KB	13.918	15.022	15.255	16.873	17.774
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	66,83	61,33	60,28	47,83	45,14

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 akseptor KB yang ada, ada 67 (pembulatan 66,83) pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsinya dan 33 pasangan masih menggunakan alat kontrasepsi.

Kemudian pada tahun 2017, ada 45 (pembulatan 45,14) pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsinya dan ada 55 pasangan masih yang menggunakan alat kontrasepsinya. Artinya sejak 2013-2017, jumlah PUS akseptor KB yang masih menggunakan alat kontrasepsi meningkat, dari 33 pasangan tahun 2013 menjadi 55 pasangan pada tahun 2017.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih diturunkan.

2.3.2.8.17. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur.

Tabel 2.288
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	840	887	1035	1045	3345
Jumlah anggota kelompok BKB	1273	1381	1535	1660	4451
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB (%)	65,99	64,23	67,43	62,95	75,15

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 anggota kelompok BKB, terdapat 66 (pembulatan 65,99) anggota kelompok BKB yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 44 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2017, ada 75 (pembulatan 75,15) anggota kelompok BKB, yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 25 belum ber KB.

Artinya sejak 2013-2017, semakin banyak anggota Bina Keluarga Balita yang mengikuti program KB. Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.3.2.8.18. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Tabel 2.289

**Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	161	151	169	536	2007
Jumlah anggota kelompok BKR	300	319	331	1011	3427
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	53,67	47,34	51,06	53,02	58,56

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), terdapat 54 (pembulatan 53,67) anggota kelompok BKR yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 46 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2017, ada 59 (pembulatan 58,56) anggota kelompok BKR, yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 41 belum ber KB. Artinya sejak 2013-2017, semakin banyak anggota Bina Keluarga Remaja yang mengikuti program KB dan semakin sedikit anggota BKR yang tidak ber KB.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.3.2.8.19. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Tabel 2.290
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	145	166	122	342	1458
Jumlah anggota kelompok BKL	373	383	355	809	3089
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	38,87	43,34	34,37	42,27	47,20

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), terdapat 39 (pembulatan 38,87) anggota kelompok BKL yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 61 belum ber KB. Kemudian pada tahun 2017, ada 47 (pembulatan 47,20) anggota kelompok BKL yang sudah ber KB, sisanya sebanyak 53 belum ber KB. Artinya sejak 2013-2017, semakin banyak anggota Bina Keluarga Lansia yang mengikuti program KB dan semakin sedikit anggota BKL yang tidak ber KB.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini terus membaik di Kota Palopo sejak lima tahun terakhir. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.3.2.8.20. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Tabel 2.291
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PPKS	No Data	No Data	1	1	1
Jumlah Kecamatan	9	9	9	9	9
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	0	0	0,11	0,11	0,11

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa Kota Palopo hanya memiliki satu Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera itu pun harus melayani 9 kecamatan yang ada.

2.3.2.8.21. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) adalah suatu wadah kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta perencanaan kehidupan berkeluarga. Keberadaan dan peranan PIK R/M dilingkungan remaja/mahasiswa sangat penting artinya dalam membantu remaja/mahasiswa untuk memperoleh informasi dan pelayanan konseling yang cukup dan benar tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa.

Tabel 2.292
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PIK R/M (Buah)	23	46	22	66	81
Jumlah Kecamatan (Buah)	9	9	9	9	9
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (a/b)	2,56	5,11	2,44	7,33	9

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, Kota Palopo memiliki 23 Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa. Artinya pada tahun ini, untuk setiap kecamatan di Kota Palopo terdapat 2-3 (angka 2,56) wadah PIK Remaja dan Mahasiswa yang terbentuk. Pada tahun 2017, kondisinya jauh semakin baik. Sebab satu kecamatan, rata-rata memiliki 9 PIK R/M. Meningkatnya jumlah pusat informasi dan konseling di Kota Palopo diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan kepada remaja dan mahasiswa di Kota Palopo.

2.3.2.8.22. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Tabel 2.293
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun

	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	50	49	49	68	68
Jumlah PKB/PLKB	50	49	49	68	68
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.23. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

Tabel 2.294

**Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	No Data	105	117	123	640
Jumlah anggota kelompok UPPKS	No Data	346	454	693	3102
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	No Data	30,35	25,77	17,75	20,63

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada tahun 2013, dari 100 anggota kelompok UPPKS, hanya ada 30 (pembulatan 30,35) anggota yang sudah ber KB Mandiri, sisanya sebanyak 70 anggota belum ber KB secara mandiri.

Kemudian pada tahun 2017, hanya ada 21 (pembulatan 20,63) anggota kelompok UPPKS yang sudah ber KB mandiri, sisanya sebanyak 79 anggota belum ber KB secara mandiri. Artinya sejak 2013-2017, kemandirian anggota kelompok UPPKS untuk ber KB menurun. Sebab dari 100 anggota UPPKS, jumlah anggota yang ber KB secara mandiri justru semakin menurun, dari 30 anggota pada tahun 2013 menjadi 21 anggota pada tahun 2017.

Ini menunjukkan bahwa kinerja indikator ini pada tahun 2017, lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2013. Sehingga ke depan, angka persentase yang akan menjadi target untuk indikator ini harus lebih ditingkatkan.

2.3.2.8.24. Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Tabel 2.295

**Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	48	48	48	48	48
Jumlah Kelurahan	48	48	48	48	48

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	48	48	48	48	48
Jumlah Kelurahan	48	48	48	48	48
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, satu kelurahan di Kota Palopo telah dilayani satu orang petugas pembantu pembina KB Desa. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan KB dan keberhasilan program KB di setiap kelurahan di Kota Palopo.

2.3.2.8.25. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota

Tabel 2.296

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	No Data	No Data	1.121	5.330	9.688
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan tingkat Kota	No Data	No Data	260	551	1.331
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	No Data	No Data	4,31	9,67	7,28

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.26. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes

Tabel 2.297

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persediaan alat dan obat Kontrasepsi	No Data	No Data	59.491	11.673	4.512
Rata Rata Pemakaian alat dan obat Kontrasepsi per bulan di Faskes	No Data	No Data	119,16	211,91	67,91
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	No Data	No Data	499.30	55.1	66.4

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.27. Persentase Faskes Dan Jejaringnya (diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja Sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Tabel 2.298

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	14	14	16	19	20
Jumlah Faskes dan jejaring	14	14	16	19	20
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, semua fasilitas kesehatan dan jejaringnya seluruhnya telah bekerjasama dengan BPJS. Ini menunjukkan bahwa akses untuk mendapatkan pelayanan KBKR di Kota Palopo semakin terbuka.

2.3.2.8.28. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

Tabel 2.299

Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.29. Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Tabel 2.300

Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual Kabupaten/Kota Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Jumlah remaja yang dibina	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.30. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Tabel 2.301

**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	9	48	48	145	427
Jumlah kelompok kegiatan	64	68	68	139	221
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	0,14	0,71	0,71	1,04	1,93

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.31. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Tabel 2.302

**Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	696	830	991	1.025	3.686
Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	7.440	7.174	4.158	5.220	6.715
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	9,35%	11,56%	23,83%	19,63%	54,89

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.8.32. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita (UKP)

Umur pertama menikah (UKP) yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. UKP sebesar 20 berarti rata-rata penduduk menikah saat berusia 20 tahun. UKP berhubungan terbalik dengan jumlah kelahiran, UKP yang semakin rendah mengindikasikan tingkat fertilitas yang tinggi.

Tabel 2.303
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
Rata-rata usia kawin pertama wanita	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018,

Sesuai Data BPS Kota Palopo, pada tahun 2015 masih ada 6.57% wanita yang menikah untuk pertama kalinya pada umur dibawah 16 tahun, ada 10.40% wanita yang menikah pertama kali pada umur 17-18 tahun, 26.64% wanita menikah pertama kali pada umur 19-20 tahun, 56.38% wanita yang menikah pertama kali pada umur 21 tahun keatas.

2.3.2.8.33. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.304
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	No Data	No Data	1.541.862.500	3.332.894.600	2.969.721.000
Jumlah APBD dan APBDes	No Data	No Data	4.098.597.000	5.112.260.200	3.542.370.000
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	No Data	No Data	37,62%	65,19%	83,83%

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

2.3.2.9.1. Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator ini menggambarkan kinerja operasional layanan angkutan umum yang ada di Kota Palopo. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum, Jumlah penumpang yang dimaksud merupakan jumlah penumpang yang terangkut oleh satu angkutan umum dalam satu hari (satuan dari jumlah penumpang adalah penumpang/angkutan/hari).

Indikator ini merupakan salah satu dari beberapa parameter evaluasi kinerja sektor perhubungan. Semakin banyak jumlah arus penumpang yang terangkut, semakin mudahnya aksesibilitas sebuah wilayah.

Indikator ini mengurai besaran jumlah arus penumpang angkutan umum untuk masing-masing moda transportasi bis, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun dibagi dengan total Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.

Tabel 2.305
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	1.582.803	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan kapal laut (Orang)	590	2.057	769	122	445
Jumlah total arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.583.393	1.611.095	1.689.617	1.680.146	1.345.436

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Data ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2013-2017, jumlah penumpang yang keluar masuk di Kota Palopo menurun. Jika tahun 2013, ada sebanyak 1,583 juta orang, tahun 2017 hanya ada 1,345 juta penumpang angkutan umum. Salah satu faktor yang patut diduga menjadi penyebab penurunan ini, adalah cukup banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi udara.

Data di atas juga menunjukkan per harinya, rata-rata jumlah penumpang yang keluar masuk di Kota Palopo menggunakan transportasi umum sebanyak 3.686 orang pada tahun 2017, sementara pada tahun 2013 sebanyak 4.338 orang .

2.3.2.9.2. Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dan barang dengan kendaraan angkutan umum (bis atau mobil penumpang) pada jaringan trayek. Satu trayek biasanya dilayani puluhan armada angkutan umum. Trayek sendiri adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang/barang dengan mobil yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Indikator ini memberikan gambaran cakupan pelayanan trayek angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan penduduk Kota Palopo. Apakah jumlah trayek yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Palopo sudah mampu melayani seluruh penduduk dalam mengakses wilayah di Kota Palopo menggunakan angkutan umum. Semakin

tinggi nilai rasio indikator ini, semakin banyak masyarakat yang terlayani angkutan umum dan semakin mudah mengakses wilayah di Kota Palopo dengan angkutan umum.

Tabel 2.306
Rasio Ijin Trayek
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Buah	3	3	3	3	3
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
c	Rasio	Per 100.000	2	2	2	2	2

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, dalam mengakses wilayah di Kota Palopo, hanya tersedia 2 trayek angkutan umum bagi 100.000 penduduk Kota Palopo. Jumlah ini relative stagnan sampai dengan tahun 2017. Dari perspektif layanan angkutan umum, masyarakat akan semakin kesulitan mengakses beberapa spot wilayah di Kota Palopo jika ingin menggunakan angkutan umum massal. Sebab jumlah penduduk akan cenderung terus bertambah. Meski demikian saat ini, Kota Palopo memiliki alternative transportasi umum lainnya misalnya taksi, dan layanan transportasi daring/internet sepeda motor.

2.3.2.9.3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Indikator ini menggambarkan partisipasi para pelaku usaha angkutan umum memenuhi standar kelayakan angkutan umum dari aspek keamanan dan kenyamanan serta kelaikan operasional kendaraan nya. Semakin tinggi angka indikator ini, maka semakin banyak angkutan umum yang laik dan aman untuk diakses oleh publik.

Tabel 2.307
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	1.223	1.307	1.354	1.301	1.152

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.9.4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Indikator ini menggambarkan jumlah sentra pelayanan transportasi dan perhubungan masyarakat atau publik yang ada di Kota Palopo. Semakin beragam jumlah sentra atau pusat pelayanan transportasi publik, maka semakin tinggi aksesibilitas sebuah wilayah dijangkau oleh masyarakat.

Tabel 2.308
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.9.5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yang menunjukkan seberapa besar kemampuan layanan angkutan transportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencakup kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo.

Tabel 2.309
Persentase Layanan Angkutan Darat
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah angkutan darat	Unit	1.383	1.467	1.524	1.441	1.322
b.	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1.582.803	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991
Persentase		%	0.087%	0.091%	0.090%	0.085%	0.099%
Per 10.000 Penumpang			8.7	9.1	9.02	8.5	9.9

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, untuk melayani 10.000 penumpang angkutan darat di Kota Palopo hanya tersedia 8-9 unit angkutan darat. Kondisi yang tak jauh berbeda juga terjadi pada tahun 2017, dimana untuk 10.000 penumpang angkutan darat hanya tersedia 8 unit angkutan darat.

Artinya pada tahun 2013, 1 unit angkutan darat dalam setahun kurang lebih melayani 1.111-1250 orang penumpang. Sementara di 2017, 1 angkutan darat hanya melayani kurang lebih 1.111 orang penumpang per tahunnya.

2.3.2.9.6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Indikator yang menggambarkan seberapa besar kedisiplinan para pelaku usaha angkutan umum memenuhi standar kelayakan angkutan umum dari aspek keamanan dan nyaman serta kelaikan operasional kendaraan nya. Semakin tinggi angka indikator ini, maka semakin banyak angkutan umum yang laik dan aman untuk diakses oleh publik.

Tabel 2.310
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	Unit	160	160	170	140	180
b.	Jumlah angkutan umum	Unit	1.383	1.468	1.524	1.441	1.332

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	pada tahun n						
	Persentase	%	11.56	10.89	11.15	9.71	13.51

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dari 100 angkutan umum yang beroperasi di Kota Palopo hanya 11-12 kendaraan yang tidak memiliki KIR, artinya ada sebanyak 88-89 kendaraan yang sudah memiliki KIR. Namun pada tahun 2017, kondisi ini mengalami penurunan. Sebab hanya ada 87-88 kendaraan yang memiliki KIR. Artinya kepemilikan KIR yang mengindikasikan kelayakan dan keamanan angkutan umum lebih rendah. Sehingga ke depan angka persentase yang menjadi target indikator ini harus diturunkan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk melakukan KIR, sementara Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sweeping di jalan raya.

2.3.2.9.7. Pemasangan Rambu – Rambu

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan yang tersedia melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas. Semakin panjang jalan yang menggunakan rambu, maka semakin besar tingkat pengamanan jalan raya yang tersedia.

Tabel 2.311
Persentase Pemasangan Rambu - Rambu
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pemasangan rambu – rambu pada tahun n	Buah	120	136	142	144	158
b.	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	Buah	151	165	205	220	250
	Persentase	%	79,47	82,42	65,27	65,45	63,20

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas hanya 79,47%, kondisi ini masih jauh lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang hanya berada pada angka 63,20%. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan di Kota Palopo semakin menurun.

2.3.2.10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika adalah media yang dapat digunakan untuk memudahkan setiap orang berkomunikasi, menambah pengetahuan serta sebagai sarana hiburan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan setiap orang berkomunikasi yakni tersedianya jaringan telepon, dsb.

2.3.2.10.1. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat adalah Lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhannya terletak di di perkotaan/pedesaan

beranggotakan 3 (tiga) sampai 30 (tiga puluh) orang dapat terdiri dari remaja, orang dewasa/tua, laki-laki atau perempuan, Pelajar atau mahasiswa, pedagang, petani atau nelayan dll. Semakin tinggi nilai indikator ini, artinya semakin besar partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan layanan informasi yang menunjukkan semakin terbukanya masyarakat terhadap perubahan.

Tabel 2.312
Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat Kecamatan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah KIM	Kelompok	0	0	0	0	30
b.	Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota Palopo	Kecamatan	9	9	9	9	9
Persentase		%	0	0	0	0	3,33

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa di Kota Palopo KIM baru terbentuk pada tahun 2017. Jumlahnya sebanyak 30 lembaga. Pada tahun sebelumnya tak ada satupun lembaga KIM yang terbentuk. Ini menunjukkan bahwa partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi di Kota Palopo oleh masyarakat mulai melembaga dan dianggap penting.

2.3.2.10.2. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator yang menggambarkan seberapa besar wilayah dan masyarakat di sebuah wilayah mampu mengakses informasi dan komunikasi. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin lancar arus informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat semakin terbuka dalam memanfaatkan informasi.

Tabel 2.313
Cakupan Layanan Telekomunikasi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas wilayah yang tercoverage	Km ²	185,64	198,02	205,44	212,87	212,87
b.	Luas wilayah keseluruhan	Km ²	252.99	252.99	252.99	252.99	252.99
Jumlah (a/b)			0,75	0,80	0,83	0,86	0,86

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan adanya peningkatan cakupan wilayah Kota Palopo yang mampu diakses jaringan atau layanan telekomunikasi dari 75% menjadi 86%. Peningkatan luas coverage ini menunjukkan semakin besar wilayah Kota Palopo termasuk penduduk Kota Palopo yang diakses oleh layanan telekomunikasi. Ini menunjukkan sebuah perkembangan yang cukup baik bagi keterbukaan informasi di sebuah daerah.

2.3.2.10.3. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Indikator yang menunjukkan penggunaan internet pada rumah tangga yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin besar penetrasi internet dalam rumah tangga. Semakin mudah arus komunikasi dan informasi yang mungkin dan bisa diakses oleh masyarakat.

Tabel 2.314
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah rumah tanggayang memiliki akses internet	KK	2.135	2.456	2.727	2.837	3.314
b.	Jumlah rumah tangga	KK	35.026	35.914	36.871	37.749	38.641
Jumlah (a/b)			0,06	0,07	0,07	0,08	0,09

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan tahun 2017, dari 100 rumah tangga di Kota Palopo, rata-rata sebanyak 9 Rumah tangga telah mengakses internet. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya pada angka 6 Rumah Tangga saja. Ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan internet pada rumah tangga di Kota Palopo terus mengalami peningkatan, dan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan berbagai sumber informasi.

2.3.2.10.4. Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Indikator ini menunjukkan besaran masyarakat atau rumah tangga yang menggunakan komputer pribadi. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin banyak masyarakat atau rumah tangga yang menggunakan komputer pribadi dalam aktifitasnya sehari-hari.

Tabel 2.315
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	KK	10.686	11.349	12.167	13.967	15.456
b.	Jumlah rumah tangga	KK	35.026	35.914	36.871	37.749	38.641
Jumlah (a/b)			0,31	0,32	0,33	0,37	0,40

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan jumlah pengguna komputer pribadi per rumah tangga di Kota Palopo terus meningkat. Dari 100 rumah tangga yang ada pada tahun 2017 sebanyak 40 rumah tangga menggunakan komputer pribadi. Jumlah ini lebih banyak dibandingat tahun 2013 yang hanya pada angka 31 dari 100 rumah tangga yang ada. Ini menunjukkan penggunaan komputer di masyarakat dan di Kota Palopo semakin memasyarakat.

2.3.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2013, jumlah seluruh koperasi di Kota Palopo sebanyak 270 unit dan setiap tahun terus meningkat hingga mencapai 287 unit pada tahun 2017. Namun dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif terus mengalami penurunan. Permasalahan dari menurunnya persentase koperasi aktif, yakni adanya koperasi yang tidak melaksanakan RAT.

Tabel 2.316
Presentase Koperasi Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	196	197	201	204	204
b.	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	270	273	283	286	287
	Jumlah Koperasi Aktif	%	72,59	72,16	71,02	71,32	71,08

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.11.2. Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

LKM memainkan peran yang cukup penting terutama dalam hal Peran Pengentasan Kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Keberadaannya mendorong usaha kecil atau usaha mikro yang bersifat produktif melalui penyediaan fasilitas pinjaman skala kecil. Peran Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Dalam upaya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus bisa mengurangi angka pengangguran dengan mendorong sektor usaha mikro. Usaha tersebut dapat berupa pemberian kredit dengan bunga kecil. Selain itu juga menumbuhkan kembangkan produksi mikro dalam jumlah yang lebih besar lagi, seperti pada pemberian kredit kepada usaha properti dan jenis usaha lainnya. Hal tersebut dikarenakan usaha kecil mikro sudah jelas terbukti memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi krisis yang tinggi.

Tabel 2.317
Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Unit	1.351	1.375	1.398	1.923	1.978
b.	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	4.395	4.623	4.935	6.373	6.620
	Persentase	%	30,74	29,74	28,33	30,17	29,88

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.11.3. Persentase BPR/LKM Aktif

Yang dimaksud LKM adalah Lembaga Keuangan Mikro, sementara BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKM umumnya diakses oleh masyarakat di tingkat pedesaan atau wilayah yang selama ini

sulit diojangkau atau menjangkau bank komersial. LKM bisanya berbentuk koperasi atau Perseroan terbatas.

Tabel 2.318
Persentase BPR/LKM Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah BPR/LKM aktif						
b.	Jumlah seluruh BPR/LKM						
	Persentase						

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. 300 juta rupiah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 50 juta - 500 juta, kriteria Omzet: 300 juta - 2,5 Miliar rupiah.

Tabel 2.319
Presentase Usaha Mikro dan Kecil
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	4.355	4.566	4.878	6.314	6.561
b.	Jumlah seluruh UKM	Unit	4.395	4.623	4.935	6.373	6.620
	Persentase	%	99,09	98,77	98,84	99,07	99,11

Sumber Data : Dinas Koperasi & UMKM Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sejak 2013, usaha mikro dan kecil mendominasi kondisi UMKM yang ada di Kota Palopo. Oleh karenanya program dan kegiatan UMKM akan lebih banyak dirasakan manfaatnya jika difokuskan pada Usaha Mikro dan Usaha kecil yang ada di Kota Palopo.

2.3.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2.3.2.12.1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Berikut adalah tabel jumlah investor berskala nasional di Kota Palopo 2013-2017. Jumlah investor merujuk pada jumlah proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Tabel 2.320
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	-	107	95	122	147

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.12.2. Jumlah dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Nilai investasi merujuk pada besaran rupiah dari proyek-proyek penanaman modal yang diinvestasikan baik PMDN maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

Berikut adalah tabel jumlah investor berskala nasional di Kota Palopo 2013-2017.

Tabel 2.321
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Buah)	-	107	95	122	147
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (Juta)	0	141.276,30	96.603,15	268.331,63	382.322,26

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2018

2.4.2.12.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek investasi PMDN dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja suatu daerah yang dapat terserap pada perusahaan tersebut. Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap jumlah seluruh PMDN dan PMA.

Tabel 2.322
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan (*)	Orang	19,560	20,490	21,735	28,337	28,377
b.	Jumlah seluruh PMDN (**)	Juta	164,222.85	141,276.30	96,603.15	268,331.63	382,322.26
c	Rasio per 100 Juta	Angka	11.91	14.50	22.50	10.56	7.42

*Sumber Data : (**) Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2018, (*) Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo*

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun nilai penanaman modal di Kota Palopo meningkat tajam sejak 2013 ke 2017 namun serapan tenaga kerja justru menurun. Jika pada tahun 2013 rasio daya serap tenaga kerja pada angka 11.91, pada tahun 2017 justru menurun menjadi 7.42.

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2013 untuk 100 juta nilai PMDN, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 11-12 orang. Sementara pada tahun 2017 untuk nilai PMDN yang sama yakni 100 juta hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7 orang. Ini menunjukkan semakin kompetitifnya kondisi ketenagakerjaan di Kota Palopo.

2.3.2.12.4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.323
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rupiah	54.763.412.380	(22.946.554.382)	(44.673.143.956)	1.772.842.282.177	113.990.629.638
b.	Realisasi PMDN sebelum evaluasi	Rupiah	109.459.438.170	164.222.850.550	141.276.296.168	96.603.152.212	268.331.634.389
	Persentase	%	50	(16)	(32)	178	42,48

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Palopo Tahun 2018 dan Data Potensi Kota Palopo Tahun 2014 & 2015

Berdasarkan tabel di atas, nilai realisasi PMDN mengalami fluktuasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni mencapai 178%.

2.3.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

2.3.2.13.1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan generasi yang berpotensi sebagai penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa. Pemuda masih

memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah yang baik, agar dapat melanjutkan dan mengisi pembangunan yang kini tengah berlangsung.

Tabel 2.324
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	OKP	148	148	148	151	151
b.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	OKP	218	218	218	218	218
	Persentase	%	67,9	67,9	67,9	69,3	69,3

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase organisasi Pemuda yang aktif mengalami kenaikan selama dua tahun terakhir.

2.3.2.13.2. Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda di Kota Palopo terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi lingkungan masyarakat.

Tabel 2.325
Persentase Wirausaha Muda
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah wirausaha muda	Kelompok	100	120	120	134	134
b.	Jumlah seluruh wirausaha	Kelompok	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	Persentase	%	1,30	1,56	1,56	1,75	1,75

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 1.000 kelompok wirausaha, terdapat 175 wirausaha muda.

2.3.2.13.3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Tabel 2.326
Persentase Pembinaan Olahraga
Kota Palopo Tahun 2013 - 2107

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabor	0	0	0	10	10
b.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	26	26	26	26	26
	Persentase	%	0	0	0	38,46	38,46

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.13.4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Tabel 2.327

**Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	27	27	27	27	27
b.	Jumlah seluruh pelatih	Orang	83	83	83	83	83
	Persentase	%	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.13.5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Tabel 2.328

**Persentase Pembinaan Atlet Muda
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	0	0	0	30	30
b.	Jumlah seluruh atlet pelajar	Orang	170	170	170	170	170
	Persentase	%	0	0	0	17,6	17,6

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.13.6. Jumlah Atlet Berprestasi

Tabel 2.329

**Persentase Atlet Berprestasi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	3	7	10	36	7

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.13.7. Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2.330

**Persentase Prestasi Olahraga
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	3	7	10	36	7

Sumber Data : Dinas Pemuda & Olah Raga Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.14. Bidang Urusan Statistik

2.3.2.14.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi

Tabel 2.331

**Ketersediaan Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.14.2. Buku “Palopo Dalam Angka”

Tabel 2.332
Ketersediaan Buku “Palopo Dalam Angka”
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Buku Palopo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.14.3. Buku “PDRB”

Tabel 2.333
Ketersediaan Buku “PDRB”
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Buku “PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada`	Ada

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.15. Bidang Urusan Persandian

2.3.2.15.1. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan informasi pada tingkat Pemerintah Kota dan Perangkat daerah Kota Palopo. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan bahwa pengamanan informasi dari aspek jaminan terhadap keotentikan, keutuhan, ketersediaan, dan nir penyangkalan informasi pada pemerintah Kota Palopo, lebih baik.

Tabel 2.334
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	OPD	-	22	22	30	35
b.	Jumlah total perangkat daerah	OPD	41	41	40	40	49
	Persentase	%	-	55	55	75	71,42

Sumber Data : Dinas Persandian & Statistik Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan

2.3.2.16.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel 2.335
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	6	10	12	15

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Tabel 2.336
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	118	21	21	148	148
b.	Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah	Buah	118	22	21	149	149
	Persentase	%	100	95,45	100	99,32	99,32

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.16.3. Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Tabel 2.337
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	3	1	1	0

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.16.4. Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Tabel 2.338
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	23	23	37	51	51

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan

2.3.2.17.1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.339
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	10.289	10.567	10.833	13.274	13.650
b.	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	134.662	138.172	141.282	144.650	147.955
	Persentase	%	7,64	7,65	7,67	9,18	9,23

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan pada tahun 2013, hanya 7,64% masyarakat yang wajib baca yang pernah memanfaatkan jasa layanan perpustakaan daerah Kota Palopo. Namun persentasenya terus meningkat sampai pada tahun 2017 persentasenya berada pada angka 9,23% atau tumbuh kurang lebih dua persen periode 2013-2017.

2.3.2.17.2. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Tabel 2.340
Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	424	394	624	308	1232
b.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buah	591	1087	1776	895	2632
	Persentase	%	71,74	36,25	35,14	34,41	46,81

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.17.3. Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Tabel 2.341
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah perpustakaan	Jiwa	205	205	205	205	208
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
c.	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Per 1000	1.27	1.24	1.21	1.19	1.18

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa sejak 2013-2017, rasio jumlah perpustakaan yang di Kota Palopo terhadap jumlah penduduk relative stagnan. Jika tahun 2013, untuk 1000 penduduk tersedia 1 unit perpustakaan, kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2017.

2.3.2.17.4. Jumlah Rata – Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Tabel 2.342
Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah rata- rata pengunjung perpustakaan per tahun	857	880	902	1106	1137

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.17.5. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Tabel 2.343
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	424	394	624	308	1232

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.17.6. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Tabel 2.344
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	3	3	3	3	3
b.	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	3	3	3	3	3
	Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Perpustakaan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.2.18. Bidang Urusan Kearsipan

2.3.2.18.1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Tabel 2.345
Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017

a.	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku	OPD	1	1	1	1	1
b.	Jumlah perangkat daerah	OPD	41	41	40	40	49
	Persentase	%	2,43	2,43	2,5	2,5	2,04

Sumber Data : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2018

Sampai dengan tahun 2017, hanya 1 perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku. Hal ini disebabkan oleh tenaga fungsional di perangkat daerah belum ada dan kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang berada di perangkat daerah.

2.3.2.18.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Tabel 2.346
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	4	6	7	6	7

Sumber Data : Dinas Kearsipan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Bidang Urusan Pariwisata

2.3.3.1.1. Kunjungan Wisata

Tabel 2.347
Persentase Kunjungan Wisata
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se – Kota Palopo	Orang	77.573	86.955	110.078	95.918	99.481
b.	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se – Kota Palopo	Orang	65.000	80.000	90.000	95.000	100.000
	Persentase	%	119,34	108,69	122,31	100,97	99,48

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2018

2.3.3.1.2. Lama Kunjungan Wisata

Tabel 2.348
Lama Kunjungan Wisata
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rata – rata kunjungan wisata dalam	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari

satu tahun					

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama kunjungan per orang wisatawan di Kota Palopo adalah selama dua hari. Jika dibandingkan terhadap data jumlah kunjungan wisata di Kota Palopo, pada tahun 2017 dimana terdapat 99.841 orang wisatawan di Kota Palopo. Artinya rata-rata dalam sehari selama tahun 2017, terdapat 274 orang yang menjadi wisatawan di Kota Palopo.

2.3.3.1.3. PAD Sektor Pariwisata

Tabel 2.349
Persentase PAD Sektor Pariwisata
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	PAD sektor pariwisata	Rupiah	2.227.412.940	3.162.646.826	3.832.058.249	4.622.441.398	5.879.898.891
b.	Total PAD	Rupiah	51.663.729.162,20	81.646.676.135,53	92.277.283.805,00	134.110.076.220,35	167.310.913.609,15
c	Persentase	%	4.31	3.87	4.15	3.45	3.51

Sumber Data : Dinas Pariwisata Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan kontribusi PAD sector Pariwisata Kota Palopo cenderung menurun. Jika pada tahun 2013 sebesar 4.31%, pada tahun 2017 hanya sebesar 3.51%. Tahun 2017, untuk 1 (satu) milyar PAD, hanya 35,1 Juta yang berasal dari kontribusi sector pariwisata, jumlah ini lebih rendah dibandingkan kinerja tahun 2013, dimana untuk 1 (satu) milyar PAD , 43.1 Juta merupakan kontribusi PAD sector Pariwisata. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di Kota Palopo mendesak untuk diakselerasi dalam mendorong PAD Kota Palopo di tahun berikutnya.

2.3.3.2. Bidang Urusan Pertanian

2.3.3.2.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Indikator ini untuk mengetahui jumlah produksi padi atau bahan pangan utama lainnya per ha lahan usaha yang dipanen. Semakin tinggi angka produktivitas menunjukkan semakin baiknya pengelolaan usaha produksi pertanian di Kota Palopo.

Tabel 2.350
Persentase Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)					
	Padi	28,367	18,895	28,630	30167	32,444
	Jagung	5,575	5,857	4,737	6,303	5086
	Ubi Kayu	224	281	177	70.4	70
	Ubi jalar	112.88	101	13	18.94	4.55
	Sagu	85.2	70.61	51.33	33.04	15.59

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
b.	Luas panen tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)					
	Padi	5,034	3,481	5,098	5,128	5172
	Jagung	1,100	1,161	713	928	753
	Ubi Kayu	10	14	8	7	1
	Ubi Jalar	9	8	1	1	0
	Sagu	244.31	154.81	110.5	112.83	289.75
c	Produktifitas (Ton/Ha)					
	Padi	5.64	5.43	5.62	5.88	6.27
	Jagung	5.07	5.04	6.64	6.79	6.75
	Ubi Kayu	22.40	20.07	22.13	10.06	70
	Ubi jalar	12.54	12.63	13.00	18.94	4.55
	Sagu	0.35	0.46	0.46	0.29	0.05

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa produktifitas tanaman padi dan jagung sebagai komoditas utama di Kota Palopo menunjukkan produktifitas yang meningkat. Pada tahun 2013, hanya dihasilkan 5,64 Ton padi per ha, tahun 2017, produktifitas padi menjadi 6.27 Ton/Ha, jagung 6.75 Ton/Ha, ubi kayu 70 Ton/Ha, Ubi Jalar 4.55 Ton/Ha dan Sagu sebanyak 0.05 Ton/Ha.

2.3.3.2.6. Cakupan Bina Kelompok Petani

Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok petani di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas petani lokal. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan masyarakat petani lokal.

Tabel 2.351
Persentase Pembinaan Kelompok Tani
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	Klpk	176	384	364	319	222
b.	Jumlah kelompok tani	Klpk	407	407	407	407	438
	Persentase	%	43,24	94,35	89,43	78,38	50,68

Sumber Data : Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan cakupan bina kelompok tani periode 2013-2017, terbesar pada tahun 2014. Namun setelah itu cenderung menurun dan mengalami titik terendah pada tahun 2017. Ini seiring dengan semakin banyak jumlah kelompok tani yang ada, sementara kemampuan anggaran pemerintah Kota Palopo yang makin terbatas.

2.3.3.3. Bidang Urusan Kehutanan

2.3.3.3.1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Tabel 2.352
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	140	3,547.14	-	-	-
b.	Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	13.135,79	9.885,79	8.931,77	8.931,77	-
	Persentase	%	1.07	35.88			

Sumber Data : Dinas Kebutuhan Kota Palopo, Data SIPD Kota Palopo

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, luas hutan dan lahan yang direhabilitasi sebanyak 140 Ha, atau sekitar 1.07% dari total luas wilayah hutan dan lahan kritis yang ada. Kemudian pada tahun 2014, luas lahan yang direhabilitasi sebanyak 3547,14 Ha atau sekitar 35.88% dari total luas hutan dan lahan kritis yang ada.

2.3.3.3.2. Kerusakan Kawasan Hutan

Tabel 2.353
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas kerusakan kawasan hutan	Ha					
b.	Luas kawasan hutan (*)	Ha	13.135,79	9.885,79	8.931,77	8.931,77	-
	Persentase	%					

Sumber Data : () Badan Pusat Statistik Kota Palopo*

2.3.3.3.3. Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Tabel 2.354
Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian
Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas kawasan hutan lindung	Ha	8.297,58	8.297,58	7.328,76	7.328,76	-
b.	Total luas kawasan hutan	Ha	13.135,79	9.885,79	8.931,77	8.931,77	-

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
c	Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung	%	63.17	83.93	82.05	82.05	-

Sumber Data : Palopo Dalam Angka, BPS Kota Palopo

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2016, 81,77% luas kawasan hutan yang ada di Kota Palopo merupakan hutan lindung. Persentasenya sejak 2013 meningkat disebabkan adanya pengurangan luas kawasan hutan berdasarkan fungsi yang lain. Kawasan hutan yang luasnya berkurang adalah hutan konversi dimana pada tahun 2013 terdapat 3250 Ha, namun sejak 2014, hutan sesuai fungsi ini, sudah tidak ada lagi di Kota Palopo.

Luas kawasan hutan lindung di Kota Palopo sesuai angka dalam tabel di atas menurun sepanjang tahun 2013-2016 berkurang sebanyak 968,76 Ha. Bahkan jika dibandingkan tahun 2012, luas kawasan lindung di Kota Palopo saat itu, sebanyak 9.228 Ha. Hutan suaka alam dan hutan wisata di Kota Palopo luasannya juga bertambah. Jika tahun 2013 seluas 988,21 Ha, sejak tahun 2014 sampai 2016 menjadi 968,82 Ha atau bertambah 0,61 Ha.

2.3.3.4. Bidang Urusan Energi dan Sumber daya Mineral

2.3.3.4.1. Persentase Pertambangan Tanpa Ijin

Adalah indikator yang menggambarkan cakupan wilayah penambangan liar yang ditertibkan. Semakin tinggi persentase indikator ini, semakin luas wilayah penambangan liar yang ditertibkan. Sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan pertambangan telah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sulsel.

Tabel 2.355
Persentase Pertambangan Tanpa Ijin
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Luas penambangan liar yang ditertibkan	-	-	-	-	-	-
b.	Luas area penambangan yang liar	-	-	-	-	-	-
	Persentase	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Pertambangan & ESDM Kota Palopo

2.3.3.5. Bidang Urusan Perdagangan

2.3.3.5.1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor adalah cara menjual barang atau jasa melalui perantara/eksportir yang bertempat di daerah lain atau daerah tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di daerah asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme.

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu daerah ke daerah lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari daerah lain ke dalam daerah.

Tabel 2.356
Nilai Ekspor Bersih
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Nilai ekspor	Juta	1.268.962	1.368.817	1.549.986	1.746.139	2.112.272
b.	Nilai impor	Juta	1.784.173	2.061.442	2.342.937	2.580.805	2.914.631
c	Nilai ekspor bersih (a-b)	Juta	(515.211)	(692.625)	(792.951)	(834.666)	(802.359)

Sumber Data : Palopo Dalam Angka

Tabel di atas menunjukkan bahwa ekspor kota Palopo lebih kecil dibandingkan dengan impor yang masuk ke Kota Palopo. Ini menunjukkan bahwa Kota Palopo menjadi market yang cukup potensial bagi sejumlah komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palopo. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan dan potensi bagi para pelaku usaha di Kota Palopo untuk memenuhi aneka kebutuhan masyarakat Kota Palopo yang selama ini masih diimpor dari luar Kota Palopo.

2.3.3.5.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok pedagang/usaha informal di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas usahanya. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan pedagang/usaha informal yang ada.

Pedagang besar adalah pedagang yang kegiatannya membeli barang dalam jumlah yang besar dan menjualnya kembali dengan jumlah yang besar. **Pedagang Menengah** adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada para pedagang kecil dalam jumlah sedang atau kecil. **Pedagang Kecil** adalah pedagang yang membeli barang dagangan dalam jumlah sedang dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Termasuk didalamnya pedagang mikro (BPS).

Tabel 2.357
Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n	Orang					
b.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Orang	No Data	No Data	6853	7845	7756

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Persentase						

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo (Palopo Dalam Angka)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pedagang sepanjang tahun 2015-2017 di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2015 sebanyak 6853 pada tahun 2017 sebanyak 7756 pedagang. Jumlah ini merupakan akumulasi pedagang besar kecil maupun menengah.

Sesuai klasifikasi usahanya, jumlah pedagang kecil juga meningkat. Jika pada tahun 2015 hanya terdapat 5930 pedagang kecil pada tahun 2017 menjadi sebanyak 6886 pedagang. Jumlah pedagang menengah berkurang dari 680 usaha pada tahun 2015 menjadi 538 pedagang pada tahun 2017.

2.3.3.6. Bidang Urusan Perindustrian

2.3.3.6.1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Pengrajin adalah pekerja terampil yang menghasilkan atau membuat barang-barang dengan tangan, baik barang-barang fungsional maupun barang-barang dekoratif, misalnya mebel, seni dekoratif, seni pahat, pakaian, perhiasan, perabot dan peralatan rumah tangga. Para perajin mempraktikkan suatu keterampilan, dan dengan pengalaman serta bakat yang dimilikinya dapat saja mencapai tataran ekspresi seorang seniman.

Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas usaha pengrajin lokal. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan pekerja terampil lokal.

Tabel 2.358
Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Kelompok	-	-	71	11	0
b.	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok	53	58	81	83	117
c	Persentase	%	-	-	87,65	13,25	0,00

Sumber Data : Dinas Perindustrian Kota Palopo Tahun 2018

Angka dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa cakupan binaan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo sepanjang tahun 2015-2017 menurun. Jika 2015 ada sebanyak 87,65% kelompok yang menerima bantuan, tahun 2016 hanya sebanyak 13,25% dan tahun 2017 tak ada bantuan bagi kelompok pengrajin di Kota Palopo. Bantuan bagi kelompok binaan pada tahun 2015 dan 2016 diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

2.3.3.7. Bidang Urusan Transmigrasi

2.3.3.7.1. Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya. Indikator ini untuk mengetahui tingkat partisipasi dan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk melaksanakan transmigrasi.

Suatu penyelenggaraan transmigrasi dapat dikatakan berhasil jika memenuhi syarat sebagai berikut: Jumlah penduduk yang ditransmigrasikan ke daerah lain, tiap tahun lebih banyak daripada pertambahan penduduk daerah yang ditinggalkan. Jika di daerah yang ditinggalkan itu tekanan penduduk sudah berangsur-angsur berkurang dan orang-orang yang ditransmigrasikan itu memperoleh tingkat hidup yang lebih baik. Jika antara pendatang baru (transmigran) dan penduduk yang didatangi dapat hidup berdampingan, dapat terjadi perpaduan kebudayaan, sehingga terhindar dan perasaan kesukuan di antara mereka.

Tabel 2.359
Persentase Transmigran Swakarsa
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah transmigran swakarsa	KK	0	0	0	0	0
b.	Jumlah transmigrasi	KK	0	0	0	0	0
	Persentase	%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa belum ada satupun komponen data transmigrasi yang tersedia di Kota Palopo sejak 2013-2017. Dinas Transmigrasi Kota Palopo saat ini masih sedang menyusun Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi.

2.3.3.8. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

2.3.3.8.1. Produksi Perikanan

Indikator ini untuk mengetahui capaian target produksi perikanan daerah apakah semakin baik ataukah menunjukkan kinerja yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palopo. Jika persentasenya semakin tinggi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan Kota Palopo semakin baik. Sehingga kecukupan pangan dari sektor perikanan lebih baik dan mudah diperoleh.

Tabel 2.360
Persentase Produksi Perikanan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah produksi ikan	Ton	11.423,20	10.821,50	13.767,20	14.861,76	16.951,90
b.	Target daerah	Ton	11.423,21	12.566,00	13.822,00	15.205,00	16.347,76
c.	Persentase	%	100,00%	86,12%	99,60%	97,74%	103,70%

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perikanan Tahun 2013-2017 mampu memenuhi target produksi perikanan daerah. Ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah tersebut sangat baik. Produksi perikanan Kota Palopo cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun dan tahun 2017 menempati angka produksi tertinggi sepanjang periode 2013-2017.

2.3.3.8.2. Konsumsi Ikan

Indikator ini untuk mengetahui jumlah konsumsi ikan oleh masyarakat Kota Palopo pada tahun tertentu. Jika persentasenya semakin tinggi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Kota Palopo terhadap hasil perikanan semakin baik. Dimana masyarakat cukup mampu mengakses dan mendapatkan hasil perikanan untuk dikonsumsi. Ini terkait dengan upaya pemerintah memperbaiki kualitas gizi masyarakat.

Tabel 2.361
Persentase Konsumsi Perikanan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah konsumsi ikan	Kg	29,53	35	57	49,83	53,54
b.	Target daerah	Kg	40,79	43,64	46,7	50	53,47
c	Persentase	%	72,40%	80,20%	122,06%	99,66%	100,13%

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.3.8.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Indikator ini untuk mengetahui kinerja intervensi pemerintah Kota Palopo dalam memberikan bantuan bagi kelompok nelayan di Kota Palopo dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas nelayan lokal. Semakin tinggi persentase indikator ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Palopo membina dan mengembangkan penghidupan masyarakat nelayan lokal.

Tabel 2.362
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n	Klpk	30	28	35	7	4
b.	Jumlah kelompok nelayan	Klpk	117	145	162	123	127
	Persentase	%	25,64%	19,31%	21,60%	5,69%	3,15%

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan bina kelompok nelayan oleh Pemerintah Kota Palopo dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan. Jika tahun 2013 pada angka 25,64%, pada tahun 2017 hanya pada angka 3,15. Yang

menarik sebab, kondisi ini berbanding terbalik dengan angka produksi perikanan yang justru jauh meningkat sejak 2013 sampai dengan 2017. Ini menggambarkan kemungkinan mulai menguatnya sikap kemandirian para pelaku usaha budidaya perikanan yang tidak terlalu berharap bantuan pemerintah, tetapi tetap mampu menunjukkan kinerja produksi yang menggembirakan.

2.3.3.8.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Indikator ini untuk mengetahui tingkat produksi kelompok nelayan lokal terhadap market dan produksi perikanan daerah. Di Kota Palopo produksi komoditas perikanan yang beredar di masyarakat dan pasar, sebagian juga berasal dari tangkapan kelompok nelayan yang ada di wilayah Luwu Utara, Luwu bahkan beberapa komoditi perikanan dibawa dari provinsi sulawesi tengah.

Semakin tinggi produksi kelompok nelayan Kota Palopo, menunjukkan semakin besarnya kontribusi nelayan lokal dan kemandirian pangan terutama sektor perikanan terhadap kebutuhan masyarakat Kota Palopo.

Tabel 2.363
Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	Ton	8.567,40	8.116,12	9.514,20	11.146,20	12.713,92
b.	Jumlah produksi ikan di daerah	Ton	11.423,20	10.821,50	13.767,20	14.861,76	16.951,90
Persentase			75,00%	75,00%	69,11%	75,00%	75,00%

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018

Tabel di atas menggambarkan bahwa kontribusi perikanan kelompok nelayan di Kota Palopo sejak 2013-2017 relatif stabil dan stagnan. Bergerak pada angka 69-75%. Sehingga tetap ada peluang masuknya komoditas perikanan lainnya dari luar Kota Palopo. Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan perikanan yang fokus pada peningkatan kontribusi perikanan kelompok nelayan terhadap produksi ikan daerah.

2.3.3.8.5. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman

Indikator ini untuk mengetahui besaran potensi perikanan tangkap yang berada dalam batasan biologis yang aman. Semakin tinggi angka persentasenya mengindikasikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian.

Tabel 2.364

**Persentase Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah tangkapan ikan	Ton	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
b.	80% dari tangkapan maksimum lestari	Ton	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
c	Persentase	Persen	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.3.8.6. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Indikator ini untuk mengetahui luas kawasan lindung perairan terhadap seluas seluruh wilayah perairan yang menjadi wilayah sebuah daerah. Semakin tinggi rasio luas kawasan lindung perairan sebuah daerah, semakin tingginya aspek kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan tersebut. Sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan wilayah kelautan menjadi kewenangan pemerintah provinsi sulawesi selatan.

Tabel 2.365

**Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Kawasan lindung perairan		No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
b.	Total luas perairan teritorial		No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
	Rasio Kawasan Lindung		No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

Sumber Data : Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.3.8.7. Nilai Tukar Nelayan

Adalah Perbandingan antara indeks harga yang diterima Nelayan dan Pembudidaya Ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan > 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami surplus. b. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan $= 100$: berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami impas/break even. c. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan < 100 : berarti Nelayan dan Pembudidaya Ikan mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada periode sebelumnya.

Tabel 2.366

**Nilai Tukar Nelayan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Indeks yang diterima	-	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

	nelayan						
b.	Indeks yang dibayar nelayan	-	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
	Nilai Tukar Nelayan	-	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

2.3.4. Fokus Penunjang Urusan

2.3.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

2.3.4.1.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD Kota Palopo diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek.

Tabel 2.367
Ketersediaan Dokumen RPJPD
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Palopo Tahun 2005 – 2025

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah lima tahunan secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RPJMD belaku selama lima tahunan. Daerah yang memiliki dokumen RPJMD yang telah pergunakan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas.

Tabel 2.368
Ketersediaan Dokumen RPJMD
Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 - 2018
	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kota Palopo Tahun 2013 - 2018

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah secara terencana dan memiliki azas legal. Dokumen RKPD belaku satu tahun. Daerah yang memiliki dokumen RKPD yang telah perwalkan, menunjukkan keseriusan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara terencana dan sistematis dan memiliki aspek legalitas.

Tabel 2.369

Ketersediaan Dokumen RKPD Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Ada/ Tidak	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Perwal No. 055/30 8/Bapp eda/V/ 2012	Perwal No. 15 Tahun 2013	Perwal No. 12 Tahun 2014	Perwal No. 22 Tahun 2015	Perwal No. 12 Tahun 2016

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.1.4. Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Adalah indikator yang mengindikasikan tersedianya tujuan dan sasaran serta strategis pembangunan kewilyahan sebuah daerah. Daerah yang memiliki dokumen RT RW yang telah diperdakan, dianggap telah memiliki komitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan peduli pada isu isu lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Tabel 2.370

Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo

Uraian	Ada/Tidak	PERDA/PERKADA
Ketersediaan Dokumen RTRW Kota Palopo	Ada	Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Palopo Tahun 2012 - 2032

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah pada perencanaan strategis (lima tahunan) dan perencanaan operasional (tahunan). Angka 100 persen menunjukkan tingkat kesesuaian dan keselarasan dokumen RPJMD dan RKPD sangat baik, yang mencerminkan adanya komitmen dan konsistensi pada apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu.

Tabel 2.371

Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	Buah	190	190	214	222	192
b.	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	197	222	237	235	243
Persentase		Persen	96,44	86,36	90,29	94,46	79,01

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah menganggarkan apa yang direncanakan dan merencanakan apa yang dianggarkan. Indikator ini juga menggambarkan kualitas perencanaan dan pengelolaan belanja daerah. Semakin tinggi kesesuaian RKPD dengan APBD semakin baik perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.372
Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah program APBD tahun berkenaan	Buah	182	189	188	182	182
b.	Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	Buah	220	190	214	222	192
Persentase		%	82,72	99,47	87,85	81,98	94,79

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.1.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah untuk menselaraskan rencana penggunaan tata ruang termasuk tujuan, sasaran dan program penataan ruang dengan rencana pembangunan strategis yang ada. Semakin besar tingkat kesesuaian perencanaan strategis dengan tujuan, sasaran dan program di RT RW semakin baik pengelolaan tata ruang di sebuah daerah.

Tabel 2.373
Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang		No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
b.	Dokumen RTRW		No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	Persentase		No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

Sumber Data : BAPPEDA Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.2. Bidang Urusan Keuangan

2.3.4.2.1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Adalah indikator yang mengindikasikan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi yang ada. Clean and clear adalah predikat pengelolaan keuangan daerah tertinggi, disusul Wajar Tanpa Pegecualian, Wajar dengan Pegecualian dan terendah dalam Disclaimer.

Tabel 2.374
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Hasil opini BPK	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.2.2. Persentase SILPA

Sedangkan SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

SILPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2008 adalah Rp571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp524 milyar, maka SILPA-nya adalah Rp47 milyar.

Tabel 2.375
Persentase SILPA
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Total SILPA	Rupiah	0	0	0	0	0
b.	Total APBD	Rupiah	600.476.581.050	694.859.878.696	887.299.799.698	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014
	Persentase	Persen	0	0	0	0	0

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018, audited

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase SILPA Kota Palopo sejak tahun 2013-2017 bernilai Nol persen. Dari tahun 2013 sampai dengan 2017 Pemerintah Kota Palopo menganggarkan SILPA bernilai Nol, sehingga persentase antara Total SILPA terhadap Total APBD bernilai nol persen.

Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam proses penganggaran, Pemerintah Kota Palopo memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga antara Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah seimbang atau nilainya sama besar.

2.3.4.2.3. Persentase SiLPA Terhadap APBD

SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Biasanya, nilai SiLPA lebih besar atau sama dengan Nol. Hal ini disebabkan karena Pemerintah memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk mengalami kebangkrutan. Nilai SiLPA dapat juga menunjukkan uang yang tersisa pada Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan Nilai Investasi Jangka Pendek pada saat akhir tahun anggaran.

Nilai SiLPA yang baik, tergeantung dari sumber atau penyebab terjadinya SiLPA tersebut. SiLPA yang baik bersumber dari pelampauan target pendapatan dan efisiensi atas belanja daerah, sedangkan SiLPA yang kurang baik bersumber dari kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana atau kegiatan yang telah terlaksana namun belum sempat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Untuk lebih jelasnya, perkembangan SiLPA Kota Palopo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.376
Persentase SiLPA Terhadap APBD
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Total SiLPA	Rupiah	10.998.289.543,47	54.682.175.540,49	111.126.421.250,18	59.142.126.892,80	22.836.223.879,74
b.	Total APBD	Rupiah	600.476.581.050	694.859.878.696	887.299.799.698	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014
	Persentase	%	1.83	7.87	12.52	5.15	2.25

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018

Nilai SiLPA dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp. 111.155.583.598,- atau sekitar 12,53% dari total APBD. Besarnya nilai SiLPA pada tahun 2015 disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai DAK Tambahan yang turun pada pertengahan tahun anggaran membuat kegiatan dari DAK Tambahan sebagian besar tidak terlaksana karena keterbatasan penyedia yang memenuhi spesifikasi dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Begitupun yang terjadi pada tahun 2014 dan 2016, sehingga nilai SiLPA tersebut kurang baik, karena sebagian besar disebabkan karena tidak terlaksananya kegiatan.

Nilai SiLPA terkecil pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.998.289.543,- atau sekitar 1,83% dari total APBD. Nilai SiLPA tersebut lebih baik dari SiLPA yang lainnya karena SiLPA tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya efisiensi belanja dan pelampauan target Pendapatan pada tahun 2013.

2.3.4.2.4. Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam melaksanakan program yang tertuang dalam APBD daerah. Semakin tinggi atau banyak program

APBD yang tidak dilaksanakan, menunjukan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang belum baik.

Tabel 2.377
Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah program dalam APBD yang tidak dilaksanakan		4	2	1	1	2
b.	Total program dalam APBD		332	355	349	346	359
	Persentase		1,2	0,6	0,3	0,3	0,6
a.	Jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan		17	16	13	10	15
b.	Total kegiatan dalam APBD		1298	1436	1429	1361	1414
	Persentase		1,31	1,1	3,7	0,7	1,06

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.2.5. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang pendidikan yang semakin mendekati angka 20% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor pendidikan.

Tabel 2.378
Persentase Belanja Pendidikan (20%)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah belanja bidang urusan pendidikan (Rupiah)	219.434.894.318	226.094.171.612	244.529.587.587	255.348.088.498	181.192.586.801
b.	Total APBD ((Rupiah)	600.476.581.050	694.859.878.696	887.299.799.698	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014
	Persentase	36.54	32.54	27.56	22.22	17.84

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang Pendidikan di Kota Palopo cenderung menurun. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 36,54%, tahun 2017 hanya pada angka 17,84%. Pada tahun 2013, jumlah siswa mulai tingkat SD-SMA/ sederajat yang dicakup Layanan Pendidikan Gratis di Kota Palopo mencapai 37.521 orang (SD sebanyak 17.468 orang, SMP sebanyak 9.958 orang, SMA sebanyak 10.095 orang). Dengan jumlah lembaga penerima SD sebanyak 77 sekolah, SMP

sebanyak 27 dan SMA sebanyak 33 sekolah. Tahun 2017, jumlah siswa yang dicakup layanan pendidikan gratis SD sebanyak 18.719 orang dan SMP sebanyak 10.137 orang sementara untuk SMA, sudah berpendah kewenangan.

2.3.4.2.6. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memenuhi spending moneter untuk membiayai urusan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Persentase belanja bidang kesehatan yang semakin mendekati angka 10% menunjukkan komitmen daerah dalam meningkatkan dan memenuhi perintah UU mewujudkan anggaran yang layak dalam pembangunan sektor kesehatan.

Tabel 2.379
Persentase Belanja Kesehatan (10%)
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah belanja bidang urusan kesehatan(Rupiah)	92.440.445.836	113.924.506.883	156.943.963.042	214.226.652.392	248.704.751.533
b.	Total APBD (Rupiah)	600.476.581.050	694.859.878.696	887.299.799.698	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014
	Persentase	15.39	16.40	17.69	18.64	24.48

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa belanja bidang kesehatan di Kota Palopo pada tahun 2017 telah melebihi angka melebihi 10%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palopo sangat komitmen terhadap pembangunan bidang kesehatan di Kota Palopo.

2.3.4.2.7. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah mewujudkan APBD yang lebih pro rakyat dan berorientasi pada pembangunan daerah dan masyarakat. Persentase belanja langsung yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa belanja lebih banyak diarahkan pada pembangunan daerah bukan pada pemenuhan kebutuhan aparaturnya pemerintah saja.

Tabel 2.380
Persentase Perbandingan Antara Belanja Langsung
Dengan Belanja Tidak Langsung
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah belanja langsung (Rupiah)	278.100.474.282	324.803.534.545	486.737.135.447	719.186.393.030	651.615.212.524
b.	Total APBD	600.476.581.050	694.859.878.696	887.299.799.698	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014
	Persentase	46.31	46.74	54.86	62.59	64.15
a.	Jumlah belanja tidak	322.376.106.768	370.056.344.151	400.562.664.251	429.944.381.674	364.178.985.490

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	langsung (Rupiah)					
b.	Total APBD (Rupiah)	600.476.581.050	694.859.878.696	887.299.799.698	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014
	Persentase	53.69	53.26	45.14	37.41	35.85

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan belanja langsung Pemerintah Kota Palopo sepanjang 2013-2017 cenderung meningkat. Jika pada 2013 hanya pada angka 46,31%, tahun 2017 menjadi 64,15%. Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Palopo setiap tahunnya mampu mengalokasikan anggaran yang lebih banyak untuk belanja program dan kegiatan perangkat daerah.

2.3.4.2.8. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Tabel 2.381
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah belanja bagi hasil Kab/Kota/ Desa	Rupiah	19.076.226.647	18012.902.803	13.387.377.484	23.386.791.194	18.220.349.272
b.	Total APBD	Rupiah	600.476.581.050	694.859.878.696	887.299.799.698	1.149.130.774.704	1.015.794.194.014
	Persentase		3,18	2,59	1,51	2,04	1,79

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018

Data dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa persentase dana bagi hasil yang diterima pemerintah Kota Palopo sepanjang 2013-2017 menurun. Jika tahun 2013 sebesar 3,18% tahun 2017 hanya pada angka 1,79%. Rata-rata persentase dana bagi hasil yang diterima sebesar 2,22% dalam kurun waktu lima tahun.

2.3.4.2.9. Penetapan APBD

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam memenuhi regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Jika penetapan APBD tepat waktu, menunjukkan bahwa daerah sangat berkomitmen memenuhi standar pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Tabel 2.382
Ketepatan Waktu Penetapan APBD
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber Data : BPKAD Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

2.3.4.3.1. Rata – Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur.

Tabel 2.383

**Rata- Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Hari/Jam Pelajaran	39 Hari/384 JP	97 Hari/867 JP	97 Hari/867 JP	103 Hari/893 JP	103 Hari/893 JP

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.3.2. Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat formal. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen daerah meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama aparatur sipili negara di daerah.

Tabel 2.384

**Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	71	108	31	34	42
2.	Jumlah total ASN	Orang	5268	5233	5660	4794	4672
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,3	2,1	0,5	0,7	0,9

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Palopo dalam upaya meningkatkan kapasitas aparturnya melalui pendidikan dan pelatihan sejak 2013-2017 cenderung menurun. Jika pada tahun 2013 ada sebanyak 1,3% aparatur yang didiklat, pada tahun 2017 hanya ada sekitar 0,9%.

2.3.4.3.3. Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat kepemimpinan. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen daerah memenuhi salah satu syarat administrasi jabatan struktural di daerah.

Tabel 2.385

Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	Orang	231	245	291	281	286
2.	Jumlah total jabatan	Orang	969	944	961	927	977
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	23,8	26,0	30,3	30,3	29,3

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan sampai tahun 2017, masih ada 70,77% pejabat struktural Kota Palopo yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Olehnya Pemerintah Kota Palopo perlu mengakselerasi program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural dengan lembaga penyelenggara.

2.3.4.3.4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang menunjukan jumlah jabatan pimpinan tinggi yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan roda pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sekaligus mengukur komitmen daerah dalam menegakan perda tentang susunan organisasi dan perangkat daerah Kota Palopo yang berlaku pada masanya.

Tabel 2.386

**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah		35	32	36	34	33

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.3.5. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang menunjukan jumlah jabatan yang melaksanakan tugas administrasi pemerintahan pada pemerintahan Kota Palopo.

Tabel 2.387

**Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah		947	919	938	900	949

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah jabatan administrasi pada pemerintah Kota Palopo sejak 2013-2017 bertambah sebanyak 2 jabatan dari 947 jabatan pada tahun 2013 menjadi 949 jabatan administrasi pada tahun 2017. Persentase jumlah jabatan administrasi pada Pemerintah Kota Palopo terhadap total jumlah aparatur Pemerintah Kota Palopo pada tahun 2017 pada angka 20,31%, lebih tinggi dibandingkan 2013 yang berada pada angka 17,83%. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan administrasi di Kota Palopo juga sudah jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sejak 2013-2017.

2.3.4.3.6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Adalah indikator yang mengindikasikan peningkatan sumber daya manusia aparatur daerah melalui peningkatan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen daerah terhadap pengembangan sumber daya manusia terutama pejabat fungsional tertentu di daerah.

Tabel 2.388
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah		3.012	2.951	3.021	2.261	2.217

Sumber Data : Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada lingkup Pemerintah Kota Palopo sejak 2013-2017 terus berkurang. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh perpindahan kewenangan tenaga fungsional guru terutama pada tingkat pendidikan menengah pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Pendidikan Menengah dikelola oleh Pemerintah provinsi. Sehingga tenaga guru pada pendidikan menengah juga beralih ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jika dibandingkan terhadap seluruh pegawai Kota Palopo, proporsi tenaga fungsional tertentu Kota Palopo juga terus menurun. Pada tahun 2017, Kota Palopo hanya memiliki 47,45% pemangku jabatan fungsional tertentu. Sementara di 2013 yang berada pada angka 56,71%, 2014 56,67%, 2015 53,57%, dan 2016 sebanyak 47,16%.

2.3.4.4. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

2.3.4.4.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam mewujudkan rencana penelitian dan pengembangan yang ada dalam perencanaan lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan daerah. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen daerah terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah.

Tabel 2.389
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Prog	13	20	20	11	11
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Prog	13	22	22	11	11
Persentase		%	100	90,9	90,9	100	100

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ke dalam perencanaan tahunan perangkat daerah. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin tingginya komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah.

Tabel 2.390
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti		13	16	15	17	4
2.	Jumlah kelitbangan dalam Renja perangkat daerah		13	20	20	20	11
Persentase		%	100	80	75	85	36,36

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.4.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Adalah indikator yang mengindikasikan komitmen daerah dalam menerapkan inovasi secara terus menerus dalam rangka peningkatan kinerja. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin besarnya komitmen perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.391
Persentase Perangkat Daerah yang
Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi		0	0	0	0	0
2.	Jumlah total perangkat daerah		41	41	40	40	49
Persentase		%	0	0	0	0	0

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.4.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Adalah indikator yang mengindikasikan jumlah kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja dan pelayanannya. Semakin tinggi nilai indikator ini, menunjukkan semakin baiknya komitmen ASN untuk memperbaiki kualitas kerjanya melalui inovasi secara berkelanjutan.

Tabel 2.392

Persentase Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	No Data		6	8	6	12
2.	Jumlah inovasi yang diusulkan	No Data		23	23	23	23
	Persentase	%	No Data	26,08	34,78	26,08	52,10

Sumber Data : Badan Penelitian & Pengembangan Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.5. Bidang Urusan Pengawasan

2.3.4.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Adalah indikator yang mengindikasikan tingkat kepatuhan untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan jumlah temuan oleh Inspektorat atau lembaga lain yang berkompeten. Semakin tinggi persentase tindak lanjut temuan, menunjukkan semakin baiknya komitmen ASN untuk memperbaiki mental dan etos kerjanya.

Tabel 2.393

Persentase Tindak Lanjut Temuan Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Kasus	548	374	326	166	260
2.	Jumlah total temuan	Kasus	568	421	461	399	456
3	Persentase	%	96,48	88,4	70,72	41,60	57,02

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti temuan di lingkup Pemerintah Kota Palopo justru semakin menurun. Jika pada tahun 2013, persentase temuan yang ditindaklanjuti pada angka 96,48%, pada tahun 2017, temuan yang ditindaklanjuti hanya 57,02%. Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo ke depannya.

2.3.4.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Adalah indikator yang mengindikasikan tingkat kepatuhan aparatur sipil negara terhadap aturan kepegawaian dan kedisiplinan yang berlaku. Semakin banyak jumlah ASN yang dikenai sanksi menunjukkan komitmen penegakan disiplin oleh ASN masih sangat rendah.

Tabel 2.394

Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah ASN yang dikenai sanksi	Orang	14	21	5	3	2
2.	Jumlah total ASN	Orang	5.311	5.207	5.639	4.794	4.672
3	Persentase	%	0,26	0,40	0,09	0,06	0,04

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan dilihat dari jumlah kasus dan persentase, tingkat pelanggaran pegawai di Kota Palopo sepanjang tahun 2013-2017 menurun. Jika pada tahun 2013 sebanyak 14 orang pegawai (0,26%) dikenai sanksi, pada tahun 2017, hanya 2 orang yang dikenai sanksi atau sebesar 0,04% dari total jumlah pegawai Kota Palopo. Ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pegawai Kota Palopo dari tahun ke tahun semakin membaik.

2.3.4.5.3. Jumlah Temuan BPK

Adalah indikator yang mengindikasikan tingkat kepatuhan dan kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Semakin rendah jumlah temuan, semakin baik pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.395

Jumlah Temuan BPK Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Temuan BPK	22	18	15	9	19

Sumber Data : Inspektorat Daerah Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa dibandingkan tahun 2013, jumlah temuan kasus di Kota Palopo oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menurun pada tahun 2017. Kondisi ini mencerminkan bahwa salah satu fungsi Inspektorat Kota Palopo yakni melaksanakan supervisi, berjalan semakin baik sehingga perangkat daerah lebih baik dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan asetnya.

2.3.4.6. Bidang Urusan Sekretariat Dewan

2.3.4.6.1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat – Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui komitmen setiap alat kelengkapan dewan dalam mewujudkan lembaga legislatif yang akuntabel dimana setiap alat kelengkapan dewan memiliki dokumen perencanaan tahunan dan selanjutnya menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas kinerja setwan.

Tabel 2.396

Tersedianya RKT Pada Alat – Alat Kelengkapan DPRD Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.6.2. Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui bahwa pelaksanaan tugas DPRD telah menjadi bagian perencanaan strategis selama lima tahunan maupun perencanaan tahunan dan selanjutnya menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas kinerja setwan.

Tabel 2.397

Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD dengan RPJMD dan RKPD Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja dprd untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahun (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (3)

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2018

2.3.4.6.3. Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui konsistensi atau kesesuaian perencanaan dan penganggaran pada sekretariat dewan bahwa apa yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dan menjadi salah satu bagian dari akuntabilitas kinerja setwan.

Tabel 2.398

Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Terintegrasinya Program – Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)	Ada (2)

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Anggaran Setwan DPRD						

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kota Palopo Tahun 2018

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah.

2.4.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi **per kapita** adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya **anggota rumah tangga**. Sementara pengeluaran konsumsi **rumah tangga** per kapita adalah total biaya pengeluaran rumah tangga dibagi dengan **banyaknya rumah tanggayang** ada.

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumahtangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2.399
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Total Pengeluaran Rumah Tangga*	Juta	2.369.616.17	2.749.502.74	3.100.005.42	3.388.893.32	3.721.826.97
b	Jumlah Rumah Tangga (*)	RT	35,025	35,914	36,871	37,749	38,641
c	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta	67.655	76.558	84.077	89.774	96.318

Sumber Data : BPS Kota Palopo

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah konsumsi rumah tangga di Kota Palopo sejak 2013-2017 meningkat. Jika pada tahun 2013 hanya berada pada angka 67, 65 juta per tahun per rumah tangga, tahun 2017 meningkat menjadi 93,31

juta per tahun per rumah tangga. Artinya sepanjang tahun 2013-2017, peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi meningkat sebanyak 7,17 juta atau setara 8,43%.

2.4.3. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga.

Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Tabel 2.400
Nilai Tukar Petani
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Indeks yang dibayar Petani		-	-	-	-	-
b	Indeks yang Diterima Petani		-	-	-	-	-
c	Nilai tukar petani		-	-	-	-	-

Sumber Data : BPS Kota Palopo Tahun 2018

2.4.4. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya (pangan dan non pangan) dalam periode waktu tertentu. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Semakin besar belanja dan konsumsi non pangan, semakin besar tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.401
Persentase Pengeluaran Konsumsi RT Non Pangan Per Kapita
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Pengeluaran Makanan	Juta	-	409.560	447.306	428.059	529.701
b.	Pengeluaran Non Makanan	Juta	-	490.365	547.171	448.869	570.813
c	Total Pengeluaran Konsumsi	Juta	-	899.925	994.477	876.928	1.100.514
d	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	%	-	54,49	55,02	51,19%	51,87%

Sumber Data : BPS Palopo, Buku Indikator Kesejahteraan Masyarakat dan Palopo Dalam Angka

Data diatas menunjukkan bahwa konsumsi non pangan per kapita masyarakat Kota Palopo sepanjang tahun 2014-2017 selalu berada di atas angka konsumsi pangannya. Bahkan dalam kurun waktu tersebut, nilai konsumsi non pangan masyarakat juga meningkat meski relatif kecil yakni sebesar Rp. 80.448.

Artinya sebagian besar pendapatan masyarakat di Kota Palopo sepanjang kurun waktu tersebut di atas dipakai lebih banyak untuk belanja non pangan. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palopo sudah relatif cukup baik.

2.4.5. Produktivitas Total Daerah

Produktifitas total daerah diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor lapangan usaha dengan jumlah angkatan kerja yang ada dalam kurun waktu tertentu. Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor.

Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan.

Tabel 2.402
Produktivitas Total Daerah
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah Nilai Tambah Sektor (= Jumlah PDRB (Hb/Juta)	Juta	4,181,225.67	4,748,586.46	5,351,284.90	5,906,480.42	6,550,688.67
b	Jumlah Angkatan Kerja	Orang	65,906	67,996	65,346	67,504	75,563
c	Produktifitas Total Daerah	Juta/Tahun	63.44	69.84	81.89	87.50	86.69

Sumber Data : Diolah dari Buku PDRB Kota Palopo 2017, diolah

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, seorang tenaga kerja yang bekerja hanya menghasilkan nilai tambah produk sebesar 63,44 juta/tahun atau setara dengan 5,28 juta/bulan, namun pada tahun 2017, nilainya menjadi 86,69 juta/tahun/tenaga kerja atau setara dengan 7,22 juta/bulan/tenaga kerja.

Ini menunjukkan adanya peningkatan produktifitas tenaga kerja untuk menghasilkan nilai tambah produk yang ada di Kota Palopo. Produktifitas tenaga kerja tertinggi di Kota Palopo terjadi pada tahun 2016, dimana dihasilkan nilai tambah produk senilai 87.50 juta/tahun/tenaga kerja. Peningkatan kompetensi dan skil tenaga kerja diperlukan untuk meningkatkan produktifitas daerah.

2.4.6. Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Adalah perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Indikator ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDB) dengan produk yang berasal dari impor. Apabila rasionya kecil berarti

ketergantungan semakin tinggi, sebaliknya apabila rasionya besar berarti ketergantungan terhadap produk impor tidak terlalu tinggi.

Tabel 2.403
Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDRB
Kota Palopo Tahun 2013 –2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Jumlah Ekspor (Juta)	1.268.962	1.368.817	1.549.986	1.746.139	2.112.272
2	Jumlah Impor (Juta)	1.784.173	2.061.442	2.342.937	2.580.805	2.914.631
3	Jumlah Ekspor + Impor (Juta)	3.053.136	3.430.259	3.892.923	4.326.944	5.026.904
4	Jumlah PDRB (Juta)	4.181.225,67	4.748.586,46	5.351.284,90	5.908.480,42	6.550.688,67
5	Rasio Ekspor + Impor (%)	73,02%	72,24%	72,75%	73,26%	76,74%

Sumber Data : Buku PDRB Kota Palopo 2018, () Sementara, (**) Sangat Sementara*

Data diatas menunjukkan bahwa nilai ekspor Kota Palopo meningkat sebesar 843.31 (Juta) sejak 2013 sampai dengan tahun 2017, atau rata-rata 210.82 (Juta) setiap tahunnya. Sementara jumlah impor meningkat sebesar 1.130 (Juta) atau setara 282.61 9 (juta) setiap tahunnya.

Angka dalam tabel juga menunjukkan bahwa setiap tahun ekonomi di Kota Palopo semakin terbuka yang ditandai dengan semakin meningkatnya nilai rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kota Palopo. Meski pun hanya meningkat kurang lebih 3.72%. Tahun 2013 berada pada angka 73.02% dan tahun 2017 menjadi 76.74%.

2.4.7. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

Tabel 2.404
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pinjaman di bank umum	Juta	14.113.075	26.236.425	24.882.444	26.934.511	-
b.	Dana pihak ketiga di bank umum	Juta	14.851.967	16.220.629	22.276.855	20.014.741	-
c	Rasio	Juta	0.95	1.62	1.12	1.35	-

Sumber Data : Buku Indikator Ekonomi Kota Palopo 2017

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah pinjaman umum di bank (dari bank swasta maupun BUMN) di Kota Palopo meningkat sejak tahun 2013 sampai dengan 2016. Jika pada tahun 2013 berada pada angka 14,11 Trilyun Rupiah, tahun 2017

meningkat menjadi 26,93 Trilyun Rupiah atau meningkat sebanyak 12, 82 Trilyun. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan jumlah uang yang akan beredar di Kota Palopo sejak empat tahun terakhir.

2.4.8. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR

Adalah indikator yang menunjukkan perbandingan jumlah pinjaman di BPR terhadap dana pihak ketiga di BPR.

Tabel 2.405
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah pinjaman di BPR		-	-	-	-	-
b.	Dana pihak ketiga di BPR		-	-	-	-	-
c	Rasio		-	-	-	-	-

Sumber Data :

2.4.9. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.9.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Indikator ini menggambarkan tingkat kepadatan jalan oleh kendaraan per km jalan. Semakin tinggi angka indikator ini, semakin padat kondisi jalan raya yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2.406
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Panjang jalan	Km	359.32	395.860	502	502	503.16
b.	Jumlah kendaraan	Unit	22.743	24.643	25.743	26.846	27.998
Rasio		Angka	0.016	0.016	0.020	0.019	0.018
Rasio		Per 1000	16	16	20	19	18

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013, tingkat kepadatan jalan per Km terdapat 16 kendaraan, sementara di 2017, terdapat 18 kendaraan. Artinya kondisi jalan di Kota Palopo pada tahun 2017, lebih padat dibandingkan tahun 2013.

2.4.9.2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Indikator ini menggambarkan kinerja operasional layanan angkutan umum yang ada di Kota Palopo. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum, Jumlah penumpang yang dimaksud merupakan jumlah penumpang yang terangkut oleh satu angkutan umum dalam satu hari (satuan dari jumlah penumpang adalah penumpang/angkutan/hari). Indikator ini merupakan salah satu dari beberapa parameter evaluasi kinerja sektor perhubungan. Semakin banyak jumlah arus penumpang atau barang yang terangkut, menunjukkan semakin mudahnya aksesibilitas sebuah wilayah baik oleh penumpang maupun lalu lintas barang.

Tabel 2.407
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	1.582.803	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (m ³)	585.191	575.995	601.337	605.649	600.911

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

2.4.9.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Indikator ini menggambarkan besaran pemanfaatan sentra pelayanan transportasi dan perhubungan masyarakat atau publik yang ada di Kota Palopo. Semakin tinggi angka indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya orang dan lalu lintas barang yang keluar dan masuk ke Kota Palopo dalam satu tahun. Ini menunjukkan semakin terbukanya sebuah daerah dan meningkatnya aksesibilitas wilayah terhadap daerah lain.

Tabel 2.408
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah barang melalui dermaga per tahun (m ³)	585.191	575.995	601.337	605.649	600.911
Jumlah orang melalui dermaga per tahun (orang)	590	2.057	769	122	445
Jumlah barang melalui terminal per tahun (kg)	3.168	3.218	3.733	3.360	2.689
Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)	1.582.803	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

2.4.9.4. Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Makin tinggi nilai indikator ini menunjukkan makin taatnya pembangunan terhadap rencana RT RW yang ada.

Tabel 2.409
Ketaatan Terhadap RTRW
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Realisasi RTRW	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
b.	Rencana peruntukan	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
c	Persentase	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kota Palopo Tahun 2018

2.4.9.5. Jenis dan Jumlah Bank

Aktifitas Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara pada umumnya dan Palopo pada khususnya. Aktifitas sektor keuangan, atau yang lebih umum dikenal sebagai jasa keuangan, meliputi beberapa sub sektor diantaranya Perbankan, Asuransi dan Dana Pensiun, Jasa Keuangan Lainnya serta Jasa Penunjang Keuangan. Untuk Palopo, peningkatan kinerja sektor keuangan lebih dipengaruhi oleh kinerja positif perbankan. Sektor perbankan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor riil melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi tabungan dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui kredit. Mereka menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi

Tabel 2.410
Data Jumlah dan Jenis Bank di Kota Palopo

Jenis Bank	2014	2015	2016
Bank umum (Konvensional & Syariah)	12	12	20

Sumber: Potensi Ekonomi Kota Palopo (BPS, 2017)

2.4.9.6. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi

Di lihat dari unit usaha dan tenaga kerja, data BPS menunjukkan bahwa terdapat 0,98 persen total usaha yang bergerak di sektor Keuangan dan mampu menyerap 10,59 persen total tenaga kerja usaha. Fenomena inilah yang menjadikan sektor keuangan termasuk sektor unggulan. Jika dibanding kabupaten sekitar, walaupun jumlah usaha/perusahaan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi bukan yang tertinggi, tetapi dalam penyerapan tenaga kerjanya memiliki nilai yang tertinggi dibanding daerah sekitar.

Tabel 2.411
Jumlah Usaha/Perusahaan dan Tenaga Kerja Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi di Kota Palopo dan Kabupaten Sekitar, 2016

Wilayah	Jumlah Usaha/ Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
Kab. Luwu	198	1127
Kab. Tana Toraja	102	751
Kab. Luwu Utara	106	820
Kab. Luwu Timur	131	1167
Kab. Toraja Utara	70	806
Kota Palopo	154	4621

Sumber: BPS, 2017

2.4.9.7. Jenis Kelas dan Jumlah Restoran

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu sektor unggulan penggerak ekonomi Palopo. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang meliputi usaha perhotelan, restoran dan rumah makan. Berdasarkan analisis economic based approach kategori ini terpilih sebagai sektor unggulan di Palopo. Kontribusi

kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Palopo pada Tahun 2016 masih terbilang kecil yaitu sebesar 1,21 persen dan mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 8,45 persen.

2.4.9.8. Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan Hotel

Berdasarkan data BPS, jumlah hotel, jumlah kamar, jumlah tempat tidur dan jumlah tamu hotel menunjukkan tren meningkat. Jumlah hotel/penginapan/wisma dan sejenisnya di Kota Palopo sampai dengan tahun 2015 sebanyak 38 unit. Dua unit diantaranya merupakan bintang dua dan sisanya 36 unit adalah non bintang. Penyebaran penginapan tersebut hanya berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Wara sebanyak 16 unit, Wara Timur sebanyak 12 unit dan Mungkajang 2 unit serta Wara Utara 4 unit.

2.4.9.9. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Berikut adalah tabel rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Palopo

Tabel 2.412
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih
Kota Palopo Tahun 2013– 2016

No	Sumber Air Bersih	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Leding (Perpipaan)	14.958	17.958	21.958	23.467
2	Sumur Lindung	856	906	956	1.006
3	Sumur Tidak Terlindung	6.117	6.167	6.217	6.222
4	Mata Air Terlindung	3.327	3.377	3.427	3.477
5	Air Kemasan	2.649	2.699	2.749	2.799
6	Lainnya	617	667	717	767
Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih					
		28.524	31.774	36.423	37.738
Jumlah Rumah Tangga					
		35.025	35.914	36.871	37.749
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih					
		81,44%	88,47%	98,87%	99,97%

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palopo Tahun 2017

2.4.9.10. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Adalah indikator yang menggambarkan kondisi energi listrik yang telah dikonsumsi oleh masyarakat Kota Palopo, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan listrik yang ada.

Tabel 2.413
Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Daya listrik terpasang	Mw	64,437	70,690	No Data	40,902	90,443
b.	Jumlah kebutuhan	Mw	No Data	No Data	No Data	No Data	No Data
c	Rasio Ketersediaan Daya Listrik		No Data	No Data	No Data	No Data	No Data

Sumber Data : Palopo Dalam Angka

2.4.9.11. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator ini menunjukkan seberapa besar masyarakat Kota Palopo yang mampu menikmati akses listrik. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyak masyarakat Kota Palopo yang mengakses listrik, sehingga lebih mudah dalam mengakses pelayanan lain dan menikmati berbagai hasil pembangunan lainnya.

Tabel 2.414
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	Rumah Tangga	53,087	58,618	62,613	67,228	-
b.	Jumlah seluruh rumah tangga	Rumah Tangga	35.026	35.914	36.871	37.749	38.641
	Persentase						

Sumber Data : Statistik Daerah Kota Palopo, Dinas Pertambangan & ESDM Kota Palopo

2.4.9.12. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Indikator ini menggambarkan seberapa besar penetrasi alat komunikasi berupa ponsel diakses dan digunakan oleh masyarakat. Semakin tinggi nilai indikator ini artinya semakin banyak masyarakat yang memiliki akses informasi dan komunikasi melalui telephone yang menunjukkan semakin mudah dan terbukanya informasi yang ada.

Tabel 2.415
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Kota Palopo Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon	Jiwa	96.684	103.757	112.703	122.321	140.181
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
	Persentase	%	60,12	62,92	66,73	70,74	79,24

Sumber Data : Dinas Komunikasi & Informatika Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan peningkatan yang cukup besar atas akses penduduk terhadap telepon atau handphone di Kota Palopo. Tahun 2013 hanya 60,12% masyarakat yang menggunakan atau bisa mengakses layanan ini. Namun pada 2017 jumlahnya meningkat menjadi 79,24% sudah mengaksesnya. Ini menunjukkan semakin mudahnya komunikasi informasi di tingkat masyarakat.

2.4.10. Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.10.1. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan,

ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.416
Angka Kriminalitas Yang Tertangani
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun	12	13	13	20	-
b.	Jumlah penduduk	160.819	164.903	168.894	172.916	176.907
	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	7	8	8	12	-

Sumber data : SIPD Kota Palopo 2016

Data di atas menunjukkan bahwa dari 100.000 penduduk rata-rata terjadi kasus kejahatan sebanyak 7 kasus yang tertangani pada tahun 2013, sementara pada tahun 2016 angka menjadi 12 kasus tertangani per 100.000 penduduk.

Data ini juga menunjukkan peningkatan jumlah kasus kejahatan yang dialami penduduk di Kota Palopo. Olehnya faktor ketertiban dan kenyamanan wilayah yang menjadi tanggung jawab pemerintah mesti menjadi perhatian termasuk bekerja sama dengan stake holder terkait seperti TNI dan Polri.

2.4.10.2. Persentase Kelurahan Berstatus Swasembada Terhadap Total Kelurahan

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu Desa/Kelurahan Swadaya, Desa/Kelurahan Swakarsa dan Desa/Kelurahan Swasembada. Desa/Kelurahan Swasembada; adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal.

Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

Tabel 2.417
Persentase Desa Berstatus Terhadap Total Kelurahan
Kota Palopo Tahun 2013 -2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a	Persentase kelurahan berswasembada	%	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo

Data di atas menunjukkan bahwa semua kelurahan yang ada di Kota Palopo sejak 2013 sampai dengan 2017, Kota Palopo dengan 48 kelurahan yang ada dinilai telah berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupannya masyarakatnya mirip dengan kota yang

modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat yang maju.

2.4.11. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.11.1. Rasio Ketergantungan

Adalah Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Misalnya rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.418

Rasio Ketergantungan Kota Palopo Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio ketergantungan	50,22	50,74	49,23	48,81	48,46

Sumber Data : Diolah dari Palopo Dalam Angka 2013-2017

Data di atas menunjukkan bahwa untuk 100 orang penduduk usia produktif di Kota Palopo pada tahun 2017 mempunyai tanggungan sebanyak 48-49 orang usia non produktif. Beban ini jauh lebih ringan dibandingkan rasio ketergantungan pada tahun 2013 dimana per 100 orang usia produktif menanggung sebanyak 50 orang usia non produktif.

2.4.11.2. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel 2.419

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	Orang	11848	14220	15.833	15.599	16.490
b.	Jumlah penduduk	Orang	160.819	164.903	168.894	172.916	176.374
c	Rasio	Per 100	7.37	8.62	9.4	9.0	9.3

Sumber Data : Palopo Dalam Angka 2013-2017

Data di atas menunjukkan bahwa tahun 2013 dari 100 orang penduduk Kota Palopo terdapat 7 orang yang merupakan lulusan perguruan tinggi baik yang berpredikat sarjana, master/magister ataupun doctor. Kondisi tahun 2017 meningkat menjadi 9 orang berpendidikan strata 1 keatas dari 100 penduduk Kota Palopo.

2.5. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.5.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat dirangkum dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.420
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Palopo

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	8.02	7.05	6.45	6.98	7.19	≥7	=
2	Laju inflasi (%/Tahun)	5.25	8.95	3.38	2.47	3.94	3.5	<
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	26	28.79	31.68	34.18	37	36.9	>
4	Paritas Daya Beli (Ribuan/Tahun)	11,590	11,713	12,005	12,156	12,319	12,500	<
5	Indeks Gini (Angka)	-	-	0.43	0.37	0.34	0.33	<
6	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	90.43	91.2	91.42	91.26	91.22	91.11	<
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	9.57	8.8	8.58	8.74	8.78	8.89	>
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	224,562	228,881	246,727	261,056	274,319	247,109	<
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	15,500	14,590	14,510	15,020	15,440	15,012	<
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	9.64	8.85	8.59	8.69	8.72	8.89	>
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.42	1.18	1.76	1.17	1.75	-	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.3	0.26	0.52	0.28	0.6	-	
	Indeks Kesehatan	77.08	77.11	77.23	77.31	77.38	-	
	Indeks Pendidikan	73.4	74.89	75.87	75.95	76.24	-	
	Indeks Pengeluaran	74.64	74.97	75.72	76.1	76.51	-	
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	75.02	75.65	76.27	76.45	76.71	76.8	<
12	Angka melek huruf (%)	97.14	99.2	98.22	96.07	98.02	100	<
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	9.95	9.96	10.25	10.26	10.33	9.95	>
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14.49	15.01	15.02	15.03	15.05	14.49	>
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.1	70.12	70.2	70.25	70.3	70.28	>
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0.04	0.04	0.07	0.02	0.02	0	<
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	4.68	2.04	1.45	2.14	2.37	1.5	<
17	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	=
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	60.57	58.83	51.42	54.81	56.33	65	<
	<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	<i>79.3</i>	<i>75.47</i>	<i>66.29</i>	<i>69.51</i>	<i>73.99</i>	75	<
	<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	<i>43.42</i>	<i>43.29</i>	<i>37.97</i>	<i>41.31</i>	<i>40.41</i>	50	<
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	64.47	61.72	54.27	58.09	59.56	65	<
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	83.66	79.16	69.43	73.03	77.61	85	<
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	46.6	45.42	40.36	44.15	43.03	50	<
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9.03	8.15	12.07	14.43	10.96	5	<
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	90.95	91.85	87.93	85.57	89.04	95	<
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	62.17	62.27	72.07	76.66	70.56	75	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	55.09	54.04	45.21	46.9	50.15	55	<
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	-	-		-	25.51	26	≤
	<i>Laki – Laki</i>	-	-		-	18.05	24	<
	<i>Perempuan</i>	-	-		-	7.46	11.5	>
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	40.28	40.28	40.28	30.34	40.07	38	>
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Baik	
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	8.55	11.59	10.8	13.35	17.91	20	<
28	Opini BPK	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76.9	82.5	88.7	90	91.6	90	>
30	Penguatan cadangan pangan (%)	51.3	53.38	61.2	66.3	72	90	<
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	18.67	19.68	18.96	17.73	17.6	17	>
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-	-	-	-	-	4	
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)							
	Padi	28,367	18,895	28,631	30,167	32,444	27,701	>
	Jagung	5,575	5,855	4,737	6,303	5,086	5,511	<
	Ubi Kayu	223.85	281	177	70.4	70	164	<
	Ubi Jalar	112.88	101	13	18.94	4.55	50	<
	Sagu	85.2	70.61	51.33	33.04	15.59	51	<
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	1480.54	1688.25	2491.46	3318.87	3276.3	2451	<
	Daging (Ruminansia)	237.62	278.45	306.06	232.94	247.48	261	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	Ton							
	Daging Sapi (Ton)	172.58	189.53	284	232.24	247.16	225	>
	Daging Kerbau (Ton)	65.04	88.92	22.06	0.7	0.32	35	<
	Daging Kambing (Ton)	-	-	-	-	-	-	
	Daging Unggas (Ton)	1242.92	1409.8	2185.4	3085.93	3028.82	2191	<
	Daging Ayam Kampung (Ton)	127.87	129.51	133.81	143.72	145.012	136	>
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	1,107.89	1,271.71	2,043.39	2,934.04	2,875.36	2046	<
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	7.16	8.58	8.2	8.17	8.45	8	>
	Telur Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog (Ton)	350.13	626.9	666.85	2063.9	1778.18	1097	>
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	293.37	541.13	563.08	1999.48	1590.19	997	>
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	4.62	9.69	14.54	-	45	18	>
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	52.14	76.08	89.23	64.42	142.99	85	<
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)							
	Kelapa Dalam	62.75	67.18	55.82	49.67	31.92	53.47	<
	Kopi	75.3	69.53	67.46	66.12	66.27	68.94	<
	Kopi Robusta	73.61	69.13	66.85	66.07	66.26	68.38	<
	Kopi Arabika	1.69	0.4	0.61	0.05	0.01	0.55	<
	Cengkeh'	139.26	69.6	81.77	110.36	127.99	105.8	<
	Kakao	2801.73	1763.18	1546.48	1240.17	1411.83	2814	<
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.01	0.01	0.01	0.05	n/a	n/a	
39	Kontribusi sektor pertambangan	0.18	0.18	0.19	0.19	0.18	0.18	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	terhadap PDRB (%)							
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,18	1.19	1.18	1.21	-	1.5	
41	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	20.99	21.16	21.91	22.9	23.62	24	<
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	3.05	3.02	2.96	2.91	2.82	2.76	>
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
45	Pertumbuhan Industri (%)	-	12.13	43.99	1.84	22.13	20.02	>
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	67,655	76,558	84,077	89,774	96,318	98,000	<
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	-	54.49	55.02	51.19	51.87	51	>
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	63.44	69.84	81.89	87.5	86.69	87.12	<
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100	100	100	100	100	=
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	73.02	72.24	72.75	73.26	76.74	75	>
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	0.95	1.62	1.12	1.35	0	1.5	
8	Rasio pinjaman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	terhadap simpanan di BPR							
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	7	8	8	12	12	15	<
10	Rasio ketergantungan	50.22	50.74	49.23	48.81	48.46	47.34	<
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah								
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR							
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1.	Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	59,60	61,75	63,16	63,10	63,12	75	<
2	Angka Partisipasi Kasar							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	106,32	109,55	101,81	111,66	106,00	100	>
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	86,88	84,86	88,23	86,17	84,91	100	<
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	75,52	79,32	91,56	95,35	85,39	100	<
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)							
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	10.57	19.06	17.03	7.85	7.02	7	<
	Tamat SD/ sederajat (%)	21.63	21.36	19.23	30.47	14.18	15	<
	Tamat SMP/ sederajat (%)	18.23	16.29	18.02	11.82	23.63	20	>
	Tamat SMA (%)	30.66	25.42	26.12	31.75	36.68	30.3	>
	Tamat SMK (%)	4.89	5.13	3.89	4.06	2.81	4	<
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	14.02	12.75	15.72	14.08	15.67	14.8	>
	Diploma I/II (%)	0.37	0.38	0.33	0.29	0.37	0.8	<
	Diploma III (%)	2.76	1.61	2.61	1.82	1.39	2	<
	Diploma IV/S1-S3 (%)	10.89	10.76	12.78	11.97	13.91	12	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
4	Angka Partisipasi Murni							
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	96,54	97,53	94,11	95,37	99,32	100	<
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	73,57	78,15	75,43	76,61	77,89	73.57	>
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	49,25	60,49	68,29	65,72	66,42	70.71	<
5	Angka partisipasi sekolah (%)							
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	1000	1000	989.8	1000	992.3	1000	<
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	943.9	951.2	985.2	965.7	981.3	990.7	<
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (Per 1000)	700,01	827,8	818,9	884,1	883,4	920.1	<
6	Angka Putus Sekolah:							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0	0	0.4	0	0.68	0	<
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	5.14	4.13	1.45	3.43	1.87	0.98	<
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	29.43	16.74	15.87	9,10	10.28	5.94	<
7	Angka Kelulusan:							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	95.72	96.63	97.48	98.87	100	100	=
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	97.34	98.74	99.05	99.62	99.3	99.79	<
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	102.6	102.32	102.82	102.44	99.75	99.04	>
8	Angka Melanjutkan (AM):							
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	SMP/MTs (%)							
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)							
9	Fasilitas Pendidikan:							
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	97.47	97.59	97.47	97.47	96.25	100	<
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100	100	=
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100	100	=
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	32	40	37	33	32	33	<
	SD/MI (per 10,000)	36	45	43	36	36	37	<
	SMP/MTS (per 10,000)	25	32	26	26	26	26	=
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah (per 10,000)							
	SMA/MA/SMK	34	28	27	28	27	35	<
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	709	697	890	674	635	750	<
	SD/MI (per 10,000)	672	610	937	633	607	700	<
	SMP/MTS (per 10,000)	773	874	800	751	688	780	<
12	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah atas /MA/SMK (per 1000)	130	110	231	89	88	130	<
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.69	0.58	0.81	0.59	0.57	0.65	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pendidikan menengah (per 10.000)	2.73	2.39	4.77	1.77	1.8	2.69	<
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	99.934	99.908	99.954	99.973	99.995	100	<
17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97.14	99.2	98.22	96,61	97.45	98.24	<
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	92.17	93.47	61.55	123.46	137.26	100	>
2.	Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6	2	0	2	2	1	>
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	94	98	100	100	98	99	<
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1	3	1	4	2	2	=
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6	7	6	8	5	4	>
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	73	115	146	145	68	66.75	>
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	11	9	10	9	9	9	=
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	2	2	2	3	3	3	=
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	3	3	3	4	4	4	=
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per	4	5	5	5	5	5	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Targe t 2018	Inter preta si
		2013	2014	2015	2016	2017		
	1.000)							
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	4	5	5	5	5	5	=
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	68,13	60,89	74,20	76,49	70,63	73,1	<
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	100	93,14	96,31	93,99	95,79	94.74	>
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	95,83	97,92	95,83	97,92	95,83	95.79	>
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	=
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	96.25	85.61	83.85	85.9	87.4	85.19	>
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	104,37	112,32	109,94	111,83	85,57	90	<
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	2	0	2	2	0	0	=
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	1,73	6,40	8,64	3,15	6,19	6.8	<
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	93,53	101,98	83,47	108,56	138,07	100	>
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	216	181	221	205	240	250.43	<
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0	0	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	93,53	46,53	37,60	104,73	79,93	77.21	>
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	84.62	46.60	59.90	65.98	63.37	59.12	>
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	=
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	6	6	6	6	6	8	<
26	Angka kejadian Malaria (per 100.000)	104	99	113	166	19	20	<
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0	0	0	0	0	0	
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100	100	100	100	100	=
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (per 100.000)	9	10	12	32	42	21	>
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	2	<
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	
34	Cakupan kunjungan	95,23	96,90	94,50	95,75	100,78	100	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	bayi (%)							
35	Cakupan puskesmas (%)	122,22	122,22	133,33	133,33	133,33	100	>
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	46	46	46	75	75	75	=
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	92,72	93,28	92,25	90,69	92,80	92.82	≤
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	100	90,42	91,81	93,17	91,22	89.03	>
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	54,28	34,63	77,43	75,06	67,79	70.49	<
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	48,78	41,31	42,97	56,36	62,51	65.26	<
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100	100	=
42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	98,78	98,78	94,66	98,81	97,52	97.21	>
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	n/a	-	-	-	-	100	
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100	100	=
45	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100	100	100	100	0	100	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Pekerjaan Umum:							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	73.02	63.18	55.6	55.6	58.96	65	<
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	22	24	30	29	28	30	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	64.75	65.52	47.75	49.73	58.33	65	<
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	0	0	0	0.2	1.28	1.5	<
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	57.9	59.96	65.46	88.63	90.77	72.21	>
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	38	39,00	40,50	42,70	46,10	45	>
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	20.32	17.36	14.71	12.64	10.73	50	<
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	14.43	14.42	14.43	14.43	14.42	20	<
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	1.99	2.64	2.94	3.39	3.4	5	<
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	43.98	44.59	47.89	65.3	71.34	75	<
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	9.41	9.64	10.22	15.53	18.86	20	<
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	83.89	84.11	85.32	86.01	93	100	<
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan	54.65	61.93	71.44	86	88.63	85	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Targe t 2018	Inter preta si
		2013	2014	2015	2016	2017		
	perdesaan (%)							
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	2.12	2.05	1.95	1.89	0.76	0	<
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	2.3	2.5	3.64	4.5	4.53	5	<
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.68	1.64	1.78	1.62	1.58	1.8	<
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.77	1.78	1.84	1.8	1.78	2	
3	Penataan Ruang:							
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	-	-	
	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	2,759	2,759	2,759	2,761	3,978	3003	<
2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	52.36	52.36	52.36	52.4	75.49	80	<
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	-	34.4	-	-	-	50	
4	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Ketaatan terhadap RTRW	n/a	-	-	-	-	-	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1	Rasio rumah layak huni	0.11	0.11	0.14	0.16	0.16	0.25	<
2	Rasio permukiman layak huni (%)	86.38	89.08	91.93	94.24	94.28	98.96	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	55.38	53.78	69.16	70.25	79.39	80	<
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	81.06	82.14	84.78	85.04	92.1	90	>
5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	97.87	97.96	98.06	98.12	99.25	90	>
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	0	0	3.36	1.68	1.26	0	<
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	0	0	95.46	45.15	35.91	0	<
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	9.92	9.12	8.36	7.76	7.41	0	<
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	37.5	17.5	18.6	20	20.98	25	<
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)	200	688	200	200	200	100	>
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	805	821.1	725.8	796.3	808.7	100	>
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	3.03	3.03	6.06	9.09	9.09	10	<
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	95.24	100	88.16	67.67	94.87	100	<
5	Persentase Penegakan PERDA	97.6	96.6	97.8	97.7	97.9	100	<
6.	Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	36.51	36.84	36.68	36.95	47.73	85	<
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	36.45	36.85	36.68	36.98	47.66	85	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	64.74	43.30	43.12	43.77	57.61	85	<
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	0	0	0	0	10	
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	=
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	=
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100	=
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100	0	100	0	100	
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	0	0	0	0	10.95	4.08	<
Layanan Urusan Wajib Non								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Targe t 2018	Inter preta si
		2013	2014	2015	2016	2017		
Dasar								
1	Tenaga Kerja							
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per 1000)	2.8	2.8	5.5	6	8.3	5	>
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	3.8	5.2	8.3	12.1	18.1	15	>
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	75	100	88	80	71	85	<
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	4.65	4.75	1.58	3.13	4.54	5	<
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	25	25	26	24	25	25	=
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	29	28	36	37	37	35	>
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0	0	
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	1.67	1.01	0.87	0.67	0.42	2	<
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	0.48	0.48	0.53	0.48	-	0.5	
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	8.08	9.82	7.62	5.71	28.85	30	<
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	9.14	0	5.56	5.92	11.2	12	<
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	22.8	60	40	36.6	5.83	20	<
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	-	9.4	9	9.3	10	<
2	Pemberdayaan							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Targe t 2018	Inter preta si
		2013	2014	2015	2016	2017		
	Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	15.21	13,91	14,49	11,40	10,92	15	<
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20	20	20	20	20	20	=
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	3.03	3.07	3.31	3.12	3.16	4	<
4	Rasio KDRT (per 10.000)	6	4	5	6	3	3	=
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	46.6	45.42	40.36	44.15	43.03	50	<
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	7.09	22.07	100	<
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Targe t 2018	Inter preta si
		2013	2014	2015	2016	2017		
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100	=
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	n/a	n/a	-	19.29	21.38	22	<
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD							
	APM Perempuan pada Tingkat SD	-	-	90.04	90.52	99.12	100	<
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	-	-	97.48	100	99.33	100	<
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP							
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	-	-	81,02	75,52	80,28	85	<
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	-	-	68,49	77,50	75,35	80	<
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA							
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	-	-	66,63	64,73	63,24	68	<
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	-	-	70,11	66,80	69,65	70	<
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	40.48	40.99	41.25	41.76	42.27	42.72	<
	APM Perempuan yang masuk Tingkat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	Perguruan Tinggi							
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Pangan							
1	Ketersediaan pangan utama (%)	9.02	9.56	9.94	10.28	11	11	=
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	3,027	2,131	2,203	2,199	2,082	2,329	<
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2970	2049.7	2203.4	2,130.10	2012.8	2100	<
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	57.32	81.6	-	68.9	69.1	54	>
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	-	-	-	75	82	85	<
4	Pertanahan							
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	0.75	0.92	1.61	1.31	1.52	2	<
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	0	0	0	0	20	
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	50	0	100	100	0	100	
5	Lingkungan Hidup							
Kabupaten/Kota								
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	=
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	=
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	-	-	Ada	Ada	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Baik	<
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	=
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	31.76	39.13	32.54	38.95	37.2	40	<
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota							
	<i>Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina (Orang)</i>	0	0	0	0	0	1	
	<i>Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)</i>	0	0	0	0	0	1	
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	0	0	0	
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	0	
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	0	
12	Penetapan hak MHA	0	0	0	0	0	0	
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0	0	0	0	0	0	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0	0	0	0	0	0	
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	0	0	0	
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	=
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100	100	100	100	=
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	78.64	83.08	86.12	87.02	88.28	85	>
19	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	1.4	1.6	2.6	3.17	3.5	4	<
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	51	55	59	61	64	67	<
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	63.19	63.85	70.2	73.95	78.56	82.4	<
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	69.57	68.86	72.41	75.65	77.81	75	>
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	0	0	0	0	0	100	
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	100	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk ber-	0.65	0.61	0.65	0.79	0.78	0.81	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	KTP per satuan penduduk							
2	Rasio bayi berakate kelahiran	0.84	0.86	0.86	0.88	0.6	0.8	<
3	Rasio pasangan berakate nikah	0.4	0.39	0.38	0.37	0.38	0.7	<
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	=
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah	=
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	64.69	61.38	66.21	78.89	82.56	87.03	<
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100	100	100	100	100	=
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	97.92	97.92	97.92	97.92	97.92	100	<
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1	1	=
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	-	-	-	-	2.5	-	
4	Persentase LSM aktif (%)	0	5.4	10.81	5.4	0	5	
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	-	-	-	-	4.17	5	<
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	=
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100	100	=
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.69	2.54	2.42	2.38	2.31	2.22	>
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	-	-	-	-	-	-	
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	0.00%	0.00%	0.00%	40	32.65	50	<
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	-	-	-	-	
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	-	-	-	-	
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program	-	-	-	-	-	-	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	pembangunan							
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	-	-	-	-	
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	=
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	64.61	69.05	69.4	72.79	74.67	77.19	<
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	15	14	21	10	10	14	<
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	31.11	30.71	30.27	23.59	22.48	20.32	>
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	21.3	19.6	20.91	21.54	21.81	23	<
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	66.83	61.33	60.28	47.83	45.14	43	>
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	65.99	64.23	67.43	62.95	75.15	75	>
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	53.67	47.34	51.06	53.02	58.56	60	<
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	38.87	43.34	34.37	42.27	47.2	45	>

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Targe t 2018	Inter preta si
		2013	2014	2015	2016	2017		
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0	0	0.11	0.11	0.11	0.11	=
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	2.56	5.11	2.44	7.33	9	8	>
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100	100	=
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	-	30.35	25.77	17.75	20.63	30	<
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	=
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	-	-	4.31	9.67	7.28	10	<
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)			499.3	55.1	66.4	75	<
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100	100	100	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	0.14	0.71	0.71	1.04	1.93	2.38	<
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	9.35	11.56	23.83	19.63	54.89	60	<
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	-	-	-	-	-	20	
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)	-	-	37.62	65.19	83.83	80	>
9	Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1,583,393	1,611,095	1,689,617	1,680,146	1,345,436	1,285,538	>
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2	2	2	2	2	=
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	772	629	697	893	631	750	<
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	2	2	2	2	=
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	2.5	2.74	2.51	2.6	3.32	2.734	>
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	17.17	20.54	19.61	13.55	22.19	25	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	79.47	82.42	65.27	65.45	63.2	80	<
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	16	16	20	19	18	20	<
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1,582,803	1,609,038	1,688,848	1,680,024	1,344,991	1,581,141	<
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	585,781	578,052	602,106	605,771	601,356	605,250	<
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	2,171,752	2,190,308	2,294,687	2,289,155	1,893,357	1,823,758	>
10	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	0	0	0	0	3.33	3	>
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.75	0.8	0.83	0.86	0.86	1	<
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	60.12	62.92	66.73	70.74	79.24	85	<
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	=
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.31	0.32	0.33	0.37	0.4	0.42	=
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif (%)	72.59	72.16	71.02	71.32	71.08	70.7	>
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	30.74	29.74	28.33	30.17	29.88	29.67	>
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	-	-	-	-	-	100	
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99.09	98.77	98.84	99.07	99.11	100	<
12	Penanaman Modal							
1	Jumlah investor	117	107	95	122	147	157	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	berskala nasional (PMDN)							
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0	0	0	0	0	0	
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	164,223	141,276	96,603	268,332	382,322	184,830	>
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	11.91	14.5	22.5	10.56	7.42	8	<
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	50	-16	-32	178	42.48	40.6	>
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	67.9	67.9	67.9	69.3	69.3	70	<
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.3	1.56	1.56	1.75	1.75	2	<
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	-	-	-	38.46	38.46	40	<
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	-	-	63.64	68.18	68.18	70	<
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	-	-	63.64	68.18	68.18	50	<
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	3	7	10	36	7	50	<
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	3	7	10	36	7	50	<
14	Statistik							
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
2	Buku "Kota Palopo dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
15	Persandian							
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	-	55	55	75	71.42	75	<
16	Kebudayaan							
1	Penyelenggaraan festival seni dan	5	6	10	12	15	18	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	budaya							
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	95.45	100	99.32	99.32	100	<
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	1	3	1	1	0	5	
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	23	23	37	51	51	50	>
17	Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	7.64	7.65	7.67	9.18	9.23	10	<
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	71.74	36.25	35.14	34.41	46.81	50	<
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.27	1.24	1.21	1.19	1.16	1.2	<
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	857	880	902	1,106	1,137	1,000	>
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	424	394	624	308	1,232	1,393	<
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100	100	100	100	100	100	=
18	Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2.43	2.43	2.5	2.5	2.04	2	=
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	4	6	7	6	7	8	<
Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pariwisata							
1	Kunjungan wisata (%)	119.34	108.69	122.31	100.97	99.48	94.25	>
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2	2	2	2	2	2	=
3	PAD sektor pariwisata (%)	4.31	3.87	4.15	3.45	3.51	4	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Targe t 2018	Inter preta si
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.	Pertanian							
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	18,67	19,68	18,96	17,73	17,60	18	<
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)							
	Padi	28367	18895	28631	30167	32,444	27,701	>
	Jagung	5575	5855	4737	6303	5,086	5,511	<
	Ubi Kayu	223.85	281	177	70.4	70	164	<
	Ubi Jalar	112.88	101	13	18.94	4.6	50	<
	Sagu	85.2	70.61	51.33	33.04	15.59	51	<
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)							
	Padi	5.63	5.43	5.62	5.88	6.27	5	>
	Jagung	5.07	5.04	6.64	6.79	6,75	6	>
	Ubi Kayu	22.4	20.07	22.13	10.06	70	28.93	<
	Ubi jalar	12.54	12.63	13	18.94	4.55	12.33	<
	Sagu	0.35	0.46	0.46	0.29	0.05	0.32	<
7	Cakupan bina kelompok petani	43.24	94.35	89.43	78.38	50.68	50	>
3	Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
2	Rasio ketersediaan daya listrik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
4	Perdagangan							
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-515.211	-692.625	-792.951	-834.666	-802.359	-600,000	<
2	Cakupan bina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	kelompok pedagang/usaha informal (%)							
5	Perindustrian							
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	-	-	87,65	13,25	0,00	50	
6	Transmigrasi							
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	0	0	0	
7	Perikanan							
1	Produksi perikanan (%)	100	86.12	99.6	97.74	103.7	104.63	<
2	Konsumsi ikan (%)	72.4	80.2	122.06	99.6	100.13	100	>
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	25.64	19.31	21.6	5.69	3.15	4.5	<
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	75	75	69.11	75	75	75	=
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Nilai tukar nelayan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Penunjang Urusan								
1.	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	=
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	=
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	=
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	Ada	ada	ada	ada	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	96.44	86.36	90.29	94.46	79.01	100	<
6	Penjabaran Konsistensi Program APBD kedalam RKPD (%)	82.72	99.47	87.85	81.98	94.79	100	<
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2.	Keuangan							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
2	Persentase SILPA	0	0	0	0	0	0	
3	Persentase SiLPA terhadap APBD	1.83	7.87	12.52	5.15	2.25	2	>
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)							
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	1,2	0,6	0,3	0,3	0,6	0	<
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%)	1,31	1,1	3,7	0,7	1,06	0	<
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	36.54	32.54	27.56	22.22	17.84	20	<
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	15.39	16.4	17.69	18.64	24.48	10	>
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)							
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	46.31	46.74	54.86	62.59	64.15	50	>
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	53.69	53.26	45.14	37.41	35.85	50	<
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	3.18	2.59	1.51	2.04	1.79	2	<
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=

NO	BIDANG URUSAN/INDIKA TOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Targe t 2018	Inter preta si
		2013	2014	2015	2016	2017		
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	39/384	97/867	97/867	103/893	103/893	-	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	1,3	2,1	0,5	0,7	0,9	2	<
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	23,8	26,0	30,3	30,3	29,3	50	<
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	32	36	34	33	-	
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	947	919	938	900	949	-	
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	3012	2951	3021	2261	2217	-	
4.	Penelitian dan pengembangan							
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	100	90,9	90,9	100	100	100	=
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	100	80	75	85	36,36	85	<
	Penerapan SIDA:							
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	0	0	0	0	0	0	
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	-	26.08	34.78	26.08	52.1	34.76	>
5.	Pengawasan							
1	Persentase tindak	96,48	88,4	70,72	41,60	57,02	100	<

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Capaian Kinerja Tahun					Standar /Target 2018	Interpretasi
		2013	2014	2015	2016	2017		
	lanjut temuan							
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,26	0,40	0,09	0,06	0,04	0.01	<
3	Jumlah temuan BPK	22	18	15	9	19	17	
6.	Sekretariat Dewan							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	=
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=

2.5.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal :

2.5.2.1. Bidang Urusan Pendidikan :

Berikut adalah Capaian SPM Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Kota Palopo Tahun 2016-2018 :

Tabel 2.421
Capaian SPM Pendidikan
Kota Palopo Tahun 2016-2018

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
A.	PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN/ KOTA				
1.	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil				
		SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT :Jumlah kelompok permukiman permanen di kab/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
2.	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis				
	PEMBILANG : Jumlah SD/ MI yang semua rombel-nya tidak melebihi 32 orang	SD	90.24	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	90.24	100.00	100.00
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	SD	100.00	93.90	93.90
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	93.90	93.90
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang	SMP	83.33	96.67	96.67
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wilayah kabupaten/ kota	MTs	83.33	96.67	96.67
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wilayah kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
3.	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs memiliki ruang lab. IPA yang dilengkapi	SMP	64.29	129.41	43.33

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	meja kursi untuk 36 peserta didik				
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts di Kab./ kota	MTs	64.29	129.41	43.33
	PEMBILANG : Jumlah SMP/ MTs memiliki satu set alat praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen	SMP	70.59	123.53	40.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts di Kab./ kota	Mts	70.59	123.53	40.00
4.	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru				
		SD	81.48	80.49	84.15
		MI	81.48	80.49	84.15
		SMP	72.41	80.00	80.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI atau SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	MTs	72.41	80.00	80.00
5.	Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	100.00	100.00
		SD	95.12	0.00	0.00
		MI	95.12	0.00	0.00
6.	Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;n				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]	SMP	70.00	70.00	70.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts di wil. Kab./ kota	MTs	70.00	70.00	70.00
7.	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	SD	100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	100.00	100.00
	PEMBILANG: Jumlah SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	100.00	100.00	100.00
8.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs memiliki guru kualifikasi S1 atau D-IV $\geq$ 70% [daerah khusus $\geq$ 40%]	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs memiliki guru kualifikasi S1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik $\geq$ 35% [daerah khusus $\geq$ 20%]	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
9.	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs tersedia guru kualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing2 satu orang untuk Matematika, IPA, Bhs. Indonesia, Bhs. Inggris, dan PKn	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
10.	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah Kepala SD/MI berkualifikasi S-1 atau D-IV dan bersertifikat pendidik	SD	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota	MI	100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
11.	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah SMP/MTs memilki Kepala SMP/Mts kualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik	SMP	100.00	100.00	100.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ Mts Di Kabupaten/ kota	MTs	100.00	100.00	100.00
12.	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik				
	PEMBILANG: Jumlah pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat Pendidik	SD	15.85	15.85	15.85
	PENYEBUT: Jumlah SD/MI di wilayah Kabupaten/Kota	MI	15.85	15.85	15.85
13.	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif				
	100 = bila kab/ kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, 50 = bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan, 0 = bila tidak memiliki rencana			100	100
14.	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan				
		SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	96.67	96.67	96.67
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI atau SMP/ Mts Di Kab./ kota	MTs	96.67	96.67	96.67
B. PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN					
15.	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik				

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	PEMBILANG: Jumlah set buku teks mata pelajaran (B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah	SD	96.63	97.03	97.03
	PENYEBUT: Jumlah peserta didik	MI	96.63	97.03	97.03
	PEMBILANG: Jumlah SD/MI yang memenuhi IP-15.1 di atas	SD	59.76	62.20	62.20
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	59.76	62.20	62.20
16.	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah set buku teks mapel yang ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan sekolah	SMP	94.52	94.52	94.52
	PENYEBUT: Jumlah peserta didik	MTs	94.52	94.52	94.52
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi IP-16.1 di atas	SMP	86.67	86.67	86.67
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	MTs	86.67	86.67	86.67
17.	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA				
	PEMBILANG: Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap	SD	97.56	97.56	97.56
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	97.56	97.56	97.56
18.	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi				
	PEMBILANG: Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	SD	87.80	87.80	87.80
	PENYEBUT: Jumlah SD/ MI di wil. Kab./ kota	MI	87.80	87.80	87.80
	PEMBILANG: Jumlah SMP/ MTs yang memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	SMP	80.00	80.00	80.00
	PENYEBUT: Jumlah SMP/ MTs di wil. Kab./ kota	MTs	80.00	80.00	80.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
19.	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan				
	PEMBILANG: Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu = 37.5 jam				
	PENYEBUT: Jumlah seluruh guru tetap di satuan pendidikan				
		SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00
		MT's	100.00	100.00	100.00
20.	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu				
20	PEMBILANG: Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar				
	PENYEBUT: Jumlah seluruh rombongan belajar di satuan pendidikan				
		SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00
		MT's	100.00	100.00	100.00
21.	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku				
		SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00
		MT's	100.00	100.00	100.00
22.	Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya				
	PEMBILANG: Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya				

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	PENYEBUT: Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan				
		SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00
		MT's	100.00	100.00	100.00
23.	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik				
	PENYEBUT: Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan				
		SD	57.32	58.54	58.54
		MI	57.32	58.54	58.54
		SMP	58.62	62.07	62.07
		MT's	58.62	62.07	62.07
24.	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester				
		SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00
		MT's	100.00	100.00	100.00
25.	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik				
	PEMBILANG: Jumlah guru menyampaikan lap. hasil evaluasi mapel dan hasil penilaian peserta didik kepada KepSek pada akhir semester				
	PENYEBUT: Jumlah seluruh guru di satuan pendidikan				
		SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00

JENIS PELAYANAN DASAR/ INDIKATOR SPM		TINGKAT	CAPAIAN		
			2016	2017	2018
	atau SMP/ MT's di wil. Kab./ kota	MT's	100.00	100.00	100.00
26.	Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan menyampaikan lap. hasil UAS dan UKK serta US/UN kepada orang tua peserta didik				
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				
		SD	100.00	100.00	100.00
		MI	100.00	100.00	100.00
		SMP	100.00	100.00	100.00
		MT's	100.00	100.00	100.00
27.	Manajemen Sekolah: Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan		100.00		
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan		100.00		
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				
	PEMBILANG: Jumlah satuan pendidikan yang memiliki Komite Sekolah yang berfungsi baik		100.00		
	PENYEBUT: Jumlah satuan pendidikan di wilayah kabupaten/kota				

2.5.2.2. Bidang Urusan Kesehatan :

Berikut adalah Capaian SPM Urusan Kesehatan Kota Palopo Tahun 2013-2017 :

Tabel 2.422

Capaian SPM Kesehatan Kota Palopo Tahun 2013-2017

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			Capaian Kinerja				
					2013	2014	2015	2016	2017
		Indikator		Target Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)
		1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95	92.72	93.28	92.25	90.69	92.8
		2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	80	68.13	60.89	74.2	76.49	70.63
		3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90	100	93.14	96.31	93.99	95.79
		4	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90	100	90.42	91.81	93.17	91.22
		5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80	54.28	34.63	77.43	75.06	67.79
		6	Cakupan kunjungan bayi.	90	95.23	96.9	94.5	95.75	100.78
		7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100	95.83	97.92	95.83	97.92	95.83
		8	Cakupan pelayanan anak balita.	90	48.78	41.31	42.97	56.36	62.51
		9	Cakupan pemberian makanan	100	100	100	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			Capaian Kinerja				
					2013	2014	2015	2016	2017
		Indikator		Target Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)
			pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.						
		10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100
		11	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	98.78	98.78	94.66	98.81	97.52
		12	Cakupan peserta KB Aktif	70	64.61	69.05	69.4	72.79	74.67
		13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit						
		A.	<i>Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun</i>	≥2	2	0	2	2	0
		B.	<i>Penemuan Penderita Pneumonia Balita</i>	100	1,73	6,40	8,64	3,15	6,19
		C.	<i>Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif</i>	100	93,53	101,98	83,47	108,56	138,07
		D.	<i>Penderita DBD yang Ditangani</i>	100	100	100	100	100	100
		E.	<i>Penemuan Penderita Diare</i>	100	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
		14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	15	Cakupan pelayanan	100	100	100	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal			Capaian Kinerja				
					2013	2014	2015	2016	2017
		Indikator		Target Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)	Nilai (%)
			kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.						
		16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100	100	100	100	100	100
III	Penyelidikan	17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	100	100	100	100	100
IV	Promosi	18	Cakupan Desa Siaga Aktif	80	100	100	100	100	100

2.5.2.3. Bidang Urusan Perumahan dan Pemukiman :

Berikut adalah Capaian SPM Urusan Perumahan & Pemukiman Kota Palopo Tahun 2013-2017 :

Tabel 2.423

**Capaian SPM Perumahan & Pemukiman
Kota Palopo Tahun 2016-2018**

No	Jenis Pelayanan Dasar skala Kab/Kota	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Capaian Kinerja					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Target		2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	2009 - 2025	55,38	53,78	69,16	76,42	79,39	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan
		2.Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%	2009 - 2025	81,06	82,14	84,78	85,04	92,10	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Tercapainya fasilitas keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar skala Kab/Kota	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Capaian Kinerja					Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Target		2013	2014	2015	2016	2017		
2	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3.Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	2009 - 2025	37,50	17,50	18,60	20,00	20,98	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan

2.5.3. Capaian Kinerja SDG's/TPB

Tabel. 2.424
Tabel Capaian Indikator Kinerja SDGs/TPB Kota Palopo
Tahun 2016-2017

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.74	8.78
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	95.16	103.95
3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37	37
4	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	3.09	1.58
5	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3104	3769
6	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	93.99	100.41
7	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	108.6	106.81
8	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	72.79	74.67
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	N/A	93.43
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	91.24	99.58
11	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	11.36%	7.10%
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	95.37	99.23
13	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	76.61	77.89
14	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	N/A	93.57
15	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	15005	N/A
16	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal 0; Hilang 0; Mengungsi 121,4	Mengungsi 45,22
17	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	0	0
18	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	100	100

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	sosial.		
19	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	100	100
20	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	0
21	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	N/A	N/A
22	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	N/A	N/A
23	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0
24	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	44.32%	58.07%
25	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pend 22,22; Kes 18,64	Pend. 17,84 ; Kes. 24,48
26	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	10	8.4
27	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2.14	2.37
28	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Sedang 19,37; Berat 27,97	Sedang 14,42; Berat 30,6
29	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	90	91.02
30	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	28.8	26.21
31	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	N/A	N/A
32	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1.6	1.71
33	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0.15	0.18
34	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	N/A	N/A
35	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	PPH 90, KI 50,82	PPH 92,5
36	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	135,16 jt	168,4 jt
37	Angka Kematian Ibu (AKI).	4 Jiwa	2 jiwa (67,59)

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
38	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	94.29	94.29
39	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	93.99	100.41
40	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	4.36	2.03
41	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	7.62	5.41
42	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	2.18	2.03
43	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	97.92	95.83
44	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.08	0.04%
45	Insiden Tuberkulosis (Tb) per 100.000 penduduk.	204.72	250.41
46	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1.7	0.2
47	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	0	0
48	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	0	0
49	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0	0
50	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	0	0
51	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	0	0
52	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	N/A	N/A
53	Prevalensi tekanan darah tinggi.	41.88	11.05
54	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	34.41	37.8
55	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	N/A	N/A
56	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	N/A	N/A
57	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	N/A	N/A
58	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	N/A	N/A
59	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode	66.42	70.89

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	modern.		
60	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	72.79	74.67
61	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	21.54	21.81
62	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	N/A
63	Total Fertility Rate (TFR).	N/A	N/A
64	Unmet need pelayanan kesehatan.	23.59	22.48
65	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	90.75	101.61
66	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	95.16	103.95
67	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0
68	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	N/A	25.04
69	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100
70	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	100	100
71	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	N/A	97.45
72	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	79.48	94.7
73	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	65.51	81.8
74	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	111.66	105.91
75	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	86.17	84.91
76	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	15.03	
77	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	N/A	16.54
78	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	5.71	28.85
79	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	N/A	N/A

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
80	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	96.41	98.02
81	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99.83	99,41 & 97,45
82	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	N/A	N/A
83	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	N/A	SD (50,61); SMP (54,79); SMA (57,69), SMK (52,46)
84	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	N/A	2
85	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	6	3
86	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	N/A	N/A
87	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0.02	0.09
88	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	7.09	22.07
89	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0.96	1.00
90	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	N/A	N/A
91	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	N/A	12.9
92	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	20%	20%
93	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	11.76	11.76%
94	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan	N/A	N/A

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	kesehatan reproduksi.		
95	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	23.59	22.48
96	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	66.42	70.89
97	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	70.74	79.24
98	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	86	93.43
99	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	320m3/detik	550l/detik
100	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	86	93.43
101	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	N/A	N/A
102	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	86.58	99.58
103	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	9	9
104	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	N/A	9
105	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	0	180 skala lingkungan
106	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	0	0
107	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	1	1
108	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0	0
109	Kualitas air danau.	N/A	N/A
110	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Menenuhi Standar	Menenuhi Standar
111	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	0	0
112	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	0	0
113	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	0	0

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
114	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	2	2
115	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	0	0
116	Bauran energi terbarukan.	N/A	N/A
117	Intensitas energi primer.	N/A	N/A
118	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	6.9	7.1
119	PDB per kapita.	34,2 juta	37,0 juta
120	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	76.66	70.56
121	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	N/A	N/A
122	Persentase tenaga kerja formal.	47.72	N/A
123	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	N/A	N/A
124	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	16.85	19.65
125	Upah rata-rata per jam pekerja.	14,062	15,200
126	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	14.43	10.96
127	Tingkat setengah pengangguran.	26.01	23.18
128	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	N/A	N/A
129	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1.16	8.45
130	Jumlah wisatawan mancanegara.	207	622
131	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	95,711	98,895
132	Jumlah devisa sektor pariwisata.	3.45	3.51
133	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	30.75	32.07
134	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	N/A	20
135	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	<3km	<3km
136	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	9.26	9,26(2016)
137	Panjang pembangunan jalan tol.	0	0
138	Panjang jalur kereta api.	0	0
139	Jumlah dermaga penyeberangan.	0	0
140	Jumlah pelabuhan strategis.	1	1
141	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	2.96	2.91
142	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	5.1	3.57

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
143	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	3.3	6.18
144	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	N/A	N/A
145	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	N/A	N/A
146	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0.0038	0.0036
147	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	0.08	0.09
148	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	70.74	79.24
149	Proporsi individu yang menggunakan internet	0.08	0.09
150	Koefisien Gini.	0.37	0.34
151	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	8.74	8.78
152	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	N/A	N/A
153	Indeks Kebebasan Sipil.	N/A	N/A
154	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0
155	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	37	37
156	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	0.16	0.16
157	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	N/A	N/A
158	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	N/A	N/A
159	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	N/A	N/A
160	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	0	0
161	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	0	0
162	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	0	0
163	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	43	43
164	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	0	0

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
165	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	1	1
166	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Mengungsi 121,4	Meninggal 0; Hilang 0; Mengungsi 45,22
167	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	N/A	N/A
168	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	0	0
169	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	0
170	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	N/A	1,173,000,000
171	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	84.47	91.66
172	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	0	0
173	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	0	1
174	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	0	0
175	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0
176	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	410 kg	410 kg
177	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	1.5	1.6
178	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	0	0
179	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	0	0
180	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	0	0
181	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0
182	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Mengungsi 121,4	Meninggal 0; Hilang 0; Mengungsi 45,22
183	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	58.39	58.39
184	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0	0
185	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	0	0

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
186	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0	0
187	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	N/A	N/A
188	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0
189	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	N/A	1.29
190	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	N/A	N/A
191	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0	0
192	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	7.09	22.07
193	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	0
194	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	N/A	N/A
195	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	N/A	N/A
196	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP
197	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	CC	C
198	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	N/A	N/A
199	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	60.42	62.44
200	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Hijau	Hijau
201	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	5	5
202	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	7	7

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
203	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	N/A	83.63
204	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	N/A	87.98
205	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	N/A	93.57
206	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0
207	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0
208	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	2.23	2.78
209	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0.33	0.42
210	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	13.35	14.55
211	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	N/A	N/A
212	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	N/A	N/A
213	Proporsi individu yang menggunakan internet.	0.08	0.09
214	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0
215	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0
216	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	100	98.05
217	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	95.83	88.9
218	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	0	5
219	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	N/A	N/A
220	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	0	0
221	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses	5587	6399

No	INDIKATOR SDGs (TPB)	Capaian Kinerja	
		2016	2017
	data dan informasi statistik melalui website.		
222	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	99.31	99

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan.

Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi sumber daya di daerahnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah.

Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi maka akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha penggalian dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang–undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja masa lalu maupun kebijakan yang melandasinya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama periode tahun 2013 hingga tahun 2017. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek pendapatan, belanja dan aspek pembiayaan.

Aspek pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, aspek belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung dan aspek pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kota Palopo tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rata-rataPertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2013 s/d Tahun 2017 Kota Palopo

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	604.409.930.598,56	704.255.513.596,57	854.330.445.704,26	1.004.346.574.517,06	934.121.533.937,22	11,50
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	51.663.729.162,20	81.646.676.135,53	92.277.783.805,00	134.110.076.220,35	167.307.131.609,15	34,15
1.1.1.	Pajak daerah	10.891.944.547,00	16.570.116.325,00	18.770.025.711,00	21.278.599.140,70	27.317.777.187,00	25,84
1.1.2.	Retribusi daerah	6.754.632.850,00	6.289.042.222,62	6.029.357.763,00	6.858.696.882,00	6.845.567.072,00	0,33
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.245.115.692,00	2.753.845.224,00	4.231.498.917,20	6.546.377.545,00	6.982.537.588,12	32,80
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	31.772.036.073,20	56.033.672.363,91	63.246.901.413,80	99.426.402.652,65	126.161.249.762,03	41,16
1.2.	Dana Perimbangan	466.847.147.647,00	503.736.332.803,00	626.112.771.484,00	807.007.722.676,00	707.078.730.039,00	10,94
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	19.076.226.647,00	18.012.902.803,00	13.387.377.484,00	23.386.791.194,00	18.220.349.272,00	(1,14)
1.2.2.	Dana alokasi umum	408.527.791.000,00	449.242.430.000	476.408.524.000,00	525.397.125.000,00	516.167.587.000,00	6,02
1.2.3.	Dana alokasi khusus	39.243.130.000,00	36.481.000.000,00	136.316.870.000,00	258.223.806.482,00	172.690.793.767,00	44,84
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	85.899.053.789,36	118.872.504.658,04	135.939.890.415,26	63.228.775.620,71	59.735.672.289,07	(8,68)
1.3.1	Hibah	0	5.000.000.000,00	20.556.000.000,00	16.200.000.000,00	2.859.000.000,00	(13,04)
1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (**)	22.538.534.749,36	30.741.496.698,04	33.819.991.764,26	37.248.722.096,00	41.865.752.355,00	16,74
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus(***)	51.921.459.000,00	72.797.661.000,00	72.903.542.000,00	0	7.500.000.000,00	(38,35)
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.439.060.040,00	10.333.346.960,00	8.649.466.400,00	9.682.101.989,00	5.959.327.600,00	(15,04)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.6	Pendapatan Lain – lain-Lainnya	0	0	10.890.251,00	97.951.535,71	1.551.592.334,00	245,49
2	Belanja	581.368.549.681,00	648.463.722.688,49	761.974.080.717,31	1.045.044.740.745,20	963.855.112.821,04	13,47
2.1	Belanja Tidak Langsung	322.641.107.284,00	359.429.802.077,49	396.739.512.910,02	419.575.281.819,79	350.995.366.749,04	2,13
2.1.1	Belanja Pegawai	306.504.980.741,00	346.068.475.052,00	378.136.247.792,12	410.197.733.892,00	332.788.312.856,00	2,08
2.1.2	Belanja Bunga	4.473.037.265,00	7.521.308.867,49	3.154.633.233,90	2.970.714.942,79	2.755.168.538,04	(11,41)
2.1.3	Belanja Subsidi						
2.1.4	Belanja Hibah	10.650.791.993,00	4.844.630.000,00	14.702.686.819,00	5.357.545.000,00	14.412.879.900,00	7,86
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	497.125.000,00	448.675.000,00	96.400.000,00	85.700.000,00	248.500.000,00	(15,92)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	515.172.285,00	546.713.158,00	649.545.065,00	963.587.985,00	772.703.455,00	10,67
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0	0	0	0	17.802.000,00	100
2.2	Belanja Langsung	258.727.442.397,00	289.033.920.611,00	365.234.567.807,29	625.469.458.925,41	612.859.746.072,00	24,06
2.2.1	Belanja Pegawai	29.791.516.441,00	49.006.529.545,00	62.690.483.791,00	73.940.410.990,00	84.506.111.539,00	29,78
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.837.608.277,00	143.604.221.746,00	165.318.208.856,00	197.867.947.268,00	239.787.121.510,00	15,27
2.2.3	Belanja Modal	93.098.317.679,00	96.423.169.320,00	137.225.875.160,29	353.661.100.667,41	288.566.513.023,00	32,69
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	3.825.601.417,91	10.871.156.036,27	54.796.591.740,49	111.281.666.250,18	61.142.126.892,80	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.868.692.792,00	11.912.059.693,86	35.997.373.129,26	11.441.373.129,24	8.572.324.129,24	

Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 perkembangan APBD Kota Palopo mengalami perubahan yang cukup berarti dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 11,50 persen untuk pendapatan dan 13, 47 persen untuk belanja. Pada Tahun 2013 total pendapatan daerah Kota Palopo adalah sebesar Rp 604 Milyar lebih. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar Rp 934 Milyar lebih. Ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Palopo dalam lima tahun terakhir terus mengalami kemajuan yang direpresentasikan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu 7,19 pada tahun 2017.

Dari sisi belanja, belanja daerah Kota Palopo dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 2013 total belanja mencapai Rp 581 Milyar lebih dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp 963 Milyar lebih. Peningkatan belanja ini menggambarkan pengeluaran Pemerintah Kota Palopo dalam membiayai pembangunan semakin besar, yang ditunjukkan dengan belanja modal pada tahun 2013 sebesar Rp93 Milyar lebih meningkat pesat pada tahun 2017 menjadi Rp288 Milyar lebih.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menyajikan kondisi asset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Posisi neraca daerah akan menggambarkan informasi mengenai kondisi keuangan suatu daerah sehingga menjadi salah satu factor penentuan asumsi-asumsi dalam merumuskan kebijakan daerah.

Perkembangan neraca daerah Kota Palopo dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kota Palopo 2013-2017**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
1.1.	ASETLANCAR	19.339.028.083,27	69.153.204.962,30	144.871.206.569,40	101.769.533.438,09	91.728.324.146,76	47,58
1.1.1.	Kas	11.000.891.586,27	54.902.566.624,49	111.217.609.607,18	59.184.225.136,80	22.929.028.173,74	20,15
1.1.3.	Piutang	1.493.188.697,00	5.873.218.075,07	23.519.886.818,13	28.875.441.383,29	44.792.233.356,78	134,03
1.1.4	Penyisihan Piutang	0,00	(1.523.578.411,16)	(2.883.656.750,26)	(2.773.585.014,71)	(3.498.870.889,48)	31,88
1.1.5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	362.529.300,00	409.733.806,35	98.216.487,12	1.621.603.241,73	64,77
1.1.6	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	3.322.256.197,59	406.610.202,67	(87,76)
1.1.7	Persediaan	6.844.947.800,00	9.538.469.373,90	12.607.633.088,00	13.062.979.248,00	25.477.720.061,32	38,90
1.2.	INVESTASI JANGKA	39.095.059.289,78	48.665.698.481,27	90.134.508.991,19	98.434.508.991,19	104.065.459.991,19	27,73
1.2.1	Investasi Non Permanen	593.660.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9,33)
1.2.2	Investasi Permanen	38.501.398.981,78	48.665.698.481,27	90.134.508.991,19	98.434.508.991,19	104.065.459.991,19	28,22
1.3	ASET TETAP	1.081.550.430.223,33	751.128.491.728,20	1.136.710.000.842,94	1.429.699.378.642,52	1.636.982.492.054,14	10,2
1.2.1.	Tanah	209.290.101.061,00	187.592.136.735,00	442.505.201.201,62	452.888.660.032,62	457.900.022.915,79	21,62
1.2.2.	Peralatan dan mesin	185.982.013.751,34	212.725.092.622,55	226.867.517.145,58	268.014.571.102,96	276.066.994.872,57	10,38
1.2.3.	Gedung dan bangunan	338.992.909.101,99	302.408.342.999,99	381.564.474.284,33	434.964.098.108,45	467.150.756.744,13	8,35
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	335.225.629.338,00	377.703.724.013,04	420.233.247.374,62	554.720.072.046,78	789.347.747.893,88	23,87
1.2.5.	Aset tetap lainnya	9.760.183.026,00	12.274.040.561,60	14.993.164.448,60	20.853.861.375,60	28.336.397.718,60	30,53
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	2.299.593.945,00	8.777.867.928,00	15.680.599.286,61	137.435.935.275,30	103.765.834.467,41	159,18
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan	0,00	(350.352.713.131,98)	(365.134.202.898,45)	(439.177.819.299,19)	(485.585.262.558,24)	11,49
1.3.	ASETLAINNYA	169.825.418.553,84	89.639.153.726,00	96.635.466.207,75	92.262.684.182,46	82.648.676.307,49	5,73
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	8.650.495.400,00	8.640.480.400,00	8.961.024.700,00	9.255.652.076,35	9.272.087.660,11	1,75

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.3	Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian		(927.940.200,00)	(4.401.730.830,00)	(8.797.437.287,64)	(9.060.006.309,37)	
1.3.4.	Kemitraan dengan pihak ketiga	60.556.483.629,00	66.293.298.629,00	67.310.858.629,00	67.310.858.629,00	67.310.858.629,00	2,68
1.3.5	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan	88.821.115.452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.	Aset tak berwujud	0,00	0,00	592.261.345,00	1.209.872.000,00	1.299.081.500,00	48,10
1.3.7	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	(445.831.250,00)	(691.461.750,00)	(913.593.500,00)	
1.3.8	Aset Lain-lain	11.797.324.072,00	15.633.314.897,00	24.618.883.613,00	23.975.200.514,75	14.740.248.327,75	5,73
	JUMLAH ASETDAERAH	1.309.809.936.150,22	958.586.548.897,77	1.468.351.182.611,2	1.722.166.105.254,26	1.915.424.952.499,58	9,97
2.	KEWAJIBAN	63.644.464.809,59	52.647.433.521,27	48.996.211.465,72	111.030.874.314,04	111.108.706.361,08	14,95
2.1.	KEWAJIBAN	24.081.828.281,45	16.026.170.122,37	15.316.321.196,06	80.292.357.173,62	83.311.562.349,90	36,38
2.1.1.	Utang	0,00	4.387.239,00	8.492.286,00	2.357.500,00	12.848.236,00	43,07
2.1.2.	Utang Bunga	7.488.930.803,08	810.566.989,93	754.448.888,89	1.397.013.781,81	1.225.057.985,20	(36,32)
2.1.3.	Uang muka dari kas daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	306.299.900,75	428.487.530,67	446.684.723,05	20,76
2.1.5	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah	0,00	2.941.373.129,24	2.941.373.129,22	2.941.373.129,24	2.941.373.129,24	
2.1.6	Utang Belanja	0,00	652.336.296,00	5.200.536.367,00	8.240.049.816,00	1.602.034.036,00	34,92
2.1.7.	Utang	12.220.837.784,51	11.617.506.468,20	6.105.170.624,20	67.283.075.415,90	77.083.564.240,41	58,48
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	39.562.636.528,14	36.621.263.398,90	33.679.890.269,66	30.738.517.140,42	27.797.144.011,18	(8,45)
2.2.1	Utang Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	39.562.636.528,14	36.621.263.398,90	33.679.890.269,66	30.738.517.140,42	27.797.144.011,18	(8,45)
3	EKUITAS DANA	1.246.165.471.340,63	905.939.115.376,50	1.419.354.971.145,5	1.611.135.230.940,22	1.804.316.246.138,50	9,69
4	JUMLAH KEWAJIBAN	1.309.809.936.150,22	958.586.548.897,77	1.468.351.182.611,2	1.722.166.105.254,26	1.915.424.952.499,58	9,97

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah juga dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara komponen laporan keuangan yang satu dengan komponen yang lain. Analisis neraca daerah yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah adalah melalui perhitungan rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).

Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Rumus yang digunakan yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan kemudian dibagi kewajiban jangka pendek.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total asset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total asset digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjamin hutangnya dengan asset/aktiva yang dimiliki, dengan rumus total hutang dibagi total asset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh asset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), dengan rumus total hutang dibagi ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya

Analisis rasio keuangan Pemerintah Kota Palopo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Palopo 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio Lancar(<i>current ratio</i>)	0,80	4,32	9,46	1,27	1,10
2.	Rasio Cepat (<i>quick ratio</i>)	0,52	3,72	8,64	1,10	0,80
B.	Rasio Solvabilitas					
1.	Rasio total hutang terhadap total asset	0,05	0,05	0,03	0,06	0,06
2.	Rasio hutang terhadap ekuitas	0,05	0,06	0,03	0,07	0,06

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan Kota Palopo sebagaimana di tunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwarasio lancar pada tahun 2017 sebesar 1,10. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kota Palopo membayar kewajiban jangka

pendek sebesar 1,10 kali, jadi perbandingan antara asset lancar dengan hutang jangka pendek adalah 1.10 : 1.

Rasio cepat (*quick ratio*) pada tabel di atas menunjukkan angka 0,80. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kota Palopo dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan asset yang lebih likuid pada tahun 2017 adalah sebesar 0,80 kali. Jadi perbandingan antara asset lancar dengan hutang jangka pendek adalah 0,80 : 1

Rasio total hutang terhadap total asset pada tahun 2017 adalah sebesar 0,06 yang artinya bahwa sebesar Rp0,06 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Kota Palopo yang didanai dari hutang sebesar 0,06, sisanya dari modal sendiri (ekuitas).

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang direncanakan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja yang mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Gambaran proporsi realisasi belanja daerah Kota Palopo selama periode 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikutini:

Tabel 3.4. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palopo

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	Tahun anggaran 2015	587.123.323.431	797.971.453.847	73,48
2	Tahun anggaran 2016	840.843.224.980	1.056.486.113.874	79,59
3	Tahun anggaran 2017	709.277.829.489	972.427.436.950	72,94

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, maupun hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain pembayaran hutang, dan penyertaan modal.

Gambaran pembiayaan riil daerah Kota Palopo dari tahun 2015 sampai dengan 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Defisit Riil Anggaran
Kota Palopo Tahun 2015-2017

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	854.330.445.704,26	1.004.346.574.517,06	934.121.533.937,22
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	761.974.080.717,31	1.045.044.740.745,20	963.855.112.821,04
3	Pengeluaran	35.997.373.129,26	11.441.373.129,24	8.572.324.129,24
	Defisit riil	56.358.991.857,69	(52.139.539.357,38)	(38.305.903.013,06)

Pada tahun 2016 dan 2017 terjadi defisit anggaran sehingga diperlukan anggaran penutup defisit. Untuk menutup defisit ini menggunakan SiLPA tahun sebelumnya sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan berkurang sebesar defisit pada masing-masing tahun.

Komposisi penutup defisit riil anggaran menggambarkan persentase komponen penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran. Pada tahun 2016 dan 2017, persentase komponen penutup defisit riil masih di dominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya masing-masing sebesar 213,04 dan 154,39 persen. Ini berarti bahwa komponen SiLPA tahun sebelumnya masih lebih besar dan mampu untuk menutupi defisit riil anggaran sehingga terdapat SiLPA tahun berjalan masing sebesar Rp59 Milyar lebih pada tahun 2016 dan Rp22 Milyar lebih di tahun 2017. Besaran persentase masing-masing komponen penutup defisit riil dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Palopo

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2015(%)	2016(%)	2017(%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	97,15	213,04	154,39
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	5,22
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,08	0,39	0

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selama tahun 2015-2017 diantaranya bersumber dari efisiensi belanja dan kewajiban pihak ketiga sampai akhir tahun belum

terselesaikan. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 3 tahun terakhir (2015-2017) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Palopo Tahun 2015-2017

No.	Uraian	2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	111.155.583.598,18	100	59.142.126.892,80	100	22.836.223.879,74	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	0	0	0	0	0	0
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0	0	0	0	0	0
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0	0	0	0	0
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	4.762.936.316,18	4,28	0	0	0	0
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	106.392.647.282,00	95,72	59.142.126.892,80	100	22.836.223.879,74	100
7.	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0

3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan pedoman umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kemampuan keuangan daerah Kota Palopo dalam periode 5 tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan public secara optimal dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya serta data-data yang mempengaruhi penerimaan daerah antara lain:

- a. Indikator ekonomi makro, meliputi:
 - a) Rata-rata inflasi
 - b) Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi
- b. Kebijakan keuangan daerah

Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kota Palopo tahun 2018-2023 dirumuskan dengan berdasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2013-2017, serta mempertimbangkan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun pusat.

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan di atas adalah:

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan :
 - Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi
 - Intensifikasi pajak dan retribusi daerah
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada tabel 3.8 kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan pada:

1. memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah
4. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem informasi pemungutan pendapatan daerah.

Selanjutnya terkait dengan analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah periode 2018-2023 guna membiayai belanja langsung dan tidak langsung program-program RPJMD. Proyeksi belanja tersebut memperhatikan asumsi-asumsi antara lain sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja daerah Kota Palopo tahun 2013-2017.
- b. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Rumusan kebijakan pembiayaan daerah di Kota Palopo diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus, dan jika terjadi defisit sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

- c. Membentuk dana cadangan jika diperlukan untuk digunakan membiayai kegiatan-kegiatan strategis pemerintah Kota Palopo.

Penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berasal dari penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan berasal dari penerimaan piutang daerah dan pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib seperti pembayaran pokok utang dan penyertaan modal pada BUMD.

Berdasarkan agenda dan prioritas pembangunan sebagaimana tersebut di atas maka proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palopo Periode 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kota Palopo Tahun 2018 s/d Tahun 2023

No.	Uraian	Pertumbuhan%	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	PENDAPATAN	4,03	1,000,607,961,485	1,037,752,202,450	1,077,225,588,450	1,118,136,335,450	1,159,416,744,451	1,205,299,009,451
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	6,75	155,980,189,035	186,122,779,000	198,247,078,000	211,214,198,000	224,264,373,000	241,734,200,000
1.1.1.	Pajak daerah	11,98	29,466,250,000	34,920,407,000	38,905,790,000	43,451,364,000	46,994,407,000	54,901,079,000
1.1.2.	Retribusi daerah	7,15	8,290,744,000	7,361,447,000	7,882,670,000	8,445,713,000	9,054,427,000	9,075,102,000
	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1,87	7,135,170,176	7,261,839,000	7,401,489,000	7,541,140,000	7,680,791,000	7,820,442,000
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	5,52	111,088,024,859	136,579,085,000	144,057,127,000	151,775,979,000	160,534,747,000	169,307,575,000
1.2.	Dana Perimbangan	3,48	755,348,952,000	762,350,603,000	789,699,690,000	817,643,317,000	845,873,551,000	874,285,989,000
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	8,73	20381505000.00	21,875,464,000	23,416,171,000	25,551,419,000	27,973,274,000	30,577,332,000
1.2.2.	Dana alokasi umum	4,26	516167587000.00	567,784,345,000	593,592,725,000	619,401,104,000	645,209,483,000	671,017,863,000
1.2.3.	Dana alokasi khusus	0,00	218,799,860,000	172,690,793,000	172,690,793,000	172,690,793,000	172,690,793,000	172,690,793,000
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	2,04	89,278,820,450	89,278,820,450	89,278,820,450	89,278,820,450	89,278,820,451	89,278,820,451
1.3.1	Hibah	0,00	19,783,200,000	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana darurat	0,00	0	0	0	0	0	0
	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)	2,72	48,389,559,250	43,088,131,000	44,310,510,000	45,532,889,000	46,755,268,000	47,977,647,000
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	0,00	10,250,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000
	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	10,856,061,200	5,959,327,000	5,959,327,000	5,959,327,000	5,959,327,600	5,959,327,000
1.3.6	Pendapatan-lain-lain-Lainnya	0,00	1,551,592,334	1,551,592,000	1,551,592,000	1,551,592,000	1,551,592,000	1,551,592,000

2	BELANJA	(2,31)	1,019,881,163,365	1,040,310,827,450	1,097,547,740,450	1,035,077,362,450	1,083,975,371,451	1,145,857,636,451
2.1	Belanja Tidak Langsung	12,77	435,678,512,822	390,429,866,000	428,295,690,000	456,325,906,000	494,828,115,000	531,954,490,000
2.1.1	Belanja Pegawai	12,42	391,076,923,272	367,126,466,000	398,470,472,000	431,608,558,000	466,666,694,000	503,848,994,000
2.1.2	Belanja Bunga	(20,72)	2,455,000,000	14,376,155,000	20,897,973,000	15,790,103,000	10,734,177,000	5,678,251,000
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	62,66	35,476,158,550	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	25,000,000,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	4,330,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	840,431,000	927,244,000	927,244,000	927,244,000	927,244,000	927,244,000
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	(9,64)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000
2.2	Belanja Langsung	-10,59	584,202,650,543	649,880,961,450	669,252,050,450	578,751,456,450	589,147,256,451	613,903,146,451
2.2.1	Belanja Pegawai	(4,88)	55,267,008,110	29,654,179,000	26,795,676,000	27,500,822,000	28,081,731,000	29,380,644,000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	(9,26)	254,122,427,316	237,233,438,000	214,365,414,000	220,006,578,000	224,653,850,000	235,045,157,000
2.2.3	Belanja Modal	-11,31	274,813,215,117	382,993,344,450	428,090,960,450	331,244,056,450	336,411,675,451	349,477,345,451
3	PEMBIAYAAN							
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	22,836,223,880	5,500,000,000	103,381,125,000	0	0	0
	Pengeluaran Pembiayaan	33,68	3,563,022,000	2,941,375,000	83,058,973,000	83,058,973,000	75,441,373,000	59,441,373,000

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun kedepan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah seta pos-pos mana saja sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kota Palopo Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	Pendapatan	1.006.572.433.000	1.047.268.199.000	1.089.401.325.000	1.131.904.114.000	1.179.008.757.000
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Penerimaan Pembiayaan	0	103.381.125.000			
4.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0	0	0
	Total penerimaan	1.006.572.433.000	1.047.268.199.000	1.089.401.325.000	1.131.904.114.000	1.179.008.757.000
	Dikurangi:					
4.	Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang wajib dan mengikat	1,040,310,827,450	1,097,547,740,450	1,035,077,362,450	1,083,975,371,451	1,145,857,636,451
5.	Pengeluaran Pembiayaan	2,941,375,000	83,058,973,000	83,058,973,000	75,441,373,000	59,441,373,000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	219.825.029.000	177.087.747.000	181.970.697.000	192.054.945.000	209.149.997.000

Pendapatan pada proyeksinya mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga diproyeksikan di akhir tahun 2023 mencapai Rp1.179 Triyun lebih. Selain itu juga diproyeksikan tidak ada sisa lebih perhitungan anggaran setiap tahun. Untuk mengetahui sisa lebih riil penghitungan anggaran maka penerimaan dikurangi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang sifatnya wajib mengikat di tambah pengeluaran pembiayaan. Proyeksi menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan meningkat. Harapannya kapasitas riil dapat optimal untuk alokasi program-program yang dicanangkan pada program prioritas I dan II

Tabel3.10.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Daerah Kota Palopo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kapasitas riilkemampuan keuangan	219.825.029.000	177.087.747.000	181.970.697.000	192.054.945.000	209.149.997.000
1.a	Prioritas I	175.860.023.200	141.670.197.600	145.576.557.600	153.643.956.000	167.319.997.600
1.b	Prioritas II	43.965.005.800	35.417.549.400	36.394.139.400	38.410.989.000	41.829.999.400

Data menunjukkan kerangka pendanaan Pemerintah Kota Palopo mayoritas mengarah pada prioritas I yakni prioritas yang mengarah pada alokasi untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) dan pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah sedangkan prioritas II mengarah pada pemenuhan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datangdengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Tabel 4.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Strategi	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Kebijakan
Belum optimalnya perkembangan kualitas manusia. Meskipun IPM Kota Palopo sudah termasuk kategori tinggi yakni 76,71 (2017), namun dibanding Kota Makassar, IPM Kota Palopo lebih rendah. Pertumbuhannya dari 2016 (76,69) ke 2017 hanya 0,02. Palopo termasuk tiga daerah dengan pertumbuhan IPM terendah. Ini merupakan tantangan bagi Kota Palopo untuk lebih meningkatkan kualitas manusianya khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan	1. Belum optimalnya perkembangan kualitas manusia dari segi pendidikan. Rata-rata lama sekolah (RLS) pada 2016 sebesar 10,26 dan tumbuh menjadi 10,33 pada 2017. Harapan lama sekolah (HLS) pada 2016 sebesar 15,03 dan tumbuh menjadi 15,05 pada 2017. Dibanding kota lain di Sulawesi Selatan dan Indonesia, capaian ini masih rendah. 2. Belum optimalnya perkembangan kualitas manusia dari segi kesehatan. Usia harapan hidup (UHH) pada tahun 2016 sebesar 70,25 dan pada tahun 2017 tumbuh menjadi 70,30. Dibanding kota lain di Sulawesi Selatan dan Indonesia capaian ini belum optimal.	1. Belum meratanya pemenuhan sarana-prasarana serta SDM kependidikan dalam mendukung akses/partisipasi pada pendidikan dasar, pemenuhan layanan minimal pendidikan dasar, dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. 2. Belum meratanya pemenuhan sarana-prasarana serta SDM kesehatan dalam mendukung akses masyarakat atas layanan kesehatan, pemenuhan pelayanan minimal kesehatan, pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat serta belum optimalnya penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.
Belum optimalnya perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran perkapita disesuaikan pada tahun 2017 sebesar 12.319.000, naik dari 12,156.000 pada tahun 2016. Meskipun angka ini sudah di atas rata-rata Sulawesi Selatan tetapi	1. Masih signifikannya populasi penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada 2017 sebesar 8,78%, meningkat dari 2016 yang sebesar 8,74%. Jumlah penduduk miskin juga meningkat, pada 2017 sebanyak 15.440 jiwa, sementara pada 2016 sebanyak 15.020 jiwa 2015 hanya 14.510 jiwa.	1. Stagnasi produksi dan produktivitas serta daya saing produk sektor perekonomian yang banyak menyerap tenaga kerja yakni pertanian tanaman pangan dan perkebunan serta perikanan. 2. Belum optimalnya perkembangan sektor perekonomian sekunder dan tersier

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Strategi	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Kebijakan
dibanding kota lain di Sulawesi Selatan dan Indonesia Kota Palopo masih tertinggal.	2. Masih rendahnya pendapatan masyarakat. Pendapatan perkapita masyarakat pada 2017 sebesar Rp. 37,00 juta/tahun, masih jauh dibawah target PDB per kapita nasional 47,96 juta/tahun dan PDRB per kapita Sulawesi Selatan sebesar 44,06 juta/tahun. 3. Belum optimalnya serapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian. Angka pengangguran Kota Palopo s.d tahun 2017 pada angka 10,96%, 2016 pada angka 14,43% yang masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 dan 2014 yang masing-masing hanya berada pada angka 9,03% dan 8,15%. 4. Pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun terakhir sampai tahun 2017, cenderung fluktuatif, 2017 berada pada angka 7,19%, 2016 pada angka 6,98%, yang menempatkan Palopo sebagai kota yang pertumbuhan ekonominya berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.	- terutama perdagangan, industri dan jasa perkotaan. 3. Belum optimalnya perkembangan investasi dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk pada sektor ekonomi kreatif. 4. Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja karena terbatasnya akses untuk meningkatkan keterampilan kerja dan etos kewirausahaan.
Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah dalam mendukung aksesibilitas dan pemerataan pembangunan.	1. Keterpenuhan sarana dan prasarana aksesibilitas wilayah belum optimal. Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik	1. Terbatasnya kemampuan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan dan belum efektifnya penertiban penggunaan terminal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Strategi	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Kebijakan
	hanya 58,96, sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Jumlah layanan angkutan darat, pengguna terminal dan pelabuhan cenderung stagnan. 2. Keterpenuhan sarana-prasarana perumahan dan pemukiman sudah mencukupi tetapi memerlukan upaya pemeliharaan. Rasio rumah layak huni sebesar 0.168, luas pemukiman kumuh masih tersisa 32,08 Ha, dan masih ada 9.23 rumah tinggal belum bersanitasi dan belum mengakses air bersih.	dan pelabuhan 2. Kurang berkembangnya kesadaran masyarakat atas penataan lingkungan permukiman dan perumahan
Adanya ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam serta potensi peningkatan risiko lingkungan	1. Tingkat tutupan lahan yang terus berkurang. Tutupan lahan hutan dan lahan pertanian serta tutupan lahan pesisir terus mengalami degradasi. 2. Bertambahnya potensi bencana karena kerusakan alam/lingkungan. Jumlah spot/lokasi rawan bencana seperti tanah longsor, banjir, genangan, abrasi, rob, kekeringan dan kebakaran cenderung bertambah.	1. Bertambahnya intensitas konversi lahan pertanian menjadi peruntukan non pertanian serta perambahan atas lokasi hutan. 2. Adanya tekanan ekologi dan sosial pada kawasan pesisir akibat perluasan pemukiman dan perkembangan pusat aktivitas perekonomian. 3. Kurang efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya dalam RTRW. 4. Adanya ancaman pencemaran air serta ketersediaan dan sustainabilitas pasokan sumber air bersih masyarakat 5. Luas dan kualitas Lahan Terbuka Hijau dan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Strategi	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Kebijakan
		Ruang Terbuka Publik belum seimbang dengan pertumbuhan dan kebutuhan serta kondisi penduduk Kota Palopo
Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam pelayanan dasar.	Cakupan 100% terhadap penerima layanan untuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pemukiman dan perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dan sosial sesuai PP 02/2018 belum terpenuhi semua. Ini mencakup urusan pendidikan=pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan; urusan kesehatan= pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita DM, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberculosis, orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia; urusan pekerjaan umum dan penataan ruang= pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; urusan perumahan dan permukiman= penyediaan dan rehabilitasi	1. Tidak tercukupinya kebutuhan sarana/ prasarana, fasilitas, alokasi pembiayaan dan SDM dalam penyelenggaraan SPM pelayanan dasar. 2. Kualitas dan ketersediaan data kinerja SPM serta akuntabilitas kinerja pencapaian SPM pada perangkat daerah penyelenggara urusan masih lemah.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Strategi	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Kebijakan
	rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; urusan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat= pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; urusan sosial=rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, anak telantar di luar panti, lanjut usia telantar di luar panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	
Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.	Transparansi dan kualitas akuntabilitas kinerja masih rendah	1. Kualitas dan ketersediaan data dan informasi pembangunan serta Sistem Informasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Strategi	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Kebijakan
		Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) belum optimal, termasuk pada tingkat OPD. 2. Tingkat kesesuaian dan kualitas perencanaan kinerja tingkat kota dan OPD masih lemah akibat asistensi, verifikasi dan sinkronisasi yang belum memadai. 3. Kualitas SDM perencanaan pada level kota dan OPD belum optimal 4. Kualitas dan transparansi atas proses pengadaan barang dan jasa serta keterbukaan informasi publik lainnya masih terbatas dan belum massive.
	Daya saing daerah masih lemah	1. Pembangunan dilakukan belum fokus pada pengembangan potensi dan pemanfaatan sumber daya lokal yang ada. 2. Fokus dan orientasi pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah termasuk partisipasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangannya masih minim. 3. Pelaksanaan delapan area perubahan reformasi birokrasi dan peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal dalam penerapannya. 4. Pelaksanaan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi belum banyak tersedia

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Strategi	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Kebijakan
		dan dilaksanakan secara massive termasuk peran serta SKPD Kota Palopo. 5. Fokus Kemitraan dan kerjasama daerah belum banyak berorientasi pada peningkatan daya saing daerah dan kurang sinergi dan berkesinambungan.
	Pertumbuhan pendapatan asli daerah sangat lambat	1. Identifikasi potensi-potensi PAD belum optimal seperti pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan kebudayaan serta event sosial dan komunitas yang berpotensi menjadi sumber PAD. 2. Masih ada sumber potensial pendapatan asli daerah yang belum dikelola karena belum memiliki regulasi. 3. Upaya diversifikasi sumber-sumber potensial PAD belum optimal. 4. Belum efisiennya biaya operasional penarikan retribusi daerah, sehingga membutuhkan strategi yang lebih efisien. 5. Partisipasi dan peran OPD pengelola PAD dalam upaya pengembangan sumber PAD belum optimal 6. Upaya pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam peningkatan PAD belum optimal.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Strategi	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Kebijakan
	Pemanfaatan sumber pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah belum optimal	1. Pola pembiayaan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada APBD belum banyak melibatkan pihak swasta (sektor private) dan strategi lain seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk infrastruktur strategis. 2. Pengelolaan belanja OPD kurang berorientasi pada hasil (outcome) yang berbasis pada kinerja, terutama pada program dan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat dan daerah. 3. Pengelolaan aset dan tanah daerah yang belum tertata, rencana pengadaan kebutuhan tanah yang belum terukur, masih banyak tanah/aset Pemkot belum bersertifikat hak milik dan rawan dipersengketakan.
	Kedisiplinan dan kompetensi SDM Aparatur belum optimal	1. Belanja untuk biaya pelatihan dan pendidikan aparatur belum memadai serta kurang fokus pada aspek peningkatan kompetensi aparatur. 2. Pejabat fungsional atau yang memiliki kompetensi keahlian masih sangat minim pada semua OPD. 3. Pejabat struktural masih cukup banyak yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Strategi	Akan Dipecahkan Melalui Rumusan Kebijakan
		kepemimpinan. 4. Pembinaan aparatur perangkat daerah yang berintegritas dan anti korupsi belum optimal

4.2. Permasalahan Untuk Penyelenggaraan Urusan

A. Permasalahan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar

(1) Urusan Pendidikan

1. Penyebaran lembaga dan prasarana pendidikan pada semua jenjang masih banyak terfokus di Kecamatan di dekat wilayah perkotaan.
2. Pertumbuhan jumlah anak usia sekolah pada tingkat pendidikan dasar belum berbanding lurus dengan penyediaan sarana dan prasarana gedung sekolah.
3. Rasio guru dan murid menunjukkan trend negatif dan tidak berimbang, termasuk rasio antara jumlah lulusan pendidikan dasar dengan ketersediaan dan daya tampung gedung sekolah pada jenjang pendidikan di atasnya.
4. Pendidikan non formal dan pendidikan luar biasa belum berkembang dengan baik dan berstandarisasi.
5. Penerapan standar nasional dan standar pelayanan minimal pendidikan masih terbatas pada sekolah di dalam kota sementara di luar kota masih berkutat pada persoalan akses terhadap pendidikan.
6. Penyebaran tenaga pendidik belum merata dan lebih banyak terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di kota, termasuk penyebaran tenaga pendidikan yang bersertifikasi.
7. Penerapan metode pendidikan berkarakter yang mewajibkan siswa muslim lulus baca tulis Al Quran belum konsisten.
8. Pembinaan terhadap kelompok belajar masyarakat belum optimal dalam mendorong pendidikan kesetaraan.
9. Penguatan dan pemberian peran yang lebih besar kepada Dewan Pendidikan belum konsisten.
10. Masih ada kasus pembebanan biaya tambahan pendidikan seperti iuran Komite dan iuran lainnya yang menghambat partisipasi masyarakat dalam akses pendidikan.

(2) Urusan Kesehatan

1. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan belum mencakup seluruh unsur pelayanan yang dipersyaratkan.
2. Partisipasi masyarakat miskin terhadap Jaminan Kesehatan Nasional masih belum memadai, akibat keterbatasan ekonomi.
3. Ketersediaan jumlah angkutan medis (ambulance) dan jangkauan pelayanan masih terbatas.
4. Jumlah dan ketersediaan ruang rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (Rumah Sakit) belum memadai.
5. Rasio jumlah balita dan posyandu dari waktu ke waktu terus menunjukkan trend yang tidak berimbang. Demikian halnya dengan rasio ideal pelayanan dokter umum, dokter spesialis terhadap jumlah pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (RS).
6. Penyebaran dan distribusi keberadaan puskesmas terakreditasi, ketersediaan ruang rawat inap, ketersediaan obat dan peralatan esensial, termasuk perbaikan sarana dan prasarana faskes tingkat pertama lebih banyak terpusat di sekitar kota. Demikian halnya

- dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan anak dan balita termasuk ibu hamil dan melahirkan serta bagi lansia.
7. Koordinasi dengan perangkat daerah lain belum optimal terkait pembukaan dan peningkatan kualitas jalan dari beberapa pemukiman masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan.
 8. Upaya mengembangkan obat asli dengan memanfaatkan potensi lokal belum memadai.
 9. Upaya penanggulangan penyakit menular dan penciptaan lingkungan yang sehat, perbaikan gizi, dan promosi kesehatan lainnya belum optimal.
 10. Standar dan cara pelayanan tenaga kesehatan masih sering dikeluhkan pasien, terutama dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan status RSUD Sawerigading menjadi RS Rujukan di Luwu Raya.
 11. Penyediaan dan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana di RSUD diperhadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

(3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai belum memadai.
2. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir belum optimal.
3. Pembangunan prasarana pengaman pantai belum memadai.
4. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di kawasan pesisir dan daerah luar kota belum memadai dan belum merata.
5. Koordinasi dengan sejumlah stake holder terkait yang membutuhkan penanganan akses jalan dan jembatan, belum terjalin dengan baik seperti akses jalan jembatan ke fasilitas kesehatan, pendidikan, sentra produksi/budidaya.
6. Koordinasi perencanaan dan pemanfaatan serta pengelolaan tata ruang dan perencanaan infrastruktur jaringan belum memadai.
7. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau belum maksimal.
8. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dan pengelolaan serta perlindungan ruang terbuka hijau masih minim.
9. Eksistensi lahan budidaya secara khusus lahan pertanian di Kota Palopo terus tertekan oleh pengembangan sektor lain seperti perumahan dari waktu ke waktu.
10. Jaringan irigasi kabupaten sebagian mengalami kerusakan sehingga kurang efektif dalam layanan air.
11. Kualitas hasil pekerjaan konstruksi belum optimal akibat pembinaan peningkatan kompetensi dan skil tenaga konstruksi intensif.

(4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1. Pengembangan perumahan dan lingkungan sehat perumahan belum optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat yang

- membutuhkan pelayanan perumahan, termasuk masih adanya rumah layak huni.
- 2. Pemberdayaan komunitas perumahan belum memadai dalam penataan pemukiman termasuk penataan lingkungan pemukiman kumuh.
- 3. Pengelolaan areal pemakaman belum optimal
- 4. Belum tercukupinya dukungan prasarana dan sarana umum (PSU) dalam menghadirkan lingkungan perumahan/pemukiman yang sehat dan aman.

(5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1. Upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal kurang bersinergi antar stakeholder
- 2. Fasilitas, sarana-prasarana serta kapasitas SDM Satpol PP dalam penegakan Perda secara menyeluruh belum memadai.
- 3. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban, termasuk pelibatangannya dalam pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) dan menjaga keamanan, belum memadai.
- 4. Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam masyarakat termasuk pada lingkungan perumahan belum memadai.
- 5. Kecukupan sarana dan prasarana serta peralatan penanganan kebakaran belum memadai dalam memenuhi tingkat waktu tanggap (response time rate) yang baik pada wilayah manajemen kebakaran (WMK).
- 6. Kapasitas dalam penyediaan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum berkembang seiring dengan tuntutan/kebutuhan.
- 7. Kapasitas dan kerjasama stakeholder daerah dalam pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat, serta deteksi dini dan pencegahan konflik sosial, masih rendah.

(6) Urusan Sosial

- 1. Data mutakhir untuk keseluruhan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS dalam berbagai kelompok/golongan belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam penanganan PMKS.
- 2. Ketersediaan sumberdaya manusia, finansial dan sarana-prasarana dalam penanganan, pemberian bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS masih terbatas.
- 3. Kemampuan panti sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) dalam penyediaan sarana pelayanan sosial dan prasarana kesejahteraan sosial masih terbatas.
- 4. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, anak terlantar di luar panti, lanjut usia terlantar di luar panti, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, masih terbatas.
- 5. Kemampuan SDM dan sarana-prasarana dalam evakuasi, bantuan

sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana masih terbatas.

B. Permasalahan pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

(1) Urusan Tenaga Kerja

1. Data yang lengkap tentang pekerja dan pencari kerja untuk kepentingan penyaluran pencari kerja, keselamatan dan perlindungan pekerja, serta kepesertaan dalam program Jamsostek belum tersedia secara termutakhirkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja.
3. Cakupan besaran pencari kerja dan tenaga kerja dalam pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan belum memadai.
4. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan belum memadai.

(2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kompetensi dan peluang perempuan untuk bersaing pada pekerjaan di lembaga pemerintah, DPRD dan lembaga swasta belum memadai.
2. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak secara fisik dan psikologis menunjukan trend yang terus meningkat.
3. Kapasitas unit pelayanan terpadu dalam penanganan pengaduan, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan dan layanan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan masih terbatas.
4. Kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum efektif dalam pengintegrasian pada kebijakan dan penganggaran.
5. Kapasitas dalam layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan belum memadai.
6. Akses dan kemampuan perempuan dalam partisipasi pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta pendidikan kesetaraan melek huruf masih tertinggal.

(3) Urusan Pangan

1. Koordinasi dan penanganan daerah rawan dengan stake holder lain yang terkait belum efektif
2. Pemantauan dan analisis akses pangan, harga pangan, cadangan pangan dan pengembangan model distribusi, pemasaran hasil, dan sistem informasi pangan yang efisien belum memadai
3. Diversifikasi pemanfaatan pangan masyarakat belum optimal dalam mendukung pemenuhan pangan berimbang sesuai pola pangan harapan.
4. Sinergi dan koordinasi dengan stake holder terkait dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan belum optimal

(4) Urusan Pertanahan

1. Pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah belum memadai dalam mendukung sertifikasi tanah.
2. Penataan penguasaan, kepemilikan dan penggunaan dan pemanfaatan tanah belum optimal dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tanah negara maupun tanah masyarakat.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi secara bersinergi dengan perangkat daerah lain belum optimal termasuk dalam menyelesaikan izin lokasi.

(5) Urusan Lingkungan Hidup

1. Beberapa spot lokasi di Kota Palopo masih sering dilanda banjir dan di beberapa titik lainnya digenangi air saat musim penghujan tiba serta kebakaran hutan dalam skala kecil pada musim kemarau.
2. Luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan terus bertambah seiring dengan semakin menurunnya daya tampung lingkungan, kapasitas dan kualitas air baku, akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
3. Pengintegrasian RPPLH dan KLHS kedalam dokumen perencanaan daerah belum terukur dan dilengkapi data mutakhir.
4. Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif.
5. Identifikasi, verifikasi, penetapan dan pendampingan masyarakat hukum adat serta kearifan dan pengetahuan lokal terkait pengelolaan lingkungan hidup belum terprioritaskan.
6. Luas area penanganan sampah serta pengurangan sampah melalui mekanisme reduce, reuse dan recycle (3R) masih terbatas.
7. Dampak pemanasan global semakin meningkat dalam kondisi penanganan efek gas rumah kaca belum optimal.

(6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Ketidaktersediaan bahan dan fasilitas menghambat pelayanan penerbitan KTP secara tepat waktu dan memuaskan.
2. Komitmen pelaporan kelahiran dan pengurusan akte kelahiran oleh masyarakat belum maksimal.
3. Kordinasi antar stakeholder dalam penerbitan akte nikah belum optimal.
4. Pelaporan dan pencatatan penduduk datang, pergi dan meninggal belum optimal.

(7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perkantoran kelurahan yang baik belum terpenuhi secara merata termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.
2. Kinerja LPM dalam pemberdayaan masyarakat belum efektif dan merata.
3. Kinerja PKK dalam pembinaan masyarakat belum efektif dan merata.
4. Kapasitas SDM dan perlengkapan pada posyandu berkembang

secara tidak berimbang dengan kebutuhan pelayanan masyarakat khususnya ibu hamil dan bayi.

5. Keswadayaan masyarakat dalam mendorong dan memelihara keberlanjutan pemberdayaan masyarakat belum optimal
6. Kapasitas SDM pemerintahan kelurahan dalam menjalankan kewenangan pemerintahan kelurahan, pembangunan kelurahan, pembinaan kemasyarakatan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan belum mencukupi.

(8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian Penduduk dan kebijakan kependudukan lainnya dalam pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk belum efektif.
2. Pelayanan kontrasepsi belum menjangkau secara menyeluruh pada pasangan usia subur dalam menekan kelahiran anak.
3. Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri serta kesadaran kesehatan reproduksi belum memadai.
4. Bina keluarga balita, keluarga remaja dan keluarga lansia belum didukung oleh tenaga pendamping yang memadai.
5. Model operasional BKB-Posyandu-PADU belum terkoordinasi.

(9) Urusan Perhubungan

1. Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan belum optimal dalam merespons pertambahan kebutuhan angkutan umum, pelayanan terminal dan penataan izin trayek.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ kurang optimal
3. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas belum memadai
4. Pengawasan kelaikan jalan kendaraan angkutan umum belum memadai
5. Pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan belum tergali dengan baik.
6. Uji KIR sesuai standar belum mencakupi semua angkutan umum.
7. Pemenuhan rambu-rambu lalu lintas belum mencakupi sesuai kebutuhan.

(10) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan belum berkembang secara fungsional.
2. Layanan telekomunikasi belum menjangkau semua wilayah.
3. Data tentang kepemilikan masyarakat atas hand-phone/telepon, akses internet dan komputer pribadi belum terpenuhi secara lengkap.
4. SDM bidang teknologi komunikasi dan informasi pada OPD belum terpenuhi.

(11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Iklim usaha kecil dan menengah belum kondusif dan memadai.
2. Kemampuan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM belum memadai

3. Sistem pendukung usaha bagi UMKM belum optimal belum berkembang.
4. Kompetensi dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bagi keaktifan koperasi rendah.
5. Kapasitas SDM, teknologi dan permodalan dalam pengelolaan UKM, lembaga keuangan mikro (LKM) dan BPR terbatas.
6. Daya saing produk usaha mikro dan kecil masih rendah.

(12) Urusan Penanaman Modal

1. Iklim investasi dan realisasi investasi belum didukung oleh kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pengembangan sistem informasi, penyederhanaan prosedur, kajian isentif investasi secara memadai.
2. Ketersediaan data potensi ekonomi daerah yang siap ditawarkan kepada investor nasional dan asing belum lengkap.
3. Upaya promosi dan kerjasama investasipada level domestik dan luar negeri masih minim.
4. Penyiapan potensi sumberdaya dan sarana-prasarana daerah pendukung investasi masih terbatas.
5. Pengembangan data dan informasi statistik daerah terkait investasi belum tersinergikan antar OPD.

(13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Sarana/prasarana serta kordinasi antar elemen pemuda dalam mendorong keaktifan organisasi dan peran serta pemuda belum memadai.
2. Jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda belum memadai.
3. Sarana/prasarana serta fasilitas olah raga serta pelatih cabang olah raga dalam mendorong atlet/cabang olah raga berprestasi masih terbatas.
4. Kebijakan dan manajemen serta pemasyarakatan olahraga belum memadai

(14) Urusan Statistik

1. Belum tersedianya data lengkap berdasarkan indikator kinerja kunci masing-masing perangkat daerah.
2. Terlambatnya ketersediaan data umum kondisi daerah yang termuat dalam “Kabupaten dalam Angka”, “PDRB” dan “IPM Daerah” sehingga kurang mutakhir dijadikan dasar dalam perencanaan tahunan.
3. Upaya pengembangan data/informasi/statistik daerah belum terkoodinasi dan masih sektoral, dimana data statitik daerah masih bervariasi pada tingkat PD, bahkan terkadang multi interpretasi.
4. Pemanfaatan informasi dan teknologi digital berbasis web dalam pengelolaan data statitik daerah belum signifikan.

(15) Urusan Persandian

1. Kelembagaan dan arah pengembangan dan pengelolaan SDM persandian daerah belum terstruktur secara massive dan terkoordinasi dengan baik.
2. Penggunaan sandi belum termanifestasikan dalam komunikasi perangkat daerah

(16) Urusan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya belum berlangsung secara berkala
2. Benda, situs dan kawasan cagar budaya belum dikelola secara sistematis dalam kerangka pelestarian.
3. Ketersediaan data karya budaya untuk kepentingan inventarisasi dan revitalisasi belum akurat dan komprehensif.

(17) Urusan Perpustakaan

1. Budaya baca dan pembinaan perpustakaan di sejumlah lembaga pendidikan belum memadai dan belum merata.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan minat baca masyarakat masih sangat kurang.
3. Kualitas SDM (pustakawan, tenaga teknis, dan penilai) dalam pengelolaan perpustakaan daerah masih rendah.
4. Cakupan materi dan jumlah unit pada koleksi buku perpustakaan daerah masih terbatas.

(18) Urusan Kearsipan

1. Cakupan dan kualitas penerapan pengelolaan arsip secara baku pada perangkat daerah belum menyeluruh.
2. Jumlah dan kualitas SDM pengelola kearsipan belum cukup untuk mendukung perbaikan sistem kearsipan, penyelamatan dokumen daerah dan pemeliharaan sarana prasarana kearsipan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi digital dalam pengelolaan kearsipan belum memadai.

C. Urusan Pilihan

(1) Urusan Pariwisata

1. Destinasi wisata yang ada belum tertata mengikuti perkembangan kontemporer kepariwisataan dan masih ada potensi destinasi wisata yang belum dikembangkan.
2. Pemasaran dan jaringan kemitraan kepariwisataan belum efektif mendukung peningkatan jumlah pengunjung wisata.
3. Pengembangan komunikasi dan informasi dalam promosi kepariwisataan masih minim.
4. Penerimaan dan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB belum optimal.
5. Pengintegrasian ekonomi kreatif sebagai salah satu fokus komoditas penunjang kepariwisataan masih terkendala dengan belum tersedianya lokasi yang memadai.
6. Pendayagunaan keindahan alam dan lingkungan hidup sebagai salah satu potensi wisata belum optimal.

(2) Urusan Pertanian

1. Penerapan teknologi dan ketersediaan sarana prasarana pendukung

- pertanian, peternakan dan perkebunan masih terbatas.
2. Eksistensi lahan pertanian produktif terus terancam akibat pengembangan pembangunan sektor lain.
 3. Pengolahan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum optimal
 4. Jaringan dan kemitraan usaha baik produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perkebunan belum memadai
 5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan sektor pertanian secara luas masih minim
 6. Kualifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam mendukung peningkatan produktivitas usahatani masih rendah.

(3) Urusan Perdagangan

1. Simpul distribusi dan sentra ekonomi masyarakat lainnya masih jauh dari kondisi nyaman
2. Kelembagaan dan kemitraan perdagangan belum optimal
3. Pengawasan mutu dan peredaran barang yang beredar belum memadai dan terkoordinasi baik dengan PD lainnya.
4. Perlindungan atas konsumen belum optimal
5. Pembinaan terhadap personal dan kelembagaan pedagang kaki lima dan asongan belum optimal.
6. Data tentang pedagang/usaha informal belum tersedia dengan cukup sebagai dasar dalam pembinaan.

(4) Urusan Perindustrian

1. Data potensi dan karakteristik usaha kelompok pengrajin belum tersedia dengan cukup.
2. Kluster industri kecil dan menengah dalam suatu kawasan industri belum berkembang dengan optimal.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan sinergi antar pihak dalam pengembangan industri belum memadai.

(5) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Kapasitas perahu dan teknologi penangkapan ikan belum berkembang mengikuti tuntutan baru dalam modernisasi perikanan.
2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan masih minim.
3. Kelompok nelayan belum berkembang optimal sebagai wahana peningkatan produksi dan edukasi bagi penangkapan yang ramah lingkungan
4. Kesejahteraan nelayan lapisan bawah masih rendah dan memiliki kesenjangan yang tinggi dengan nelayan lapis atas.

D. Penunjang Urusan

(1) Perencanaan

1. Kualitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah masih sangat terbatas
2. Ketersediaan data sesuai indikator kinerja kunci berbagai urusan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah masih terbatas.
3. Perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penyelenggaraan urusan oleh perangkat daerah belum akurat dan tepat waktu.

4. Pembahasan prioritas Renja/RKPD dalam proses musrenbang RKPD belum substantif berbasis fakta.
5. Penjabaran konsistensi RPJMD ke dalam RKPD dan RKPD kedalam APBD belum akurat.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam membangun konsistensi RTRW belum akurat dan menyeluruh.

(2) Keuangan

1. SDM berkualitas pada OPD dalam analisis dan pelaporan keuangan masih terbatas.
2. Porsi SILPA dalam penyelenggaraan keuangan daerah masih signifikan.
3. Program/kegiatan yang tidak berjalan karena keterbatasan realisasi anggaran masih ada.
4. Pendapatan Asli Daerah masih sangat minim dan masih sangat tergantung pada Dana Alokasi Umum.

(3) Kpegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Kebutuhan dana untuk pendidikan dan pelatihan formal, structural dan fungsional bagi ASN tidak mencukupi sesuai tingkat kebutuhan ASN.
2. Penyelenggaraan tugas jabatan fungsional pada beberapa PD belum optimal dalam peningkatan capaian kinerja.

(4) Penelitian dan Pengembangan

1. SDM dan sarana/prasarana kelitbangan daerah belum memadai dalam mendukung kegiatan kelitbangan
2. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas.
3. Iklim pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah belum berjalan dengan baik.

(5) Pengawasan

1. Temuan pelanggaran administrative dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pada perangkat daerah masih signifikan.
2. Penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK belum maksimal.

(6) Sekretariat Dewan

1. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD belum akurat.
2. Program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan fungsi anggaran belum sepenuhnya terintegrasi dalam RPJMD dan RKPD.

(7) Sekretariat Daerah

1. Perumusan kebijakan dan kordinasi administrasi belum sepenuhnya efektif mendukung penyelenggaraan urusan.
2. Penyelenggaraan kegiatan antara sekretariat daerah dengan perangkat daerah sering tumpang tindih.

(8) Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan belum

- sepenuhnya efektif.
2. Fungsi kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan PD di kecamatan, penerapan dan penegakan Perda belum sepenuhnya efektif.
 3. Fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di kelurahan belum sepenuhnya efektif.
 4. Fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan fasilitas pelayanan umum belum sepenuhnya efektif di kelurahan.

4.3. Analisa Isu Strategis

4.3.1. Identifikasi Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam menentukan tujuan jangka menengah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis ini dianalisis pada level internasional/global, nasional dan daerah. Adapun isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah Kota Palopo yang perlu mendapat perhatian ke depan serta faktor penentu keberhasilan dalam penanganannya dapat dilihat pada tabel 4.2 :

Tabel 4.2
Identifikasi Isu Strategis

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
Tingkat Internasional:		
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Kemiskinan perkotaan (T1)	Kordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kantong-kantong kemiskinan di perkotaan
	2. Gizi, pangan dan pertanian berkelanjutan (T2)	Penanganan gizi masyarakat, ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan
	3. Kehidupan sehat pada semua usia (T3)	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan serta pengembangan pola hidup sehat dalam masyarakat
	4. Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan (T4)	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan dan perbaikan capaian akreditasi SD dan SMP
	5. Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (T5)	Kebijakan dan penganggaran sensitif gender serta perlindungan perempuan dan dari korban kekerasan
	6. Air bersih dan sanitasi (T6)	Penyediaan air bersih dan sanitasi total berbasis masyarakat

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
	7. Kesempatan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak (T8)	Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing tenaga kerja
	8. Infrastruktur, industri dan inovasi (T9)	Pengembangan kawasan industri, infrastruktur wilayah dan inovasi daerah
	9. Kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan (T10)	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kelurahan tertinggal
	10. Pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (T11)	Bedah rumah dan pembangunan PSU pada pemukiman kumuh
	11. Limbah B3 dan timbunan sampah (T12)	Penanganan limbah B3 dan daur ulang sampah
	12. Perubahan iklim (T13)	Penurunan emisi gas rumah kaca
	13. Penangkapan ikan dalam batasan biologis aman (T14)	Sosialisasi dan penyadaran tentang batasan biologis aman dalam penangkapan ikan
	14. Pemeliharaan tutupan lahan (T15)	Pemantauan dan pengendalian tutupan lahan
	15. Konflik dan Tatakelola Pemerintahan (T16)	Penanganan konflik dan Reformasi Birokrasi
	16. Pendapatan Pemerintah Daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah
Masyarakat Ekonomi Asean	1. Daya saing produk dalam masyarakat ekonomi Asean	Peningkatan daya saing produk
	2. Daya saing tenaga kerja dalam masyarakat ekonomi Asean	Peningkatan daya saing tenaga kerja
Tingkat Nasional:		
Prioritas pembangunan nasional	1. Revolusi mental	Pembangunan sosial budaya dan mental spiritual
	2. Pendidikan	Pendidikan vokasi, kualitas guru dan pencapaian SPM
	3. Kesehatan	Pola hidup sehat dan pencapaian SPM
	4. Infrastruktur	Infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman
	5. Kemandirian pangan	Pembangunan pertanian berkelanjutan
	6. Kemandirian energi dan ketenagalistrikan	Pengembangan energi terbarukan
	7. Kemaritiman dan kelautan	Pembangunan tol laut dan

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
		perikanan
	8. Industri dan pariwisata	Pembangunan kawasan industri dan pariwisata
	9. Pemerataan antar kelompok pendapatan	Penanggulangan kemiskinan
	10. Pembangunan kelurahan	Perbaikan kualitas pemanfaatan dana desa
	11. Pembangunan perbatasan	Pembangunan wilayah perbatasan antar negara
	12. Pembangunan daerah tertinggal	Pembangunan kabupaten tertinggal
	13. Pembangunan perkotaan	Pembangunan pemukiman kumuh perkotaan
	14. Kepatuhan dan penegakan hukum	Penegakan hukum
	15. Keamanan dan ketertiban	Penanganan pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keamanan
	16. Politik dan demokrasi	Penyelenggaraan kegiatan politik dan demokrasi
	17. Tata kelola dan reformasi birokrasi	Perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi
Tingkat Daerah:		
Permasalahan Pembangunan Daerah	1. Pendidikan	Pembangunan pendidikan
	2. Kesehatan	Pembangunan kesehatan
	3. Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
	4. Infrastruktur wilayah	Pembangunan transportasi, perhubungan, pemukiman dan perumahan
	5. Lingkungan hidup	Penanganan tutupan lahan dan pengendalian pen-cemaran
	6. Tatakelola pemerintahan	Perbaikan sistem akunta-bilitas kinerja
	7. Pelayanan publik	Pemenuhan standar pe-layanan minimal
	8. Ketertiban, ketentera-man dan konflik sosial	Penegakan ketertiban dan ketenteraman serta pe-nanganan konflik sosial

4.3.2. Pembobotan Isu Strategis

Untuk menemukan isu strategis secara terprioritaskan maka diperlukan kriteria prioritisasi dan proses menilai isu berdasarkan kriteria tersebut. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas untuk dijadikan dasar

perumusan visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Adapun kriteria yang digunakan untuk memprioritisasi isu strategis RPJM Kota Palopo dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Kriteria dan Bobot Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	15
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab/kewenangan pemerintah kota	30
3.	Memiliki dampak terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5.	Memungkinkan untuk ditangani	15

Berdasarkan kriteria tersebut maka dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria berdasarkan bobot masing-masing kriteria sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4. Nilai yang diberikan terhadap setiap kriteria antara 10 sampai 100.

Tabel 4.4
Nilai Bobot Kriteria

No.	Isu Strategis	Nilai Bobot Kriteria					Total Skor dan Ranking
		1=15	2=30	3=20	4=20	5=15	
1.	Kemiskinan	80x15=1.200	70x30=2.100	85x20=1.700	80x20=1.200	70x15=1.050	7.250 (19)
2.	Gizi dan pangan	75x15=1.125	70x30=2.100	75x20=1.500	65x20=1.300	70x15=1.050	7.075 (20)
3.	Pertanian berkelanjutan	75x15=1.125	70x30=2.100	80x20=1.600	80x20=1.600	75x15=1.125	7.550 (14)
4.	Kesehatan	83x15=1.245	90x30=2.700	85x20=1.700	80x20=1.600	77x15=1.155	8.400 (2)
5.	Pendidikan	85x15=1.275	90x30=2.700	87x20=1.740	82x20=1.640	77x15=1.155	8.510 (1)
6.	Gender dan perlindungan anak	70x15=1.050	75x30=2.250	72x20=1.440	70x20=1.400	77x15=1.155	7.295 (17)
7.	Air bersih dan sanitasi	73x15=1.095	87x30=2.610	75x20=1.500	72x20=1.440	77x15=1.155	7.800 (12)
8.	Kesempatan kerja dan pengangguran	77x15=1.155	76x30=2.280	80x20=1.600	82x20=1.640	78x15=1.170	7.845 (11)
9.	Infrastruktur daerah	80x15=1.200	88x30=2.640	88x20=1.760	82x20=1.640	72x15=1.080	8.320 (6)
10.	Kesenjangan pendapatan	78x15=1.170	70x30=2.100	73x20=1.460	72x20=1.440	73x15=1.095	7.265 (18)
11.	Pemukiman dan perumahan	79x15=1.185	88x30=2.640	83x20=1.660	79x20=1.580	74x15=1.110	8.175 (8)
12.	Sampah dan limbah	71x15=1.065	71x30=2.130	80x20=1.600	76x20=1.520	77x15=1.155	7.470 (15)
13.	Perubahan iklim	75x15=1.125	70x30=2.100	78x20=1.560	75x20=1.500	68x15=1.020	7.305 (16)
14.	Penangkapan ikan ramah lingkungan	73x15=1.095	50x30=1.500	75x20=1.500	70x20=1.400	55x15=825	6.320 (25)
15.	Pemeliharaan tutupan lahan	75x15=1.125	55x30=1.650	78x20=1.560	70x20=1.400	60x15=900	6.635 (23)
16.	Tatakelola dan reformasi birokrasi	83x15=1.245	90x30=2.700	85x20=1.700	81x20=1.620	75x15=1.125	8.390 (3)
17.	Pendapatan pemerintah daerah	71x15=1.065	82x30=2.460	85x20=1.700	83x20=1.660	65x15=975	7.950 (10)
18.	Pelayanan publik dan pemenuhan SPM	80x15=1.200	91x30=2.730	85x20=1.700	80x20=1.600	75x15=1.125	8.355 (4)
19.	Ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	76x15=1.140	91x30=2.730	86x20=1.720	76x20=1.520	77x15=1.155	8.265 (7)
20.	Revolusi mental dan pengembangan budaya	80x15=1.200	78x30=2.340	77x20=1.540	75x20=1.500	78x15=1.170	7.750 (13)

No.	Isu Strategis	Nilai Bobot Kriteria					Total Skor dan Ranking
		1=15	2=30	3=20	4=20	5=15	
21.	Kemandirian pangan	87x15=1.305	82x30=2.460	90x20=1.800	82x20=1.640	75x15=1.125	8.330 (5)
22.	Industri	88x15=1.320	75x30=2.250	85x20=1.700	89x20=1.780	70x15=1.050	8.100 (9)
23.	Pariwisata	75x15=1.125	70x15=1.050	70x20=1.400	70x20=1.400	72x15=1.080	6.055 (28)
24.	Pembangunan perkotaan	75x15=1.125	72x15=1.080	83x20=1.660	90x20=1.800	73x15=1.095	6.760 (21)
25.	Kemandirian energi dan ketenagalistrikan	83x15=1.245	50x15=750	77x20=1.540	83x20=1.660	60x15=900	6.095 (27)
26.	Kemaritiman dan kelautan	85x15=1.275	50x15=750	65x20=1.300	77x20=1.540	65x15=975	5.840 (30)
27.	Politik dan demokrasi	75x15=1.125	60x15=900	80x20=1.600	75x20=1.500	67x15=1.005	6.130 (26)
28.	Konflik sosial	70x15=1.050	80x15=1.200	85x20=1.700	77x20=1.540	67x15=1.005	6.495 (24)
29.	Kepatuhan dan penegakan hukum	73x15=1.095	52x15=780	83x20=1.660	74x20=1.480	68x15=1.020	6.035 (29)
30.	Inovasi daerah	75x15=1.125	77x15=1.155	77x20=1.540	89x20=1.780	72x15=1.080	6.680 (22)

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai gambaran tentang kondisi Kota Palopo yang diharapkan terwujud/tercapai pada akhir periode 2018-2023. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasannya dijabarkan sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kota Palopo 2005-2025, Visi RPJPD Kota Palopo 2005-2025 yakni **“Menjadi Kota Moderen Terkemuka di Kawasan Timur Indonesia yang Berbasis Potensi Sumberdaya dan Kearifan Lokal serta Bernafaskan Religi dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”** yang dicapai dengan melaksanakan 7 misi yakni :

1. Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemandirian pembangunan
2. Mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan profesionalisme aparatur, kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.
3. Mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
4. Meningkatkan hubungan sinergitas dan kerjasama daerah
5. Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM serta menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan jasa pelayanan industri dan kepariwisataan serta pelestarian budaya daerah
7. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Visi Kota Palopo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023”.

Pada Visi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak ke arah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu member solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya lokal

Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

5.2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut diatas dan sebagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018 – 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;
5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

Tabel 5.1
Penjelasan Misi dan Keterkaitan dengan Visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Misi ini bermakna bahwa pembangunan manusia dilaksanakan melalui intervensi sektor pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan perlindungan sosial masyarakat, utamanya bagi kelompok-kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok minoritas.	Maju
2	Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Misi ini bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup.	Berkelanjutan dan Maju
3	Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan	Modernisasi layanan public bermakna bahwa pelaksanaan layanan public diubah menjadi lebih inovatif, professional, serta efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan	Inovatif

No.	Misi	PenjelasanMisi	Pokok Visi
		penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan public dalam pembangunan.	
4	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan kerja didorong pada sector usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat.	Maju
5	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sector pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu yang berdimensi religi (agama).	Maju dan Berkelanjutan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Jumlah tujuan pembangunan Kota Palopo sebanyak 5 (lima) dan sasaran sebanyak 11 (sebelas)

Perumusan tujuan dan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain menerjemahkan visi/misi, perumusan tujuan dan sasaran juga dimaksudkan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis daerah, dan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palopo 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kota Palopo Tahun 2018-2023

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023										
Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan										
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)		1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	76.71	77.86	77.98	78.4	78.82	79.25	79.25
	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	2	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.33	10.36	10.39	10.45	10.48	10.56	10.56
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	3	Angka Harapan Hidup	70.3	70.32	70.34	70.36	70.38	70.4	70.4
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	4	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.78	8.1	7.64	7.15	6.63	6.08	6.08
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau										
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)		5	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	n/a	80	81	82	83	84	84
	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	6	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	1.2	0	0	0	0	0	0
	Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah	7	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	9.9	11.02	11.47	12	12.53	12.86	12.86

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
	serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)									
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	8	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	20.47	18	15	10	7	2	2
		9	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.72	76.83	76.93	76.98	77.10	77.20	77.20
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan										
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)		10	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	62,44	64	66	68	70	72	72
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	11	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	40.33	70	75	80	85	85	85
		12	Level SPIP Daerah (Point)	2.86	3	3	3	3	3	3
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	79.9	80.78	81.12	81.28	81.89	82.03	82.03
Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis										
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)		14	Pertumbuhan PDRB (%)	7.19	7.14	7.16	7.18	7.2	7.22	7.22

Misi/Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.96	9.81	9.51	9.03	8.55	8.07	8.07
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	16	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37	37.1	37.3	37.5	37.6	37.8	37.8
Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu										
Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)		17	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	1.21 (2016 : Pariwisata Saja)	2	2.2	2.4	2.5	2.6	2.6
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	18	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	0.24	0.24
		19	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.77	2.80	2.82	2.84	2.86	2.88	2.88

5.4. Sinergitas Visi Misi Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan Nasional

Sinergitas Visi Misi RPJMD Kota Palopo Terhadap Provinsi dan Nasional

Visi Misi Kota Palopo	Visi Misi Sulsel	Visi Misi Nasional
Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023	Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter	Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong
1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan; 2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penebatan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau; 3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan; 4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis; 5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.	1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif 2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel 3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif 4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter 5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan 2. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara dan upaya Pemerintah Kota Palopo mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berguna sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi Kota Palopo secara berkelanjutan.

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, **strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu atau lebih sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Dalam kaitan ini, arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis, ini dijalankan melalui program pembangunan daerah dan program prioritas berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Perencanaan strategik ini didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui program prioritas masing-masing urusan. Dalam perumusan strategi pembangunan daerah ada empat perspektif yang digunakan dalam mengarahkan keselarasan dengan pilihan program pembangunan daerah yakni (1) perspektif masyarakat/layanan; (2) perspektif proses internal; (3) perspektif kelembagaan; (4) perspektif keuangan.

Berikut adalah Tabel Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Strategi untuk mencapai setiap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Pemerintah Kota Palopo 2018-2023.

**Tabel 6.1. Rumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota
Palopo 2018-2023**

Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023		
Tujuan	Sasaran	Strategi

Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan		
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S.1)	Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan secara proporsional dengan meningkatkan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan (Stra (Stra. 1)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.2)	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien (Stra 2)
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (S.3)	Meningkatkan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang beriringan dengan pengendalian penduduk serta meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sinergitas penanganan kesejahteraan sosial (Stra 3)
Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau		
Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman secara beriringan dengan upaya menata dan mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif. (Stra 4)
	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (S.5)	Mengembangkan infrastruktur strategis perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usaha serta kawasan produktif daerah yang ada (Stra 5)
	Meningkatnya Kualitas	Meningkatkan Kerjasama

Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023		
Tujuan	Sasaran	Strategi
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (S.6)	Pengelolaan Lingkungan dan Memantapkan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian & Pemanfaatan ruang (Stra 6)
Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan		
Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (S.7)	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan dengan prinsip e government dengan memantapkan regulasi, struktur, tata kelola layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah yang dibarengi dengan pemantapan kualitas SDM, kinerja aparatur serta sarana dan prasarana yang ada (Stra 7)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.8)	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan Publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan standarisasi pelayanan yang beriringan dengan upaya pemantapan sarana dan prasarana, Inovasi , Teknologi Sistem Layanan dan Aksesibilitas Publik Atas Layanan dengan Penerapan Prinsip Smart City (Stra 8)
Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis		
Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Berusaha dan Produktifitas Tenaga Kerja (S.9)	Mengembangkan Sistem Layanan dan Kerjasama Daerah dalam hal Ketenagakerjaan dan Penyediaan Lapangan Kerja serta Peningkatan SDM Angkatan Kerja yang disertai dengan pengembangan Promosi,

Visi : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		Sarana Prasarana dan Kualitas Daya Dukung Investasi (Stra 9)
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (S 10)	Mengembangkan Produksi dan Produktifitas Daerah, Memperkuat Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Produktif Masyarakat disertai peningkatan Skala Usaha dan Aksesibilitas Kelembagaan Usaha Masyarakat serta pengembangan industri unggulan dan industri potensial lainnya (Stra 10)
Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu		
Terwujudnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing (T.5)	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah (S.11)	Meningkatkan daya saing pariwisata disertai dengan peningkatan SDM, Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan ikut menguatkan dan mengembangkan sarana prasarana, kerjasama dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah (Stra 11)

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan

harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan pembangunan Kota Palopo periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Palopo 2018-2023

Strategi	Arah Kebijakan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan secara proporsional dengan meningkatkan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan (Stra 1)	Peningkatan akses, cakupan, kualitas layanan & tenaga pendidikan, serta SPM Pendidikan	Peningkatan partisipasi kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan, serta SPM Pendidikan	Akselerasi peningkatan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan serta SPM Pendidikan	Pemantapan tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan serta SPM Pendidikan	Optimalisasi tata kelola dan kualitas layanan pendidikan, keberlanjutan pendidikan, serta SPM Pendidikan
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien (Stra 2)	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan (UHC) dan seluruh sumber daya kesehatan serta SPM Kesehatan	Akselerasi cakupan dan kualitas serta tata kelola pelayanan kesehatan serta pemenuhan UHC serta SPM Kesehatan	Pemantapan sarana prasarana kesehatan, kualitas layanan dan optimalisasi UHC serta SPM Kesehatan	Optimalisasi sarana prasarana kesehatan, kualitas layanan dan UHC serta SPM Kesehatan	Pemantapan Pemenuhan Cakupan, dan Layanan Kesehatan UHC yang Berkualitas serta SPM Kesehatan
Meningkatkan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang beriringan dengan pengendalian penduduk serta meningkatkan partisipasi, kerjasama dan sinergitas penanganan kesejahteraan sosial (Stra 3)	Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, Kelompok Rentan serta PMKS yang Berbasis Data BDT (Basis Data Terpadu) dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang	Akselerasi Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan Kelompok Rentan Berbasis Rumah	Pemantapan Upaya Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan Kelompok Rentan yang Berbasis	Optimalisasi Upaya Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, PMKS Berbasis BDT (Basis Data Terpadu/SPKD), dan Pembinaan Kelompok Rentan yang Berbasis	Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat dan Pro Poor Bagi Fakir Miskin, PMKS dan Kelompok Rentan yang Responsif Gender serta SPM Sosial

Strategi	Arah Kebijakan				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Responsif Gender, serta SPM Sosial	Tangga/Keluarga yang Responsif Gender serta SPM Sosial	Komunitas/Pemberdayaan Masyarakat yang Responsif Gender serta SPM Sosial	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro yang Responsif Gender serta SPM Sosial	
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman secara beriringan dengan upaya menata dan mengembangkan potensi kawasan hunian untuk produktif. (Stra 4)	Pemenuhan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses Terhadap perumahan dan permukiman layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman serta SPM Perumahan Pemukiman	Optimalisasi Pemenuhan Sanitasi dan Pemukiman Layak dan Pencegahan Munculnya Kawasan dan Rumah Tangga Kumuh SPM Perumahan Pemukiman	Pemantapan Akses dan Kualitas Sanitasi, Akses Terhadap perumahan dan permukiman layak serta Penataan Perumahan & Pemukiman yang Sehat dan Produktif SPM Perumahan Pemukiman	Akselarasi Peningkatan Kawasan Hunian Produktif Tanpa Kumuh dengan Akses Sanitasi dan Cakupan Rumah Layak Huni, SPM Perumahan Pemukiman	Akselarasi Peningkatan Kawasan Hunian Sehat Produktif, dan Optimalisasi Peran Serta Stake Holder, iKemitraan, dengan lembaga filantropi/donor serta SPM Perumahan Pemukiman
Mengembangkan infrastruktur strategis perkotaan yang beriringan dengan pengembangan usaha serta kawasan produktif daerah yang ada (Stra 5)	Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lainnya Terutama Provinsi dalam pembukaan dan perbaikan infrastruktur wilayah serta SPM PU PR	Peningkatan jangkauan, kualitas dan kemantapan jalan di daerah dan fasilitas perkotaan lainnya serta SPM PU PR	Penyediaan sarana dan prasarana serta cakupan fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR	Pemantapan kapasitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR	Optimalisasi kapasitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas Infrastruktur Perkotaan serta SPM PU PR
Meningkatkan Pengelolaan	Peningkatan Upaya	Akselarasi Upaya	Pemantapan Upaya	Optimalisasi Upaya	Peningkatan

Strategi	Arah Kebijakan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lingkungan dan Memantapkan Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian & Pemanfaatan ruang (Stra 6)	Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir, serta SPM Kebencanaan dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir, serta SPM Kebencanaan dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan, serta SPM Kebencanaan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta SPM Kebencanaan	Penanganan/Pengurangan Luas Terdampak Banjir dan Genangan serta Peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta SPM Kebencanaan	pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang DAS dan Tata Kelola dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau serta SPM Kebencanaan
Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan dengan prinsip e government dengan memantapkan regulasi, struktur, tata kelola layanan sistem serta kinerja pemerintah daerah yang dibarengi dengan pemantapan kualitas SDM, kinerja aparatur serta sarana dan prasarana yang ada (Stra 7)	Peningkatan Tata Kelola Layanan Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	Akselerasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur	Pemenuhan Tata Kelola Pemerintahan, Kinerja, Sarana dan Prasarana, dan Kapasitas SDM Aparatur yang Berkualitas
Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pelayanan Publik, penguatan sistem/regulasi dan penegakan standarisasi pelayanan yang beriringan dengan upaya pemantapan sarana dan prasarana, Inovasi , Teknologi Sistem Layanan dan Aksesibilitas Publik Atas Layanan dengan Penerapan Prinsip Smart City (Stra 8)	Penataan dan peningkatan layanan dasar maupun layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Akselerasi layanan dasar maupun layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pemantapan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Optimalisasi layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pemantapan pemenuhan layanan dasar maupun kualitas layanan publik lainnya yang didasari dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik

Strategi	Arah Kebijakan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mengembangkan Sistem Layanan dan Kerjasama Daerah dalam hal Ketenagakerjaan dan Penyediaan Lapangan Kerja serta Peningkatan SDM Angkatan Kerja yang disertai dengan pengembangan Promosi, Sarana Prasarana dan Kualitas Daya Dukung Investasi (Stra 9)	Pembukaan dan Peningkatan Upaya Fasilitasi Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha,	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Kerja (Life Skill) dan Peningkatan Rasio Daya Derap Tenaga Kerja,	Peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui Pelatihan Kerja (Life Skill), Peningkatan Kualitas Pelayanan Investasi, Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Produktif	Akselerasi Penyediaan Lapangan Kerja, Kualitas Tenaga Kerja dan Kesesuaian Kompetensi Angkatan Kerja dengan Kebutuhan Lapangan Kerja.	Optimalisasi Penyediaan Lapangan Kerja, Kualitas Tenaga Kerja dan Kesesuaian Kompetensi Angkatan Kerja dengan Kebutuhan Lapangan Kerja.
Mengembangkan Produksi dan Produktifitas Daerah, Memperkuat Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Produktif Masyarakat disertai peningkatan Skala Usaha dan Aksesibilitas Kelembagaan Usaha Masyarakat serta pengembangan industri unggulan dan industri potensial lainnya (Stra 10)	Peningkatan produksi komoditas daerah	Peningkatan Nilai Tambah Produk	Peningkatan Daya Saing Produk/Komoditas Daerah.	Optimalisasi Daya Saing Produk/Komoditas Daerah.	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat dan Daerah
Meningkatkan daya saing pariwisata disertai dengan peningkatan SDM, Kelembagaan, Penguasaan Teknologi dan Iklim Usaha yang Kondusif dengan ikut menguatkan dan mengembangkan sarana prasarana, kerjasama dan pemasaran produk ekonomi kreatif daerah (Stra 11)	Peningkatan Pembinaan Kapasitas Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan	Akselerasi Pembinaan Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan	Pemantapan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta Kelembagaan	Optimalisasi Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan Infrastruktur serta	Pengembangan Pembinaan Kapasitas Pelaku Usaha, Permodalan/Pembiayaan, Pemasaran, Teknologi dan

Strategi	Arah Kebijakan				
	2019	2020	2021	2022	2023
11)	Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	Budayawan.	Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	Kelembagaan Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.	Infrastruktur serta Kelembagaan dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Termasuk Bagi Seniman dan Budayawan.

Fokus dan Tema Pembangunan Kota Palopo

Fokus dan Tema Pembangunan Kota Palopo 2019-2023 untuk mencapai visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3.

Fokus dan Rancangan Tema Pembangunan Kota Palopo 2019-2023

Fokus dan Rancangan Tema Pembangunan				
Visi : “Palopo Maju Inovatif Berkelanjutan”				
2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Produktifitas dan Perekonomian Daerah	Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Kapasitas Layanan	Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Daerah	Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat, Perekonomian Daerah, Kualitas Layanan
Maju		Inovatif		Berkelanjutan

6.3. Program Pembangunan Daerah

Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Seperti halnya perumusan sebelumnya, dalam tahap perumusan program pembangunan daerah, proses pendampingan, masukan, kritik dan koreksi dari pusat terhadap provinsi, dan pendampingan, masukan, kritik dan koreksi oleh pusat dan/atau provinsi terhadap kabupaten/kota sangat penting untuk dilakukan. **Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.**

Berikut adalah program Pembangunan Daerah Kota Palopo 2019-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah Kota Palopo 2019-2023

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
1			Misi 1 : Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan															
			Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Hidup Masyarakat (T.1)	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	76.71	77.86		77.98		78.4		78.82		79.25		79.25		
			Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S.1)	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.33	10.36		10.39		10.45		10.48		10.56		10.56		
				Persentase Rata-Rata Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar (%)	1.27	0		0		0		0		0		0		
				Angka Melek Huruf	98.02	100		100		100		100		100		100		
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S.2)	Angka Harapan Hidup	70.3	70.32		70.34		70.36		70.38		70.4		70.4		
				Tingkat Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) (%)	88.87	100		100		100		100		100		100		
				Angka Kematian Ibu (per 100.000	68	65		60		55		50		48		48		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Kinerja	Rp (Juta)
						Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)			
				kelahiran hidup)														
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2	1		1		1		1		1				
			Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial masyarakat (5.3)	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.78	8.1		7.64		7.15		6.63		6.08				
				Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	40.07	39.97		39.91		39.86		39.81		39.76				
				Paritas Daya Beli (Ribu/Tahun)	12319	12,684		12,866		13,048		13,320		13,413				
				Rasio ketergantungan	48.46	48.02		47.58		47.14		46.7		46.26				
				Tingkat Pertumbuhan Penduduk (%)	2.31	2.3		2.29		2.28		2.27		2.26				
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.91 (2015)	73.85		74.15		74.55		74.85		75.05				
2			Misi 2 : Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau															

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
			Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (T.2)	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	n/a	80		81		82		83		84				
			Meningkatnya kapasitas dan Layanan infrastruktur perkotaan (S.4)	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	1.2	0		0		0		0		0				
				Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	20.98	25		30		35		40		45		45		
				Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	90.77	91		92		93		94		95				
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	88.63	90		95		100		100		100				

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022				
							Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
				Backlog Perumahan (Angka)	5633 (2018)	5133		4633		4133		3633		3133			
				Meningkatnya Konektifitas dan Aksesibilitas Wilayah serta Infrastruktur Strategis Daerah (5.5)	9.9	11.02		11.47		12		12.53		12.86		12.86	
				Jumlah orang/baran g melalui dermaga/ba ndara/ terminal per tahun	1.893,357	1,962,956		2,032,555		2,102,153		2,171,752		2,241,351		2,241,351	
				Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	18	21		22		23		24		25		25	
				Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	20.47	18		15		10		7		2		2	
				Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.72	76.83		76.93		76.98		77.10		77.20		77.20	
				Jumlah Kejadian Banjir Kategori Bencana (Kali/Tahun)	4	0		0		0		0		0		0	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
			DAYA AIR DAN PERSAMPAHAN (PP6)	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	3.5	4.13		4.77		5.4		6.03		6.67		6.67		
3			Misi 3 : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan															
			Terwujudnya Birokrasi Profesional Kompetitif dan Melayani (T.3)	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	62,44	64		66		68		70		72		72		
				Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	40.33	70		75		80		85		85		85		
				Level SPIP Daerah (Point)	2.86	3		3		3		3		3		3		
				Indeks Profesionalisme Aparatur (Angka)	n/a	70		71		72		73		75		75		
				Jumlah temuan BPK	19	16		15		14		13		12		12		
				Persentase perangkat daerah yang memiliki dokumen kelengkapan SAKIP yang terukur (Rencana Strategis,	n/a	80		90		100		100		100		100		

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2019		2020		2021		2022		2023				
							Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
				Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, IKU, Rencana Aksi, Laporan Kinerja Triwulan dan Laporan Kinerja Tahunan)															
				Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada			
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik (5.8)	79.9	80.78		81.12		81.28		81.89		82.03		82.03			
3	8	8		PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN DASAR MASYARAKAT (PP8)	n/a	100	35,349	100	27,389	100	27,367	100	27,456	100	27,767	100	145,328	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU PR, Dinas Sosial, Dis Perumahan & Kawasan Pemukiman, BPBD, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP.	

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
3	9	9	PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN NON DASAR, INOVASI DAERAH DAN PARTISIPASI PUBLIK (PP9)	Predikat Zona Pelayanan Publik (Ombudman)	81.8	82	20,412	83	13,090	84	13,100	85	13,289	86	13,899	86	73,790	DPMPTSP, Dis LH & Kebersihan, Dis Pengendalian Penduduk & KB, Dis Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan, Satuan Pol PP, Dis Pertanahan, Dinas Kearsipan, Sekretariat Daerah, Balitbangda, Dis Kominfo, Dis Pemuda & Olahraga, Bakesbang Pol & Linmas, Kecamatan
4			Misi 4 : Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis															
			Terwujudnya produktivitas perekonomian daerah (T.4)	Pertumbuhan PDRB (%)	7.19	7.14		7.16		7.18		7.2		7.22		7.22		
			Meningkatnya Kesempatan Berusaha dan Kualitas Tenaga Kerja (S.9)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.96	9.81		9.51		9.03		8.55		8.07		8.07		
				Rasio Penduduk yang Bekerja	89.04	90		90.47		90.95		91.43		91.91		91.91		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp (Juta)	
						Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)			
			KERJA DAN USAHA SERTA PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA (PP10)	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	59.56	62.02		63.24		64.47		65.7		66.93		66.93	Terpadu Satu Pintu	
				Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (per 100 Juta Investasi)	7.42	9		9		10		11		12		12		
			Meningkatnya Produksi dan Produktifitas (\$ 10)	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37	37.1		37.3		37.5		37.6		37.8		37.8		
				Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	76.74	77.67		78.6		79.53		80.46		81.39		81.39		
				Produktivitas total daerah (Juta/Tenaga Kerja/Tahun)	86.69	92.5		98.32		104.13		109.94		115.75		115.75		
				Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.82	2.9		2.92		2.95		2.98		3		3		
5			Misi 5 : Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu															
			Terwujudnya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi	1.21 (2016 : Pariwisata Saja)	2	0	2.2	0	2.4	0	2.5	0	2.6	0	2.6		

Kode			Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
						Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	Kinerja	Rp (Juta)	
			Berdaya Saing (T.5)	Kreatif Terhadap PDRB (%)														
				Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	0.24	0.24							
				Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.77	2.8	2.82	2.84	2.86	2.88	2.88							
				Nilai PAD dari ekonomi kreatif daerah (Rupiah)	4,63 Milyar	4,65 Milyar	4,67 Milyar	4,68 Milyar	4,70 Milyar	4,8 Milyar	4,8 Milyar							
				Nilai PAD sektor pariwisata (Rupiah)	213 Juta	215 Juta	220 Juta	230 Juta	240 Juta	250 Juta	250 Juta							
				Lama kunjungan wisata (Rata - rata lama kunjungan wisata dalam 1 tahun)	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5						

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sementara Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategis (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Berikut adalah tabel kerangka pendanaan pembangunan Kota Palopo dan Program Perangkat Daerah 2019-2023 :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019-2023 Kota Palopo

Kode	Kapabilitas Riil /Belanja	Proyeksi				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Kapasitas riil keuangan	653,093,182,000	587,831,119,000	592,744,004,000	589,527,306,000	601,674,061,000
	Belanja	1,217,869,768,000	960,709,223,000	1,002,842,349,000	1,045,345,139,000	1,078,449,780,000
	Belanja Tidak Langsung	333,420,279,000	379,378,107,000	416,598,348,000	462,317,835,000	513,275,723,000
	Belanja Pegawai	316,616,880,000	356,052,890,000	398,381,001,000	449,156,414,000	505,670,228,000
	Belanja Bunga	14,376,155,000	20,897,973,000	15,790,103,000	10,734,177,000	5,678,251,000
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
	Belanja Hibah	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	15,000,000,000	25,000,000,000
	Belanja Bantuan Sosial	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0
	Belanja Bantuan Keuangan	927,244,000	927,244,000	927,244,000	927,244,000	927,244,000
	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000
	Belanja Langsung	884,449,489,000	581,331,116,000	586,244,001,000	583,027,304,000	565,174,057,000
	Belanja Pegawai	26,902,871,000	26,116,419,000	25,198,200,000	21,198,593,000	22,023,680,000
	Belanja Modal	644,941,245,000	352,916,816,000	362,482,115,000	382,239,964,000	408,984,614,000
	Belanja Barang dan Jasa	212,605,373,000	202,297,881,000	198,563,686,000	169,588,747,000	144,165,763,000

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Palopo 2019-2023

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			369,826		436,065		446,118		453,283		479,813		387,633		
1	1		URUSAN PENDIDIKAN				26,756		33,884		30,063		32,222		36,384		159,309	
1	1	1	DINAS PENDIDIKAN				26,756		33,884		30,063		32,222		36,384		159,309	
		1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	63,12	100	241	100	145	100	259	100	292	100	325	100	325	Dinas Pendidikan
		2	Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .	Persentase penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	95,45	100	6,379	100	25,000	100	28,000	100	30,000	100	34,000	100	34,000	Dinas Pendidikan
		3	Program Pendidikan Kesenjangan	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	n/a	100	145	100	88	100	99	100	110	100	121	100	121	Dinas Pendidikan
		4	Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis .	Persentase Murid Pendidikan Dasar yang Menerima Bantuan Pendidikan (%)	100	100	17,100	100	7,067	100	9	100	10	100	10	100	10	Dinas Pendidikan
		5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	137,26	100	900	100	338	100	388	100	438	100	488	100	488	Dinas Pendidikan
		6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Rasio guru/murid pendidikan dasar (per 10.000)	647,5	666	300	685,5	185	704	195	722,5	204	741	214	741	214	Dinas Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		7	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	1,679	100	1,050	100	1,102	100	1,157	100	1,214	100	1,214	Dinas Pendidikan
		8	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	12	100	11	100	11	100	11	100	12	100	12	Dinas Pendidikan
1	2		URUSAN KESEHATAN				171,878		169,992		177,429		177,309		194,398		194,398	
1	2	1	DINAS KESEHATAN				82,878		69,492		70,529		59,909		65,398		65,398	
		1	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil .	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	92,8	100	100	100	190	100	200	100	210	100	220	100	220	Dinas Kesehatan
		2	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin .	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	95,79	100	1,500	100	15,600	100	17,900	100	2,020	100	2,250	100	2,250	Dinas Kesehatan
		3	Program Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir .	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	98	100	112	100	155	100	178	100	201	100	223	100	223	Dinas Kesehatan
		4	Program Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	62,51	100	45	100	85	100	108	100	131	100	154	100	154	Dinas Kesehatan
		5	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar .	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	97,52	100	200	100	66	100	75	100	84	100	93	100	93	Dinas Kesehatan
		6	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif .	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	82,55	100	90	100	39	100	44	100	49	100	54	100	54	Dinas Kesehatan
		7	Program Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penduduk usia lanjut yang	133,47	100	11	100	115	100	132	100	149	100	166	100	166	Dinas Kesehatan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					mendapatkan layanan kesehatan														
		8	Program Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi .	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	79,45	100	80	100	35	100	40	100	45	100	50	100	50	Dinas Kesehatan	
		9	Program Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus .	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	91,7	100	100	100	89	100	68	100	69	100	72	100	72	Dinas Kesehatan	
		10	Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat .	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	98,23	100	100	100	79	100	152	100	225	100	298	100	298	Dinas Kesehatan	
		11	Program Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis .	Persentase penduduk terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	127,44	100	150	100	69	100	79	100	89	100	99	100	99	Dinas Kesehatan	
		12	Program Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) .	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	90,37	100	120	100	59	100	67	100	75	100	83	100	83	Dinas Kesehatan	
		13	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan .	Persentase Masyarakat yang Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan (%)	88,87	100	22,100	100	29,000	100	26,000	100	29,000	100	31,000	100	31,000	Dinas Kesehatan	
		14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan .	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	100	11,000	100	16,000	100	17,000	100	19,000	100	21,000	100	21,000	Dinas Kesehatan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		15	Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Persentase Faskes Pertama Bersertifikat ISO (%)	8	8	10	8	351	7	8	7	10	23	11	23	11	Dinas Kesehatan
		16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan puskesmas (%)	133,33	133,33	27,800	133,33	4,000	133,33	5,000	133,33	5,000	133,33	6,000	133,33	6,000	Dinas Kesehatan
		17	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	3	17,150	3	800	4	580	4	650	4	720	4	720	Dinas Kesehatan
		18	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	2,200	100	2,745	100	2,882	100	2,885	100	2,887	100	2,887	Dinas Kesehatan
		19	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	10	100	15	100	16	100	17	100	18	100	18	Dinas Kesehatan
1	2	2	RSUD				89,000		100,500		106,900		117,400		129,000		129,000	
		1	Program Pelayanan BLUD Bidang Kesehatan	% Pencapaian Indikator Kinerja BLUD RS (Keuangan & Pelayanan)	75	80	85,000	85	96,000	90	102,000	95	112,000	100	123,000	100	123,000	RSUD
		2	Program pengadaan, peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit	% Ketersediaan Sarana dan PRasarana RS	65-75	70-80	4,000	75-85	4,500	80-90	4,900	85-95	5,400	90-100	6,000	90-100	6,000	RSUD
1	3		URUSAN PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG				138,229		200,247		206,265		210,657		215,104			
1	3	1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				138,229		200,247		206,265		210,657		215,104			
		1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase penduduk yang memperoleh	89.43 (2016)	100	100	100	660	100	750	100	840	100	930	100	930	Dinas PU PR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
				kebutuhan pokok air minum sehari-hari														
		2	Program Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	n/a	100	200	100	5,700	100	5,800	100	5,900	100	6,000	100	6,000	Dinas PU PR
		3	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan .	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	28	28	58,500	29	32,550	29	34,177	30	35,885	30	37,679	30	37,679	Dinas PU PR
		4	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan .	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	58,33	60	435	61	405	62	415	63	425	65	435	65	435	Dinas PU PR
		5	Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	10,73	15	5,350	25	2,850	35	2,995	40	3,145	50	3,302	50	3,302	Dinas PU PR
		6	Program Pembangunan/Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	3,4	4	5,600	5	2,850	6	2,995	7	3,145	8	3,302	8	3,302	Dinas PU PR
		7	Program Pengendalian Banjir	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	14,42	15	925	20	100	25	815	30	825	35	835	35	835	Dinas PU PR
		8	Program Pembangunan Infrastruktur Publik/Strategis Daerah	Cakupan Penyediaan Infrastruktur Publik &Strategis Daerah (Buah)	n/a	10	24,750	10	152,000	10	155,000	10	157,000	10	159,000	50	159,000	Dinas PU PR
		9	Program Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	1,171	1,173	534	1,175	352	1,177	361	1,179	379	1,181	386	1,181	386	Dinas PU PR
		10	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	71,34	71,5	100	72	50	73	84	74	95	75	100	75	100	Dinas PU PR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		11	Program Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	n/a	50	2,450	52	575	54	603	55	633	57	635	57	635	Dinas PU PR
		12	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi yang Lulus Sertifikasi (%/Tahun)	n/a	75	230	80	115	85	120	90	125	95	130	95	130	Dinas PU PR
		13	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	39,000	100	2,000	100	2,100	100	2,200	100	2,300	100	2,300	Dinas PU PR
		14	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	55	100	40	100	50	100	60	100	70	100	70	Dinas PU PR
1	4		URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				5,751		2,678		2,614		2,796		2,933		2,933	
1	4	1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				5,751		2,678		2,614		2,796		2,933		2,933	
		1	Program Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	n/a	100	250	100	168	100	179	100	189	100	199	100	199	Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman
		2	Program Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah .	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	n/a	100	250	100	167	100	179	100	189	100	199	100	199	Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman
		3	Program Rumah Layak Huni	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni (%/Tahun)	n/a	1,2	3	1,2	450	1,2	300	1,2	400	1,2	500	6	500	Dis Perumahan & Pemukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		4	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	79,39	85,39	2.700	91,4	900	97,4	945	98	992	98	995	98	995	Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman	
		5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pemukiman yang tertata (%)	99,25	100	370	100	99	100	101	100	110	100	118	100	118	Dis Perumahan & Pemukiman	
		6	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	2.170	100	885	100	900	100	905	100	910	100	910	Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman	
		7	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	9	100	10	100	11	100	12	100	12	Dis Perumahan & Kwsan Pemukiman	
1	5		URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT				17,650		17,695		18,102		18,495		19,029		19,029		
1	5	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					5,080		2,330		2,391		2,452		2,468		2,468	
		1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan Lembaga atau Organisasi yang Mendapatkan Pendidikan Politik	n/a	25	1,050	27	180	29	185	30	190	35	190	35	190	Bakesbang Pol & Linmas	
		2	Program Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Wilayah Rawan Konflik yang Dibina (%)	100	100	1.800	100	650	100	655	100	700	100	705	100	705	Bakesbang Pol & Linmas	
		3	Program Peningkatan Demokratisasi Ideologi dan Pembauran	Tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan FKUB dan FPK	n/a	100	840	100	200	100	205	100	210	100	215	100	215	Bakesbang Pol & Linmas	
		4	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	1.310	100	1.255	100	1.300	100	1.305	100	1.310	100	1.310	Bakesbang Pol & Linmas	
		5	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan	100	100	80	100	45	100	46	100	47	100	48	100	48	Bakesbang Pol & Linmas	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
				Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah														
1	5	2	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5,495		5,264		5,410		5,561		5,872		5,872	
		1	Program Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (%)	97,9	100	2,750	100	2,150	100	2,200	100	2,250	100	2,500	100	2,500	Satuan Polisi Pamong Praja
		2	Program Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	97,9	100	1,612	100	2,050	100	2,100	100	2,150	100	2,200	100	2,200	Dinas Satpol PP
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	1,125	100	1,055	100	1,100	100	1,150	100	1,160	100	1,160	Dinas Satpol PP
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	9	100	10	100	11	100	12	100	12	Dinas Satpol PP
1	5	3	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				3,667		6,278		6,397		6,518		6,641		6,641	
		1	Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran .	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	n/a	100	500	100	3,600	100	3,650	100	3,700	100	3,750	100	3,750	Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan
		2	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran .	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	9,09	11,11	2,035	13,13	870	15,15	913	13,13	958	15,15	1,005	15,15	1,005	Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran,	100	100	1,125	100	1,800	100	1,825	100	1,850	100	1,875	100	1,875	Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur														
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	7	100	8	100	9	100	10	100	11	100	11	Dis Pemadam Kebakaran & Penyelamatan
1	5	4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				3,408		3,823		3,904		3,964		4,048		4,048	
		1	Program Pelayanan Informasi rawan bencana .	Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	n/a	100	250	100	165	100	179	100	186	100	197	100	197	BPBD
		2	Program Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana .	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	n/a	100	2,015	100	2,120	100	2,150	100	2,180	100	2,230	100	2,230	BPBD
		3	Program Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	n/a	100	250	100	390	100	410	100	430	100	450	100	450	BPBD
		4	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	858	100	1,142	100	1,145	100	1,147	100	1,149	100	1,149	BPBD
		5	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan	100	100	35	100	6	100	20	100	21	100	22	100	22	BPBD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target			Rp (Juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Keuangan Perangkat Daerah															
1	6		URUSAN SOSIAL				9,562		11,569		11,645		11,805		11,965		11,965		
1	6	1	DINAS SOSIAL				9,562		11,569		11,645		11,805		11,965		11,965		
		1	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n/a	100	150	100	195	100	120	100	125	100	130	100	130	Dinas Sosial	
		2	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n/a	100	70	100	75	100	100	100	125	100	150	100	150	Dinas Sosial	
		3	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	n/a	100	150	100	100	100	105	100	110	100	115	100	115	Dinas Sosial	
		4	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	n/a	100	185	100	100	100	105	100	110	100	115	100	115	Dinas Sosial	
		5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	n/a	100	1,000	100	919	100	929	100	939	100	952	100	952	Dinas Sosial	
		6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan	Persentase WKSBM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	150	100	370	100	375	100	380	100	385	100	385	Dinas Sosial	
		7	Program Bantuan Non Tunai	Persentase PMKS skala yang	79,11	79,28	6,000	79,45	125	79,62	135	79,79	145	79,96	155	79,96	155	Dinas Sosial	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							2019		2020		2021		2022		2023				Akhir periode RPJMD	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)															
		8	Program Pembinaan Penyandang Cacat	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	1,58	2,09	103	2,61	405	3,12	417	3,63	436	4,15	452	4,15	452	Dinas Sosial		
		9	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir Miskin dan PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	78,97	79,12	800	79,26	7,850	79,41	7,900	79,56	7,950	79,7	8,000	79,7	8,000	Dinas Sosial		
		10	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	940	100	1,425	100	1,450	100	1,475	100	1,500	100	1,500	Dinas Sosial		
		11	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	14	100	5	100	9	100	10	100	11	100	11	Dinas Sosial		
2			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					86,793		73,471		77,825		80,012		81,178		81,178		
2	1		TENAGA KERJA					2,063		1,740		1,883		1,946		2,015		2,015		
2	1	1	DINAS TENAGA KERJA					2,063		1,740		1,883		1,946		2,015		2,015		
		1	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	37	40	120	45	87	50	92	55	102	65	115	65	115	Disnaker		
		2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	70,56	72,66	700	74,76	320	76,85	425	78,95	435	78,95	445	78,95	445	Disnaker		
		3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	59,56	62,02	340	63,24	800	64,47	805	65,7	810	66,93	815	66,93	815	Disnaker		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		4	Program Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	4,54	5	150	6	99	7	102	8	114	9	129	9	129	Disnaker
		5	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	742	100	425	100	450	100	475	100	500	100	500	Disnaker
		6	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	11	100	9	100	9	100	10	100	11	100	11	Disnaker
2	2		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,116		1,359		1,374		1,389		1,408		1,408	
2	2	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,116		1,359		1,374		1,389		1,408		1,408	
		1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjaraan Gender Dalam Pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	43,03	44,82	1,350	45,71	470	46,6	475	47,49	480	48,39	485	48,39	485	Dis Pemberdayaan Perempuan
		2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT (per 10.000)	3	3	115	3	370	3	375	2	384	2	392	2	392	Dis Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	640	100	511	100	515	100	515	100	520	100	520	Dis Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	11	100	8	100	9	100	10	100	11	100	11	Dis Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	3		PANGAN		1,158	752	832	867	900	900								
2	3	1	DINAS KETAHANAN PANGAN		1,158	752	832	867	900	900								
		1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91,6	91,6	360	91,65	150	91,7	172	91,8	185	91,9	196	91,9	196	Dinas Ketahanan Pangan
		2	Program Peningkatan Produktifitas Kawasan Hunian dan Lingkungan Pemukiman	Luas Lahan Pekarangan yang Dimanfaatkan	n/a	2	100	2	75	2	125	2	135	2	145	10	145	Dinas Ketahanan Pangan
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	690	100	520	100	527	100	538	100	549	100	549	Dinas Ketahanan Pangan
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	7	100	8	100	9	100	10	100	10	Dinas Ketahanan Pangan
2	4		PERTANAHAN			14,050	11,361	13,396	14,414	14,438	14,438							
2	4	1	DINAS PERTANAHAN			14,050	11,361	13,396	14,414	14,438	14,438							
		1	Program Pelayanan Pertanahan	Cakupan pengadaaan tanah utk pemerintah daerah (Ha)	n/a	5	135	6	11,000	7	13,000	8	14,000	9	14,000	35	14,000	Dinas Pertanahan
		2	Program Perencanaan dan Pengendalian Tanah	Cakupan pengaturan tanah pemerintah (Ha)	n/a	14,7	13,400	13,2	65	13,2	95	8,8	107	8,8	117	58,7	117	Dinas Pertanahan
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	500	100	292	100	296	100	301	100	314	100	314	Dinas Pertanahan
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan	100	100	15	100	4	100	5	100	6	100	7	100	7	Dinas Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Keuangan Perangkat Daerah														
2	5		LINGKUNGAN HIDUP				38,206		31,940		32,390		32,840		33,290		33,290	
2	5	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				38,206		31,940		32,390		32,840		33,290		33,290	
		1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum	Persentase Luas Wilayah Pemukiman yang Dijangkau Penerangan Jalan Umum (%)	60 (2013)	70	14,200	72	11,350	75	11,500	77	11,650	79	11,800	79	11,800	Dinas Lingkungan Hidup
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Cemaran ringan	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Dinas Lingkungan Hidup
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat baik	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Dinas Lingkungan Hidup
		3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan (%)	64	67	17,500	70	12,000	73	12,150	76	12,300	79	12,450	79	12,450	Dinas Lingkungan Hidup
		4	Program Pelayanan Pemakaman & Pengelolaan Pertamanan	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1,58	1,6	1,100	1,8	3,400	1,9	3,450	1,9	3,500	1,9	3,550	1,9	3,550	Dinas Lingkungan Hidup
		5	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	3,250	100	2,750	100	2,800	100	2,850	100	2,900	100	2,900	Dinas Lingkungan Hidup
		6	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	56	100	40	100	40	100	40	100	40	100	40	Dinas Lingkungan Hidup
2	6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL				3,562		1,285		1,983		2,129		2,258		2,258	
2	6	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3,562		1,285		1,983		2,129		2,258		2,258	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	Program Penataan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Persentase Wajib KTP yang Terlayani (%)	n/a	80	2,500	85	155	90	796	95	883	100	950	100	950	Dis Kependudukan & Pencatatan Sipil
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	1,050	100	1,122	100	1,178	100	1,236	100	1,297	100	1,297	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	12	100	8	100	9	100	10	100	11	100	11	Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan
2	8		PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA				3,117		10,093		10,304		10,385		10,466		10,466	
2	8	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3,117		10,093		10,304		10,385		10,466		10,466	
		1	Program Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur yang Menggunakan Kontrasepsi (%)	n/a	10	2,100	12	9,350	15	9,400	17	9,450	20	9,500	74	9,500	Dis Pengendalian Penduduk dan KB
		2	Program Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Prasejahtera dalam BDT yang Mendapatkan Bina Keluarga (%)	n/a	2	200	3	90	4	100	4	110	4	120	17	120	Dis Pengendalian Penduduk dan KB
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	794	100	635	100	785	100	805	100	825	100	825	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan	100	100	23	100	18	100	19	100	20	100	21	100	21	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Kuangan Perangkat Daerah														
2	9		PERHUBUNGAN				4,460		2,081		1,915		1,918		1,926		1,926	
2	9	1	DINAS PERHUBUNGAN				4,460		2,081		1,915		1,918		1,926		1,926	
		1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	22,19	23,45	1,650	24,7	1,155	25,96	995	27,21	1,000	28,47	1,000	28	1,000	Dinas Perhubungan
		2	Program Pembangunan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1.345.436	1.404.925	550	1.464.415	45	1.523.904	29	1.583.393	30	1.642.882	31	1.642.882	31	Dinas Perhubungan
		3	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	63,2	63,4	950	71	40	72	44	54	35	65	36	75	36	Dinas Perhubungan
		4	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	1,300	100	835	100	840	100	845	100	850	100	850	Dinas Perhubungan
		5	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	10	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Dinas Perhubungan
2	10		KOMUNIKASI & INFORMATIKA				1,972		1,181		1,696		1,745		1,792		1,792	
2	10	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				1,972		1,181		1,696		1,745		1,792		1,792	
		1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,09	0,1	1,040	0,1	565	0,11	673	0,11	695	0,12	710	0,12	710	Dinas Komunikasi
		2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dan Informasi	Jumlah Produk Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi yang Dibuah (Buah)	n/a	2	49	2	55	2	56	2	57	2	58	10	58	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi	3,33	3,45	13	3,45	45	3,65	155	3,75	160	4	165	4	165	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Masyarakat di Tingkat Kecamatan														
		4	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	860	100	510	100	805	100	825	100	850	100	850	Dinas Komunikasi dan Informatika
		5	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	10	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	11		KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				1,252		1,669		1,685		1,701		1,717		1,717	
2	11	1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1,252		1,669		1,685		1,701		1,717		1,717	
		1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang dikuatkan dalam hal kelembagaan, permodalan dan manajemen	n/a	5	206	5	505	5	510	5	515	5	520	25	520	Dinas Koperasi & UMKM
		2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah	Persentase UMKM yang difasilitasi dalam hal permodalan dan peralatan	n/a	5	335	5	270	5	275	5	280	5	285	25	285	Dinas Koperasi & UMKM
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	685	100	885	100	890	100	895	100	900	100	900	Dinas Koperasi & UMKM
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	26	100	9	100	10	100	11	100	12	100	12	Dinas Koperasi & UMKM
2	12		PENANAMAN MODAL				4,659		3,503		3,579		3,655		3,731		3,731	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	12	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				4,659		3,503		3,579		3,655		3,731		3,731		
		1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	147	149	161	150	250	152	265	154	280	156	295	156	295	DPMPTSP	
		2	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta)	382	437	1,481	491	1,050	546	1,100	600	1,150	655	1,200	655	1,200	DPMPTSP	
		3	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	7,42	9	1,415	9	850	10	855	11	860	12	865	12	865	DPMPTSP	
		4	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	1,600	100	1,350	100	1,355	100	1,360	100	1,365	100	1,365	DPMPTSP	
		5	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	2	100	3	100	4	100	5	100	6	100	6	DPMPTSP	
2	13		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4,569		3,378		3,638		3,762		3,865		3,865		
2	13	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				4,569		3,378		3,638		3,762		3,865		3,865		
		1	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga (%)	38,46	39	716	40	800	41	810	42	820	45	830	45	830	Dis Pemuda & Olahraga	
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	68,18	68,2	2,100	68,3	525	68,5	709	68,8	739	69	757	69	757	Dis Pemuda & Olahraga	
		3	Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	69,3	70	940	71	1,000	72	1,050	73	1,100	75	1,150	75	1,150	Dis pora	
		4	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirahausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase wirausaha muda (%)	1,75	1,8	150	1,9	235	1,95	255	2	270	2,1	285	2,1	285	Dis Pemuda & Olahraga	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		5	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	651	100	805	100	800	100	818	100	827	100	827	Dispora
		6	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	12	100	13	100	14	100	15	100	16	100	16	Dis Pemuda & Olahraga
2	14		STATISTIK				774		695		740		778		810		810	
2	14	1	DINAS PERSANDIAN DAN STATISTIK				774		695		740		778		810		810	
		1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	71,42	75	75	76	56	78	66	80	73	85	84	85	84	Dinas Persandian Statistik
		2	Program Pengembangan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang Pemenuhan Data Statistiknya Diatas 75%	n/a	75	100	80	175	85	190	90	210	95	220	95	220	Dinas Persandian Statistik
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	589	100	460	100	479	100	489	100	499	100	499	Dinas Persandian Statistik
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	10	100	4	100	5	100	6	100	7	100	7	Dinas Persandian Statistik
2	16		KEBUDAYAAN				2,083		853		655		668		699		699	
2	16	1	DINAS KEBUDAYAAN				2,083		853		655		668		699		699	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	99,32	100	750	100	25	100	30	100	35	100	40	100	40	Dinas Kebudayaan
		2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	-	3	900	3	225	3	605	3	620	3	635	3	635	Dinas Kebudayaan
		3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	51	50	50	50	48	50	50	50	52	50	54	50	54	Dinas Kebudayaan
		4	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	370	100	550	100	600	100	650	100	700	100	700	Dinas Kebudayaan
		5	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	13	100	5	100	11	100	12	100	13	100	13	Dinas Kebudayaan
2	17		PERPUSTAKAAN				1,586		1,085		1,136		1,167		1,188		1,188	
2	17	1	DINAS PERPUSTAKAAN				1,586		1,085		1,136		1,167		1,188		1,188	
		1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	9,23	9,3	765	9,45	300	9,55	330	9,6	350	9,8	360	9,8	360	Dinas Perpustakaan
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	796	100	780	100	800	100	810	100	820	100	820	Dinas Perpustakaan
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	25	100	5	100	6	100	7	100	8	100	8	Dinas Perpustakaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	18		KEARSIPAN				1,166	496		619		648		675		675		
2	18	1	DINAS KEARSIPAN				1,166	496		619		648		675		675		
		1	Program Pembinaan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2	2	228	6	70	8	92	10	100	12	106	12	106	Dinas Kearsipan
		2	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang Memiliki Petugas Khusus Pengelola Arsip Terlatih (%)	2	30	385	45	30	55	70	65	80	75	90	75	90	Dinas Kearsipan
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	543	100	385	100	445	100	455	100	465	100	465	Dinas Kearsipan
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	10	100	11	100	12	100	13	100	14	100	14	Dinas Kearsipan
3			URUSAN PILIHAN				36,802	47,893		20,752		21,580		22,364		22,364		
3	1		KELAUTAN DAN PERIKANAN				6,358	3,261		3,436		3,612		3,773		3,773		
3	1	1	DINAS PERIKANAN				6,358	3,261		3,436		3,612		3,773		3,773		
		1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	17	20	2,539	21	2,100	24	2,200	26	2,300	29	2,400	29	2,400	Dinas Perikanan
		2	Program pengembangan perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	116	124	2,388	130	210	137	250	144	300	151	350	151	350	Dinas Perikanan
		3	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	262	262	353	262	115	262	130	262	145	262	150	262	150	Dinas Perikanan
		5	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	1,038	100	831	100	850	100	860	100	865	100	865	Dinas Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		6	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	40	100	5	100	6	100	7	100	8	100	8	Dinas Perikanan	
3	2		PARIWISATA				2,489		2,404		2,535		2,673		2,790		2,790		
3	2	1	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				2,489		2,404		2,535		2,673		2,790		2,790		
		1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata (%/Tahun)	n/a	1,5	260	1,5	100	1,5	150	1,5	200	1,5	250	7,5	250	Dinas Pariwisata & Ekraf	
		2	Program Pengembangan Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pengunjung Wisata Domestic dan Mancanegara (Orang/Tahun)	99,481	100,973	380	102,487	398	104,025	408	105,585	435	107,169	441	107,169	441	Dinas Pariwisata & Ekraf	
		3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Komunitas Ekonomi Kreatif yang Dibina (%)	n/a	12	1,095	13	290	14	300	15	310	16	320	16	320	Dinas Pariwisata & Ekraf	
		4	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	736	100	1,600	100	1,650	100	1,700	100	1,750	100	1,750	Dinas Pariwisata & Ekraf	
		5	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	18	100	16	100	27	100	28	100	29	100	29	Dinas Pariwisata & Ekraf	
3	3		PERTANIAN				18,019		11,033		11,284		11,585		11,886		11,886		
3	3	1	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN				18,019		11,033		11,284		11,585		11,886		11,886		
		1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Angka Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	50,68	51	533	52	515	53	550	54	575	55	600	55	600	Dis Pertanian	
		2	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil Pertanian	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)	38	40	2,031	42	1,500	44	1,600	46	1,700	48	1,800	220	1,800	Dis Pertanian	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target			Rp (Juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		3	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)	563	646	865	701	1,170	755	1,200	810	1,250	864	1,300	2	1,300	Dis Pertanian	
		4	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan	Produksi Daging dan Telur Daerah (Ton/Tahun)	5	5	11,565	5	2,535	5	2,600	5	2,700	5	2,800	26	2,800	Dis Pertanian	
		5	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	3,000	100	5,305	100	5,325	100	5,350	100	5,375	100	5,375	Dis Pertanian	
		6	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	25	100	8	100	9	100	10	100	11	100	11	Dis Pertanian	
3	6		PERDAGANGAN				6,019		29,228		1,280		1,407		1,532		1,532		
3	6	1	DINAS PERDAGANGAN				6,019		29,228		1,280		1,407		1,532		1,532		
		1	Program Pembinaan Pedagang	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	n/a	15	109	15,3	28,300	15,6	200	15,9	300	16	400	16	400	Dinas Perdagangan	
		2	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Barang Bersubsidi yang Diawasi (%)	n/a	100	3,787	100	165	100	278	100	289	100	298	100	298	Dinas Perdagangan	
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	2,075	100	757	100	795	100	810	100	825	100	825	Dinas Perdagangan	
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	48	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Dinas Perdagangan	
3	7		PERINDUSTRIAN				3,095		1,252		1,352		1,407		1,453		1,453		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	7	1	DINAS PERINDUSTRIAN				3,095		1,252		1,352		1,407		1,453		1,453	
		1	Program Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	13.25 (2016)	15	415	15	125	15,6	130	15,9	135	16	140	16	140	Dinas Perindustrian
		2	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Potensi Daerah	Persentase Pertumbuhan Industri (%/Tahun)	22,13	255	371	5	300	5	351	5	376	5	398	0	398	Dinas Perindustrian
		3	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Nilai Industri Pengolahan (Milyar/Tahun)	184,7	199,05	1,218	213,3	270	227,6	300	241,9	310	256,2	320	256,2	320	Dinas Perindustrian
		4	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	1,041	100	552	100	565	100	579	100	587	100	587	Dinas Perindustrian
		5	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	50	100	5	100	6	100	7	100	8	100	8	Dinas Perindustrian
3	8		TRANSMIGRASI				822		715		865		896		930		930	
3	8	1	DINAS TRANSMIGRASI				822		715		865		896		930		930	
		1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Luas Kawasan Transmigrasi yang akan Dikembangkan (Ha)	-	2	65	2	375	2	532	2	556	2	574	10	574	Dinas Transmigrasi
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	438	100	334	100	326	100	332	100	347	100	347	Dinas Transmigrasi
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	11	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Dinas Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4			PENUNJANG URUSAN				119,262		103,984		95,872		98,432		101,405		101,405	
4	1		PERENCANAAN PEMBANGUNAN				4,735		3,521		4,073		3,705		3,812		3,812	
4	1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				4,735		3,521		4,073		3,705		3,812		3,812	
				Penjabaran Konsistensi														
				Program RKPD kedalam APBD (%)														
				Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW														
				Kesesuaian rencana pembangunan dengan SDGS/TPB														
		4	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	1,900	100	1,735	100	1,800	100	1,850	100	1,900	100	1,900	BAPPEDA
		5	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	35	100	11	100	12	100	13	100	14	100	14	BAPPEDA
4	2		KEUANGAN				19,605		16,659		16,994		17,326		17,658		17,658	
4	2	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				11,096		9,750		9,839		9,920		10,001		10,001	
		1	Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah	Persentase Regulasi Daerah yang terkait APBD yang ditetapkan sesuai dengan target waktu	100	100	6,390		5,400	100	5,450	100	5,500	100	5,550	100	5,550	BPKAD
		2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan	Persentase Rencana Anggaran Perangkat Daerah	100	100	1,350		1,200	100	1,225	100	1,250	100	1,275	100	1,275	BPKAD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Keuangan Kabupaten/Kota	yang Diasistensi (%)														
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	3,345	100	3,137	100	3,150	100	3,155	100	3,160	100	3,160	BPKAD
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	11	13	100	14	100	15	100	16	100	16		BPKAD
4	2	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH				8,509		6,909		7,155		7,406		7,657		7,657	
				Nilai Pajak Daerah (Rp/Milyar)	27,31	34,92		38,9		43,45		46,99		54,9		54,9		Badan Pendapatan Daerah
				Nilai Retribusi Daerah (Rp/Milyar)	6,84	7,36		7,88		8,44		9,05		9,7		9,7		Badan Pendapatan Daerah
				Nilai Lain-Lain Pendapatan Daerah (Rp/Milyar)	126,16	132,37		139,85		147,57		156,33		165,1		165,1		Badan Pendapatan Daerah
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	3,346	100	2,605	100	2,650	100	2,700	100	2,750	100	2,750	Badan Pendapatan Daerah
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	5	4	100	5	100	6	100	7	100	7		Badan Pendapatan Daerah
4	3		KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6,940		6,839		6,925		6,992		7,058		7,058	
4	3	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6,940		6,839		6,925		6,992		7,058		7,058	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target			Rp (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		1	Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Cakupan Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang Ditangani (%)	100	100	538	100	1,020	100	1,050	100	1,065	100	1,080	100	1,080	BKDPSDM	
		2	Program Pelayanan Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir	Cakupan Layanan Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir Aparatur (%)	100	100	4,250	100	540	100	550	100	560	100	570	100	570	BKDPSDM	
		3	Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya Aparatur	Cakupan Layanan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya Aparatur yang Ditangani (%)	100	100	1,366	100	4,466	100	4,500	100	4,525	100	4,550	100	4,550	BKDPSDM	
		4	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	778	100	788	100	799	100	815	100	830	100	830	BKDPSDM	
		5	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	25	100	26	100	27	100	28	100	28	BKDPSDM	
4	5		PENELITIAN & PENGEMBANGAN				2,125		604		968		1,027		1,098		1,098		
4	5	1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2,125		604		968		1,027		1,098		1,098		
		1	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	36,36	38	335		85	45	210	50	230	50	250	55	250	Balitbangda	
		2	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	-	2	1,000		100	4	206	5	226	6	258	6	258	Balitbangda	
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran,	100	100	730	100	416	100	548	100	566	100	584	100	584	Balitbangda	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur														
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	60		3	100	4	100	5	100	6	100	6	Balitbangda
4	6		PENGAWASAN				5,041		3,412		3,763		3,854		3,945		3,945	
4	6	1	INSPEKTORAT				5,041		3,412		3,763		3,854		3,945		3,945	
		1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Persentase tindak lanjut temuan	57,02	70	3,910	75	2,030	80	2,050	85	2,070	90	2,090	90	2,090	Inspektorat
		2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemkot (Level)	2	3 (DC)	320	3 (DC)	130	3 (DC)	410	3 (DC)	430	4 (DC)	450	4 (DC)	450	Inspektorat
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	801	100	1,250	100	1,300	100	1,350	100	1,400	100	1,400	Inspektorat
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	10	100	2	100	3	100	4	100	5	100	5	Inspektorat
4	8		KEWILAYAHAN				22,073		26,266		18,897		19,022		19,172		19,172	
4	8	1	KECAMATAN WARU SELATAN				2,288		2,219		2,242		2,268		2,294		2,294	
		1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	1,900	100	1,915	100	1,930	100	1,945	100	1,960	100	1,960	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	380	100	298	100	305	100	315	100	325	100	325	Kecamatan
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Kecamatan
4	8	2	KECAMATAN WARU TIMUR				3,841		3,716		3,737		3,758		3,779		3,779	
		1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	3,200	100	3,315	100	3,330	100	3,345	100	3,360	100	3,360	Kecamatan
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	633	100	395	100	400	100	405	100	410	100	410	Kecamatan
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Kecamatan
4	8	3	KECAMATAN WARU UTARA				3,122		3,229		3,300		3,316		3,338		3,338	
		1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta	100	100	2,700	100	2,805	100	2,810	100	2,815	100	2,820	100	2,820	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				pelayanan di kecamatan (%)														
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	414	100	418	100	483	100	493	100	509	100	509	Kecamatan
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Kecamatan
4	8	4	KECAMATAN WARA				2,461		3,183		3,212		3,228		3,249		3,249	
		1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	1,962	100	2,800	100	2,810	100	2,820	100	2,830	100	2,830	Kecamatan
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	490	100	377	100	395	100	400	100	410	100	410	Kecamatan
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	9	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Kecamatan
4	8	5	KECAMATAN WARA BARAT				2,683		3,046		447		456		478		478	
		1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan	100	100	2,305	100	2,700	100	2,710	100	2,720	100	2,730	100	2,730	Kecamatan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023				Akhir periode RPJMD
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)															
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	370	100	340	100	396	100	401	100	416	100	416	Kecamatan	
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Kecamatan	
4	8	6	KECAMATAN BARA				1,146		2,729		2		2		2		2		
		1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	720	100	2,400	100	2,410	100	2,420	100	2,430	100	2,430	Kecamatan	
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	418	100	323	100	360	100	380	100	400	100	400	Kecamatan	
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Kecamatan	
4	8	7	KECAMATAN SENDANA				2,127		2,236		1		1		2		2		
		1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan	100	100	1,800	100	1,900	100	1,910	100	1,920	100	1,930	100	1,930	Kecamatan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kemasyarakatan di Kecamatan	koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)														
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	319	100	330	100	335	100	340	100	345	100	345	Kecamatan
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Kecamatan
4	8	8	KECAMATAN MUNGKAJANG				732		2,330		2,357		2,373		2,389		2,389	
		1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan koordinasi kegiatan pembangunan serta pelayanan di kecamatan (%)	100	100	490	100	1,925	100	1,935	100	1,945	100	1,955	100	1,955	Kecamatan
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	234	100	399	100	415	100	420	100	425	100	425	Kecamatan
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Kecamatan
4	8	9	KECAMATAN TELLUWANUA				3,673		3,578		3,599		3,620		3,641		3,641	
		1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan	100	100	3,300	100	3,250	100	3,260	100	3,270	100	3,280	100	3,280	Kecamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target			Rp (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			Kemasyarakatan di Kecamatan	umum dan koordinasi kegiatan pembangunan sertapelayanan di kecamatan (%)															
		2	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	365	100	322	100	332	100	342	100	352	100	352	Kecamatan	
		3	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	8	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Kecamatan	
5			URUSAN PENDUKUNG				58,743		46,683		44,251		46,505		48,662		48,662		
5	1	1	SEKRETARIAT DAERAH				41,843		35,652		31,639		32,671		33,580		33,580		
		1	Program Pembinaan Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan yang Ditangani (%)	100	100	6,400	100	6,600	100	6,800	100	7,000	100	7,200	100	7,200	Sekretariat Daerah	
		2	Program Koordinasi Pengelolaan Perekonomian Daerah	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pengelolaan Perekonomian Daerah (%)	n/a	100	513	100	435	100	879	100	885	100	898	100	898	Sekretariat Daerah	
				Cakupan Ketersediaan															
				Dokumen LKPJ dan LPPD															
				Tepat waktu (%)															
		4	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pemenuhan 17 Standar LPSE (%)	58.82 (2018)	70	696	80	690	90	700	100	705	100	710	100	710	Sekretariat Daerah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	5	Program Pengelolaan Ketatausahaan, Keprotokoleran dan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga (%)	100	100	5,535	100	4,605	100	5,000	100	5,250	100	5,500	100	5,500	Sekretariat Daerah	
	6	Program Pengembangan Pengelolaan Kehumasan	Cakupan Layanan Kehumasan yang Ditangani (%)	100	100	3,900	100	2,810	100	3,000	100	3,100	100	3,200	100	3,200	Sekretariat Daerah	
	7	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan, Perbendaharaan dan TPTGR	Cakupan Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan TPTGR yang Ditangani (%)	100	100	1,255	100	125	100	510	100	530	100	557	100	557	Sekretariat Daerah	
	8	Program Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah	Cakupan Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah Daerah yang Dikaji dan Difinalisasi (%)	100	100	375	100	350	100	510	100	530	100	557	100	557	Sekretariat Daerah	
	9	Program Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Cakupan Layanan Produk Hukum Daerah yang Dikaji dan Difinalisasi (%)	100	100	782	100	1,100	100	1,125	100	1,130	100	1,135	100	1,135	Sekretariat Daerah	
	10	Program Pengelolaan Administrasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Dikoordinasikan (%)	100	100	150	100	175	100	200	100	225	100	250	100	250	Sekretariat Daerah	
			Angka Rata-Rata Kinerja SPM Perangkat Daerah (%)	100	100		100		100		100		100		100			
			Cakupan Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		100		100			
	12	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Persentase Rata-rata LPM, LSM, LPM, PKK, Posyandu yang Aktif (%)	n/a	55	48	60	6,250	65	7	70	7	75	7	75	7	Sekretariat Daerah	
	13	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran,	100	100	14,800	100	11,400	100	11,600	100	11,800	100	12,000	100	12,000	Sekretariat Daerah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur														
		14	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan		100	100	212	100	181	100	200	100	215	100	220	100	220	Sekretariat Daerah
5	2	1	SEKRETARIAT DPRD				16,900		11,031		12,612		13,834		15,082		15,082	
				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	Ada		Ada			Sekretariat Dewan
				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada	Ada		Ada			Sekretariat Dewan
		2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	340	Ada	425	Ada	605	Ada	626	Ada	673	Ada	673	Sekretariat Dewan
		3	Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran, Prasarana Aparatur, Disiplin Aparatur, dan Kapasitas SDM Aparatur	100	100	4,250	100	3,600	100	4,000	100	4,200	100	4,400	100	4,400	Sekretariat Dewan
		4	Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan	100	100	10	100	6	100	7	100	8	100	9	100	9	Sekretariat Dewan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kond.Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023			Akhir periode RPJMD	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		Target	Rp (Juta)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah														

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur dari seperangkat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran).

Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Penetapan indikator kinerja daerah Kota Palopo 2019-2023 selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kota Palopo 2019-2023**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (Point)	76.71	77.86	77.98	78.4	78.82	79.25	79.25
2	Angka rata-rata lama sekolah (Thn)	10.33	10.36	10.39	10.45	10.48	10.56	10.56
3	Angka Harapan Hidup	70.3	70.32	70.34	70.36	70.38	70.4	70.4
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.78	8.1	7.64	7.15	6.63	6.08	6.08
5	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	n/a	80	81	82	83	84	84
6	Persentase Areal Kawasan Kumuh (%)	1.2	0	0	0	0	0	0
7	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	9.9	11.2	11.47	12	12.53	12.86	12.86
8	Luas Kawasan Terdampak Banjir (Ha)	20.47	18	15	10	7	2	2
9	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	76.72	76.83	76.93	76.98	77.10	77.20	77.20
10	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	50.06 (2018)	64	66	68	70	72	72
11	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (Nilai)	40.33	70	75	80	85	85	85
12	Level SPIP Daerah (Point)	2.86	3	3	3	3	3	3
13	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik (Point)	79.9	80.78	81.12	81.28	81.89	82.03	82.03
14	Pertumbuhan PDRB (%)	7.19	7.14	7.16	7.18	7.2	7.22	7.22
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10.96	9.81	9.51	9.03	8.55	8.07	8.07
16	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37	37.1	37.3	37.5	37.6	37.8	37.8
17	Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB (%)	1.21 (2016 : Pariwisata Saja)	2	2.2	2.4	2.5	2.6	2.6
18	Kontribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	0.24	0.24
19	Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	2.77	2.80	2.82	2.84	2.86	2.88	2.88

**Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Palopo 2019-2023**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB (%/Tahun)	7.19	7.14	7.16	7.18	7.2	7.22	7.22
2	Laju inflasi (%/Tahun)	3.94	3.4	3.3	3.2	3.1	3	3
3	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	37	37.1	37.3	37.5	37.6	37.8	37.8
4	Paritas Daya Beli (Ribuan/Tahun)	12,319	12,684	12,866	13,048	13,320	13,413	13413
5	Indeks Gini (Angka)	0.34	0.339	0.337	0.335	0.333	0.332	0.332
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	91.22	91.9	92.36	92.85	93.07	93.92	93.92
7	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.78	8.10	7.64	7.15	6.63	6.08	6.08
8	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Palopo (Rp/Kapita/Bulan)	274,319	259,548	271,988	284,427	296,866	309,305	309,305
9	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	15,440	15,131	14,829	14,532	14,241	13,957	13,957
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	8.78	8.1	7.64	7.15	6.93	6.08	6.08
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.75	1.67	1.585	1.503	1.585	1.503	1.50
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.6	0.53	0.45	0.38	0.45	0.38	0.38
	Indeks Kesehatan	77.38	77.46	77.53	77.61	77.68	77.76	77.76

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Indeks Pendidikan	76.24	76.95	77.66	78.37	79.08	79.79	79.79
	Indeks Pengeluaran	76.51	76.98	77.45	77.91	78.38	78.85	78.85
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka)	76.71	77.56	77.98	78.4	78.82	79.25	79.25
12	Angka melek huruf (%)	98.02	100	100	100	100	100	100
13	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10.33	10.36	10.39	10.45	10.48	10.56	10.56
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15.05	15.11	15.15	15.17	15.19	15.21	15.21
14	Angka usia harapan hidup (Tahun)	70.3	70.32	70.34	70.36	70.38	70.40	70.40
15	Persentase balita gizi buruk (%/Tahun)	0.02	0	0	0	0	0	0
16	Prevalensi balita gizi kurang (%/Tahun)	2.37	1.79	1.22	0.64	0.06	0	0
17	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
18	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	56.33	58.51	59.57	60.63	61.69	62.75	62.75
	<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	<i>73.99</i>	<i>76.65</i>	<i>77.97</i>	<i>79.3</i>	<i>80.63</i>	<i>81.96</i>	<i>81.96</i>
	<i>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	<i>40.41</i>	<i>41.92</i>	<i>42.67</i>	<i>43.42</i>	<i>44.17</i>	<i>44.93</i>	<i>44.93</i>
19	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	59.56	62.02	63.24	64.47	65.7	66.93	66.93
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki</i>	<i>77.61</i>	<i>80.64</i>	<i>82.15</i>	<i>83.66</i>	<i>85.17</i>	<i>86.69</i>	<i>86.69</i>
	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</i>	<i>43.03</i>	<i>44.82</i>	<i>45.71</i>	<i>46.6</i>	<i>47.49</i>	<i>48.39</i>	<i>48.39</i>
20	Tingkat pengangguran terbuka (%)	10.96	10	9.51	9.03	8.55	8.07	8.07
21	Rasio penduduk yang bekerja (%)	89.04	90	90.47	90.95	91.43	91.91	91.91
22	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	70.56	72.66	74.76	76.85	78.95	78.95	78.95
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	50.15	52.62	53.86	55.09	56.33	57.56	57.56

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (%)	25.51	25.6	26.65	26.75	26.8	26.95	26.95
	<i>Laki – Laki</i>	18.05	18.15	18.3	18.45	18.55	18.75	18.75
	<i>Perempuan</i>	7.46	7.45	8.35	8.3	8.25	8.2	8.2
25	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)	40.07	39.97	39.91	39.86	39.81	39.76	39.76
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.9	80.78	81.12	81.28	81.89	82.03	82.03
27	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	17.91	19.26	20.61	21.96	23.31	24.66	24.66
28	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91.6	91.6	91.65	91.7	91.8	91.9	91.9
30	Penguatan cadangan pangan (%)	72	82.35	87.53	92.7	97.88	98.1	98.1
31	Penanganan daerah rawan pangan (%)	n/a	0	0	0	0	0	0
32	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)							
33	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	-	3	3	3	3	3	3
34	Produksi sektor pertanian (Ton/Tahun)							0
	Padi	32,444	34,323	36,040	37,842	39,734	41,720	189,659
	Jagung	5,086	5,568	5,847	6,139	6,446	6,768	30,768
	Ubi Kayu	70	181	181	182	183	185	912
	Ubi Jalar	4.55	5.02	5.27	5.53	5.81	5.87	28
	Sagu	15.59	16	17	18	19	20	90

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Daging (Ruminansia dan Unggas) Ton	3276.3	3308.98	3343.53	3377.13	3412.78	3448.49	16,891
	Daging (Ruminansia) Ton	247.48	249.98	252.53	255.13	257.78	260.49	1,276
	Daging Sapi (Ton)	247.16	249.66	252.2	254.8	257.45	260.15	1,274
	Daging Kerbau (Ton)	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.34	2
	Daging Kambing (Ton)	-	1	1	1	1	1	5
	Daging Unggas (Ton)	3028.822	3059	3091	3122	3155	3188	15,615
	Daging Ayam Kampung (Ton)	145.01	155	157	158	160	162	792
	Daging Ayam Pedaging (Ton)	2,875.36	2904	2934	2964	2995	3027	14,824
	Daging Itik/Bebek/Entog (Ton)	8.45	8,54	8,62	8,71	8,80	8,89	-
	Telur (Ayam Kampung/Ras/Itik/Entog) (Ton)	1778.18	1796	1814	1833	1852	1872	10945.18
	Telur Ayam Buras/Kampung (Ton)	1590.19	1606	1623	1639	1656	1674	8,198
	Telur Ayam Ras Petelur (Ton)	45	45.45	45.92	46.39	46.87	47.37	232
	Itik/Angsa/Entog (Ton)	142.99	144.43	145.9	147.41	148.94	150.5	737
35	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	3	3	3	3	3	3
36	Produksi sektor perkebunan (Ton/Tahun)							
	Kelapa Dalam	31.92	32.4	32.88	33.38	33.88	34.39	166.93
	Kopi	66.27	67	68	69	70	71	345
	Kopi Robusta	66.26	67	68	69	70	71	345
	Kopi Arabika	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05
	Cengkeh'	127.99	130	132	134	136	138	670

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Kakao	271	350	400	450	500	550	550
37	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	2	2	2	2	2	2
38	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	n/a	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
39	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
40	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1.21 (2016)	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.26
41	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	n/a	2	2	2	2	2	2
42	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	23.62	24	24.3	24.6	24.9	24.95	24.95
43	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	2.82	2.9	2.92	2.95	2.98	3	3
44	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
45	Pertumbuhan Industri (%)	22.13	5	5	5	5	5	25
46	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	n/a	0	0	0	0	0	0
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	96,318	103,484	110,650	117,815	124,981	132,147	132,147
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	51.87	51	52	53	54	54	54
4	Produktivitas total daerah (Ribu/Tenaga Kerja/Tahun)	86.69	92.5	98.32	104.13	109.94	115.75	115.75

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	100	100	100	100	100	100	100
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) (%)	76.74	77.67	78.6	79.53	80.46	81.39	81.39
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	0	1.59	1.83	2.06	2.3	2.54	2.54
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Angka kriminalitas yang tertangani (per 100.000)	12	17	19	21	23	25	25
10	Rasio ketergantungan	48.46	48.02	47.58	47.14	46.7	46.26	46.26
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1.	Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	63,12	100	100	100	100	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar							
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	106,00	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	84,91	100	100	100	100	100	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan (%)							0
	Tidak/Belum Bersekolah (%)	7.02	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.5
	Tamat SD/ sederajat (%)	14.18	13	11	10	9	7	7
	Tamat SMP/ sederajat (%)	23.63	24	23	22	21	20	20
	Tamat SMA (%)	36.68	37	38	39	40	41	41
	Tamat SMK (%)	2.81	3	4	5	6	7	7

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Tamat Perguruan Tinggi (%)	15.67	17	18	18	18	19	19
	Diploma I/II (%)	0.37	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
	Diploma III (%)	1.39	2.81	3	3.1	3.3	3.9	3.9
	Diploma IV/S1-S3 (%)	13.91	13.69	14.1	14.2	14.3	14.4	14.4
4	Angka Partisipasi Murni							0
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,32	100	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	77,89	100	100	100	100	100	100
5	Angka partisipasi sekolah (%)							0
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (Per 1000)	992.3	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (Per 1000)	981.3	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	Angka Putus Sekolah:							0
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0.68	0	0	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1.87	0	0	0	0	0	0
7	Angka Kelulusan:							0
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99.3	100	100	100	100	100	100
8	Angka Melanjutkan (AM):							0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)		100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)		100	100	100	100	100	100
9	Fasilitas Pendidikan:							0
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	96.25	100	100	100	100	100	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (per 10,000)	32	33	33	33	34	34	34
	SD/MI (per 10,000)	36	36	36	36	36	37	37
	SMP/ MTS (per 10,000)	26	26	26	26	26	27	27
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (per 10.000)	635	654	672	691	709	728	727.5
	SD/MI (per 10,000)	607	623	640	656	672	688	688.25
	SMP/ MTS (per 10,000)	688	709	731	752	773	794	794.25
12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar (per 10.000)	0.57	0.58	0.59	0.6	0.61	0.62	0.62

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
13	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	n/a	100	100	100	100	100	100
14	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki (%)	99.995	100	100	100	100	100	100
15	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	97.45	100	100	100	100	100	100
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	137.26	100	100	100	100	100	100
2.	Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2	1	1	1	1	1	1
2	Angka kelangsungan hidup bayi (per 100)	98	99	99	99	99	99	99
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	2	1	1	1	1	1	1
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5	4	4	3	3	2	2
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	68	65	60	55	50	48	48
6	Rasio posyandu per satuan balita (Per 1000 balita)	9	9	9	10	10	11	11
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 10.000)	3	3	3	4	4	4	4
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000)	4	4	4	4	4	4	4
9	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	5	5	5	5	6	6	6
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 10.000)	5	5	5	5	6	6	6
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	70,63	70.8	71.8	72.5	73.2	75	75
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga	95,79	95.9	96	96.45	96.9	97	97

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)							
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	95,83	96	96.35	96.9	97.1	97.8	97.8
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (%)	87.4	82.98	80.76	78.55	76.34	74.13	74.13
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	85,57	86.8	87.2	88.9	89.5	90.5	90.5
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (Rasio)	0	0	0	0	0	0	0
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	6,19	7.7	8.9	9.7	10.5	12	12
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	138,07	100	100	100	100	100	100
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (Rasio per 100.000 penduduk)	240	230	210	200	190	195	195
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0	0	0	0	0	0	0
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	79,93	80.1	81.3	82.5	83.8	85.1	85.1
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (%)	63,37	63.8	64.15	64.85	65.2	65.9	65.9

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani (per 100.000)	6	6	7	8	9	10	10
26	Angka kejadian Malaria (per 100.000)	19	17	14	13	12	10	10
27	Tingkat kematian akibat malaria (per 1000)	0	0	0	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (%)	100	100	100	100	100	100	100
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (per 100.000)	42	40	38	36	34	32	32
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (per 1000)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS (%)	0,00	2	2.1	2.4	2.8	3	3
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	n/a	100	100	100	100	100	100
34	Cakupan kunjungan bayi (%)	100,78	100	100	100	100	100	100
35	Cakupan puskesmas (%)	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33
36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	75	75	75	76	76	77	77

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	92,80	93	93.1	93.3	93.4	.93.50	.93.50
38	Cakupan pelayanan nifas (%)	91,22	91.3	91.6	91.9	92.1	92.3	92.3
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	67,79	68.85	70.3	73.4	77.8	78.9	78.9
40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	62,51	65	68	72	74	75	75
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100
42	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	97,52	100	100	100	100	100	100
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	-	100	100	100	100	100	100
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100	100	100	100	100	100	100
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	0	100	100	100	100	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
	Pekerjaan Umum:							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	58.96	60	64	68	72	75	75
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (per 10,000)	28	28	29	29	30	30	30
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	n/a						0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
4	Persentase Jalan Kewenangan Kota yang Berkondisi Baik (> 40 KM/Jam) (%)	58.33	60	61	62	63	65	65
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	1.28	1.3	1.32	1.34	1.36	1.38	1.38
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	n/a	-	-	-	-	-	-
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	90.77	91	92	93	94	95	95
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	46,10	40	35	30	25	20	20
9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	10.73	15	25	35	40	50	50
10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	14.42	15	20	25	30	35	35
11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	3.4	4	5	6	7	8	8
12	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik (%)	71.34	71.5	72	73	74	75	75
13	Rasio Jaringan Irigasi (per 1000 Ha)	18.86	19.1	20.5	21.2	22.7	25	25
14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	93	100	100	100	100	100	100
15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	88.63	90	95	100	100	100	100
16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	1.2	0	0	0	0	0	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	4.53	4.6	4.7	4.8	4.9	5	5
18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (per 10.000)	1.58	1.6	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9
19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1000)	1.78	1.8	1.9	2	2	2	2
3	Penataan Ruang:							
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	-	-	-
2	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (Ha)	1170.72	1172.34	1173.87	1174.63	1176.46	1177.99	1177.99
3	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	76.72	76.83	76.93	76.98	77.10	77.20	77.20
4	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)	-	50	52	54	55	57	57
5	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Ketaatan terhadap RTRW	-	100	100	100	100	100	100
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
1	Rasio rumah layak huni	0.16	0.17	0.19	0.2	0.21	0.22	0.22
2	Rasio permukiman layak huni (%)	94.28	94.85	95.12	95.78	96.23	96.67	96.67
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	79.39	85.39	91.40	97.40	98	98	98

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	92.1	94.86	97.62	98.1	98.5	98.7	98.7
5	Persentase pemukiman yang tertata (%)	99.25	100	100	100	100	100	100
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	1.26	1	0.8	0.6	0.4	0	0
7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	35.91	25	15	5	1	0	0
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	7.41	6	5	3	2	0	0
9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	20.98	25	30	35	40	45	45
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
1	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas) (Orang/Kelurahan)	2	1	1	1	1	1	1
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	89.4	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	9.09	11.11	13.13	15.15	13.13	15.15	15.15
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	94.87	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penegakan PERDA	97.9	100	100	100	100	100	100
6.	Sosial							
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	48.72	48.80	48.90	49	49.12	49.20	49.20

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	48.58	48.60	48.70	48.75	48.80	48.85	48.85
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	58.11	58.20	58.30	58.35	58.40	58.45	58.45
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (%)	0	10	12	13	14	15	15
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	0	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	14.04	14.15	14.20	14.25	14.30	14.35	14.35
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	Tenaga Kerja							
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Per	8.3	7.47	6.64	5.81	4.98	3.15	3.15

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	1000)							
	Angka sengketa pengusaha-pekerja di Perusahaan ber TDP per tahun (Per 1000)	18.1	13.8	12.5	10.2	9.5	8.1	8.1
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	71	80	82	83	84	85	85
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	4.54	5	6	7	8	9	9
4	Keselamatan dan perlindungan (%)	25	26	27	28	29	30	30
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	37	40	45	50	55	65	65
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0	0	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (%)	0.42	0.8	1.12	1.5	1.7	1.9	1.9
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (%)	-	0.5	1	1.5	2	2.5	2.5
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	28.85	15	20	25	30	35	35
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	11.2	10	11	12	13	15	15
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	5.83	8	14	18	20	25	25
12	Rasio lulusan S1/S2/S3	9.3	10.1	10.3	10.5	10.7	10.85	10.85
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	10,92	11	12	13	14	15	15
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20	20	20	20	20	20	20
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	3.16	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	4
4	Rasio KDRT (per 10.000)	3	3	3	3	2	2	2
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)	n/a						0
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	43.03	44.82	45.71	46.6	47.49	48.39	48.39
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	22.07	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	n/a	20	30	40	50	60	60
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.(%)	n/a	10	20	30	40	50	50
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	n/a	20	30	40	50	60	60
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan	21.38	20	23	25	28	30	30

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	anak korban kekerasan (%)							
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	n/a	10	15	20	25	30	30
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD							
	APM Perempuan pada Tingkat SD	99.12	100	100	100	100	100	100
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SD	99.33	100	100	100	100	100	100
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP							0
	APM Perempuan pada Tingkat SMP	80,28	81.3	81.5	81.7	81.9	82	82
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMP	75,35	77	79	80	81	82	82
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA							0
	APM Perempuan pada Tingkat SMA	63,24	70	71	72	73	75	75
	APM Laki-Laki Pada Tingkat SMA	69,65	71	72	73	74	75	75
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	42.27	42.9	43.3	43.85	44.1	44.85	44.85
	APM Perempuan yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	APM Laki-Laki yang masuk Tingkat Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Pangan							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Ketersediaan pangan utama (%)	11	11.2	11.4	11.6	11.8	12	12
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	2,082	2154	2154	2154	2154	2154	2154
	Ketersediaan energi perkapita (Kkal/kapita/hari)	2012.8	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	Ketersediaan protein perkapita (Kkal/kapita/hari)	69.1	54	54	54	54	54	54
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	82	87	88	89	90	91	91
4	Pertanahan							
1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	1.52	1.6	1.8	1.9	1.95	2	2
2	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	2	2	2	2	2	2
3	Penyelesaian izin lokasi (%)	0	100	100	100	100	100	100
5	Lingkungan Hidup							
Kabupaten/Kota								
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P	Ada						0
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Cemar Ringan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	37.2	40	40.2	40.4	40.6	40.8	40.8
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota							0
	<i>Jumlah PPLHD yang dilatih dan/ atau dibina (Orang)</i>	0	1	1	1	1	1	1
	<i>Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum (Orang)</i>	0	1	1	1	1	1	1
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	0	0	0	0	0	0
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	0	0
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0	0	0	0	0	0	0
12	Penetapan hak MHA	0	0	0	0	0	0	0
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan (%)	0	0	0	0	0	0	0
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana (%)	0	0	0	0	0	0	0
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Kali)	Tidak Ada	Belum Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.(%)	100	100	100	100	100	100	100
18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	88.28	90.01	91.75	93.48	95.21	96.95	96.95
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	3.5	4.13	4.77	5.4	6.03	6.67	6.67
20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	64	67	70	73	76	79	79
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	78.56	83.46	88.37	93.27	98.17	99	99
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	77.81	77.91	77.98	78	78.1	78.2	78.2
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	0	100	100	100	100	100	100
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	100	100	100	100	100	100
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.78	0.8	0.83	0.85	0.87	0.9	0.9
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0.6	0.85	0.87	0.9	0.96	0.98	0.98
3	Rasio pasangan berakte nikah	0.38	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	0.95
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	82.56	85	95	97	98	100	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	97.92	100	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1	1	1
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
4	Persentase LSM aktif (%)	0	5	6	7	8	9	9
5	Persentase LPM Berprestasi (%)	4.17	5	7	9	10	12	12
6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2.31	2.30	2.29	2.28	2.27	2.26	2.26
2	Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (ada/tidak)	Tidak Ada	0	0	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan	-	0	0	2	3	4	4

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Kependudukan)							
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	32.65	38	45	50	52	55	55
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	0	0	2	3	4	4
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	0	0	0	0	1	1
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	0	0	0	2	2	2
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	0	0	0	0	1	1
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	2
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	74.67	76.54	78.42	80.29	82.16	84.04	84.04
12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (1000 PUS)	10	9	7	6	5	3	3

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	22.48	20	17	14	12	9	9
15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	21.81	23	23	24	25	25	25
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	45.14	42.45	37.05	31.66	26.26	20.86	20.86
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	75.15	78.79	82.43	86.07	89.71	93.35	93.35
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	58.56	62.3	66.04	69.78	73.52	77.26	77.26
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	47.2	48.49	49.77	51.06	52.35	53.63	53.63
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan (%)	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	9	10	11	12	13	14	14
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100	100	100	100	100	100	100
23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	20.63	23.87	27.11	30.35	33.59	36.83	36.83

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	mandiri (%)							
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota (%)	7.28	8	9	10	11	12	12
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes (%)	66.4	65	66	67	68	69	69
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)	100	100	100	100	100	100	100
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (%)	1.93	2.34	2.74	3.15	3.56	3.96	3.96
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	54.89	69.33	83.78	98.22	112.66	127.11	127.11
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita (Tahun)	-	20	21	22	23	25	25
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan,	83.83	83.9	84.1	84.15	84.3	84.2	84.2

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD (%)							
9	Perhubungan							
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (Orang)	1,345,436	1,404,925	1,464,415	1,523,904	1,583,393	1,642,882	1,642,882
2	Rasio ijin trayek (Per 100.000 Penduduk)	2	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah uji kir angkutan umum (Unit)	631	666	702	737	772	807	807
4	Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis	2	2	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat (per 10.000)	3.32	3.53	3.73	3.94	4.14	4.35	4
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	22.19	23.45	24.7	25.96	27.21	28.47	28
7	Persentase Pemasangan Rambu-rambu (%)	63.2	63.4	71	72	74	75	75
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (per 1000)	18	21	22	23	24	25	25
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum (Orang/Tahun)	1,344,991	1,404,444	1,463,897	1,523,350	1,582,803	1,642,256	1,642,256
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (M3/Tahun)	601,356	605,250	609,144	613,037	616,931	620,825	620,825
11	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	1,893,357	1,962,956	2,032,555	2,102,153	2,171,752	2,241,351	2,241,351
10	Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	3.33	3.45	3.55	3.65	3.75	4	4
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0.86	0.86	0.88	0.9	0.92	0.98	0.98

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	79.24	80	80.2	80.5	80.7	80.9	80.9
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0.4	0.42	0.5	0.55	0.75	0.9	0.9
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
1	Persentase koperasi aktif (%)	71.08	71	72	73	74	75	75
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	29.88	30	30.2	30.4	30.5	30.75	30.75
3	Persentase BPR/LKM aktif (%)	-	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	99.11	100	100	100	100	100	100
12	Penanaman Modal							
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	147	149	150	152	154	156	156
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	0	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta)	382,322	436,847	491,372	545,897	600,422	654,947	654,947
4	Rasio daya serap tenaga kerja (per 100 Juta Nilai PMDN)	7.42	9	9	10	11	12	12
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	42.48	20	25	30	35	40	40
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	69.3	70	71	72	73	75	75
2	Persentase wirausaha muda (%)	1.75	1.8	1.9	1.95	2	2.1	2.1

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	38.46	39	40	41	42	45	45
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	68.18	68.2	68.3	68.5	68.8	69	69
5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	68.18	68.2	68.3	68.5	68.8	69	69
6	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	7	20	30	40	50	60	60
7	Jumlah prestasi olahraga (Cabang)	7	7	8	9	10	11	11
14	Statistik							
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian							
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	71.42	75	76	78	80	85	85
16	Kebudayaan							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	15	15	15	15	15	15	15
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	99.32	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (Buah)	0	3	3	3	3	3	3
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	51	50	50	50	50	50	50
17	Perpustakaan							
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	9.23	9.3	9.45	9.55	9.6	9.8	9.8
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	46.81	47	48	49	50	51	51

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1000)	1.16	1.2	1.21	1.22	1.23	1.24	1.24
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1,137	1,194	1,254	1,316	1,382	1,451	1451.13
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1,232	1,282	1,332	1,382	1,432	1,482	1482
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	100	100	100	100	100	100	100
18	Kearsipan							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2.04	3	20	40	60	80	80
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	7	8	9	10	11	12	12
Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pariwisata							
1	Kunjungan wisata (%)	99.48	100	100	100	100	100	100
2	Lama kunjungan Wisata (Rata-rata Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun)	2	2	2	2.5	2.5	2.5	2.5
3	PAD sektor pariwisata (%)	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	0.24	0.24
2.	Pertanian							
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	17,60	17.5	17.43	17.40	17.35	17.3	17.3
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Produksi Bahan Pangan Utama (Ton/Tahun)							
	Padi	32,444	34,323.00	36,040.00	37,842.00	39734	41720	189,659
	Jagung	5,086	5,568.00	5,847.00	6,139.00	6446	6768	30,768
	Ubi Kayu	70	181	181	182	183	185	912
	Ubi Jalar	4.6	5.02	5.27	5.53	5.81	5.87	28
	Sagu	15.59	16	17	18	19	20	90
6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton/Ha)							
	Padi	6.27	6,41	6,51	6,61	6,71	6,81	6,81
	Jagung	6,75	7,15	7,25	7,36	7,47	7,58	7,58
	Ubi Kayu	70	27	28	29	30	31	31
	Ubi jalar	4.55	12	13	14	15	16	16
	Sagu	0.05	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.45
7	Cakupan bina kelompok petani	50.68	51	52	53	54	55	55
3	Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	n/a	100	100	100	100	100	100
2	Rasio ketersediaan daya listrik	n/a	100	100	100	100	100	100
4	Perdagangan							
1	Ekspor Bersih Perdagangan (Nilai/Juta)	-802.359	-800,000	-700,000	-650,000	-625,000	-600,000	-600,000

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	n/a	10	12	13	14	15	15
5	Perindustrian							
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	0,00	15	15.3	15.6	15.9	16	16
6	Transmigrasi							
1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	0	0	Ada	Ada
7	Perikanan							
1	Produksi perikanan (%)	103.7	100	100	100	100	100	100
	Target Produksi Perikanan Daerah (Ton/Tahun)	16347.76	18810	20041	21272	22503	23735	23735
2	Konsumsi ikan (%)	100.13	100	100	100	100	100	100
	Target Konsumsi Perikanan Daerah (Kg/Tahun)	53.47	60	63	66	69	72	72
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	3.15	4.7	4.9	5.1	5.2	5.3	5.3
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	75	80	81	82	83	84	84
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Nilai tukar nelayan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Penunjang Urusan								
1.	Perencanaan Pembangunan							
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
	ditetapkan dengan PERDA							
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	79.01	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	94.79	100	100	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	100	100	100	100	100	100
2.	Keuangan							
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase SiLPA terhadap APBD	2.25	2	2	2	2	2	2
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana (%)							0
	Persentase program yang tidak terlaksana (%)	0,6	0	0	0	0	0	0
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana (%)	1,06	0	0	0	0	0	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	17.84	20	20	20	20	20	20

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	24.48	10	10	10	10	10	10
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (%)							
	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD (%)	64.15	51	52	53	54	55	55
	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD (%)	35.85	49	48	47	46	45	45
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (%)	1.79	1.85	1.95	2	2.1	2.2	2.2
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Hari/Jam Pelajaran)	103/893						0
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0,9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	29,3	30	35	40	45	50	50
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	33	33	33	33	33	33	33
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	949	949	949	949	949	949	949
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (Orang)	2217	2239	2262	2284	2307	2330	2330
4.	Penelitian dan pengembangan							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.(%)	100	10	11	12	13	14	14
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.(%)	36,36	38	40	45	50	55	55
	Penerapan SIDA:							
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.(%)	0	2	3	4	5	6	6
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah(%)	52.1	35	36	37	38	39	39
5.	Pengawasan							
1	Persentase tindak lanjut temuan	57,02	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
3	Jumlah temuan BPK	19	16	15	14	13	12	12
6.	Sekretariat Dewan							
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

**Tabel 8.3. Penetapan Target Indikator Kinerja
Terhadap Capaian Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minim (SPM)
Kota Palopo 2019-2023**

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Setiap Tahun (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
I	SPM Bidang Pendidikan							
	Pendidikan Dasar							
1	Persentase penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	%		100	100	100	100	100
a	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99.23	100	100	100	100	100
b	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	77.89	100	100	100	100	100
c	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	106.00	100	100	100	100	100
d	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	84.91	100	100	100	100	100
e	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99.32	100	100	100	100	100
f	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	77.89	100	100	100	100	100
	Pendidikan Kesetaraan							
2	Persentase penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%		100	100	100	100	100
a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.68	100	100	100	100	100
b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1.87	100	100	100	100	100
	Pendidikan Anak Usia Dini							
3	Persentase penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	63.13	100	100	100	100	100
II	SPM Bidang Kesehatan							
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Setiap Tahun (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	92.80	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
2	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	95.79	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
3	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98.00	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan balita								
4	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	62.51	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar								
5	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	97.52	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif								
6	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%		100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut								
7	Persentase penduduk usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%		100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi								
8	Persentase penduduk penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%		100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus								
9	Persentase penduduk penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%		100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat								
10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%		100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Setiap Tahun (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis							
11	Persentase penduduk terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	79.93	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)							
12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%		100	100	100	100	100
III	SPM Bidang Pekerjaan Umum							
	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari							
1	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	88.63	100	100	100	100	100
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik							
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	n/a	100	100	100	100	100
IV	SPM Bidang Perumahan							
	Penyediaan & rehabitiiasi rumah yg layak huni bagi korban bencana							
1	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%		100	100	100	100	100
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah							
2	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%		100	100	100	100	100
V	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum							
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum							
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda	%	97.90	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Setiap Tahun (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
	dan Perkada							
	Pelayanan informasi rawan bencana							
2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%		100	100	100	100	100
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%		100	100	100	100	100
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
4	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%		100	100	100	100	100
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
5	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%		100	100	100	100	100
VI	SPM Bidang Sosial							
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti							
1	Persentase penduduk penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%		100	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti							
2	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%		100	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti							
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%		100	100	100	100	100
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti							
4	Persentase penduduk /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%		100	100	100	100	100
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana							

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Capaian Setiap Tahun (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	%		100	100	100	100	100

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada tahun akhir masa jabatan Walikota/Wakil Walikota Palopo periode 2018-2023. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2023 atau setelah RPJMD periode 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo tahun 2005-2025 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Namun RKPD masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya (2023-2028).

Program-program pada masa transisi ini diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum tercapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Program-program dimaksud bersifat tahunan atau tidak *multiyear* sehingga hasil dan dampaknya dapat di evaluasi pada akhir tahun perencanaan.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

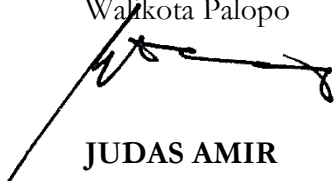
RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo berkewajiban melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023 dengan sebaik- baiknya.
2. Setiap Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada RPJMD Kota Palopo tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah harus memastikan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Mengingat RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah lima tahunan, maka dokumen ini harus dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam KUA-PPAS dan RAPBD.
4. Walikota/Wakil Walikota Palopo periode 2018-2023 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kota Palopo periode 2018-2023.
5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palopo berkewajiban untuk mengkoordinasikan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Palopo periode 2018- 2023 dilakukan pada akhir periode RPJMD oleh Walikota/Wakil Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan

oleh BAPPEDA untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

7. RPJMD Kota Palopo periode 2018-2023 harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh-sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab. RPJMD ini juga menjadi arahan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah untuk turut terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Wakil Kota Palopo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Judas Amir', is written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right.

JUDAS AMIR